



LAPORAN KINERJA INTERIM

TRIWULAN I TAHUN 2026

BALAI POM DI PANGKAL PINANG

KATA PENGANTAR



Puji syukur senantiasa kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2026 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal Pinang dapat diselesaikan. Laporan kinerja ini merupakan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dalam rangka mencapai Sasaran Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2026 yang merupakan tahun kedua dalam periode Renstra 2025-2029.

Penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2026 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal Pinang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi. Dengan kata lain, timbul kewajiban bagi setiap instansi pemerintah untuk mengukur dan sekaligus menginformasikan capaian kinerjanya. Hal ini juga berarti bahwa instansi pemerintah diwajibkan untuk mengubah orientasi pelaporan dari kemampuan menyerap anggaran menjadi kemampuan untuk menunjukkan capaian kinerja output maupun outcome.

Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2026 ini disusun sebagai bagian dari upaya Balai POM di Pangkal Pinang untuk memberikan pertanggungjawaban kinerja pengawasan obat dan makanan di wilayah Kep. Bangka Belitung. Dalam Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2026 ini tertuang Perjanjian Kinerja, pengukuran capaian kinerja terhadap target kinerja Tahun 2026, evaluasi dan hasil analisis pengukuran kinerja serta realisasi anggaran. Nomenklatur indikator kinerja yang tertuang dalam laporan kinerja ini mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan perhatian dan dukungan kepada Balai POM di Pangkal Pinang dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan obat dan makanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kami berharap semoga Laporan Kinerja ini akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi acuan dalam upaya perbaikan secara berkesinambungan untuk peningkatan kinerja Balai POM di Pangkal Pinang di masa yang akan datang.

Pangkal Pinang, 27 April 2026

A handwritten signature in blue ink, which appears to read "Agus Riyanto", is placed over the date.

Agus Riyanto, S.Farm, Apt., M.M.

➤ DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	iii
Daftar Lampiran.....	iv
Daftar Tabel.....	vi
Daftar Gambar	xiv
Ringkasan Eksekutif	xv
Highlight.....	xx
 BAB I. Pendahuluan	 2
1.1 LATAR BELAKANG	2
1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI.....	3
1.3 STRUKTUR ORGANISASI	8
1.4 ISU STRATEGIS	9
 BAB II. Perencanaan Kinerja	 13
2.1 URAIAN SINGKAT RENSTRA.....	13
2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT).....	15
2.3 PERJANJIAN KINERJA (PK).....	18
2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK).....	31
2.5 METODE PENGUKURAN.....	34
 BAB III. Akuntabilitas Kinerja	 38
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	38
3.2 TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2024.....	255
3.3 REALISASI ANGGARAN.....	298
3.4 ANALISIS EFISIENSI KEGIATAN.....	305
 BAB IV. Penutup.....	 314
4.1 KESIMPULAN.....	314
4.2 SARAN	317

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK)

- 1) Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- 2) Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD_ESO ke BPOM
- 3) Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- 4) Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar
- 5) Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
- 6) Persentase Keputusan_Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder
- 7) Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
- 8) Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
- 9) Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- 10) Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan
- 11) Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Keten
- 12) Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
- 13) Jumlah Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
- 14) Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan
- 15) Jumlah Desa Pangan Aman
- 16) Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas 2025
- 17) Persentase UMKM memperoleh rekomendasi sertifikat CP OBA, Kos dan atau IP-CPPOB

- 18) Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
- 19) Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar
- 20) Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar
- 21) Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT

Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahun 2026 Balai POM di Pangkal Pinang

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2026 Balai POM di Pangkal Pinang

Lampiran 4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2026 Balai POM di Pangkal Pinang

Lampiran 5. SK Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029 Balai POM di Pangkal Pinang

Lampiran 6. SK Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029 Revisi Balai POM di Pangkal Pinang

Lampiran 7. Realisasi IKU Balai POM di Pangkal Pinang Triwulan I Tahun 2026

Lampiran 8. Matriks Tingkat Efisiensi Kinerja Per Output Balai POM di Pangkal Pinang Triwulan I Tahun 2026

Lampiran 9. Matriks Tingkat Efisiensi Kinerja Per Indikator Balai POM di Pangkal Pinang Triwulan I Tahun 2026

Lampiran 10. Matriks Tingkat Efisiensi Kinerja Per Sasaran Kegiatan Balai POM di Pangkal Pinang Triwulan I Tahun 2026

Lampiran 11. Capaian RAPK Triwulan I Tahun 2026 BPOM di Pangkal Pinang

Lampiran 12. Tabel Keselarasan Nomenklatur Data Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Lampiran 13. Tabel Keselarasan Perencanaan Data Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Lampiran 14. Tabel Keselarasan Pengukuran Data Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Lampiran 15. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2026

Lampiran 16. Penyesuaian anggaran Triwulan I Tahun 2026

Lampiran 17. Matriks Reviu Target Indikator Pada Perjanjian Kinerja

Lampiran 18. Matriks Reviu Target Indikator Pada Perjanjian Kinerja Setelah Perbaikan

Lampiran 19. Perbandingan Capaian Kinerja TW I 2026 dengan Target Jangka Menengah

Lampiran 20. Nota Dinas Sekretaris Utama tentang Penyampaian Data Pergeseran Anggaran Ke Dalam RO Khusus Berdasarkan Hasil Identifikasi Keuangan Dalam Rangka Penguatan Dukungan Pelaksanaan Prioritas Direktif Presiden

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Sarana dan Prasarana Balai POM di Pangkal Pinang	5
Tabel 2.1. Tabel Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2026	15
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Balai POM di Pangkal Pinang Tahun 2026	19
Tabel 2.4 Tabel Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai POM di Pangkal Pinang Tahun 2026	31
Tabel 2.7 Kriteria Predikat NKO	34
Tabel 2.8 Kriteria Predikat realisasi kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah	35
Tabel 2.9 Kriteria Predikat Indikator Kinerja	36
Tabel 3.1 Nilai Kinerja Organisasi Triwulan I Tahun 2026	40
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Triwulan I Tahun 2026	43
Tabel 3.3 Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	46
Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2026 Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	47
Tabel 3.5 Matriks Rekomendasi Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	50
Tabel 3.6 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	51
Tabel 3.7 Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO	55
Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2026 Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO	55
Tabel 3.9 Matriks Rekomendasi Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO	58
Tabel 3.10 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO	58
Tabel 3.11 Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	60

Tabel 3.12 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2026 Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	62
Tabel 3.13 Matriks Rekomendasi Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	63
Tabel 3.14 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	69
Tabel 3.15 Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar	71
Tabel 3.16 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2026 Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar	72
Tabel 3.17 Matriks Rekomendasi Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar	73
Tabel 3.18 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar	76
Tabel 3.19 Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	78
Tabel 3.20 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2026 Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	79
Tabel 3.21 Matriks Rekomendasi Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	81
Tabel 3.22 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	84
Tabel 3.23 Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder	87
Tabel 3.24 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2026 Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder	88
Tabel 3.25 Matriks Rekomendasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder	89
Tabel 3.26 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder	91
Tabel 3.27 Tabel 3.34 Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	95

Tabel 3.28 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2026 Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	96
Tabel 3.29 Matriks Rekomendasi Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan.....	97
Tabel 3.30 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	98
Tabel 3.31 Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	102
Tabel 3.32 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2026 Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	102
Tabel 3.33 Matriks Rekomendasi Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan.....	104
Tabel 3.34 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	105
Tabel 3.35 Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	108
Tabel 3.36 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2026 Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	108
Tabel 3.37 Matriks Rekomendasi Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan.....	111
Tabel 3.38 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	112
Tabel 3.39 Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	114
Tabel 3.40 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2026 Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	115

Tabel 3.41 Matriks Rekomendasi Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan.....	118
Tabel 3.42 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	119
Tabel 3.43 Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	123
Tabel 3.44 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2026 Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	124
Tabel 3.45 Matriks Rekomendasi Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan.....	125
Tabel 3.46 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	126
Tabel 3.47 Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar	130
Tabel 3.48 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2026 Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar	131
Tabel 3.49 Matriks Rekomendasi Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar.....	133
Tabel 3.50 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar	134
Tabel 3.51 Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah UPT	137
Tabel 3.52 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2026 Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah UPT	137
Tabel 3.53 Matriks Rekomendasi Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah UPT	139
Tabel 3.54 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah UPT	140
Tabel 3.55 Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	145

Tabel 3.56 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2026 Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	147
Tabel 3.57 Matriks Rekomendasi Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium.....	149
Tabel 3.58 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	150
Tabel 3.59 Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman.....	153
Tabel 3.60 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2026 Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman.....	153
Tabel 3.61 Matriks Rekomendasi Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	155
Tabel 3.62 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	156
Tabel 3.63 Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	159
Tabel 3.64 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2026 Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.....	159
Tabel 3.65 Matriks Rekomendasi Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.....	161
Tabel 3.66 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	162
Tabel 3.67 Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan .	165
Tabel 3.68 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2026 Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan.....	165
Tabel 3.69 Matriks Rekomendasi Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan.....	167
Tabel 3.70 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	168
Tabel 3.71 Jumlah Desa Pangan Aman	170

Tabel 3.72 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2026 Jumlah Desa Pangan Aman	171
Tabel 3.73 Matriks Rekomendasi Jumlah Desa Pangan Aman	172
Tabel 3.74 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Jumlah Desa Pangan Aman	173
Tabel 3.75 Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	176
Tabel 3.76 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2026 Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	176
Tabel 3.77 Matriks Rekomendasi Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas...	178
Tabel 3.78 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	179
Tabel 3.79 Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	182
Tabel 3.80 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2026 Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	183
Tabel 3.81 Matriks Rekomendasi Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan.....	185
Tabel 3.82 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	186
Tabel 3.83 Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.....	190
Tabel 3.84 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2026 Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.....	191
Tabel 3.85 Matriks Rekomendasi Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.....	193
Tabel 3.86 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	195

Tabel 3.87 Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar	198
Tabel 3.88 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2026 Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar	199
Tabel 3.89 Matriks Rekomendasi Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar	200
Tabel 3.90 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar	203
Tabel 3.91 Indeks Pelayanan Publik.....	206
Tabel 3.92 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2026 Indeks Pelayanan Publik.....	206
Tabel 3.93 Matriks Rekomendasi Indeks Pelayanan Publik	208
Tabel 3.94 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Indeks Pelayanan Publik	213
Tabel 3.95 Nilai Pembangunan ZI.....	217
Tabel 3.96 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2026 Nilai Pembangunan ZI.....	217
Tabel 3.97 Matriks Rekomendasi Nilai Pembangunan ZI	219
Tabel 3.98 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Nilai Pembangunan ZI.....	224
Tabel 3.99 Nilai AKIP.....	229
Tabel 3.100 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2026 Nilai AKIP	229
Tabel 3.101 Matriks Rekomendasi Nilai AKIP UPT BPOM.....	232
Tabel 3.102 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Nilai AKIP UPT BPOM.....	234
Tabel 3.103 Nilai Kinerja Anggaran	238
Tabel 3.104 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2026 Nilai Kinerja Anggaran	238
Tabel 3.105 Matriks Rekomendasi Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	240
Tabel 3.106 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM.....	242

Tabel 3.107 Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	247
Tabel 3.108 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2026 Indeks Manajemen Risiko	248
Tabel 3.109 Matriks Rekomendasi Indeks Manajemen Risiko	250
Tabel 3.110 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Indeks Manajemen Risiko	252
Tabel 3.111 Tindak Lanjut Triwulan II atas Evaluasi SAKIP Tahun 2024	255
Tabel 3.112 Rencana Aksi Tindak Lanjut atas Evaluasi SAKIP Tahun 2025.....	292
Tabel 3.113 Tindak Lanjut Triwulan I Tahun 2026 atas Evaluasi SAKIP Tahun 2025..	295
Tabel 3.114 Realisasi Anggaran Tiap Sasaran Kegiatan	298
Tabel 3.115 Realisasi Anggaran Tiap Rincian Output	300
Tabel 3.116 Penyesuaian Anggaran dalam Mencapai Kinerja	302
Tabel 3.117 Tingkat Efisiensi Anggaran untuk Pencapaian Sasaran Kegiatan Triwulan I Tahun 2026.....	306
Tabel 3.118 Tingkat Efisiensi Anggaran untuk Pencapaian Kegiatan atau Rincian Output	310



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Penyebaran Pegawai di Balai POM di Pangkal Pinang	6
Gambar 1.2	Peta Provinsi Kep.Bangka Belitung	7
Gambar 1.3	Struktur Organisasi Balai POM di Pangkal Pinang	8

RINGKASAN EKSEKUTIF

Balai POM di Pangkal Pinang sebagai salah satu instansi pemerintah memiliki kewajiban menyusun laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam mewujudkan visi misi melalui rencana strategis tahun 2025-2029.

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, BPOM telah merumuskan serangkaian tujuan strategis untuk periode 2025 – 2029. Tujuan tersebut dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi BPOM sebagai lembaga pengawas obat dan makanan di Indonesia. Berikut adalah tujuan BPOM untuk periode 2025 - 2029, mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi:

1. **Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu:** Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.
2. **Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu:** Melalui tujuan ini, BPOM bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih obat dan makanan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi obat dan makanan.
3. **Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan Keberpihakan pada UMKM:** Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor sediaan farmasi dan pangan olahan. BPOM berupaya memberikan pendampingan regulatori kepada pelaku usaha agar siap memenuhi persyaratan perizinan, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.
4. **Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:** Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari

risiko kejahatan obat dan makanan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.

5. **Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima:** Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima.

Secara keseluruhan, tujuan BPOM tahun 2025-2029 yang menjadi tujuan BPOM Pangkal Pinang ini mencerminkan dedikasi dalam memenuhi tanggung jawab sebagai pengawas sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.

Pada Rencana Strategis Balai POM di Pangkal Pinang, pada tahun 2026 telah ditetapkan 7 sasaran kegiatan diantaranya yaitu.

1. Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
2. Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT
3. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu
4. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT
5. Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT
6. Layanan Publik UPT yang prima
7. Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

Pencapaian 7 Sasaran Kegiatan tersebut diukur dengan 27 (dua puluh tujuh) indikator kinerja.

Berdasarkan tabel di atas, dari **27 (dua puluh tujuh)** Indikator Kinerja Utama, hanya **19 (sembilan belas)** indikator yang dapat diukur capaiannya dan **8 (delapan)** indikator lainnya merupakan indikator tahunan yang penilaiannya dilakukan pada akhir tahun.

Pada perhitungan Nilai Kinerja Organisasi Balai POM di Pangkal Pinang Triwulan I Tahun 2026, terdapat 1 indikator kinerja yang capaiannya dinormalisasi menjadi 110% karena capaiannya melebihi 110% yaitu indikator Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar. Dari hasil perhitungan diperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Balai POM di Pangkal Pinang Triwulan I Tahun 2026 sebesar **98,98%** dengan predikat **Baik**.

Pada Triwulan I Tahun 2026, terdapat penambahan 3 indikator kinerja utama sehingga jumlah indikator menjadi 27 indikator kinerja utama. Dari **27 (dua puluh tujuh)** Indikator Kinerja Utama pada Triwulan I Tahun 2026, terdapat **7 (tujuh)** indikator dengan kategori **sangat baik**, **10 (sepuluh)** indikator dengan kategori **baik**, **1 (satu)** indikator dengan kategori **tidak dapat disimpulkan**, **1 (satu)** indikator dengan kategori **kurang** dan **8 (delapan)** indikator belum dapat diukur capaiannya karena penilaiannya dilakukan pada akhir tahun.

Pada tahun 2026, Balai POM di Pangkal Pinang melaksanakan 20 (dua puluh) kegiatan utama atau Rincian Output (RO) untuk mendukung pencapaian 7 Sasaran Kegiatan. Dari 20 Rincian Output (RO), hanya 14 RO yang dapat dihitung tingkat efisiensinya, sedangkan 6 RO lainnya tidak dapat dihitung Tingkat Efisiensinya karena belum ada capaian input (anggaran) dan/atau capaian output (RO) di Triwulan I ini.

14 RO yang dapat dihitung tingkat efisiensinya masih diperoleh nilai Indeks Efisiensi sebesar 1,08 dengan capaian **TE 100% (Efisien)**. Hal ini dikarenakan nilai Indeks Efisiensi (1,08) lebih besar dari Standar Efisiensi (1) dengan persentase capaian output yang lebih tinggi dari persentase capaian input. Namun Balai POM di Pangkal Pinang tetap terus mempertahankan efisiensi hingga akhir tahun.

Dari 7 sasaran kegiatan, hanya 4 sasaran kegiatan yang bisa dihitung tingkat efisiensinya. Hasil pengukuran 4 sasaran kegiatan tersebut diperoleh nilai Tingkat Efisiensi sebesar 0,19 sehingga kategorinya capaiannya **100% (Efisien)** dengan rata-rata persentase capaian output sebesar 99,16% dan persentase capaian input (anggaran) sebesar 83,29%.

Sepanjang Triwulan I Tahun 2026, Balai POM di Pangkal Pinang tidak melakukan perubahan atau revisi pada target Rincian Output (RO). Pada tahun 2026 Balai POM di Pangkal Pinang memperoleh anggaran sebesar **Rp 13.918.203.000**. Pada bulan

Desember 2025 dilaksanakan revisi kewenangan DJA untuk pergeseran anggaran kedalam RO Khusus dalam rangka penguatan dukungan pelaksanaan Prioritas Direktif Presiden Tahun Anggaran 2026. Dilakukan pergeseran anggaran dari pagu Balai POM di Pangkal Pinang sebesar Rp 2.230.083.000 dan blokir anggaran sebesar Rp 88.350.000 sehingga total pagu Balai POM di Pangkal Pinang sebesar **Rp 11.688.120.000** atau pagu efektif sebesar **Rp 11.599.770.000**.

Pada Triwulan I 2026, total realisasi anggaran Balai POM di Pangkal Pinang yaitu sebesar Rp **1.814.047.711** dari pagu yang bisa digunakan (diluar pagu blokir) sebesar **Rp 11.599.770.000** dengan capaian sebesar **15,52%** atau **15,64%** bila dibandingkan dengan Pagu Total (dengan pagu blokir). Pada triwulan I capaian penyerapan Balai POM di Pangkal Pinang belum mencapai target penyerapan IKPA indikator Penyerapan Anggaran dengan target dan capaian masing-masing belanja yaitu: Belanja Pegawai dengan target 10% capaian 25,09%; Belanja Barang dengan target 15% dan capaian 13,38%; dan Belanja Modal dengan target 10% dan capaian 2,28%.

Dalam pelaksanaan kegiatannya, masih terdapat kendala yang dihadapi Balai POM di Pangkal Pinang, yang menyebabkan tidak tercapainya target indikator yaitu pada IKU Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder. Rendahnya capaian ini disebabkan oleh adanya kesalahan rumus dalam perhitungan pada RAPK, di mana rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor yang sebelumnya tidak termasuk dalam komponen pembagi, justru masuk ke dalam perhitungan pembagi. Perubahan tersebut menyebabkan peningkatan jumlah total rekomendasi yang menjadi dasar perhitungan, sehingga persentase capaian menjadi lebih rendah dari kondisi sebenarnya. Dengan demikian, penurunan kinerja yang terlihat lebih dipengaruhi oleh aspek teknis perhitungan dibandingkan dengan pelaksanaan kegiatan di lapangan, sehingga diperlukan perbaikan formulasi dan validasi perhitungan agar capaian kinerja dapat merepresentasikan kondisi yang sebenarnya.

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan difokuskan pada pembenahan aspek teknis perhitungan serta penguatan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi. Langkah yang perlu dilakukan antara lain melakukan evaluasi dan perbaikan rumus perhitungan pada aplikasi RAPK agar sesuai dengan definisi operasional indikator, khususnya memastikan komponen pembilang dan pembagi dihitung secara konsisten dan valid. Selain itu, perlu dilakukan verifikasi dan validasi data

secara berkala untuk mencegah terjadinya kesalahan perhitungan yang dapat memengaruhi capaian kinerja. Dari sisi pelaksanaan, diperlukan penguatan koordinasi dan komitmen lintas sektor dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan, disertai dengan peningkatan monitoring dan evaluasi secara lebih intensif. Optimalisasi sistem pelaporan berbasis digital dan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan data juga menjadi langkah penting agar proses pelaporan lebih akurat dan tepat waktu. Dengan upaya tersebut, diharapkan capaian kinerja pada periode selanjutnya dapat meningkat dan lebih mencerminkan kondisi kinerja yang sebenarnya.

Pada tahun 2026 Balai POM di Pangkal Pinang sudah mengambil langkah antisipatif atas kendala-kendala yang ada, dari beberapa kendala yang ada, telah dilakukan identifikasi risikonya sebesar 95,65%.

Balai POM di Pangkal Pinang akan melakukan perbaikan kinerja untuk indikator yang belum memuaskan sehingga dapat terwujud manajemen kinerja yang lebih produktif, efektif, dan efisien.

HIGHLIGHT

Informasi berkala kepada masyarakat terkait Gratifikasi selalu diberikan oleh Balai POM di Pangkal Pinang melalui media sosial instansi oleh inovasi KONGJI. Pada infografis yang dishare pada tanggal 23 Februari 2026 ini membahas tentang perubahan pada dasar hukum terkait Gratifikasi seperti Nilai Batas Wajar(tidak wajib lapor), tindak lanjut kelengkapan laporan, tugas unit pengendali gratifikasi, dll.



Balai POM di Pangkal Pinang menyelenggarakan kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi Farmakovigilans kepada tenaga kesehatan di Pulau Bangka yang dilaksanakan secara hybrid.(09/02/26)

Melalui Aplikasi E-Meso Tenaga Kesehatan didorong untuk aktif melaporkan kejadian tidak diinginkan atau efek samping obat termasuk kejadian ikutan pasca imunisasi sebagai upaya deteksi dini risiko keamanan obat dan perlindungan keselamatan pasien.



Balai POM di Pangkal Pinang melaksanakan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) bertema "Legalitas Pangan Olahan untuk Meningkatkan Daya Saing Produk" pada Kamis, 26 Februari 2026 di SMK Negeri 4 Pangkal Pinang. Kegiatan ini merupakan upaya edukasi kepada generasi muda mengenai pentingnya keamanan dan legalitas pangan olahan. Pelaksanaan KIE ini merupakan bentuk pendampingan berkelanjutan kepada pelaku usaha pemula dan calon wirausaha muda. Produk olahan hasil perikanan yang diproduksi di SMK Negeri 4 Pangkal Pinang diketahui telah memiliki izin edar BPOM, sehingga kegiatan ini memperkuat pemahaman siswa terhadap praktik produksi pangan yang aman dan sesuai standar.



Pada tanggal 11 Februari 2026, dilaksanakan kegiatan silaturahmi dan koordinasi lanjutan antara PPNS BBPOM di Pangkal Pinang dengan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kep. Bangka Belitung, yang dihadiri oleh Kepala Balai dan PPNS.



Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal Pinang melaksanakan kegiatan asesmen SNI ISO/IEC 17025:2017 dalam rangka reakreditasi laboratorium pengujian pada tanggal 5 Februari 2026 hingga 6 Februari 2026. Kegiatan ini dilaksanakan oleh tim asesor dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) sebagai lembaga yang berwenang dalam memberikan akreditasi laboratorium di Indonesia. Asesmen ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Balai POM di Pangkal Pinang dalam memastikan penerapan sistem manajemen mutu serta kompetensi teknis laboratorium sesuai dengan standar internasional. Standar SNI ISO/IEC 17025:2017 menjadi acuan utama dalam menjamin keandalan, ketertelusuran, dan validitas hasil pengujian laboratorium, khususnya dalam pengawasan obat dan makanan.



Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terus memperkuat kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah. Salah satunya melalui kegiatan pembinaan kinerja yang dilakukan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik BPOM, Mohamad Kashuri, kepada Balai POM di Pangkal Pinang sebagai UPT binaan Kedeputian II. Dalam pembinaannya, Deputi II menekankan pentingnya penguatan peran UPT dalam pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik, seiring dengan dinamika peredaran produk dan meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap perlindungan kesehatan. Profesionalisme SDM, kepatuhan terhadap regulasi, serta sinergi antara pusat dan daerah menjadi poin utama yang disampaikan.



BAB I

PENDAHULUAN



BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Tantangan pengawasan obat dan makanan semakin hari semakin besar. Kemajuan teknologi telah membawa perubahan-perubahan yang cepat dan signifikan pada industri obat dan makanan. Dengan dukungan kemajuan teknologi transportasi dan *entry barrier* yang makin tipis dalam perdagangan internasional, maka produk-produk tersebut dalam waktu yang amat singkat dapat menyebar ke berbagai negara dengan jaringan distribusi yang sangat luas dan mampu menjangkau seluruh strata masyarakat.

Konsumsi masyarakat cenderung terus meningkat, seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat termasuk pola konsumsinya. Sementara itu pengetahuan masyarakat masih belum memadai untuk dapat memilih dan menggunakan produk secara tepat, benar, dan aman. Di lain pihak, iklan dan promosi secara gencar mendorong konsumen untuk mengonsumsi secara berlebihan dan sering kali tidak rasional. Perubahan teknologi produksi, sistem perdagangan internasional dan gaya hidup konsumen tersebut pada realitanya meningkatkan risiko dengan implikasi yang luas pada kesehatan dan keselamatan konsumen. Untuk itu, Indonesia harus memiliki Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM) yang efektif dan efisien yang mampu mendeteksi, mencegah, dan mengawasi produk-produk termaksud untuk melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumennya baik di dalam maupun di luar negeri.

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan upaya yang cukup strategis karena berdampak langsung pada perlindungan konsumen serta menjadi unsur penting dalam upaya meningkatkan daya saing produk di tingkat daerah dan nasional. Atas dasar tersebut, Balai POM di Pangkal Pinang sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM mempunyai peran strategis dalam pencapaian *outcome* tersebut, terlebih dalam melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2026 Balai POM di Pangkal Pinang disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas

dan fungsi sebagai unit pelaksana teknis pengawas obat dan makanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan maka Badan POM menerbitkan Peraturan Badan POM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan serta berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan, ditetapkan Balai POM di Pangkal Pinang sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM dengan wilayah kerja 5 Kabupaten Kota di Pulau Bangka.

Tugas Pokok dan Fungsi Balai POM Pangkal Pinang

Kegiatan pengawasan obat dan makanan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat, akan tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistematis, dari hulu sampai hilir.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan, tugas pokok dan fungsi Balai POM di Pangkal Pinang sebagai UPT Badan POM adalah sebagai berikut:

1. Tugas Pokok

UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi UPT

Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, Balai POM di Pangkal Pinang menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;

2. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
5. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
7. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
8. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
9. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
10. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
11. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
12. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
13. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
14. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

3. Analisis Lingkungan Strategis

A. Internal

Balai POM di Pangkal Pinang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang pengawasan obat dan makanan didukung oleh sumber daya baik segi Sumber Daya Manusia (SDM) maupun sarana dan prasarana.

Sarana dan Prasarana

Tabel 1.1 Sarana dan Prasarana Balai POM di Pangkal Pinang

Luas Tanah & Bangunan	Rumah Dinas	Listrik	Sarana Komunikasi
L.Tanah 5526 m ² L.Bangunan 2075 m ² Luas Kantor 780 m ² Luas Laboratorium 1295 m ²	Belum ada, Rumah dinas berupa rumah kontrak	207.000 watt - kantor : 33.000 watt - Laboratorium : 174.000 watt	- Saluran telepon (Ruang pimpinan, ULPK, dan Tata Usaha) - Internet jaringan Moratelindo - Tiap ruangan terhubung dengan telepon extension sebanyak 27 unit - Conference Video - LAN server internal

Sumber Daya Manusia

Pada Triwulan I Tahun 2026, Balai POM di Pangkal Pinang memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 56 (Enam Puluh) orang yang terdiri dari 2 orang Struktural (1 orang Kepala Balai dan 1 orang Kepala Sub Bagian Tata Usaha), 16 orang staf tata usaha, 24 orang staf pengujian, 6 orang staf Pemeriksaan, 4 orang staf Penindakan, dan 4 orang staf Seksi Informasi dan Komunikasi. Selain ASN, terdapat 12 orang tenaga outsourcing.



Gambar 1.1 Profil Pegawai Balai POM di Pangkal Pinang berdasarkan Golongan Tahun 2025

B. Eksternal

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan pemekaran dari Provinsi Sumatera Selatan yang terbentuk berdasarkan UU No. 27 Tahun 2000. Berdasarkan kondisi tersebut wilayah kerja Balai POM di Pangkal Pinang digambarkan sebagai berikut:

1. Data Umum Wilayah Kerja

a. Luas Wilayah Kerja

Total luas wilayah daratan dan laut Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai luas 81.725,06 km², Luas daratan setidaknya mencapai 16.424,06 kilometer persegi, atau 20,10 persen dari total wilayah. Sementara luas laut kurang lebih 65.301 kilometer persegi, atau 79,90 persen dari total wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Perbatasan wilayah:

- di sebelah Utara : Laut Natuna
- di sebelah Selatan : Laut Jawa
- di sebelah Barat : Selat Bangka
- di sebelah Timur : Selat Karimata



Gambar 1.2 Peta Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

b. Jumlah Kabupaten/Kota

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan gugusan dua pulau yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung serta terdapat pulau-pulau kecil disekitarnya. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki 6 kabupaten dan 1 kota, yaitu:

- a. Kabupaten Bangka,
- b. Kabupaten Bangka Tengah,
- c. Kabupaten Bangka Barat,
- d. Kabupaten Bangka Selatan,
- e. Kabupaten Belitung,
- f. Kabupaten Belitung Timur dan
- g. Kota Pangkal Pinang.

c. Pola Transportasi Balai POM Pangkal Pinang di Wilayah Kerja

Pola transportasi Balai POM di Pangkal Pinang adalah menggunakan transportasi darat, transportasi laut dan transportasi udara.

d. Lama Waktu Perjalanan ke Wilayah Kerja

Untuk menjangkau wilayah Pulau Bangka perjalanan dapat ditempuh menggunakan transportasi darat dengan waktu 1-3 jam.

e. Waktu yang diperlukan di satu Wilayah Kerja

Waktu yang diperlukan petugas Balai POM Pangkal Pinang di satu wilayah kerja berkisar antara 2-3 hari.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Balai POM di Pangkal Pinang seperti terlihat pada gambar 1.1 disusun berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan.



Gambar 1.3 Struktur Organisasi Balai POM di Pangkal Pinang

1. Kepala UPT BPOM menyampaikan laporan kepada Kepala Badan mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengawasan Obat dan Makanan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
2. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu.

3. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dalam pelaksanaan tugas, kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja yang terdiri dari Ketua Tim dan Anggota Tim untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.

1.4 ISU STRATEGIS

Dalam melaksanakan pengawasan obat dan makanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung muncul isu-isu strategis yang harus diperhatikan, antara lain:

A. ISU INTERNAL

1. Sampel Sediaan Farmasi yang di sampling tidak sesuai dengan pedoman sampling dikarenakan keterbatasan variasi jumlah sampel di wilayah pengawasan Balai POM Pangkal Pinang
2. Peralatan laboratorium sering mengalami kerusakan karena sudah berumur lebih dari 15 tahun, dibutuhkan peremajaan alat untuk memperlancar proses pengujian.
3. Keterbatasan anggaran perbaikan dan pemeliharaan alat laboratorium menyebabkan hanya alat prioritas yang dapat diperbaiki.
4. Ruang laboratorium untuk pengujian Obat, Obat Tradisional, dan Kosmetik masih terbatas, berpotensi menyebabkan ketidaknyamanan dan mengganggu keselamatan kerja.
5. Ketidaksesuaian dalam penentuan kategori sampel dan nama jenis Pangan Olahan yang di sampling
6. Alokasi anggaran untuk pengembangan kompetensi PFM di fungsi pengujian sangat terbatas dan belum dapat mengakomodasi semua kebutuhan dan gap kompetensi pegawai.
7. Keterbatasan alokasi anggaran untuk pengujian sampel KLB keracunan pangan
8. Ketidaksesuaian dalam penentuan kategori maupun waktu sampling sampel PIRT Data pemeriksaan distribusi Sediaan Farmasi yang diinput pada SIPT tidak sesuai dengan jumlah sarana yang ditelaah diawasi

9. Adanya pengawasan terhadap label produk tembakau dan/atau rokok elektrik yang dilaporkan melalui SIPT tidak sesuai dengan produk yang sebenarnya diawasi.
10. Tools antibiotik tidak digunakan secara konsisten dalam kegiatan pengawasan antibiotik di sarana pelayanan kefarmasian khususnya Apotek
11. Peralatan laboratorium sering mengalami kerusakan karena sudah berumur lebih dari 15 tahun, dibutuhkan peremajaan alat untuk memperlancar proses pengujian.
12. Pengembangan kompetensi pegawai fungsi penindakan belum terlaksana sesuai perencanaan.
13. Pengelolaan Barang Bukti belum optimal
14. Aplikasi Dashboard Penindakan belum berjalan secara optimal.
15. Pemanfaatan Data Kerawanan Kejahatan belum optimal.
16. Alat pengolah data di bagian Penindakan belum sesuai standar spesifikasi dari Direktorat Siber.
17. Pengelolaan pengembangan kompetensi pegawai dari tahap perencanaan hingga evaluasi membutuhkan monitoring secara berkelanjutan
18. Penerapan Sistem Manajemen POM Terintegrasi belum optimal.
19. Upaya perlindungan data untuk mencegah kebocoran data dan informasi belum optimal.
20. Diperlukan adanya pengembangan inovasi pelayanan publik yang lebih berdampak kepada masyarakat untuk mendukung proses pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
21. Adanya perbedaan pemahaman antar pegawai mengenai penyusunan, gratifikasi, dan benturan kepentingan
22. Monitoring pengumpulan raw data kinerja masing-masing fungsi belum optimal.
23. Kualitas pelaksanaan anggaran belum optimal dan masih menjadi temuan dalam audit Inspektorat maupun BPK.
24. Pemangkasan anggaran berpotensi menyebabkan penyesuaian kegiatan pengawasan sarana dan produk.
25. Pengelolaan manajemen risiko belum sepenuhnya sesuai pedoman yang berlaku.

26. Ruang arsip (Record Center) belum memenuhi standar yang dipersyaratkan.
27. Masih terdapat penciptaan arsip yang belum mengikuti pedoman Tata Naskah Dinas yang berlaku
28. Pengelolaan persediaan belum optimal, terdapat selisih antara data gudang dan aplikasi SAKTI.
29. Sarana prasarana K3 belum tersedia secara optimal sesuai standar
30. Pengadaan melalui e-purchasing tidak sampai selesai.

B. ISU EKSTERNAL

1. Sampel Sediaan Farmasi yang di sampling tidak sesuai dengan pedoman sampling dikarenakan keterbatasan variasi jumlah sampel di wilayah pengawasan Balai POM Pangkal Pinang
2. Pelaporan KTD / ESO tidak dilakukan oleh Sarana Pelayanan Kesehatan
3. Kebijakan timeline pengujian yang selalu berubah setiap tahun dan belum dituangkan dalam Pedoman Sampling
4. Tidak terdapat Penetapan terkait Status Kejadian Luar Biasa (KLB) dari Dinas Kesehatan setempat
5. Potensi adanya KLB keracunan pangan meningkat dengan berjalannya program MBG.
6. Satgas KLB keracunan pangan belum terbentuk dan bekerja secara optimal
7. Pemberian Gratifikasi dari Pelaku Usaha kepada Petugas
8. Rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan tidak disampaikan secara tepat waktu ke stakeholder terkait
9. Sarana yang diperiksa dalam kondisi tutup tidak beroperasi akan tetapi tidak bisa dikonfirmasi kepada pemilik sarana karena tidak terdapat kontak yang bisa dihubungi
10. Petugas mengalami penolakan dari sarana saat dilakukan pemeriksaan
11. Penyesuaian kebijakan pengawasan dari pusat menuntut UPT untuk cepat beradaptasi dan meningkatkan efektivitas koordinasi operasional.
12. Risiko keselamatan petugas saat melakukan pengawasan obat dan makanan
13. Perubahan metode penilaian SRL dari "pernah dan mampu uji" menjadi "harus melalui verifikasi MA menimbulkan kebutuhan pemisahan kegiatan peningkatan SRL dan MA Terverifikasi.

14. Kabupaten/Kota yang dilakukan pendampingan tidak mengisi tools penilaian dan Data Dukung KKPA
15. Dukungan BPOM terhadap program MBG meliputi sampling, pemeriksaan, penyuluhan dan pengujian
16. Beredar isu atau hoaks mengenai Obat dan Makanan serta sentimen negatif terhadap BPOM
17. Adanya program lain dari kementerian/lembaga di sekolah dengan tahapan program yang hampir sama sehingga menghambat keberlanjutan program
18. Terdapat tumpang tindih program di desa dari kementerian/lembaga lain yang menggunakan metode serupa, sehingga menghambat keberlanjutan program Keamanan Pangan Terpadu
19. Terjadinya efisiensi anggaran yang menyebabkan PEMDA tidak melaksanakan replikasi program keamanan pangan terpadu
20. Pengetahuan pelaku UMKM masih rendah terkait perizinan melalui OSS terbaru.
21. Masih rendahnya komitmen pelaku usaha dalam melaksanakan tahapan pendampingan UMKM
22. Risiko keselamatan petugas saat melakukan pengawasan obat dan makanan
23. Rendahnya putusan pengadilan terhadap pelaku kejahatan obat dan makanan sehingga tidak memberikan efek jera.
24. Berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
25. Intervensi dari pihak eksternal dalam penindakan atau penyidikan.
26. Peningkatan peredaran produk ilegal dan berbahaya melalui platform digital/online.
27. Kegiatan penggalangan pemangku kepentingan belum terlaksana secara optimal.
28. Ketidakpuasan masyarakat terhadap layanan publik disebabkan oleh ekspektasi yang tinggi terhadap BPOM
29. Masyarakat membutuhkan akses informasi dan edukasi obat dan makanan yang lebih mudah dan berbasis digital.

- 30. Adanya ancaman siber seperti malware, ransomware, phishing, dan serangan DDoS, serta risiko dari pihak ketiga
- 31. Jumlah responden yang tidak mencukupi untuk pengisian survey
- 32. Masih rendahnya komitmen Dinas Kesehatan dalam melaksanakan kegiatan yang bersumber dari DAK BPOM.

.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA



BAB II **PENGUKURAN KINERJA**

2.1 URAIAN SINGKAT RENSTRA

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja pengawasan obat dan makanan, maka disusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dengan ditetapkannya RPJMN 2025-2029, maka Badan Pengawas Obat dan Makanan menyusun Renstra Tahun 2025-2029 yang menjadi dasar ditetapkannya Renstra Balai POM di Pangkal Pinang Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis (Renstra) Balai POM di Pangkal Pinang 2025-2029 merupakan suatu dokumen perencanaan indikatif dan memuat program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Balai POM di Pangkal Pinang. Rencana Strategis Balai POM di Pangkal Pinang 2025-2029 akan menjadi acuan dalam penyusunan rencana kinerja tahunan dalam rangka pelaksanaan pembangunan di bidang pengawasan Obat dan Makanan dalam kurun waktu 2025-2029. Renstra ini dibuat sesuai dengan SOTK baru Badan POM berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan.

Rancangan Rencana Strategis Balai POM di Pangkal Pinang telah mulai disusun sejak awal tahun 2025. Setelah mengalami beberapa kali penyesuaian pada bulan Desember 2025 Balai POM di Pangkal Pinang telah menetapkan secara resmi Rencana Strategis Balai POM di Pangkal Pinang tahun 2025 – 2029 yang selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan Tahun 2026.

Secara ringkas, Visi, Misi, dan Tujuan Balai POM di Pangkal Pinang sesuai dengan Badan POM adalah sebagai berikut:

I. Visi

Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045

II. Misi

Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat

Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing

Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan

Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

IV. TUJUAN

- 1) Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu
- 2) Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu
- 3) Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan Keberpihakan pada UMKM
- 4) Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
- 5) Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima

Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Balai POM di Pangkal Pinang dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Balai POM di Pangkal Pinang. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2025-2029) ke depan diharapkan Balai POM di Pangkal Pinang akan dapat mencapai sasaran kegiatan. Sasaran kegiatan Balai POM di Pangkal Pinang selama lima tahun (2025–2029) disusun dengan mengacu pada Renstra Badan POM 2025–2029. Sasaran kegiatan Balai POM di Pangkal Pinang tahun 2026 telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT;
2. Meningkatnya efektivitas KIE;
3. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu;
4. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT;
5. Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT;
6. Layanan Publik UPT yang prima;
7. Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal.

Keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan tersebut diukur dengan 27 Indikator Kinerja Utama (IKU). Total capaian indikator tersebut dihitung secara periodik untuk memperoleh Nilai Kinerja Organisasi periodik.

2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Berikut tabel Rencana Kinerja Tahunan Balai POM di Pangkal Pinang Tahun 2026.

Tabel 2.1. Tabel Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2026

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target 2026
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Produk Sediaan Farmasi dan	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,25

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target 2026
	Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	27
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	85
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95,75
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	89,60
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	81
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target 2026
		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	77
		Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	40
		Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81
2	Meningkatnya efektivitas KIE	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,85
		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	10
		Jumlah desa pangan aman	6
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
3	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	31,25
4	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	91
5	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	91

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target 2026
6	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,75
7	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	90,4
		Nilai AKIP UPT BPOM	81,80
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,94

RKT Tahun 2026 ini disusun dan ditetapkan pada 07 Oktober 2025, target yang tertuang dalam RKT merupakan target tahun 2026 pada dokumen Rencana Strategis Balai POM di Pangkal Pinang Tahun 2025 – 2029.

2.3 PERJANJIAN KINERJA (PK)

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 disebut sebagai Perjanjian Kinerja.

Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, sebagai wujud komitmen dari penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, dan menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Kepala Balai POM di Pangkal Pinang menandatangani Perjanjian Kinerja memuat Sasaran Kegiatan yang seharusnya terwujud pada tahun 2026 dengan indikator kinerja utama yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang diwujudkan serta target yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Balai POM di Pangkal Pinang serta didukung dengan alokasi anggaran pada tahun 2026 sebesar Rp 13.918.203.000.

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Balai POM di Pangkal Pinang Tahun 2026

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target 2026
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98,75
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	27,85
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98,9
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,5
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94,25
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,6
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,25
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	93,83

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target 2026
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	84,04
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100
		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	78,6
		Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	40
2	Meningkatnya efektivitas KIE	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,85
		Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	7
		Jumlah desa pangan aman	3
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
3	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	31,25
4	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	92,5
5	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT	94

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target 2026
	Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT		
6	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,85
7	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	90,4
		Nilai AKIP UPT BPOM	80,1
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,94

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 Tahun 2014, maka BPOM di Pangkal Pinang sebagai unit kerja eselon III wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah (Kepala BPOM di Pangkal Pinang) dengan pemberi amanah (Kepala Badan POM RI) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Pengukuran akuntabilitas dengan melakukan klasifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pada tahun 2026 Balai POM di Pangkal Pinang memperoleh anggaran awal yaitu sebesar Rp 13.918.203.000 dan pada bulan Desember 2025 terdapat revisi anggaran, dikarenakan adanya pergeseran anggaran pagu dan blokir anggaran, dari Rp 13.918.203.000 menjadi Rp 11.688.120.000 dalam rangka penguatan dukungan pelaksanaan Prioritas Direktif Presiden Tahun Anggaran 2026. Pada saat PK disusun, anggaran disusun berdasarkan revisi DIPA kedua dengan pagu efektif sebesar Rp 11.599.770.000, namun total pagu tetap sama atau tidak berubah. Total Pagu tersebut dijabarkan kedalam setiap pagu untuk 20 Rincian Output yang mendukung pencapaian tujuan Balai POM di Pangkal Pinang.

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026 ini terdapat perubahan/perbedaan jika dibandingkan dengan RKT Tahun 2026, yaitu:

1. Jumlah IKU berkurang dari 28 menjadi 27, terdapat 1 IKU yang tidak masuk kedalam dokumen PK yaitu Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dikarenakan anggaran untuk sampling MBG tidak ada pada DIPA 2026 yang menjadi dasar penyusunan anggaran dalam dokumen PK.
2. Terdapat perubahan target pada 17 IKU, disebabkan oleh hasil perhitungan dengan mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya serta kondisi lain yang relevan.

Perubahan secara rinci antara RKT dan PK tahun 2026 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

RKT Tahun 2026				Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2026				Keterangan/Justifikasi
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target 2026	No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target 2026	
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90,25	1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98,75	Target pada PK merupakan hasil exercise dengan mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya
		Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	27			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	27,85	Target pada PK merupakan hasil exercise dengan mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya
		Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	91			Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98,9	Target pada PK merupakan hasil exercise dengan mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100			Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	

RKT Tahun 2026				Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2026				Keterangan/Justifikasi
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target 2026	No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target 2026	
		Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90			Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,5	Target pada PK merupakan hasil exercise dengan mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	85			Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85	
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100			Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92			Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94,25	Target pada PK merupakan hasil exercise dengan mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya

RKT Tahun 2026				Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2026				Keterangan/Justifikasi
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target 2026	No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target 2026	
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95,75			Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,6	Target pada PK merupakan hasil exercise dengan mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92			Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,25	Target pada PK merupakan hasil exercise dengan mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	89,60			Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	93,83	Target pada PK merupakan hasil exercise dengan mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	81			Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	84,04	Target pada PK merupakan hasil exercise dengan mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya
		Persentase pemenuhan target	100			Persentase pemenuhan target	100	

RKT Tahun 2026				Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2026				Keterangan/Justifikasi
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target 2026	No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target 2026	
		pengendalian AMR di wilayah UPT				pengendalian AMR di wilayah UPT		
		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	77			Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	78,6	Target pada PK merupakan hasil exercise dengan mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya
		Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	40			Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	40	
		Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81					Anggaran untuk sampling MBG tidak ada pada DIPA 2026
2	Meningkatnya efektivitas KIE	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,85	2	Meningkatnya efektivitas KIE	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,85	
		Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan	10			Jumlah Sekolah yang melaksanakan	7	Target pada PK merupakan hasil exercise dengan

RKT Tahun 2026				Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2026				Keterangan/Justifikasi
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target 2026	No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target 2026	
		keamanan pangan				pembudayaan keamanan pangan		mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya
		Jumlah desa pangan aman	6			Jumlah desa pangan aman	3	Target pada PK merupakan hasil exercise dengan mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1			Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	Target pada PK merupakan hasil exercise dengan mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya
3	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	31,25	3	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	31,25	

RKT Tahun 2026				Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2026				Keterangan/Justifikasi
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target 2026	No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target 2026	
4	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	91	4	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	92,5	Target pada PK merupakan hasil exercise dengan mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya
5	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	91	5	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	94	Target pada PK merupakan hasil exercise dengan mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya
6	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,75	6	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,85	Target pada PK merupakan hasil exercise dengan mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya
7	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	90,4	7		Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	90,4	

RKT Tahun 2026				Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2026				Keterangan/Justifikasi
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target 2026	No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target 2026	
	Organisasi yang Optimal	Nilai AKIP UPT BPOM	81,80		Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai AKIP UPT BPOM	80,1	Target pada PK merupakan hasil exercise dengan mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5			Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,94			Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,94	

2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)

Berikut di bawah ini tabel Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2026 sesuai penyusunan Renstra Balai POM di Pangkal Pinang,

Tabel 2.4 Tabel Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai POM di Pangkal Pinang Tahun 2026

No	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B010	B011	B012	
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		98.75	98.75	98.75	98.75	98.75	98.75	98.75	98.75	98.75	98.75	98.75	343,795,000
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO												27.85	5,983,000
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		98.9	98.9	98.9	98.9	98.9	98.9	98.9	98.9	98.9	98.9	98.9	143,609,000
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	8,198,400
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	9,369,600
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	1,751,400
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	2,852,220
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan	94.25	94.25	94.25	94.25	94.25	94.25	94.25	94.25	94.25	94.25	94.25	94.25	17,020,380

No	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B010	B011	B012	
	ditindaklanjuti sesuai ketentuan													
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.6	96.6	96.6	96.6	96.6	96.6	96.6	96.6	96.6	96.6	96.6	96.6	145,595,160
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.25	93.25	93.25	93.25	93.25	93.25	93.25	93.25	93.25	93.25	93.25	93.25	253,730,440
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	93.83	93.83	93.83	93.83	93.83	93.83	93.83	93.83	93.83	93.83	93.83	93.83	4,144,000
12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai Standar	84.04	84.04	84.04	84.04	84.04	84.04	84.04	84.04	84.04	84.04	84.04	84.04	14,986,000
13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT												100	16,159,400
14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			78.2	78.2	78.2	78.4	78.4	78.4	78.5	78.5	78.5	78.6	3,639,932,000
15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman												40	22,160,000
16	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			86.85	86.85	86.85	86.85	86.85	86.85	86.85	86.85	86.85	86.85	116,138,000
17	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	5	5	10	25	25	25	70	70	95	95	100	7	69,515,000
18	Jumlah desa pangan aman	5	5	10	25	25	25	50	50	70	70	100	3	72,577,000

No	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B010	B011	B012	
19	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	5	5	10	25	50	70	80	100	100	100	100	1	36,673,000
20	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	2.5	2.7	12.9	41.23	52.05	62.88	71.2	75.15	89.73	94.3	99.5	31.25	20,097,000
21	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT		33.33	33.33	33.33	33.33	38.33	38.33	51.67	51.67	66.67	85	92.5	142,830,000
22	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	94	5,230,000
23	Indeks Pelayanan Publik UPT												4.85	7,591,000
24	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM												90.4	661,291,000
25	Nilai AKIP UPT BPOM												80,1	156,999,000
26	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5	5,454,781,000
27	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												2.94	315,112,000
TOTAL														11,688,120,000

Dalam pencapaian sasaran dan indikator kinerja dalam PK harus didukung oleh kegiatan dan anggaran, serta dipantau secara berkala. Untuk itu perlu disusun Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK). RAPK memuat target kinerja per bulan dan anggaran per indikator kinerja yang dilengkapi dengan detail aktivitas pendukung. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja merupakan dasar pemantauan tiap bulan digunakan untuk penilaian kinerja secara berkala. RAPK tahun 2026 Balai POM di Pangkal Pinang secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 4.

2.5 METODE PENGUKURAN

Pada Penetapan Kinerja Balai POM di Pangkal Pinang tahun 2026 terdapat 7 sasaran kegiatan dengan 27 indikator kinerja yang berkontribusi pada pencapaian sasaran.

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) di lingkungan BPOM terdiri dari NKO Periodik dan NKO Tahunan. NKO Periodik merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja secara triwulanan, sedangkan NKO Tahunan merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja pada akhir tahun anggaran. Untuk dapat mengukur kinerja, baik kinerja sasaran maupun kinerja kegiatan digunakan alat ukur berupa indikator yang telah ditetapkan. Rumus yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Apabila semakin **tinggi** angka realisasi menunjukkan capaian yang semakin **baik**, maka digunakan rumus no. 1 sbb:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- a) Hasil NKO dikelompokkan menjadi 5 (lima) predikat, yaitu 1) Sangat Kurang; 2) Kurang; 3) Butuh Perbaikan; 4) Baik; dan 5) Istimewa dengan rincian sesuai tabel berikut:

Tabel 2.7 Kriteria Predikat NKO

Predikat NKO	Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	Notifikasi Warna
Istimewa	>100%	
Baik	$80\% < x \leq 100\%$	
Butuh Perbaikan	$60\% < x \leq 80\%$	
Kurang	$20\% < x \leq 60\%$	
Sangat Kurang	$0\% \leq x \leq 20\%$	

$$\text{Nilai Akhir: } \{(1) \times [(100\% - (2)) \times 100]$$

A. Normalisasi capaian perjanjian kinerja

Dengan memperhatikan prinsip PKO sebagaimana disebut di atas yaitu terkait dengan prinsip berorientasi hasil serta mempertimbangkan koreksi terhadap anomali capaian kinerja instansi dan unit/satuan kerja, maka dipandang perlu melakukan normalisasi capaian perjanjian kinerja sebagaimana ketentuan berikut:

- i. Jika capaian kinerja setiap indikator $>110\%$ maka akan dinormalisasi menjadi 110% ; dan
- ii. Jika capaian kinerja setiap indikator $\leq 110\%$ maka tidak dilakukan normalisasi.

B. Koreksi normalisasi capaian perjanjian kinerja berdasarkan predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah

Setelah normalisasi capaian perjanjian kinerja dilakukan terhadap masing-masing indikator maka hasil normalisasi tersebut dikoreksi dengan memperhatikan predikat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang bersumber dari hasil evaluasi sebagaimana gambar berikut.

- b) Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra. Capaian kinerja hasil perbandingan ini dinyatakan dalam kategori berikut:

Tabel 2.8 Kriteria Predikat realisasi kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah

Kategori	Penjelasan	Notifikasi Warna
Tercapai/Melampaui	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. tahun n dibandingkan dengan target jangka menengah (akhir periode Renstra) sebesar $\geq 100\%$.	
Akan Tercapai	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. tahun n dibandingkan dengan target jangka menengah (akhir periode Renstra) sebesar $70\% - <100\%$ ($70 \leq x < 100$).	
Perlu Upaya Keras	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. tahun n dibandingkan dengan target jangka menengah (akhir periode Renstra) sebesar $<70\%$ ($x < 70$).	

c) Capaian indikator kinerja dinyatakan dalam kategori sebagai berikut:

Tabel 2.9 Kriteria Predikat Indikator Kinerja

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	$>110\%$	
Sangat Baik	$100\% < x \leq 110\%$	
Baik	$90\% < x \leq 100\%$	
Cukup	$60\% \leq x \leq 90\%$	
Kurang	$<60\%$	

Mekanisme pelaksanaan pengukuran dan evaluasi kinerja BPOM di Pangkal Pinang:

1. Tim Monev Tata Usaha menyiapkan media pengumpulan data pada madu pelawan
2. Penanggung Jawab Data tiap Tim Kerja melakukan penginputan data kinerja
3. Ketua Tim Kerja melakukan verifikasi data kinerja yang diinput
4. Ketua Tim Monev memeriksa Kelengkapan data kinerja yang telah diinput oleh semua Tim Kerja
5. Ketua Tim Kerja, Ketua Tim Monev melakukan evaluasi dan pembahasan di rapat bulanan Bersama Kepala Balai
6. Tim Monev TU melakukan input dan pelaporan data kinerja

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA





3.1 CAPAIAN KINERJA

Pada subbab analisis capaian kinerja ini akan diuraikan pengukuran kinerja dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Selain itu, juga dilakukan perbandingan realisasi Triwulan I dengan target tahunannya. Setiap indikator akan dijelaskan penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja), program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, efisiensi penggunaan sumber daya, dan informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja.

Balai POM di Pangkal Pinang melakukan perhitungan Nilai Kinerja Organisasi dan menganalisis capaian setiap indikator kinerjanya. Analisis capaian kinerja tersebut tertuang pada bagian berikut ini.

ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Balai POM di Pangkal Pinang Tahun 2026, terdapat 7 sasaran kegiatan dan keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan diukur dengan 27 Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu:

1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO
3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT
5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
12. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar
13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT
14. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
15. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman
16. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
17. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
18. Jumlah desa pangan aman
19. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas
20. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan
21. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT
22. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar
23. Indeks Pelayanan Publik UPT
24. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM
25. Nilai AKIP UPT BPOM
26. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM
27. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Berkaitan dengan proses penetapan Rencana Strategis BPOM 2025-2029 terdapat perubahan jumlah sasaran kegiatan yang semula 8 sasaran kegiatan menjadi 7 sasaran kegiatan. Perubahan ini juga telah dilakukan pada revisi dokumen Perjanjian kinerja Tahun 2025. Dalam revisi ini, terdapat pengurangan satu sasaran kegiatan yaitu Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT.

Dengan adanya revisi Perjanjian Kinerja Balai POM di Pangkal Pinang Tahun 2025, jumlah sasaran kegiatan menjadi 7 dan keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan diukur dengan 27 Indikator Kinerja Utama (IKU). Total capaian indikator tersebut dihitung secara periodik untuk memperoleh Nilai Kinerja Organisasi periodik. Berikut Nilai Kinerja Organisasi BPOM di Pangkal Pinang Tahun Triwulan I Tahun 2026.

Tabel 3.1 Nilai Kinerja Organisasi Triwulan I Tahun 2026

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator	Kinerja			Justifikasi	Capaian Setelah Normalisasi
				Target	Realisasi	%Capaian		
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98,75	100,00	101,27%	-	101,27%
		2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	-	-	-	-	
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98,9	100,00	101,11%	-	101,11%
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100,00%	-	100,00%
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,5	99,33	102,93%	-	102,93%
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85	44,03	51,80%	-	51,80%
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100,00%	-	100,00%
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94,25	100,00	106,10%	-	106,10%

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator	Kinerja			Justifikasi	Capaian Setelah Normalisasi
				Target	Realisasi	%Capaian		
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,6	100,00	103,52%	-	103,52%
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,25	98,33	105,45%	-	105,45%
		11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	93,83	93,34	99,48%	-	99,48%
		12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	84,04	100,00	118,99%	Normalisasi	110,00%
		13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	-	-	-	-	
		14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	78,2	78,2	100,00%	-	100,00%
		15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	-	-	-	-	
2	Meningkatnya efektivitas KIE	16	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,85	88,79	102,23%	-	102,23%
		17	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	10	10	100,00%	-	100,00%
		18	Jumlah desa pangan aman	10	10	100,00%	-	100,00%
		19	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	10	10	100,00%	-	100,00%

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator	Kinerja			Justifikasi	Capaian Setelah Normalisasi
				Target	Realisasi	%Capaian		
3	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	20	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	12,9	12,49	96,82%	-	96,82%
4	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	21	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	33,33	33,33	100,00%	-	100,00%
5	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	22	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50%	50%	100,00%	-	100,00%
6	Layanan Publik UPT yang prima	23	Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-	-	
7	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	24	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	-	-	-	-	
		25	Nilai AKIP UPT BPOM	-	-	-	-	
		26	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	-	-	-	
		27	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-	-	-	
Total Capaian PK								1880,71%
Nilai Kinerja Organisasi (Rata-rata Capaian PK)								98,98%
Predikat NKO								Baik

Nilai Kinerja Organisasi dihitung dari total capaian indikator perjanjian kinerja periodik tertentu yang telah dinormalisasi dibagi dengan jumlah indikator kinerja yang memiliki capaian kinerja pada periode tersebut. Berdasarkan Surat Edaran Nomor: PR.09.01.2.03.25.10 Tahun 2025 Tentang Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Unit/Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan, dengan mempertimbangkan koreksi terhadap anomali capaian kinerja unit/satuan kerja, maka perlu melakukan normalisasi capaian perjanjian kinerja sebagaimana ketentuan berikut:

- 1) Jika capaian kinerja setiap indikator >110% maka akan dinormalisasi menjadi 110%; dan
- 2) Jika capaian kinerja setiap indikator =110% maka tidak dilakukan normalisasi.

Berdasarkan tabel di atas, dari **27 (dua puluh tujuh)** Indikator Kinerja Utama, hanya **19 (sembilan belas)** indikator yang dapat diukur capaiannya dan **8 (delapan)** indikator lainnya merupakan indikator tahunan yang penilaiannya dilakukan pada akhir tahun.

Pada perhitungan Nilai Kinerja Organisasi Balai POM di Pangkal Pinang Triwulan I Tahun 2026, terdapat 1 indikator kinerja yang capaiannya dinormalisasi menjadi 110% karena capaiannya melebihi 110% yaitu indikator Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar. Dari hasil perhitungan diperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Balai POM di Pangkal Pinang Triwulan I Tahun 2026 sebesar **98,98%** dengan predikat **Baik**.

Berikut capaian kinerja dari 27 Indikator Kinerja Utama pada Triwulan I Tahun 2026 yang dinyatakan dalam kategori sesuai Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 676 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Triwulan I Tahun 2026

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Kinerja			Kategori & Notifikasi Warna
			Target	Realisasi	%Capaian	
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98,75	100,00	101,27%	Sangat Baik
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	27,85	-	-	-
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98,9	100,00	101,11%	Sangat Baik
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100,00%	Baik
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,5	99,33	102,93%	Sangat Baik
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85	44,03	51,80%	Kurang

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Kinerja			Kategori & Notifikasi Warna
			Target	Realisasi	%Capaian	
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100,00%	Baik
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94,25	100,00	106,10%	Sangat Baik
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,6	100,00	103,52%	Sangat Baik
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,25	98,33	105,45%	Sangat Baik
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	93,83	93,34	99,48%	Baik
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	84,04	100,00	118,99%	Tidak Dapat Disimpulkan
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	-	-	-
		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	78,2	78,20	100,00%	Baik
		Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	40	-	-	-
3	Meningkatnya efektivitas KIE	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,85	88,79	102,23%	Sangat Baik
		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	10	10	100,00%	Baik
		Jumlah desa pangan aman	10	10	100,00%	Baik
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	10	10	100,00%	Baik
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	12,9	12,49	96,82%	Baik

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Kinerja			Kategori & Notifikasi Warna
			Target	Realisasi	%Capaian	
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	33,33	33,33	100,00%	Baik
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100,00%	Baik
7	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,85	-	-	-
8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	90,4	-	-	-
		Nilai AKIP UPT BPOM	80,1	-	-	-
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	-	-	-
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,94	-	-	-

Pada Triwulan I Tahun 2026, terdapat penambahan 3 indikator kinerja utama sehingga jumlah indikator menjadi 27 indikator kinerja utama. Dari **27 (dua puluh tujuh)** Indikator Kinerja Utama pada Triwulan I Tahun 2026, terdapat **7 (tujuh)** indikator dengan kategori **sangat baik**, **10 (sepuluh)** indikator dengan kategori **baik**, **1 (satu)** indikator dengan kategori **tidak dapat disimpulkan**, **1 (satu)** indikator dengan kategori **kurang** dan **8 (delapan)** indikator belum dapat diukur capaiannya karena penilaiannya dilakukan pada akhir tahun.

SK 1 : Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT

Capaian Sasaran Kegiatan **Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT** diukur dengan 15 indikator sebagai berikut:

1. **Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan**
 - a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan I Tahun 2026

Tabel 3.3 Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator	Kinerja			Kategori & Notifikasi Warna
	Target	Realisasi	%Capaian	
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98,75	100,00	101,27%	Sangat Baik

Sediaan farmasi mencakup obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Sampel sediaan farmasi berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted atau purposive sampling dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui pedoman sampling dan pengujian. Tindak lanjut pada sampel melibatkan beberapa tahap, dimulai dari pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, hingga pelaporan hasil. Unit Pelaksana Teknis (UPT) juga diwajibkan melaporkan tanggapan terhadap surat tindak lanjut yang dikirimkan oleh pusat, sesuai pedoman tindak lanjut yang berlaku. Sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang telah ditetapkan dalam pedoman atau SOP terkait.

Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = $(A + B + C + D) / 4$, dimana A adalah Persentase Sampel Obat Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan, B adalah Persentase Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan, C adalah Persentase Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan dan D adalah Persentase Sampel Kosmetik Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan. Target Indikator kinerja Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti

Sesuai Ketentuan tahun 2025 sebesar 85% dimana target flat setiap bulan sebesar 85% dihitung sejak bulan ke-2 (Februari).

Pada Triwulan I 2026 pelaksanaan pengujian sesuai renlak sampling dan pengujian. Hasil perhitungan realisasi dari masing-masing komponen untuk menghasilkan realisasi indikator Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada triwulan I 2026 diperoleh nilai komponen A = 100%, B = 100%, C = 100% dan D = 100% sehingga diperoleh realisasi Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan dengan rumus $(A + B + C + D) / 4$ sebesar 100%.

Realisasi Indikator Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan yang diperoleh (100,00%) jika dibandingkan dengan target triwulan I 2026 (98,75%) diperoleh capaian 101,27% dengan kategori **"Sangat Baik"**.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2026

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2026 Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Target Tahun 2026	Realisasi Triwulan I	% Capaian Terhadap Target Tahunan	Kategori
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98,75	100,00	101,27 	Tercapai/ Melampaui

Target Indikator kinerja Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan tahun 2026 mengalami revisi target sejak Januari 2026, yang semula 90,25% menjadi 98,75%. Hal ini sesuai dengan kebijakan dari biro perencanaan bahwa target di tahun berjalan tidak boleh lebih kecil dari realisasi tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan target tahun 2026 (98,75%), realisasi kinerja triwulan I tahun 2026 (100,00%) diperoleh capaian sebesar 101,27% dengan kategori tercapai / melampaui.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Realisasi indikator Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan I ini diperoleh sebesar 100,00%, masih memenuhi target yang ditetapkan (98,75%) dengan capaian 101,27%.

Capaian yang diperoleh ditunjang oleh beberapa faktor di antaranya sebagai berikut :

1. Koordinasi yang baik antara petugas sampling, penerima sampel dan pengujian terkait pengaturan SLA baik SLA sampling, pengujian dan pelaporan di SIPT sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati bersama pada bulan Januari 2026.
2. Komitmen pelaksanaan sampling sesuai perencanaan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pelaksanaan sampling di awal tahun.
3. Komitmen dalam memenuhi SLA baik pelaksanaan sampling, pelaksanaan pengujian hingga pelaporan hasil uji sebagaimana yang telah diatur dalam Pedoman Sampling Tahun 2026.
4. Responsif dalam memberikan tanggapan terhadap Surat Permohonan Tindak Lanjut dari masing-masing kedeputian.
5. Menyusun perencanaan kebutuhan dengan baik sehingga pengujian bisa dilakukan sesuai parameter uji yang sudah ditetapkan dalam Pedoman Sampling.
6. Memastikan peralatan laboratorium beroperasi dengan baik yang menunjang terlaksananya pengujian sesuai SLA yang sudah ditetapkan.
7. Memastikan komunikasi dan koordinasi antara pengujian dan bagian sampling baik internal maupun dalam region Pekanbaru berjalan dengan baik, sehingga dapat mengantisipasi apabila ada hambatan terkait pengujian.
8. Tetap memastikan jaminan mutu hasil pengujian sebagaimana yang diatur dalam ISO/IEC 17025:2017.

Target tahunan diprediksi dapat tercapai jika faktor-faktor penunjang keberhasilan pencapaian target di atas tetap konsisten dilaksanakan.

- d. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Untuk memastikan realisasi kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan perlu dilakukan upaya perbaikan kinerja khususnya terhadap kendala yang ditemukan pada triwulan I yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dengan Balai Penguji di Region Pekanbaru, terkait ketepatan waktu penginputan laporan hasil uji di SIPT dan proses pengujian di Balai lain apabila terjadi kerusakan alat utama.
2. Memprioritaskan perbaikan alat laboratorium utama yang mendukung pemenuhan timeline pengujian.
3. Mengawal pengadaan alat laboratorium yang baru untuk memastikan dapat memperlancar proses pengujian.
4. Memastikan ketersediaan sampel (kategori day/night cream) mencukupi untuk dilakukan sampling sepanjang tahun 2026 melalui pemetaan sarana yang lebih terperinci.

Selain itu, ada beberapa upaya antisipatif untuk penyempurnaan kinerja ke depannya, diantaranya :

1. Mengidentifikasi kebutuhan reagen dan media mikro yang dibutuhkan laboratorium yang belum direncanakan sebelumnya dan mengidentifikasi anggaran mana yang bisa direvisi untuk memenuhi kebutuhan reagen/media mikro tersebut.
2. Melakukan koordinasi yang baik antara sampling dan pengujian sehingga SLA baik pelaksanaan sampling, pelaksanaan pengujian dan pelaporan hasil pengujian memenuhi timeline seperti yang ditetapkan dalam Pedoman Sampling.
3. Mengawal semua tahapan proses dari sampling sampai pelaporan yang mempengaruhi perhitungan indikator Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan.

Tabel 3.5 Matriks Rekomendasi Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Januari	Adanya Nota Dinas dari Sekretaris utama Nomor : PR.04.02.2.01.26.05 tanggal 5 Januari 2026 perihal pergeseran breakdown komoditi dan sarana yang menjadi target Rincian Output, menyebabkan perlunya penyesuaian anggaran yang tersedia	Bersurat ke unit pengampu teknis terkait usulan pergeseran breakdown komoditi	Mengirim nota dinas ke unit pengampu teknis terkait usulan pergeseran breakdown komoditi	Feb 2026	Y	O-01	Sampel Obat yang di sampling tidak sesuai dengan pedoman sampling
Februari	Terjadi kerusakan pada board AAS Grafite Furnace sehingga dilakukan clock off pada aplikasi SIPT. Saat dilakukan clock on SLA pengujian 15 HK masih dapat dipenuhi. Namun, karena adanya keterbatasan anggaran perbaikan, saat ini belum dilakukan perbaikan.	1. Agar dilakukan koordinasi ke Region Pekanbaru untuk melaksanakan pengujian parameter logam Pb,Cd,dan As di Balai lain. 2. Agar dilakukan koordinasi ke bagian Pemeriksaan untuk melakukan sampling untuk bulan maret dan april diusahakan sampel dengan parameter uji non logam Pb, Cd, dan As. 3. Agar dilakukan pengecekan oleh vendor terkait kepastian kerusakan alat AAS	1. Membuat nota dinas permohonan pengujian parameter logam ke Balai lain. 2. Menginformasikan kerusakan alat AAS ke bagian pemeriksaan untuk dapat dilakukan penyesuaian pengujian. 3. Akan dilakukan pengajuan kunjungan oleh Teknisi untuk memastikan kerusakan alat.	Maret 2026	Y	O-50	Pengujian sampel yang menggunakan instrument AAS melewati timeline
Maret	1. Terdapat kendala dalam memenuhi target sampel kosmetik bulan maret (4 sampel) kategori Kosmetik Risiko Tinggi - Day Cream / Night Cream. Kategori ini cukup sulit ditemukan di lapangan dikarenakan adanya pergeseran tren pasar sediaan kosmetik dari Day Cream / Night Cream menjadi Moisturizer. Target bulan Maret masih dapat dicapai, namun masih terdapat target Kosmetik kategori Day Cream / Night Cream hingga akhir tahun sebanyak 17 sampel 2. Masih terkendala untuk melakukan pengujian parameter cemaran logam Pb,Cd,As	1. Lakukan pemetaan ketersediaan merk dagang untuk kategori sampel Day Cream / Night Cream di pasaran 2. Jika tidak dapat ditemukan di lapangan, agar dapat diusulkan ke unit pengampu teknis untuk perubahan jenis sediaan Day / Night Cream menjadi sediaan lain 3. Agar dilakukan koordinasi ke bagian sampling sehingga tidak dilakukan sampling terhadap sampel yg parameter uji cemaran logam Pb, Cd, As	1, Menginformasikan kepada PJ sampling kosmetik untuk mendata merk dagang yang mengeluarkan jenis kosmetik Day / Night Cream dengan memanfaatkan data pada https://app-registrasi.pom.go.id/ 2. Melakukan koordinasi dengan petugas sampling untuk tidak melakukan sampling sampel dengan parameter cemaran logam Pb, Cd, dan As.	April 2026	Y	O-01 O-50	1. Sampel Obat yang di sampling tidak sesuai dengan pedoman sampling 2. Pengujian sampel yang menggunakan instrument AAS melewati timeline

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Capaian indikator kinerja Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada triwulan I tahun 2026 mencapai target yang

ditetapkan yaitu 100,00%. Hal ini tentunya ditunjang oleh beberapa program atau kegiatan diantaranya :

1. Adanya koordinasi antara Bidang Pemeriksaan dan Pengujian terkait kesepakatan rencana sampling dan pengujian
2. Peningkatan kompetensi personil pengujian yang dilakukan melalui bimbingan teknis pengujian baik internal maupun eksternal.
3. Peningkatan kompetensi petugas yang melakukan sampling sampel Sediaan Farmasi sesuai petunjuk teknis Pedoman sampling masing-masing komoditi.
4. Penyusunan kebutuhan pengujian baik reagensia, baku pembanding, suku cadang dan pendukung pengujian sehingga proses pengujian dapat berjalan dengan lancar.
5. Pengaturan jadwal penggunaan alat yang dipakai bersama seperti AAS dan GC MS untuk menghindari pengujian sampel yang melewati timeline pengujian.
6. Berkoordinasi dengan Balai Penguji yang lain di region Pekanbaru terkait parameter uji regionalisasi baik yang diuji di BPOM di Pangkal Pinang maupun di Balai yang lain.

f. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3.6 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian
	T	R	%	Target (RPD TW I)	Realisasi	%			
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98,75	100,00	101,27	27.674.390	28.782.503	104,00	0,97	-0,03	Tidak Efisien

1) Efisiensi penggunaan anggaran

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa tingkat efisiensi penggunaan anggaran pada indikator Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan ini sebesar -0,03 dengan Indeks efisiensi (0,97) diperoleh dengan membandingkan % capaian output dengan % capaian input (anggaran). Karena % capaian input lebih besar dari % capaian output diperoleh Tingkat efisiensi -0,03. Tingkat efisiensi < 0 , capaian dinilai tidak efisien. Dengan penggunaan anggaran sebesar Rp 28.782.503(104,00%) diperoleh capaian

output sebesar 101,27%. Anggaran yang digunakan untuk mendukung tercapainya indikator Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan berdasarkan mapping dari Biro Perencanaan adalah anggaran dengan MAK3165.QIA.002.053.A, 3165.QIA.002.053.YA, 3165.QIA.002.055.A dan 3165.QIA.002.055.YA. Anggaran yang sudah direalisasikan sampai dengan triwulan I 2026 ini sebesar Rp 28.782.503. Untuk realisasi anggaran pengadaan sampel melebihi RPD yang ditetapkan karena harga sampel yang ditemukan di lapangan lebih mahal dan adanya percepatan pembayaran pengadaan reagensia dan media mikro yang sudah selesai pelaksanaannya untuk memenuhi target serapan anggaran UPT sehingga realisasi melebihi target RPD yang ditetapkan dengan capaian anggaran 104,00%. Sementara untuk realisasi output kinerja, walaupun lebih besar dari target dengan capaian sebesar 101,27%, namun karena capaian output lebih kecil dari capaian input, tingkat efisiensinya -0,03 (Tidak Efisien).

Selain anggaran dari MAK 3165.QIA.002.053.A, 3165.QIA.002.053.YA, 3165.QIA.002.055.A dan 3165.QIA.002.055.YA, indikator Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan juga ditunjang oleh anggaran pengujian yaitu MAK 3165.PDD.001.052.A, 3165.PDD.001.052.B, 3165.PDD.001.052.C, 3165.PDD.001.052.D yang digunakan untuk pembelian suku cadang dan kolom, baku pembanding, reagensia dan media mikro, gas laboratorium dan pendukung pengujian serta MAK 3165.PDD.001.054.A, 3165.PDD.001.054.B dan 3165.PDD.001.054.F yang digunakan untuk kalibrasi peralatan laboratorium dan perbaikan alat laboratorium.

2) Upaya mencapai efisiensi penggunaan anggaran

Beberapa Upaya pencapaian target efisiensi ini antara lain :

1. Melakukan pengawalan dan evaluasi pencapaian output setiap bulannya untuk memastikan target tercapai minimal 100% dan mengupayakan pencapaian di atas target dengan anggaran yang ada.
2. Melakukan revisi anggaran sisa kegiatan yang sudah terlaksana untuk dioptimalisasikan kepada kegiatan yang lain sesuai dengan kebutuhan laboratorium untuk mencapai target kinerja ini.

3. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target diantaranya :

- Percepatan pengadaan pengujian seperti reagensia, baku pembanding, suku cadang dan pendukung pengujian untuk memenuhi kebutuhan di laboratorium.
- Melaksanakan kalibrasi peralatan laboratorium sesuai dengan program kalibrasi yang sudah ditetapkan.
- Jika terjadi kerusakan alat laboratorium, segera dilaporkan pada aplikasi "Pucak Ok" dan berkoordinasi dengan bagian Tata usaha supaya proses perbaikan alat bisa dilaksanakan segera sebelum timeline pengujian sampel.

g. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

1) Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2025 capaian target kinerja telah melebihi target yang ditetapkan, untuk memastikan pencapaian target di tahun 2026 dilakukan aktivitas penyesuaian diantaranya :

- a. Pengusulan penyesuaian jumlah sampel akibat adanya efisiensi anggaran perjalanan dinas.
- b. Pengusulan penyesuaian target IKU di tahun 2026 berdasarkan hasil capaian tahun 2025.

2) Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja

Informasi penggunaan anggaran pada tahun 2025 menunjukkan bahwa anggaran digunakan secara efisien dalam kegiatan ini. Pada awal tahun 2026 terdapat pemotongan anggaran sehingga dilakukan penyesuaian terhadap anggaran dan target yang akan diusulkan untuk tahun 2026 mengacu pada informasi anggaran tahun 2025.

3) Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja

Rekomendasi/rencana aksi yang dituangkan pada laporan kinerja tahun 2025 menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan. Beberapa hal yang harus ditindaklanjuti diantaranya yaitu :

- a. Meningkatkan koordinasi baik itu di lingkup region Pekanbaru, dengan direktorat pengawasan terkait, dan dengan tim sampling internal

- b. Meningkatkan ketepatan waktu pelaporan sampling, penandaan, dan pengujian.
 - c. Melakukan pengaturan jadwal untuk penggunaan alat laboratorium yang digunakan oleh semua laboratorium.
- 4) Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya
- Sebagai upaya untuk mencapai target yang telah ditetapkan, perlu dilakukan penyesuaian perencanaan kinerja agar tidak terjadi kesalahan yang berulang pada kegiatan ini diantaranya :
- a. Melakukan perencanaan dan monitoring sampling dengan lebih baik, terutama komoditi obat. Memastikan kesesuaian baik dari segi jumlah, kategori, maupun kelas terapi.
 - b. Melakukan perawatan alat dengan lebih baik, agar tidak terjadi hambatan pelaksanaan pengujian
 - c. Memastikan reagen, media mikro dan sarana pendukung pengujian tersedia untuk pelaksanaan pengujian sesuai target.

2. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO

Pelaporan KTD (Kejadian Tidak Diinginkan) merupakan pelaporan kejadian medis yang tidak diinginkan yang terjadi selama terapi menggunakan obat tetapi belum tentu disebabkan oleh obat tersebut. Sedangkan Pelaporan ESO (Efek Samping Obat) merupakan pelaporan mengenai respon terhadap suatu obat yang merugikan dan tidak diinginkan dan yang terjadi pada dosis yang biasanya digunakan pada manusia untuk pencegahan, diagnosis, atau terapi penyakit atau untuk modifikasi fungsi fisiologik. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan keamanan obat dan pemantauan keamanan obat di suatu negara. Pelaporan KTD/ESO merupakan indikator penting yang menunjukkan bagaimana pemantauan keamanan obat di suatu negara berjalan dengan baik.

Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO menjadi indikator untuk mengukur sejauh mana keterlibatan stakeholder dalam melaporkan KTD/ESO yang terjadi di masyarakat. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO diperoleh dari hasil perbandingan antara jumlah fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah Balai POM Pangkal Pinang yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM dibagi dengan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan

KIE Farmakovigilans oleh Balai POM Pangkal Pinang pada tahun berjalan, kemudian dikalikan 100%.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan I Tahun 2026

Tabel 3.7 Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO

Indikator	Kinerja			Kategori & Notifikasi Warna
	Target	Realisasi	%Capaian	
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	-	-		

Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO merupakan target tahunan yang capaiannya baru bisa diukur di akhir periode tahun 2026 sehingga belum bisa dievaluasi pencapaian targetnya pada Triwulan I.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2026

Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2026 Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Target Tahun 2026	Realisasi Triwulan I	% Capaian Terhadap Target Tahunan	Kategori
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	27,85			

Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO merupakan target tahunan yang capaiannya baru bisa diukur di akhir periode tahun 2026 sehingga tidak bisa dievaluasi perbandingan antara pencapaian targetnya pada Triwulan I dengan Target pada tahun 2026.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2026 dalam rangka mencapai target indikator Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO diantaranya melalui pelaksanaan KIE terkait Farmakovigilans kepada 45 fasilitas pelayanan kesehatan dengan rincian 14 Rumah Sakit dan 31 Puskesmas. Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid yaitu secara luring dan daring. Pelaksanaan KIE secara luring diikuti oleh 13 fasilitas pelayanan

kesehatan dan 32 fasilitas pelayanan kesehatan lainnya mengikuti kegiatan secara daring.

Pelaksanaan kegiatan secara hybrid merupakan salah satu strategi untuk menyiasati kebijakan efisiensi anggaran dengan tetap mengutamakan kualitas pembinaan. Pada tahun sebelumnya, pendekatan pembinaan secara daring terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman peserta KIE mengenai pentingnya pelaporan KTD/ESO. Selanjutnya pada tahun 2026, dilakukan pelaksanaan secara hybrid dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi aktif dan Interaksi yang lebih baik antara peserta KIE dengan narasumber yang merupakan praktisi yang telah berhasil menerapkan sistem pelaporan KTD/ESO di fasilitas pelayanan kesehatannya. Metode baru ini diharapkan dapat berdampak langsung pada peningkatan capaian indikator.

d. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam rangka mencapai target Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO antara lain :

1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang telah menerima KIE Farmakovigilans. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan tersebut memahami kewajiban pelaporan dan segera melakukan pelaporan apabila terjadi Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) atau Efek Samping Obat (ESO) di sarannya.
2. Meningkatkan intensitas koordinasi, komunikasi dan pendampingan kepada tenaga kesehatan melalui media daring maupun luring guna memperkuat komitmen dan keterlibatan aktif dalam sistem pelaporan farmakovigilans.
3. Melakukan evaluasi dan umpan balik berkala kepada sarana terhadap laporan yang telah masuk, sebagai bagian dari pembinaan berkelanjutan dan peningkatan mutu pelaporan dari masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan pencapaian target indikator pelaporan Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) atau Efek Samping Obat (ESO) hingga Triwulan I Tahun 2026 didukung oleh pelaksanaan sejumlah program strategis yang saling terintegrasi dan saling memperkuat. Salah satu program utama adalah kegiatan KIE farmakovigilans yang ditujukan kepada fasilitas pelayanan kesehatan. Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid (luring dan daring) memungkinkan jangkauan pembinaan yang lebih luas tanpa terkendala oleh batasan wilayah maupun keterbatasan anggaran. Pelaksanaan hybrid dinilai efektif karena tetap mampu menjaga kualitas materi dan mengoptimalkan efisiensi anggaran pada pelaksanaan daring serta meningkatkan partisipasi aktif dan Interaksi yang lebih baik antara peserta KIE dengan narasumber pada pelaksanaan luring.

Selain KIE Farmakovigilans, dilakukan pula kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap sarana yang telah dibina. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kesinambungan pemahaman dan peningkatan komitmen dari tenaga kesehatan dalam melaksanakan pelaporan KTD/ESO. Evaluasi dilakukan tidak hanya terhadap aspek teknis pelaporan, tetapi juga terhadap hambatan yang dihadapi tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan, sehingga dapat diberikan tindak lanjut atau solusi yang tepat atas kendala yang terjadi.

Dukungan sistem pelaporan elektronik yang memadai turut menjadi pilar dalam menunjang pelaksanaan program ini. Aplikasi berbasis web seperti <https://e-meso.pom.go.id> serta platform mobile E-Meso Mobile, memberikan kemudahan bagi tenaga kesehatan dalam menyampaikan laporan secara real-time. Dengan sinergi antara peningkatan kapasitas SDM, penguatan pemantauan lapangan, serta pemanfaatan teknologi informasi, program ini diharapkan mampu mempercepat pencapaian target pelaporan KTD/ESO.

Tabel 3.9 Matriks Rekomendasi Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Januari	-	1. Menetapkan 45 Sarana target KIE Farmakovigilans 2. Mempersiapkan pelaksanaan KIE Farmakovigilans	1. Membuat Nota Dinas Rencana Pelaksanaan KIE Farmakovigilans yang memuat target yang telah ditetapkan 2. Membuat Undangan Narasumber dan Undangan bagi Tenaga Kesehatan / Tenaga Medis yang akan menjadi PIC pelaporan e-meso di sarana nya	Februari 2026	T	-	-
Februari	Setelah pelaksanaan KIE Farmakovigilans, masih terdapat Tenaga Kesehatan / Tenaga Medis yang belum melakukan pendaftaran akun e-meso sarannya	1. Membantu pembuatan akun e-meso sarana yang belum melakukan pendaftaran 2. Membatasi jumlah akun yang difasilitasi pembuatannya sebagai strategi untuk mencapai IKU yang diharapkan	1. Melakukan pendataan sarana yang belum melakukan pendaftaran akun e-meso 2. Memfasilitasi pendaftaran akun e-meso via online (Whatsapp)	Maret 2026	Y	O-03	Pelaporan KTD / ESO tidak dilakukan oleh Sarana Pelayanan Kesehatan
Maret	Sarana lupa mengenai teknis pelaporan menggunakan website e-meso	1. Identifikasi sarana PKM dan RS yang berpotensi dapat melaporkan KTD/ESO pada bulan April 2. Menginformasikan kembali mengenai link akses materi dan buku panduan teknis pelaporan KTD/ESO	Melakukan follow up melalui whatsapp / saat turun pemeriksaan sarana terkait kendala yang mungkin dialami PKM dan RS yang berpotensi dapat melaporkan KTD/ESO pada bulan April	April 2026	Y	O-03	Pelaporan KTD / ESO tidak dilakukan oleh Sarana Pelayanan Kesehatan

f. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3.10 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO

Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian
	T	R	%	Target (RPD TW I)	Realisasi	%			
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	-	-	-	5.983.000	3.639.000	60,82	-	-	-

1) Efisiensi penggunaan anggaran

Efisiensi anggaran pada triwulan I tahun 2026 belum dapat dihitung karena capaian indikator output belum tersedia.

2) Upaya mencapai efisiensi penggunaan anggaran

Melaksanakan kegiatan dalam rangka menunjang capaian indikator meskipun terdapat efisiensi anggaran pada indikator ini yang disiasati dengan melakukan kegiatan KIE secara hybrid sehingga lebih efektif dalam penggunaan anggaran.

g. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

i) Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja

Penyesuaian kegiatan dalam mencapai target kinerja yang dilakukan pada triwulan I yaitu dengan melaksanakan kegiatan secara hybrid (luring dan daring) yang memungkinkan jangkauan pembinaan yang lebih luas tanpa terkendala oleh batasan wilayah dengan tetap mengutamakan kualitas pembinaan.

ii) Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja

Dalam rangka pencapaian target kinerja peningkatan persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO, telah dilakukan penyesuaian anggaran kegiatan melalui mekanisme revisi anggaran guna mendukung pelaksanaan KIE Farmakovigilans dan monitoring pelaporan KTD/ESO oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Penyesuaian ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran seefektif mungkin, sehingga target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal.

iii) Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja

Berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja yang telah dicapai pada tahun 2025, hal-hal yang dapat dilakukan untuk pencapaian target:

- Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang telah menerima KIE Farmakovigilans
- Meningkatkan intensitas koordinasi, komunikasi dan pendampingan kepada tenaga kesehatan melalui media daring maupun luring
- Melakukan evaluasi dan umpan balik berkala kepada sarana terhadap laporan yang telah masuk, sebagai bagian dari pembinaan berkelanjutan dan peningkatan mutu pelaporan.

iv) Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya.

Penyesuaian yang dapat dilakukan untuk periode berikutnya antara lain:

- Melanjutkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang telah menerima KIE Farmakovigilans
- Mengusulkan revisi rencana penarikan dana agar kegiatan pelaporan KTD/ESO oleh sarana pelayanan kesehatan dapat berjalan sesuai dengan target kinerja kegiatan.

3. Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan I Tahun 2026

Tabel 3.11 Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator	Kinerja			Kategori & Notifikasi Warna
	Target	Realisasi	%Capaian	
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98,9	100,00	101,11%	Sangat Baik

Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, dikecualikan pangan industri rumah tangga. Sampel Pangan Olahan Berisiko adalah sampel yang dipilih berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai Pedoman Sampling. Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya. Diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling adalah pengambilan sampel dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling yang meliputi kesesuaian target sampel UPT, kesesuaian parameter uji, ketepatan pengambilan kesimpulan, ketepatan waktu pengambilan sampel dan ketepatan pelaporan sampling dan pengujian.

Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut pengawasan atau ketentuan lainnya yang dapat dilakukan antara lain :

1. Tindak Lanjut terhadap produk TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan TMS Pengujian
2. Pembinaan terhadap Sarana Distribusi dan/atau Sarana Produksi
3. Pemeriksaan Sarana Produksi dan/atau Sarana Distribusi terhadap implementasi CPPOB/ CPerPOB terkait dengan hasil sampling dan pengujian produk TMS

4. Koordinasi pusat dan lintas UPT terkait penyampaian hasil uji produk TMS

Tindak lanjut terhadap sampel TIE/ rusak/ kedaluwarsa termasuk dalam bentuk persuasi kepada pelaku usaha untuk melakukan pemusnahan secara sukarela terhadap produk, serta upaya lain untuk memastikan produk tidak beredar.

Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = $20\%A + 20\%B + 20\%C + 10\%D + 10\%E + 20\%F$

Keterangan:

- A. Kesesuaian Target Sampel
- B. Kesesuaian Parameter Uji
- C. Ketepatan Pengambilan Kesimpulan
- D. Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel
- E. Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian
- F. Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya

Realisasi Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan I adalah 100%. Realisasi ini diperoleh dari pemeriksaan dan pengujian terhadap 30 sampel pangan olahan berisiko. Dari enam kriteria penilaian semuanya mencapai nilai optimal. Target yang ditetapkan pada TW I adalah 98,90%, sehingga capaian yang diperoleh adalah 101,11%. Target pada TW I berbeda dengan target awal penyusunan Renstra tahun 2025–2029. Terjadi kenaikan target dari 91% menjadi 98,90%. Perubahan target dilaksanakan setelah adanya pembahasan dengan ke deputian 3 terkait target dan perbandingan realisasi sampai dengan tahun 2025. Perubahan target ini dilakukan karena untuk menyesuaikan realisasi dengan target awal yang telah ditetapkan. Target awal ditetapkan lebih rendah karena indikator ini merupakan indikator baru sehingga pada saat penyusunan target belum ada kertas kerja yang dapat menggambarkan capaian dari tahun sebelumnya. Target yang ditetapkan pada awal tahun adalah 91% karena belum ada nilai *baseline* untuk indikator ini sehingga belum memperhatikan pengendalian terhadap faktor-faktor yang berpengaruh terhadap target. Dengan adanya peningkatan target diharapkan realisasi dan capaian untuk indikator ini tidak melebihi 110%. Pada TW I, capaian yang diperoleh 101,11 dengan realisasi 100%. Nilai ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan mampu dicapai oleh BPOM di Pangkal Pinang. Hasil capaian ini menyebabkan BPOM di Pangkal Pinang masuk dalam kriteria “Sangat Baik”.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2026

Tabel 3.12 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2026 Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Target Tahun 2026	Realisasi Triwulan I	% Capaian Terhadap Target Tahunan	Kategori
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98,90	100,00	101,11 	Tercapai/Melampaui

Pada Triwulan I terjadi perubahan target bulanan, triwulan dan tahunan. Target awal yang ditetapkan adalah 91% dan untuk saat ini target dinaikkan menjadi 98,90%. Target yang ditetapkan untuk Tahun 2026 adalah 98,90% sama dengan target triwulan karena sifatnya flat. Realisasi Triwulan I telah mencapai target tirulan dan tahunan yaitu 100% dengan kategori "Tercapai/Melampaui". Dari enam komponen penilaian yang ditetapkan, semua komponen mencapai nilai maksimal.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Keberhasilan BPOM di Pangkal Pinang dalam mencapai target persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan didukung oleh adanya koordinasi yang baik antara fungsi pemeriksaan dan pengujian dalam melaksanakan sampling dan pengujian produk olahan pangan berisiko. Sampling dan pengujian dilaksanakan sesuai dengan rencana pelaksanaan yang telah disusun bersama. Efisiensi dan pemotongan anggaran pada Triwulan I cukup memberikan tantangan terhadap pelaksanaan sampling dan pengujian sehingga dilakukan penyesuaian dalam perencanaan tanpa mengubah persentase target yang telah ditetapkan. Efisiensi anggaran menuntut BPOM di Pangkal Pinang untuk melakukan penyusunan ulang rencana sampling dan pengujian menyesuaikan dengan ketersediaan reagen, media dan pendukung pengujian yang ada di laboratorium. Dengan melakukan penyusunan ulang dan pemanfaatan terhadap sumber daya yang dimiliki maka pada Triwulan I target yang ditetapkan dapat tercapai meskipun terjadi kenaikan target. Selain itu BPOM di Pangkal Pinang juga secara aktif berkoordinasi dengan laboratorium penguji di regional Pekanbaru untuk memastikan sampel diuji dan dilaporkan tepat waktu.

d. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

BPOM di Pangkal Pinang melaksanakan beberapa upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja terkait persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang telah dicapai. Beberapa upaya tersebut antara lain :

1. Meningkatkan koordinasi antara fungsi pemeriksaan dan pengujian dalam rangka pelaksanaan sampling dan pengujian produk pangan olahan berisiko yang menjadi target kinerja setiap akhir bulan. Hal ini dilakukan untuk memastikan kategori sampel yang diperiksa dan yang masuk ke laboratorium sesuai dengan rencana dan Pedoman Sampling.
2. Meningkatkan koordinasi dengan balai di lingkup regional Pekanbaru untuk memastikan bahwa sampel regional yang dikirimkan dapat diuji dengan baik dan sesuai ketentuan.
3. Mengidentifikasi kebutuhan reagensia, media mikrobiologi, baku pembanding dan pendukung pengujian lainnya untuk memastikan bahwa pengujian sampel pangan olahan berisiko dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Mengajukan penambahan alat gelas dan cawan sekali pakai untuk mengatasi kekurangan alat gelas di laboratorium mikrobiologi.
4. Melakukan penyesuaian terhadap target sesuai dengan kesepakatan baru yang ditetapkan oleh pengampu.
5. Melakukan pemeliharaan, kalibrasi dan verifikasi peralatan laboratorium sesuai dengan ketentuan untuk menjaga kondisi peralatan yang dimiliki siap untuk melakukan pengujian.

Tabel 3.13 Matriks Rekomendasi Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Januari	Telah dilaksanakan rapat pembahasan sampling dan pengujian pangan olahan pada tanggal 20 Januari 2026. Telah dilakukan pembahasan terkait kendala yang dihadapi di tahun 2025. Telah dibuat perencanaan bulanan pelaksanaan sampling komoditi pangan olahan sesuai target RO awal.	1. Bersurat ke unit pengampu teknis terkait usulan pergeseran breakdown komoditi 2. Memberikan perhatian khusus bagi sampel-sampel yang mudah rusak dan berkoordinasi dengan jasa pengiriman (PT. POS Indonesia) terkait tata cara	1. Mengirim nota dinas ke unit pengampu teknis terkait usulan pergeseran breakdown komoditi 2. Memberikan packing khusus bagi sampel-sampel yang mudah rusak dan memberikan penjelasan yang lebih detail kepada jasa pengiriman (PT. POS	Februari	Ya	O-04	1. Sampel Pangan Olahan yang di sampling tidak sesuai dengan pedoman sampling

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	Pada Bulan Januari telah dilakukan sampling terhadap komoditi pangan olahan sebanyak 12 sampel. Adanya Nota Dinas dari Sekretaris utama Nomor : PR.04.02.2.01.26.05 tanggal 5 Januari 2026 perihal pergeseran breakdown komoditi dan sarana yang menjadi target Rincian Output, menyebabkan perlunya penyesuaian anggaran yang tersedia Kendala : Adanya kerusakan sampel AMDK galon (1 dari 12 sampel) pada saat dilakukan pengiriman ke BBPOM Palembang dikarenakan cuaca buruk saat pengiriman (via pos) Realisasi : - Sampai dengan bulan Januari jumlah sampel yang masuk laboratorium dan dilakukan pengujian adalah 12 sampel dari target renlak sampling dan pengujian 12 sampel - Telah dilakukan rapat target sampling dan pengujian bersama antara pengujian dan pemeriksaan - Perencanaan kebutuhan laboratorium telah dilakukan dan dalam proses pengadaan Kendala : Belum ditemukan kendala pengujian sampel pada bulan Januari Capaian terhadap target : Capaian dihitung mulai B02 Upaya yang telah dilakukan : Melakukan komunikasi dengan balai penguji di regional Pekanbaru tentang sampel yang dikirimkan	pengiriman sampel yang mudah rusak 1. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan tim kerja pemeriksaan dan balai penguji di regional Pekanbaru 2. Melakukan identifikasi kebutuhan pengujian	Indonesia) untuk dapat lebih hati-hati dalam menangani pengiriman sampel-sampel yang mudah rusak 1. Penyusunan renlak pengujian regionalisasi 2. Penyusunan kebutuhan pengujian untuk segera dilakukan pengadaan	Februari	Ya	O-05 O-53 O-06 O-54 O-55 O-70 SDM-17 K3-04	1. Kondisi sampel frozen dari loka yang diserahkan ke pihak Laboratorium dalam kondisi rusak/kurang baik 2. Terjadi ketidaksesuaian sampel balai (kategori pangan, laboratorium tujuan kimia mikro) yang masuk laboratorium dengan perencanaan sampling yang disampaikan 3. Terjadi ketidaksesuaian sampel loka (kategori pangan, laboratorium tujuan kimia mikro) yang masuk laboratorium dengan

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
							perencanaan sampling yang disampaikan 4. Terjadi kesalahan dalam pengujian dan perhitungan hasil uji 5. Pemenuhan parameter uji tidak lengkap 6. Pengujian sampel rutin pangan melewati timeline yang telah ditetapkan 7. Kesalahan dalam melakukan pengujian sampel 8. Terjadinya kecelakaan kerja dalam pelaksanaan pengujian sampel obat dan makanan di laboratorium
Februari	Pada Bulan februari telah dilakukan sampling terhadap komoditi pangan olahan sebanyak 17 sampel. Pelaksanaan sampling mengacu pada perencanaan sampling awal (sebelum adanya revisi target rincian output) Tidak terdapat kendala dalam pelaksanaan sampling komoditi pangan olahan bulan februari Realisasi : - Sampai dengan bulan Januari jumlah sampel yang masuk laboratorium dan dilakukan pengujian adalah 29 sampel dari target renlak sampling dan pengujian 29 sampel - Perencanaan kebutuhan laboratorium telah dilakukan dan dalam proses pengadaan Kendala :	1. Melakukan pemeriksaan kembali kesesuaian kategori / jenis sampel pangan olahan dengan membandingkannya pada database pendaftaran (Contoh : sampel pangan olahan MD dicek kembali pada https://ereg-rba.pom.go.id/) 1. Segera melakukan perbaikan ICP MS 2. Melakukan pelatihan terkait pemeliharaan ICP MS termasuk pembersihan vakum untuk menghemat biaya perbaikan yang memakan biaya cukup mahal	Mengingatkan kembali kepada PJ sampling untuk Melakukan pemeriksaan kembali kesesuaian kategori / jenis sampel pangan olahan dengan membandingkannya pada database pendaftaran saat pelaksanaan sampling 1. Akan dilakukan perbaikan di awal Maret 2026	Maret Maret	Ya Ya	O-04 O-05 O-53 O-06 O-54 O-55 O-70 SDM-17 K3-04	1. Sampel Pangan Olahan yang di sampling tidak sesuai dengan pedoman sampling 1. Kondisi sampel frozen dari loka yang diserahkan ke pihak Laboratorium dalam kondisi rusak/kurang baik 2. Terjadi ketidaksesuaian sampel balai (kategori pangan,

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	Terdapat kerusakan ICP MS (kotor di bagian vakum) sehingga pengujian dihentikan sementara (clock off) karena AAS juga mengalami kerusakan Rencana perbaikan awal Maret 2026 Capaian terhadap target : Capaian dihitung dengan target revisi yang diajukan adalah 101,11% Upaya yang telah dilakukan : Melakukan komunikasi dengan teknisi alat untuk dilakukan perbaikan ICP MS segera						laboratorium tujuan kimia mikro) yang masuk laboratorium dengan perencanaan sampling yang disampaikan 3. Terjadi ketidaksesuaian sampel loka (kategori pangan, laboratorium tujuan kimia mikro) yang masuk laboratorium dengan perencanaan sampling yang disampaikan 4. Terjadi kesalahan dalam pengujian dan perhitungan hasil uji 5. Pemenuhan parameter uji tidak lengkap 6. Pengujian sampel rutin pangan melewati timeline yang telah ditetapkan 7. Kesalahan dalam melakukan pengujian sampel 8. Terjadinya kecelakaan kerja dalam pelaksanaan pengujian sampel obat dan makanan di laboratorium
Maret	Terdapat 1 sampel kasus pangan olahan bulan Maret 2026 berupa Mie Basah dari hasil pengawasan pemeriksaan Takjil di Kab. Bangka Tengah. Capaian sampel pangan olahan sampai dengan maret sebanyak 30 sampel	-	-	-	Ya	O-04	1. Sampel Pangan Olahan yang di sampling tidak sesuai dengan pedoman sampling

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	Tidak terdapat kendala dalam pelaksanaan sampling komoditi pangan olahan bulan Maret Realisasi : - Sampai dengan bulan Maret jumlah sampel yang masuk laboratorium dan dilakukan pengujian adalah 30 sampel dari target renlak sampling dan pengujian 29 sampel - Terdapat 1 sampel yang tidak sesuai dengan renlak - Telah terbit Kepka BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian serta Kepka BPOM tentang Regionalisasi Laboratorium yang berlaku mulai bulan Maret 2026 untuk sampel pangan Kendala : Pada bulan Maret tidak terdapat kendala yang mengganggu proses pengujian di laboratorium kimia pangan dan mikrobiologi Capaian terhadap target : Capaian dihitung dengan target revisi yang diajukan adalah 101,46% Upaya yang telah dilakukan : Telah dilakukan perbaikan ICP pada awal Maret sehingga seluruh sampel telah selesai dilakukan pengujian dan dilaporkan	1. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan tim kerja pemeriksaan dan balai penguji di regional Pekanbaru terkait renlak yang telah disusun 2. Melakukan pengaturan waktu pengujian agar dapat menyelesaikan temuan KAN dengan segera 3. Melakukan penyesuaian terhadap Kepka BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian serta kepka BPOM tentang Regionalisasi Laboratorium	1. Meningkatkan komunikasi dengan penanggung jawab sampling agar renlak dapat terlaksana 2. Membuat skala prioritas untuk melakukan pengujian dan verifikasi metode dalam rangka menyelesaikan temuan KAN 3. Melakukan perubahan terkait perhitungan timeline pengujian mulai bulan Maret 2026	April	Ya	O-05 O-53 O-06 O-54 O-55 O-70 SDM-17 K3-04	1. Kondisi sampel frozen dari loka yang diserahkan ke pihak Laboratorium dalam kondisi rusak/kurang baik 2. Terjadi ketidaksesuaian sampel balai (kategori pangan, laboratorium tujuan kimia mikro) yang masuk laboratorium dengan perencanaan sampling yang disampaikan 3. Terjadi ketidaksesuaian sampel loka (kategori pangan, laboratorium tujuan kimia mikro) yang masuk laboratorium dengan perencanaan sampling yang disampaikan 4. Terjadi kesalahan dalam pengujian dan perhitungan hasil uji 5. Pemenuhan parameter uji tidak lengkap 6. Pengujian sampel rutin pangan melewati timeline yang telah ditetapkan 7. Kesalahan dalam melakukan

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
							pengujian sampel 8. Terjadinya kecelakaan kerja dalam pelaksanaan pengujian sampel obat dan makanan di laboratorium

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Capaian untuk persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan I telah mencapai target yang ditetapkan. Beberapa hal yang menunjang pencapaian target antara lain :

1. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap bulan terhadap realisasi dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan sampling dan pengujian pangan olahan berisiko sehingga permasalahan yang ada dapat segera diidentifikasi dan dicari solusinya. Kegiatan ini didukung oleh adanya inovasi Madu Pelawan.
2. Telah dilakukan upaya pengisian data dan pelaporan yang *real time* melalui SIPT dan aplikasi Madu Pelawan sehingga data yang disampaikan masing-masing fungsi lebih valid dan akurat.
3. Laboratorium Kimia Pangan dan Mikrobiologi memiliki sarana penyimpanan rekapitulasi data sampel dan pengujian yang masuk dan diuji oleh laboratorium dalam bentuk *google drive* sehingga memudahkan analis, penyelia dan ketua tim dalam melakukan pemantauan sampel.
4. Pelaporan Catatan Pengujian sampai dengan Laporan Hasil Uji di laboratorium dilakukan dengan pendekatan digitalisasi laboratorium untuk mempercepat proses dan menghemat kebutuhan ATK.

f. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3.14 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian
	T	R	%	Target (RPD TW I)	Realisasi	%			
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98,9	100,00	101,11	10.548.128	12.235.529	116,00	0,87	-0,13	Tidak Efisien

1) Efisiensi penggunaan anggaran

Tingkat efisiensi penggunaan anggaran pada indikator persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti mendapatkan penilaian tidak efisien karena realisasi penggunaan anggaran lebih besar dibandingkan realisasi dari output kinerja. Anggaran KRO QIA.001 yang direncanakan di Triwulan I telah direalisasikan dalam pengawasan makanan aman dan bermutu salah satunya terhadap sampel pangan olahan berisiko. Capaian efisiensi ini merupakan indikator yang tidak bisa dikendalikan secara internal sehingga besarnya anggaran yang digunakan hanya merupakan faktor pendukung, bukan penentu tercapai atau tidaknya target IKU. Adanya efisiensi anggaran pada Triwulan I juga mempengaruhi terhadap perencanaan dan realisasi pada Triwulan I sehingga dilakukan beberapa penyesuaian. Rencana sampling dan pengujian pangan olahan berisiko pada Triwulan I mengalami revisi karena adanya kebijakan pemotongan anggaran, sehingga sampling dan pengujian dilakukan sesuai kondisi tersebut.

2) Upaya mencapai efisiensi penggunaan anggaran

Penggunaan anggaran belum efisien untuk mendukung indikator persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti. Efisiensi dapat dicapai dengan melakukan perencanaan penggunaan anggaran secara akurat dan sesuai dengan pelaksanaan kegiatan sampling dan pengujian pangan olahan berisiko yang telah disusun. Monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan anggaran telah dilakukan secara berkala setiap bulan sehingga apabila terdapat kendala dan perubahan dapat diidentifikasi dan dikelola lebih awal untuk menjaga efisiensi anggaran. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan revisi anggaran untuk pembelian sampel dan reagen serta media.

g. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

1) Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja

Berdasarkan informasi kinerja dalam Laporan Kinerja tahun 2025 terlihat bahwa realisasi dan capaian yang diperoleh telah melebihi target yang ditetapkan, bahkan melebihi target akhir Renstra. Data dan informasi pada tahun 2025 dijadikan sebagai *baseline* perhitungan target untuk tahun 2026 dan seterusnya. Perhitungan dengan menggunakan *baseline* baru ini kemudian diusulkan untuk dilakukan revisi terhadap target dan penyesuaian target kegiatan.

2) Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja

Informasi penggunaan anggaran pada tahun 2025 menunjukkan bahwa anggaran digunakan secara efisien dalam kegiatan ini. Pada awal tahun 2026 terdapat pemotongan anggaran sehingga dilakukan penyesuaian terhadap anggaran dan target yang akan diusulkan untuk tahun 2026 mengacu pada informasi anggaran tahun 2025.

3) Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja

Rekomendasi yang tertuang pada Laporan Kinerja tahun 2025 digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun 2026 dalam rangka mempertahankan realisasi. Rekomendasi dan tindak lanjut pada tahun 2025 tetap dilaksanakan di tahun 2026 sehingga menjaga realisasi menjadi 100%.

4) Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya.

BPOM di Pangkal Pinang akan melaksanakan beberapa aktivitas yang menjadi rekomendasi pada tahun 2025 untuk menjaga capaian target indikator ini. Untuk mencegah terjadinya kesalahan kategori sampel, perlu dilakukan penyamaan persepsi melalui koordinasi teknis sebelum dan setelah sampling, serta perencanaan sampling dengan kategori yang jelas. Koordinasi antara tim sampling dan laboratorium juga perlu ditingkatkan untuk memastikan kesesuaian parameter uji. Keterbatasan alat gelas di laboratorium mikrobiologi akan ditindaklanjuti dengan mengajukan penambahan alat gelas dan cawan sekali pakai. Pengembangan kompetensi analis laboratorium juga akan dilakukan untuk meningkatkan kompetensi

analisis dan menghindari terjadinya kesalahan pengambilan kesimpulan. Perlu dilakukan review terhadap target yang ditetapkan untuk tahun 2026 karena realisasi yang diperoleh di tahun 2025 telah melebihi target tahun 2026.

4. Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan I Tahun 2026

Tabel 3.15 Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar

Indikator	Kinerja			Kategori & Notifikasi Warna
	Target	Realisasi	%Capaian	
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100,00%	Baik

Sampel KLB Keracunan Pangan adalah sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB keracunan pangan berdasarkan hasil investigasi atau diduga sebagai penyebab dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut diidentifikasi sebagai sumber keracunan. Sampel dapat berupa pangan olahan dalam kemasan atau pangan olahan siap saji yang diuji oleh laboratorium BPOM dengan sampel berasal dari internal BPOM dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L).

Sesuai standar adalah kesesuaian parameter pengujian sesuai dengan hasil penelusuran dugaan KLB KP berupa kesesuaian dengan gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan, atau sesuai dengan parameter permintaan uji Dinas Kesehatan. Lebih lanjut untuk PODK juga memperhatikan kesesuaian dengan standar dalam regulasi terkait pangan dimaksud dan parameter dalam Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan BPOM. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\frac{\sum (30\% \times A1, A2, \dots, An) + (35\% \times B1, B2, \dots, Bn) + (35\% \times C1, C2, \dots, Cn)}{n}$$

A = jumlah parameter sampel yang diuji sesuai dengan hasil investigasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi x 100%

$B = \text{Jumlah parameter yang diuji sesuai dengan pedoman sampling/ total parameter uji dalam pedoman sampling} \times 100\%$

$C = \text{Jumlah parameter yang terkonfirmasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi terkonfirmasi} \times 100\%$

$n = \text{total sampel}$

Terdapat perubahan mengenai manual indikator dan perhitungan pada persentase sampel KLB Keracunan Pangan yang diuji sesuai standar. Realisasi indikator persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar pada Triwulan I adalah 100%. Target dari indikator ini adalah 100%, artinya apabila ada sampel keracunan pangan atau KLB yang masuk ke laboratorium maka harus diuji secara lengkap berdasarkan juknis keracunan pangan. Realisasi dan capaian sebesar 100% diperoleh dari pengujian sampel kasus keracunan pangan sebanyak dua sampel. Dengan hasil ini capaian BPOM di Pangkal Pinang masuk dalam kategori **Baik**.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2026

Tabel 3.16 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2026 Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Target Tahun 2026	Realisasi Triwulan I	% Capaian Terhadap Target Tahunan	Kategori
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00	100,00	100,00 	Tercapai/ Melampaui

Target yang ditetapkan untuk Tahun 2026 dengan Triwulan I adalah sama yaitu 100%. Realisasi saat ini pada Triwulan I adalah 100% sesuai target akumulatif yang ditentukan. Hal ini menyebabkan BPOM di Pangkal Pinang dianggap telah mampu mencapai target yang ditetapkan. Realisasi ini harus dipertahankan sampai dengan akhir tahun agar target tahunan dapat tercapai.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Realisasi dari persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar sesuai dengan target. Hasil ini diperoleh dari pengujian sampel keracunan pangan yang terjadi dari program MBG pada triwulan I sebanyak dua sampel.

Indikator ini tidak dapat dikendalikan secara penuh oleh BPOM di Pangkal Pinang sehingga diperlukan koordinasi dengan dinas terkait. Selain itu di wilayah pengawasan BPOM di Pangkal Pinang program MBG baru mulai dilaksanakan pada TW III tahun 2025 sehingga pelaksanaannya belum optimal. Realisasi pada triwulan I tahun 2026 lebih baik dibandingkan tahun 2025 yang tidak terdapat realisasi. Keberhasilan capaian indikator ini dipengaruhi oleh upaya koordinasi dan identifikasi kebutuhan pengujian sampel KLB yang dilakukan di internal BPOM di Pangkal Pinang yang telah dilakukan sejak tahun 2025.

d. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Capaian terhadap target yang sudah sesuai mengharuskan BPOM di Pangkal Pinang harus menjaga capaian tersebut sampai dengan akhir tahun. BPOM di Pangkal Pinang melakukan beberapa upaya perbaikan dan peningkatan untuk menjaga capaian tersebut. Upaya tersebut antara lain adalah dengan melakukan koordinasi dengan dinas terkait mengenai penanganan sampel KLB di Kepulauan Bangka Belitung. BPOM di Pangkal Pinang juga akan menyiapkan reagen, media mikrobiologi, baku pembanding dan kebutuhan pengujian lainnya untuk memastikan seluruh standar pengujian sampel KLB dapat dipenuhi. BPOM di Pangkal Pinang juga melaksanakan pemberian informasi kepada masyarakat melalui berbagai media tentang keamanan pangan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pangan olahan yang aman dan bermutu. BPOM di Pangkal Pinang telah memiliki Tim Gerak Cepat Penanganan KLB Keracunan Pangan tingkat internal dan akan terus melakukan komunikasi agar dapat masuk ke dalam Tim Gerak Cepat Kabupaten/Kota.

Tabel 3.17 Matriks Rekomendasi Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Januari	Tidak terjadi kasus keracunan pangan pada bulan Januari Realisasi :	- Menyusun kebutuhan reagen dan media untuk pengujian	-	- Februari	- Ya	- S-03 O-09	- 1. Tidak terdapat Penetapan

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	Tidak terjadi kasus KLB/Keracunan Pangan pada bulan Januari Kendala : belum ditemukan kendala dalam pengujian sampel KLB keracunan pangan Capaian terhadap target : 1. Belum dapat dilakukan perhitungan capaian karena belum ada realisasi terhadap IKU ini 2. Belum terdapat sampel KLB keracunan pangan Upaya yang telah dilakukan : Melakukan pengecekan dan menyiapkan reagen serta media yang diperlukan untuk parameter uji yang berhubungan dengan sampel keracunan pangan	sampel KLB keracunan pangan	Penyusunan kebutuhan pengujian untuk segera dilakukan pengadaan			F-03 O-64 O-71	terkait Status Kejadian Luar Biasa (KLB) dari Dinas Kesehatan setempat 2. Sampel KLB tidak diuji sesuai dengan standar 3. Analis menerima gratifikasi 4. Sampel KLB keracunan pangan tidak diuji sesuai dengan tools penilaian RHPK 5. Agen penyebab KLB tidak dapat dikonfirmasi
Februari	Tidak terjadi kasus keracunan pangan pada bulan Februari Realisasi : Tidak terjadi kasus KLB/Keracunan Pangan pada bulan Februari Kendala : belum ditemukan kendala dalam pengujian sampel KLB keracunan pangan Capaian terhadap target : 1. Belum dapat dilakukan perhitungan capaian karena belum ada realisasi terhadap IKU ini 2. Belum terdapat sampel KLB keracunan pangan Upaya yang telah dilakukan : Melakukan pengecekan dan menyiapkan reagen serta media yang diperlukan untuk parameter uji yang berhubungan dengan sampel keracunan pangan	-	-	-	-	-	-
	Tidak terjadi kasus keracunan pangan pada bulan Februari Kendala : belum ditemukan kendala dalam pengujian sampel KLB keracunan pangan Capaian terhadap target : 1. Belum dapat dilakukan perhitungan capaian karena belum ada realisasi terhadap IKU ini 2. Belum terdapat sampel KLB keracunan pangan Upaya yang telah dilakukan : Melakukan pengecekan dan menyiapkan reagen serta media yang diperlukan untuk parameter uji yang berhubungan dengan sampel keracunan pangan	Menyusun kebutuhan reagen dan media untuk pengujian sampel KLB keracunan pangan	Penyusunan kebutuhan pengujian untuk segera dilakukan pengadaan	Maret	Ya	S-03 O-09 F-03 O-64 O-71	1. Tidak terdapat Penetapan terkait Status Kejadian Luar Biasa (KLB) dari Dinas Kesehatan setempat 2. Sampel KLB tidak diuji sesuai dengan standar 3. Analis menerima gratifikasi 4. Sampel KLB keracunan pangan tidak diuji sesuai dengan tools penilaian RHPK 5. Agen penyebab KLB tidak dapat dikonfirmasi
Maret	Terdapat 1 kasus keracunan pangan yang terdiri dari 2 sampel burger yang berasal dari MBG di Kabupaten Bangka Kendala: Informasi yang diperoleh terkait kejadian keracunan pangan terbatas	Meningkatkan koordinasi antar fungsi dalam penanganan keracunan pangan dengan mengusulkan pembentukan TGC dengan melibatkan seluruh fungsi yang terkait	Sarana SPPG yang menyediakan MBG akan dijadikan prioritas target pemeriksaan jika sarana kembali beroperasi	April	-	-	-

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	dikarenakan sampel disampaikan langsung oleh pihak eksternal Realisasi : Terdapat 1 kejadian keracunan pangan (tidak ada penetapan KLB) di SMK N 1 Sungaliat yang berasal dari menu MBG (SPPG Imam Bonjol) Jumlah sampel diterima lab : 2 sampel burger Parameter uji terkonfirmasi : AKK dan Salmonella Kendala : Tidak terdapat laporan/dokumen kronologi kejadian dan koordinasi yang baik antar pihak terkait. Informasi dan sampel yang diterima terbatas sehingga laboratorium mengalami kendala dalam menentukan parameter uji, sedangkan permintaan parameter uji yang disampaikan Puskesmas tidak memiliki dasar epidemiologi yang jelas Capaian terhadap target : Capaian dihitung dengan target bulanan dan tahunan adalah 100,00% Upaya yang telah dilakukan : Melakukan wawancara dan penggalan informasi kronologi kejadian keracunan pangan kepada petugas Puskesmas yang mengantarkan sampel	1. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait 2. Melakukan pelaporan pada SPIMKER KLB KP 3. Usulan untuk pembentukan TGC KLB KP	1. Koordinasi dengan dinas kesehatan kabupaten/kota 2. Input data keracunan pangan dalam aplikasi SPIMKER (admin SPIMKER dari infokom) 3. Pembentukan tim TGC KLB KP yang melibatkan fungsi terkait	April	Ya	S-03 O-09 F-03 O-64 O-71	1. Tidak terdapat Penetapan terkait Status Kejadian Luar Biasa (KLB) dari Dinas Kesehatan setempat 2. Sampel KLB tidak diuji sesuai dengan standar 3. Analisis menerima gratifikasi 4. Sampel KLB keracunan pangan tidak diuji sesuai dengan tools penilaian RHPK 5. Agen penyebab KLB tidak dapat dikonfirmasi

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Capaian yang telah sesuai terhadap target mengharuskan BPOM di Pangkal Pinang melakukan beberapa upaya untuk menjaga realisasi dan peningkatan. Upaya tersebut antara lain adalah dengan melakukan koordinasi dengan dinas terkait mengenai penanganan sampel KLB di Kepulauan Bangka Belitung. BPOM di

Pangkal Pinang juga akan menyiapkan reagen, media mikrobiologi, baku pembanding dan kebutuhan pengujian lainnya untuk memastikan seluruh standar pengujian sampel KLB dapat dipenuhi. BPOM di Pangkal Pinang juga melaksanakan pemberian informasi kepada masyarakat melalui berbagai media tentang keamanan pangan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pangan olahan yang aman dan bermutu. BPOM di Pangkal Pinang juga telah mempunyai Tim Gerak Cepat yang nantinya akan berkoordinasi dengan Tim Gerak Cepat di Kabupaten/Kota.

f. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3.18 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar

Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian
	T	R	%	Target (RPD TW I)	Realisasi	%			
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100,00	0	0	-	-	-	-

1) Efisiensi penggunaan anggaran

Penggunaan anggaran untuk mencapai indikator persentase sampel KLB keracunan pangan belum dapat didefinisikan karena belum ada realisasi anggaran terhadap indikator ini. Indikator ini tidak dapat dikendalikan secara internal karena tidak dapat kita prediksi atau tentukan berapa jumlah kasus keracunan pangan atau KLB yang akan terjadi.

2) Upaya mencapai efisiensi penggunaan anggaran

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efisiensi terhadap penggunaan anggaran dan sumber daya adalah dengan melakukan identifikasi terkait kasus KLB di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar laporan dapat diperoleh secara akurat. Selain itu dilakukan koordinasi yang berkesinambungan dengan dinas terkait untuk bisa mendeteksi secara cepat jika terdapat laporan keracunan pangan. Pengadaan reagen dan media mikrobiologi juga dilaksanakan untuk mendukung indikator ini.

g. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan informasi kinerja yang tertuang dalam laporan kinerja tahun 2025, Balai POM di Pangkal Pinang melakukan berbagai upaya dalam rangka pencapaian target kinerja. Pemanfaatan informasi kinerja tersebut antara lain :

i) Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja

Dalam upaya mencapai target indikator Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar beberapa penyesuaian. Melaksanakan koordinasi dengan lintas sektor terkait untuk memastikan bahwa benar tidak ada kasus keracunan pangan, bukan karena tidak dilaporkan atau tidak disampaikan ke BPOM di Pangkal Pinang. BPOM di Pangkal Pinang juga telah melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) secara berkala guna memastikan bahwa jika terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB), dapat segera ditindaklanjuti dengan cepat dan sesuai ketentuan yang berlaku. Laboratorium juga telah melakukan penyesuaian kemampuan uji terhadap sampel KLB berdasarkan relaksasi anggaran.

ii) Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja

Indikator kinerja persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji secara standar tidak hanya dipengaruhi oleh anggaran QIA yang telah ditangging, tetapi juga dipengaruhi oleh anggaran lain seperti PDD. Pada triwulan I terdapat kebijakan efisiensi anggaran sehingga dilakukan penyesuaian dengan melakukan revisi anggaran.

iii) Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja

Hasil capaian pada triwulan I menunjukkan peningkatan realisasi pada indikator ini dibandingkan dengan tahun 2025. Beberapa hal yang telah ditindaklanjuti dari rekomendasi laporan kinerja tahun 2025 antara lain melakukan koordinasi dengan dinas terkait mengenai penanganan sampel KLB di Kepulauan Bangka Belitung. BPOM di Pangkal Pinang juga telah mengusulkan kebutuhan reagen, media mikrobiologi, baku pembanding dan kebutuhan pengujian lainnya untuk memastikan seluruh standar pengujian sampel KLB dapat dipenuhi. BPOM di Pangkal Pinang juga melaksanakan pemberian informasi kepada masyarakat melalui berbagai media tentang keamanan pangan untuk meningkatkan

kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pangan olahan yang aman dan bermutu.

iv) Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya.

Belum adanya realisasi untuk indikator ini pada tahun 2025 menjadi perhatian khusus bagi BPOM di Pangkal Pinang meskipun kendali pada indikator ini dipengaruhi oleh faktor eksternal. Rekomendasi terhadap indikator ini untuk periode selanjutnya adalah melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) secara berkala guna memastikan bahwa jika terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB), dapat segera ditindaklanjuti dengan cepat dan sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu BPOM di Pangkal Pinang agar melakukan penyesuaian kemampuan uji terhadap sampel KLB berdasarkan efisiensi anggaran. BPOM di Pangkal Pinang juga meningkatkan koordinasi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dapur program Makan Bergizi Gratis yang ada di Pulau Bangka terkait adanya kemungkinan KLB keracunan pangan. Koordinasi ini perlu dilakukan untuk penanganan terjadinya KLB keracunan pangan seperti yang telah terjadi di beberapa wilayah lain.

5. Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan I Tahun 2026

Tabel 3.19 Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator	Kinerja			Kategori & Notifikasi Warna
	Target	Realisasi	%Capaian	
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,5	99,33	102,93%	Sangat Baik

Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan. Sampel PIRT berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted berbasis analisis risiko sesuai pedoman sampling. Ditindaklanjuti sesuai ketentuan meliputi diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya. Diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling adalah sampling dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling (kesesuaian target sampel UPT, kesesuaian parameter uji, ketepatan waktu pengambilan sampel dan ketepatan pelaporan). Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya adalah tahapan awal tindak lanjut oleh UPT terhadap sampel PIRT yang Tidak

Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya kepada pelaku usaha (IRTP) maupun kepada lintas sektor seperti Dinas Kesehatan/ DPM-PTSP (OPD penerbit SPP-IRT) dll dan atau melaporkan ke Pusat jika kasus lintas wilayah.

Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = $20\%A + 20\%B + 20\%C + 10\%D + 10\%E + 20\%F$

Keterangan:

- B. Kesesuaian Target Sampel
- G. Kesesuaian Parameter Uji
- H. Ketepatan Pengambilan Kesimpulan
- I. Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel
- J. Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian
- K. Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya

Realisasi indikator persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan I adalah 99,33% dengan target 96,5%. Realisasi ini memberikan nilai capaian sebesar 102,93% dan masuk ke dalam kategori **"Sangat Baik"**. Sampling dan pengujian sampel PIRT ditargetkan selesai pada Triwulan II tahun 2026. Pada Triwulan I seluruh sampel telah selesai dilaporkan sesuai target pada Triwulan I. Jumlah target sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan untuk BPOM di Pangkal Pinang pada awalnya adalah 15 sampel. Efisiensi anggaran pada awal tahun 2026 menjadi dasar usulan perubahan target sampel PIRT untuk turun sesuai proporsi dari sampel pangan olahan. Seluruh sampel telah selesai diperiksa, diuji, dilaporkan dan ditindaklanjuti pada bulan Maret 2026. Sampel yang ditindaklanjuti karena Tidak Memenuhi Syarat berjumlah 3 sampel.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2026

Tabel 3.20 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2026 Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Target Tahun 2026	Realisasi Triwulan I	% Capaian Terhadap Target Tahunan	Kategori
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,50	99,33	102,93 	Tercapai/ Melampaui

Realisasi persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti adalah 99,33%, bila dibandingkan dengan target tahun 2026 maka capaiannya adalah 102,93% dengan kategori “Tercapai/Melampaui”. Meskipun terdapat target triwulan dan tahunan, indikator ini hanya dilaksanakan sampai dengan Triwulan II sehingga pada triwulan II sampai dengan akhir tahun target BPOM di Pangkal Pinang telah tercapai.

- c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Keberhasilan BPOM di Pangkal Pinang dalam mencapai target persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan didukung oleh adanya koordinasi yang baik antara fungsi pemeriksaan dan pengujian dalam melaksanakan sampling dan pengujian produk olahan pangan berisiko. Sampling dan pengujian dilaksanakan sesuai dengan rencana pelaksanaan yang telah disusun bersama. Efisiensi anggaran pada Triwulan I cukup memberikan tantangan terhadap pelaksanaan sampling dan pengujian sehingga dilakukan penyesuaian dalam perencanaan tanpa mengubah persentase target yang telah ditetapkan. Upaya untuk tetap memenuhi target sampel pada triwulan I dalam kondisi efisiensi anggaran menjadi tantangan tersendiri bagi BPOM di Pangkal Pinang. Realisasi yang diperoleh belum mencapai 100% karena masih menggunakan perhitungan jumlah target sampel di awal tahun.

- d. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

BPOM di Pangkal Pinang melaksanakan beberapa upaya untuk menjaga capaian kinerja terkait persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang telah dicapai. Beberapa upaya tersebut antara lain :

1. Meningkatkan koordinasi antara fungsi pemeriksaan dan pengujian dalam rangka pelaksanaan sampling dan pengujian produk PIRT berisiko yang ada di Kepulauan Bangka Belitung.
2. Melakukan penyesuaian terhadap rencana pelaksanaan yang disusun pada awal tahun sesuai dengan kondisi dan perubahan pada Triwulan I.
3. Mengidentifikasi kebutuhan reagensia, media mikrobiologi, baku pembanding dan pendukung pengujian lainnya untuk memastikan bahwa pengujian sampel PIRT berisiko dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

4. Melakukan pemeliharaan, kalibrasi dan verifikasi peralatan laboratorium sesuai dengan ketentuan untuk menjaga kondisi peralatan yang dimiliki siap untuk melakukan pengujian.
5. Pelaporan Catatan Pengujian sampai dengan Laporan Hasil Uji di laboratorium dilakukan dengan pendekatan digitalisasi laboratorium untuk mempercepat proses dan menghemat kebutuhan ATK.

Tabel 3.21 Matriks Rekomendasi Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Januari	Pada bulan Januari belum dilakukan sampling produk PIRT. Pelaksanaan sampling ditargetkan pada bulan Februari-Maret serta menunggu keputusan usulan perubahan target ke unit pengampu teknis. Hal ini berhubungan dengan anggaran sampel PIRT yang cukup tinggi untuk setiap sampelnya	Melakukan Sampling PIRT diawal bulan agar timeline pengujian dan pelaporan dapat efektif sampai dengan tanggal 15 bulan berikutnya	Sampling akan dilakukan pada awal bulan agar timeline pengujian dan pelaporan dapat efektif sampai dengan tanggal 15 bulan berikutnya Tahun 2026 akan dipastikan kategori pangan yang disampling sesuai dengan Pedoman Sampling Penyusunan kebutuhan pengujian untuk segera dilakukan pengadaan	Februari	Ya	F-04 SDM-12	1. Mark up harga pembelian sampel PIRT 2. Ketidaksesuaian dalam penentuan kategori sampel PIRT yang di sampling
	Realisasi : Pada bulan Januari belum dilakukan pengujian sampel PIRT, sesuai renlak awal sampel PIRT ditargetkan bulan Februari akan tetapi karena adanya perubahan target akibat pemotongan anggaran sampling maka sampling dan pengujian sampel PIRT dipending dan menunggu hasil pengesahan target. Saat ini dilakukan identifikasi dan penyusunan kebutuhan untuk pengujian sampel PIRT. Kendala : belum ditemukan kendala dalam pengujian sampel PIRT Capaian terhadap target : Belum dapat dilakukan perhitungan capaian karena belum ada realisasi terhadap IKU ini Upaya yang telah dilakukan :	Melakukan revisi terhadap renlak sampling dan pengujian sampel PIRT di bulan Februari		Februari	Ya	F-05 O-10 O-72	1. Manipulasi data hasil pengujian oleh analis 2. Sampel PIRT terlambat dilaporkan 3. Sampel PIRT berisiko diuji tidak sesuai dengan standar

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	- Melakukan pengecekan dan menyiapkan reagen serta media yang diperlukan untuk parameter uji yang berhubungan dengan sampel PIRT - Melakukan revisi terhadap renlak sampling dan pengujian bulan Februari						
Februari	Kendala : Pada bulan Februari belum dilakukan sampling produk PIRT. Pelaksanaan sampling masih menunggu keputusan unit pengampu teknis terkait jumlah total sampel pangan sehingga dapat diketahui jumlah sampel PIRT yang harus disampling (8%) Realisasi : Pada bulan februari belum dilakukan pengujian sampel PIRT, sesuai renlak awal sampel PIRT ditargetkan bulan Februari akan tetapi karena adanya perubahan target akibat pemotongan anggaran sampling maka sampling dan pengujian sampel PIRT dipending dan menunggu hasil pengesahan target. Rencana sampling dan pengujian PIRT di bulan Maret. Saat ini dilakukan identifikasi dan penyusunan kebutuhan untuk pengujian sampel PIRT. Kendala : belum ditemukan kendala dalam pengujian sampel PIRT Capaian terhadap target : Belum dapat dilakukan perhitungan capaian karena belum ada realisasi terhadap IKU ini Upaya yang telah dilakukan : Melakukan pengecekan dan menyiapkan reagen serta media yang diperlukan untuk parameter uji yang berhubungan dengan sampel PIRT Melakukan revisi terhadap renlak sampling dan pengujian bulan Maret	Berkoordinasi dengan unit pengampu teknis terkait kepastian usulan perubahan target 1. Melakukan revisi terhadap renlak sampling dan pengujian sampel PIRT di bulan Maret 2. Melakukan pemeriksaan kembali kesesuaian kategori / jenis sampel PIRT dengan membandingkannya pada database pendaftaran (cek PIRT pada https://sppirt.pom.go.id/cek-sppirt)	Jika belum ada kepastian hingga akhir februari, maka pelaksanaan sampling PIRT sesuai dengan jumlah sampel pada perencanaan awal (8% dari Total Target RO awal) 1. Melakukan revisi renlak sampling dan pengujian sampel PIRT di bulan Maret sesuai target usulan baru 2. Mengingatkan kembali kepada PJ sampling untuk Melakukan pemeriksaan kembali kesesuaian kategori / jenis sampel PIRT dengan membandingkannya pada database pendaftaran saat pelaksanaan sampling	Maret Maret	Ya Ya	F-04 SDM-12 F-05 O-10 O-72	1. Mark up harga pembelian sampel PIRT 2. Ketidaksesuaian dalam penentuan kategori sampel PIRT yang di sampling 1. Manipulasi data hasil pengujian oleh analis 2. Sampel PIRT terlambat dilaporkan 3. Sampel PIRT berisiko diuji tidak sesuai dengan standar

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Maret	Realisasi : Pada Bulan maret telah dilakukan sampling terhadap komoditi PIRT sebanyak 14 sampel (Target bulan Maret seharusnya 15 sampel). Pelaksanaan sampling mengacu pada perencanaan sampling awal (sebelum adanya revisi target rincian output) Kendala : Terdapat 1 sampel PIRT yang tidak dapat dilakukan sampling dikarenakan adanya kendala pengujian yaitu tidak memiliki peralatan LC MS MS untuk parameter uji prioritas identifikasi bahan kimia obat (sildenafil dan turunannya), sesuai dengan pedoman sampling dan pengujian tahun 2026	1. Mengirimkan Surat Permohonan Perubahan Kategori Sampel PIRT ke Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan selaku unit pengampu 2. Segera melakukan sampling setelah adanya balasan perubahan kategori sampel PIRT dari Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	Mengingatkan kembali kepada PJ sampling pangan olahan untuk melakukan sampling terhadap sisa 1 sampel PIRT jika telah diperoleh balasan perubahan kategori sampel PIRT dari Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	April	Ya	F-04 SDM-12	1. Mark up harga pembelian sampel PIRT 2. Ketidaksesuaian dalam penentuan kategori sampel PIRT yang di sampling
	Realisasi : Pada bulan Maret laboratorium telah menerima dan melakukan pengujian sampel PIRT sebanyak 14 sampel dari target awal 15 sampel. Terdapat 3 sampel yang TMS untuk dilakukan tindak lanjut. Kendala : Terdapat 1 target sampel untuk minuman serbuk botanical yang tidak dapat dilakukan pengujian identifikasi BKO dengan LC MS MS karena tidak tersedia peralatan LC MS MS Capaian terhadap target : Realisasi pada bulan Maret adalah 99,33% dengan target bulanan dan tahunan 96,50% sehingga capaiannya adalah 102,94% Upaya yang telah dilakukan : Melakukan koordinasi dengan tim kerja pemeriksaan terkait kendala peralatan yang dimiliki agar dapat dilakukan perubahan kategori pangan sampel PIRT tersebut agar realisasi IKU tercapai	1. Melakukan koordinasi dengan tim kerja pemeriksaan 2. Melakukan evaluasi terhadap renlak yang telah ditetapkan karena masih terdapat 1 sampel yang tidak sesuai	1. Koordinasi terkait perubahan kategori pangan sampel PIRT 2. Melakukan penyesuaian terhadap perubahan renlak	April	Ya	F-05 O-10 O-72	1. Manipulasi data hasil pengujian oleh analis 2. Sampel PIRT terlambat dilaporkan 3. Sampel PIRT berisiko diuji tidak sesuai dengan standar

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Capaian untuk persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan I telah mencapai target yang ditetapkan. Beberapa hal yang menunjang pencapaian target antara lain :

1. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap bulan terhadap realisasi dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan sampling dan pengujian pangan olahan berisiko sehingga permasalahan yang ada dapat segera diidentifikasi dan dicari solusinya.
2. Telah dilakukan upaya pengisian data dan pelaporan yang *real time* melalui SIPT dan aplikasi Madu Pelawan sehingga data yang disampaikan masing-masing fungsi lebih valid dan akurat.
3. Pengawasan Sarana Produksi dan pembinaan terhadap pelaku usaha yang lebih intensif dalam penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB).
4. Peningkatan pengawasan dan pembinaan terhadap distributor dan penjual retail produk pangan mengenai Pangan yang memenuhi ketentuan melalui pengawasan rutin maupun kegiatan intensifikasi pengawasan.
5. Pemberian informasi kepada masyarakat melalui berbagai media tentang keamanan pangan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pangan olahan yang aman dan bermutu.

f. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3.22 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian
	T	R	%	Target (RPD TW I)	Realisasi	%			
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,5	99	102,93	0	0	-	-	-	-

1) Efisiensi penggunaan anggaran

Penggunaan anggaran untuk mencapai indikator persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan belum dapat didefinisikan karena belum ada realisasi anggaran terhadap indikator ini. Sampel diperiksa dan diuji menggunakan alokasi anggaran yang sama pada indikator pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan menggunakan sumber daya yang dimiliki oleh BPOM di Pangkal Pinang.

2) Upaya mencapai efisiensi penggunaan anggaran

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efisiensi terhadap penggunaan anggaran dan sumber daya adalah dengan melakukan perencanaan dan penyesuaian terhadap anggaran yang ada. Revisi anggaran diharapkan mampu memperbaiki efisiensi anggaran yang telah ada pada Triwulan I. Revisi anggaran pada Triwulan II dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk meningkatkan efisiensi.

g. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan informasi kinerja yang tertuang dalam laporan kinerja tahun 2025, Balai POM di Pangkal Pinang melakukan berbagai upaya dalam rangka pencapaian target kinerja. Pemanfaatan informasi kinerja tersebut antara lain :

1) Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja

Berdasarkan informasi kinerja dalam Laporan Kinerja tahun 2025 terlihat bahwa realisasi dan capaian yang diperoleh telah melebihi target yang ditetapkan, bahkan melebihi target akhir Renstra. Data dan informasi pada tahun 2025 dijadikan sebagai *baseline* perhitungan target untuk tahun 2026 dan seterusnya. Perhitungan dengan menggunakan *baseline* baru ini kemudian diusulkan untuk dilakukan revisi terhadap target dan penyesuaian target kegiatan.

2) Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja

Indikator kinerja persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti tidak hanya dipengaruhi oleh anggaran QIA yang telah ditagging, tetapi juga dipengaruhi oleh anggaran lain seperti PDD. Pada triwulan I terdapat kebijakan efisiensi anggaran sehingga dilakukan penyesuaian. Informasi penggunaan anggaran pada tahun 2025 menunjukkan bahwa anggaran digunakan secara

efisien dalam kegiatan ini. Pada awal tahun 2026 terdapat pemotongan anggaran sehingga dilakukan penyesuaian terhadap anggaran dan target yang akan diusulkan untuk tahun 2026 mengacu pada informasi anggaran tahun 2025.

- 3) Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja

BPOM di Pangkal Pinang telah melaksanakan beberapa upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja terkait persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang telah dicapai sesuai dengan rekomendasi pada tahun 2025. Beberapa upaya tersebut antara lain adalah meningkatkan koordinasi antara fungsi pemeriksaan dan pengujian dalam rangka pelaksanaan sampling dan pengujian produk PIRT berisiko yang ada di Kepulauan Bangka Belitung. Selain itu telah dilakukan penyesuaian terhadap rencana pelaksanaan yang disusun pada awal tahun sesuai dengan kondisi dan perubahan pada Triwulan I. Identifikasi terhadap kebutuhan reagensia, media mikrobiologi, baku pembanding dan pendukung pengujian lainnya untuk memastikan bahwa pengujian sampel PIRT berisiko dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Laboratorium juga melakukan pemeliharaan, kalibrasi dan verifikasi peralatan laboratorium sesuai dengan ketentuan untuk menjaga kondisi peralatan yang dimiliki siap untuk melakukan pengujian. Rekomendasi yang tertuang pada Laporan Kinerja tahun 2025 digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun 2026 dalam rangka mempertahankan realisasi. Rekomendasi dan tindak lanjut pada tahun 2025 tetap dilaksanakan di tahun 2026 sehingga menjaga realisasi menjadi 100%.

- 4) Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya.

BPOM di Pangkal Pinang akan melaksanakan beberapa aktivitas yang menjadi rekomendasi pada tahun 2025 untuk menjaga capaian target indikator ini. Untuk mencegah terjadinya kesalahan kategori sampel, perlu dilakukan penyamaan persepsi melalui koordinasi teknis sebelum dan setelah sampling, serta perencanaan sampling dengan kategori yang jelas. Koordinasi antara tim sampling dan laboratorium juga perlu ditingkatkan untuk memastikan kesesuaian parameter uji. Keterbatasan alat gelas di laboratorium mikrobiologi akan ditindaklanjuti dengan mengajukan penambahan alat gelas dan cawan

sekali pakai. Pengembangan kompetensi analis laboratorium juga akan dilakukan untuk meningkatkan kompetensi analis dan menghindari terjadinya kesalahan pengambilan kesimpulan. Perlu dilakukan review terhadap target yang ditetapkan untuk tahun 2026 karena realisasi yang diperoleh di tahun 2025 telah melebihi target tahun 2026.

6. Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder

Keputusan/Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Izin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan I Tahun 2026

Tabel 3.23 Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder

Indikator	Kinerja			Kategori & Notifikasi Warna
	Target	Realisasi	%Capaian	
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85	44,03	51,80%	Kurang

Indikator Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder pada Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik, dengan target sebesar 85% dan realisasi mencapai 44,03%, sehingga persentase capaian indikator sebesar 51,80%. Capaian ini berada jauh di bawah target yang telah ditetapkan dan masuk

dalam kategori “Kurang”. Rendahnya capaian tersebut mengindikasikan bahwa tindak lanjut stakeholder terhadap hasil pengawasan masih belum berjalan efektif, yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kurangnya koordinasi dan komunikasi, keterlambatan atau ketidaktepatan pelaporan, serta rendahnya tingkat kepatuhan stakeholder dalam menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan. Kondisi ini menunjukkan perlunya perhatian serius melalui penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi, peningkatan pembinaan kepada stakeholder, serta optimalisasi sistem pelaporan agar proses tindak lanjut dapat berjalan lebih efektif dan capaian kinerja pada periode selanjutnya dapat ditingkatkan.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2026

Tabel 3.24 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2026 Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Target Tahun 2026	Realisasi Triwulan I	% Capaian Terhadap Target Tahunan	Kategori
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85,00	44,03	51,80 	Perlu Upaya Keras

Dari tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2026 Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder yang Dilaksanakan sampai pada Triwulan I Tahun 2026 sebesar 51,80% dengan realisasi sebesar 44,03%. Apabila dibandingkan terhadap target tahun 2026 yaitu 85,00%, realisasi telah mencapai target dengan kategori “Perlu Upaya Keras”.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Capaian indikator Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder sebesar 44,03% atau 51,80% terhadap target 85% menunjukkan kinerja yang belum optimal dan berada pada kategori “Kurang”. Rendahnya capaian ini disebabkan oleh adanya kesalahan rumus dalam perhitungan pada RAPK, di mana rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor yang sebelumnya tidak termasuk dalam komponen pembagi, justru masuk ke dalam perhitungan pembagi. Perubahan tersebut menyebabkan peningkatan jumlah total rekomendasi yang menjadi dasar

perhitungan, sehingga persentase capaian menjadi lebih rendah dari kondisi sebenarnya. Dengan demikian, penurunan kinerja yang terlihat lebih dipengaruhi oleh aspek teknis perhitungan dibandingkan dengan pelaksanaan kegiatan di lapangan, sehingga diperlukan perbaikan formulasi dan validasi perhitungan agar capaian kinerja dapat merepresentasikan kondisi yang sebenarnya.

d. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan difokuskan pada membenahan aspek teknis perhitungan serta penguatan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi. Langkah yang perlu dilakukan antara lain melakukan evaluasi dan perbaikan rumus perhitungan pada aplikasi RAPK agar sesuai dengan definisi operasional indikator, khususnya memastikan komponen pembilang dan pembagi dihitung secara konsisten dan valid. Selain itu, perlu dilakukan verifikasi dan validasi data secara berkala untuk mencegah terjadinya kesalahan perhitungan yang dapat memengaruhi capaian kinerja. Dari sisi pelaksanaan, diperlukan penguatan koordinasi dan komitmen lintas sektor dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan, disertai dengan peningkatan monitoring dan evaluasi secara lebih intensif. Optimalisasi sistem pelaporan berbasis digital dan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan data juga menjadi langkah penting agar proses pelaporan lebih akurat dan tepat waktu. Dengan upaya tersebut, diharapkan capaian kinerja pada periode selanjutnya dapat meningkat dan lebih mencerminkan kondisi kinerja yang sebenarnya.

Tabel 3.25 Matriks Rekomendasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Januari	Realisasi keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder bulan januari sebesar 100%. Dengan rincian :	-	-	-	-	-	-

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	- 3 realisasi carry over (1 Dist Pangan dan 2 Produksi MD) - 12 realisasi berasal dari sardist pangan yang telah menindaklanjuti rekomendasi petugas pemeriksa (TL Pelaku Usaha) saat dilakukan pembinaan di sarana selama bulan Januari						
Februari	Realisasi keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder bulan februari sebesar 40.7%. Target tidak tercapai dikarenakan pada realisasi keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti pada parameter pelaku usaha sebesar 81.40% namun pada parameter lintas sektor sebesar 0% . Hal ini terkendala akibat adanya 1 rekomendasi yang diberikan kepada GFK selaku lintas sektor, namun belum terdapat jawaban CAPA meskipun masih sesuai dengan timeline yang ditentukan.	Menerbitkan surat permintaan CAPA kedua kepada sarana GFK yang belum memberikan respon CAPA	Melakukan monitoring data sarana yang belum menjawab CAPA dan timeline maksimal jawaban capa dari sarana menggunakan inovasi AMOI CAKEP	Maret	Tidak	-	-
Maret	Realisasi keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder bulan februari sebesar 44.03%. Target tidak tercapai dikarenakan pada realisasi keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti pada parameter pelaku usaha sebesar 88.06% namun pada parameter lintas sektor sebesar 0% . Hal ini terkendala akibat adanya 1 rekomendasi yang diberikan kepada GFK dan 2 rekomendasi yang diberikan kepada Puskesmas selaku lintas sektor, namun belum terdapat jawaban CAPA meskipun masih sesuai dengan timeline yang ditentukan.	Menerbitkan surat permintaan CAPA kedua kepada sarana GFK dan Puskesmas yang belum memberikan respon CAPA	1. Melakukan monitoring data sarana yang belum menjawab CAPA dan timeline maksimal jawaban capa dari sarana menggunakan inovasi AMOI CAKEP 2. Melakukan follow up melalui whatsapp terhadap sarana yang telah dikirimkan CAPA ke-2 namun belum juga menjawab CAPA	April	Tidak	-	-

- e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan capaian realisasi indikator Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder yang dilaksanakan pada Triwulan I tahun 2026 didukung dengan adanya petugas yang responsif dan cepat tanggap dalam menindaklanjuti keputusan/rekomendasi yang ada. Setiap petugas inspeksi telah memahami dan menindaklanjuti hasil inspeksi sarana sesuai dengan pedoman tindak lanjut yang berlaku dan sesuai dengan SOP yang ada. Dalam mempertahankan keberhasilan capaian indikator ini perlu komitmen dari semua pihak terutama dari sarana agar senantiasa menindaklanjuti rekomendasi yang diterbitkan oleh Balai POM Pangkal Pinang dengan tepat waktu, perlu monitoring secara berkala menggunakan melalui tools monev inovasi AMOI CAKEP Balai POM Pangkal Pinang sehingga rekomendasi dapat selalu ditindaklanjuti tepat waktu dan sesuai dengan timeline.

- f. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3.26 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder

Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian
	T	R	%	Target (RPD TW I)	Realisasi	%			
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85	44,03	51,80	2.500.000	2.121.000	84,84	0,61	-0,39	Tidak Efisien

- 1) Efisiensi penggunaan anggaran

Dari data tersebut terlihat bahwa meskipun anggaran tidak terserap penuh (hanya 84,84%), capaian output juga relatif rendah (51,80%). Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran belum optimal dalam menghasilkan output yang diharapkan.

Nilai IE sebesar 0,61 (<1) menandakan bahwa setiap satuan anggaran yang digunakan belum mampu menghasilkan kinerja yang sebanding. Sementara itu,

TE negatif (-0,39) mengindikasikan adanya ketidakefisienan, di mana penyerapan anggaran tidak berbanding lurus dengan hasil yang dicapai.

2) Upaya mencapai efisiensi penggunaan anggaran

Dalam mendukung pencapaian indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder, efisiensi penggunaan anggaran dilakukan dengan cara mengintegrasikan pelaksanaan pengawasan dan tindak lanjut lintas kegiatan contohnya bersamaan dengan kegiatan pengawasan. Hal ini mengurangi frekuensi perjalanan dinas yang terpisah dan menekan biaya operasional. adapun terkait serapan anggaran yang melebihi RPD yang telah ditetapkan perlu dilakukan penyesuaian dan sinkronisasi antara mapping anggaran dengan Perjanjian Kinerja (PK) hasil revisi, serta memastikan bahwa perhitungan serapan anggaran mengacu pada data dan struktur mapping yang telah diperbarui.

Pemanfaatan sistem informasi pelaporan dan monitoring secara digital juga mempermudah koordinasi serta pelacakan tindak lanjut rekomendasi oleh stakeholder tanpa perlu pertemuan tatap muka yang memerlukan anggaran tambahan. Selain itu, penerapan monev menggunakan tools AMOI CAKEP dalam menetapkan prioritas rekomendasi yang harus segera diingatkan kembali untuk segera merespon rekomendasi dari Balai POM Pangkal Pinang. serta dengan memperkuat kolaborasi bersama stakeholder dan mengedepankan komunikasi digital serta pemantauan terintegrasi, efisiensi anggaran dapat tercapai tanpa mengurangi kualitas dan kecepatan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan.

g. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

1) Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja

- Meningkatkan koordinasi yang lebih efektif antara UPT dan pemangku kepentingan, sehingga keputusan/rekomendasi hasil inspeksi dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait lintas sektor.

- Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap rekomendasi yang telah disampaikan kepada stakeholder serta menindaklanjuti progres pelaksanaannya.
- Monitoring evaluasi bisa difokuskan pada stakeholder yang tingkat tindak lanjutnya rendah untuk meningkatkan persentase capaian.

2) Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja

- Melakukan revisi dan penyesuaian anggaran perjalanan dinas, khususnya untuk mendukung kegiatan pencapaian pada indikator ini khususnya untuk menyiasati adanya efisiensi anggaran
- Melakukan revisi anggaran pelatihan guna meningkatkan kapasitas petugas Balai POM di Pangkal Pinang dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan.

3) Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja

- Melakukan evaluasi atas masalah atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja pada tahun sebelumnya, serta merumuskan langkah-langkah tindak lanjut yang diperlukan.
- Mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan capaian indikator pada tahun 2025 dengan menganalisis capaian yang belum optimal berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya.
- Laporan kinerja tahun 2025 digunakan untuk mengkaji apakah bentuk rekomendasi yang diberikan sudah cukup jelas dan mudah bagi stakeholder dalam menindaklanjutinya.
- Melaksanakan evaluasi apakah stakeholder yang sebelumnya belum menindaklanjuti sudah diberikan rencana aksi, tindak lanjut atau surat pengingat, dan sejauh mana keberhasilannya.

4) Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya.

- Melakukan penyesuaian pada perencanaan kinerja, khususnya pada sub-indikator terkait rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pemangku kepentingan

- Melakukan penyesuaian sistem monitoring dan *follow-up* yang lebih sistematis agar rekomendasi pengawasan tidak berhenti hanya di level surat atau rekomendasi saja sehingga dapat memastikan implementasi nyata di lapangan.

7. Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan nilai rata-rata dari persentase Sarana produksi Obat, persentase Sarana produksi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, persentase Sarana produksi Kosmetik yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

- Sarana produksi (Sarprod) sediaan farmasi yaitu meliputi:
 - Sarana Produksi Obat, Bahan Baku Obat, Produk Biologi, dan Sarana Khusus (misal Unit Transfusi Darah, Fasilitas Radiofarmaka, Sel Punca, dan Rumah Sakit).
 - Sarana yang melakukan pembuatan ekstrak bahan alam, produk obat bahan alam dan/atau suplemen kesehatan untuk semua tahapan dan/atau sebagian tahapan meliputi industri obat tradisional, Industri Ekstrak bahan alam, Usaha Kecil Obat Tradisional, Usaha mikro obat tradisional, industri suplemen kesehatan
 - Fasilitas produksi kosmetik, yaitu industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.
- Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan inspeksi pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan
- Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada :regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Dikarenakan pada wilayah pengawasan Balai POM di Pangkal Pinang untuk sarana produksi sediaan farmasi hanya terdapat sarana produksi Obat Bahan Alam (OBA) yaitu Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) dan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) maka perhitungan persentase pada indikator ini hanya diambil dari persentase persentase

Sarana produksi Obat Bahan Alam. Adapun untuk perhitungan capaian persentase pada indikator ini adalah sebagai berikut :

$$\% \text{ Sarprod OBA} = \text{Rata-rata (A+B+C+D)}$$

A. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi

$$= (\text{Jumlah realisasi pengawasan sarana} / \text{jumlah target pengawasan inspeksi sesuai Renlak}) \times 100\%$$

B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat

$$= (\text{Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu} / \text{Jumlah seluruh sarana yang diperiksa}) \times 100\%$$

C. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi

$$= (\text{Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar} / \text{jumlah sarana yang selesai diperiksa}) \times 100\%$$

D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana

$$= (\text{Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu} / \text{jumlah seluruh tindak lanjut}) \times 100\%$$

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan I Tahun 2026

Tabel 3.27 Tabel 3.34 Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator	Kinerja			Kategori & Notifikasi Warna
	Target	Realisasi	%Capaian	
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100,00%	Baik

Berdasarkan Tabel diatas, realisasi pemeriksaan dan tindak lanjut terhadap sarana produksi sediaan farmasi pada Triwulan I Tahun 2026 mencapai 100%, sesuai dengan target yang ditetapkan sebesar 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh sarana yang diperiksa telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan tepat waktu, sehingga dikategorikan dalam kategori “Baik” dengan notifikasi warna hijau. Kinerja ini mencerminkan efektivitas dan kepatuhan pelaksanaan pengawasan terhadap standar yang telah ditetapkan.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2026

Tabel 3.28 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2026 Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Target Tahun 2026	Realisasi Triwulan I	% Capaian Terhadap Target Tahunan	Kategori
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,00	100,00	100,00 	Tercapai/Melampaui

Bila dibandingkan antara realisasi triwulan I dan target tahun 2026 maka capaian persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan masuk dalam kategori tercapai atau melampaui target yang ditetapkan.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Keberhasilan capaian 100% pada Triwulan I dalam pemeriksaan dan tindak lanjut sarana produksi sediaan farmasi menunjukkan adanya konsistensi kinerja yang signifikan dan perbaikan sistematis dibandingkan Triwulan IV tahun sebelumnya. Hal ini mencerminkan bahwa hambatan atau kendala yang mungkin terjadi pada Triwulan sebelumnya, seperti keterbatasan sumber daya, penjadwalan kegiatan, atau koordinasi internal, berhasil diidentifikasi dan diatasi dengan baik. Strategi pelaksanaan pengawasan tampaknya telah mengalami penyesuaian yang lebih tepat, baik dari sisi perencanaan, alokasi tugas, maupun pelibatan stakeholder, sehingga target dapat dicapai secara penuh. Capaian maksimal ini juga menjadi indikator bahwa sistem monitoring dan evaluasi kinerja pada Triwulan I berjalan secara efektif, serta memperlihatkan komitmen dan tanggung jawab pelaksana kegiatan dalam memenuhi target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, capaian ini bukan hanya sekadar angka, tetapi mencerminkan keberhasilan koordinasi, perencanaan matang, serta tindak lanjut yang tepat sasaran dalam upaya pengawasan sediaan farmasi.

d. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Walaupun target pada indikator persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan telah tercapai, perlunya konsistensi dan upaya agar sampai akhir tahun dapat dipertahankan. Pertama, dilakukan penyesuaian terhadap perencanaan pelaksanaan pengawasan dengan mempertimbangkan pola distribusi target yang bersifat flat. Hal ini dapat dilakukan dengan mengakselerasi kegiatan pengawasan, khususnya terhadap sarana produksi yang telah teridentifikasi dan siap diperiksa lebih awal.

Kedua dengan segera melakukan pemeriksaan sarana produksi Obat Bahan Alam yang telah ditargetkan sehingga segera terdapat output realisasi pada indikator ini. Dengan pelaksanaan upaya-upaya tersebut, diharapkan realisasi indikator pada triwulan-triwulan berikutnya dapat konsisten hingga akhir tahun.

Tabel 3.29 Matriks Rekomendasi Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Januari	Tidak terdapat target pemeriksaan sarana produksi Sediaan Farmasi pada bulan Januari. Sesuai perencanaan, pemeriksaan sarana produksi Sediaan Farmasi (UKOT) akan dimulai pada bulan Februari	-	-	-	-	-	-
Februari	Telah dilakukan pemeriksaan dan pemberian tindak lanjut sarana produksi sediaan farmasi (UKOT) terhadap 1 sarana dengan persentase 100% Tidak terdapat kendala dalam pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi bulan februari	-	-	-	-	-	-
Maret	Tidak terdapat target pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi selama bulan maret	-	-	-	-	-	-

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan pencapaian 100% pada Triwulan I dalam indikator pemeriksaan dan tindak lanjut sarana produksi sediaan farmasi tidak terlepas dari efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan yang bersifat teknis, terstruktur, dan adaptif. Program peningkatan kapasitas SDM pengawas, optimalisasi jadwal inspeksi lapangan, serta penguatan sistem koordinasi lintas bidang menjadi faktor penunjang utama yang mendukung kelancaran kegiatan pengawasan. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam pemantauan real-time serta pelaporan hasil pengawasan turut mempercepat proses tindak lanjut dan pengambilan keputusan yang sesuai ketentuan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan capaian kinerja sangat bergantung pada sinergi antara kesiapan sumber daya, efektivitas manajemen program, serta ketepatan eksekusi di lapangan. Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh terhadap faktor-faktor penghambat dan pendukung perlu terus dilakukan sebagai dasar penguatan berkelanjutan dalam siklus manajemen kinerja pengawasan.

f. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3.30 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian
	T	R	%	Target (RPD TW I)	Realisasi	%			
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100,00	2.763.600	2.583.960	93,50	1,07	0,07	100% (Efisien)

1) Efisiensi penggunaan anggaran

Berdasarkan Tabel diatas, efisiensi penggunaan anggaran untuk indikator persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tergolong tidak efisien dengan capaian sebesar 100%. Realisasi anggaran yang digunakan sebesar Rp2.583.960 dari total alokasi Rp2.763.600 menunjukkan bahwa sekitar 100,00% dana yang digunakan untuk mencapai output sebesar 100%. Hal ini menghasilkan nilai Indeks Efisiensi (IE) sebesar 1,07 dan Tingkat Efisiensi (TE) sebesar 0,07 yang menyatakan bahwa capaian efisien.

2) Upaya mencapai efisiensi penggunaan anggaran

Untuk mencapai efisiensi penggunaan anggaran dalam kegiatan pengawasan sarana produksi sediaan farmasi, perlu dilakukan optimalisasi perencanaan sehingga proses pengawasan hingga pertanggungjawaban anggaran dapat terlaksana tepat waktu. Selain itu, penggabungan jadwal dengan kegiatan pengawasan lain di lokasi yang berdekatan sehingga perjalanan petugas ke lokasi sarana lebih efektif dari sisi waktu dan biaya dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaporan dan dokumentasi turut mendukung efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator ini.

g. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

1) Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja

- Meningkatkan koordinasi yang lebih efektif antara UPT dan pemangku kepentingan
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap rekomendasi yang telah disampaikan kepada stakeholder serta menindaklanjuti progres pelaksanaannya.
- Monitoring evaluasi bisa difokuskan pada stakeholder yang tingkat tindak lanjutnya rendah untuk meningkatkan persentase capaian.

2) Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja

- Melakukan revisi dan penyesuaian anggaran perjalanan dinas, khususnya untuk mendukung kegiatan pencapaian pada indikator ini khususnya untuk menyiasati adanya efisiensi anggaran
- Melakukan revisi anggaran pelatihan guna meningkatkan kapasitas petugas Balai POM di Pangkal Pinang dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan.

3) Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja

- Melakukan evaluasi atas masalah atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja pada tahun sebelumnya, serta merumuskan langkah-langkah tindak lanjut yang diperlukan.

- Mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan capaian indikator pada tahun 2026 dengan menganalisis capaian yang belum optimal berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya.
- Laporan kinerja tahun 2025 digunakan untuk mengkaji terkait dengan Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan dan melihat tren kepatuhan sarana.
- Melaksanakan evaluasi apakah stakeholder yang sebelumnya belum menindaklanjuti sudah diberikan rencana aksi, tindak lanjut atau surat pengingat, dan sejauh mana keberhasilannya.

4) Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya.

- Melakukan penyesuaian pada perencanaan kinerja, khususnya pada sub-indikator terkait Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
- Melakukan penyesuaian sistem monitoring dan follow-up yang lebih sistematis agar rekomendasi pengawasan tidak berhenti hanya di level surat atau rekomendasi saja sehingga dapat memastikan implementasi nyata di lapangan.

8. Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan nilai rata-rata dari persentase Sarana produksi Obat, persentase Sarana produksi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, persentase Sarana produksi Kosmetik yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

- Sarana produksi (Sarprod) sediaan farmasi yaitu meliputi:
 - Sarana Produksi Obat, Bahan Baku Obat, Produk Biologi, dan Sarana Khusus (misal Unit Transfusi Darah, Fasilitas Radiofarmaka, Sel Punca, dan Rumah Sakit).
 - Sarana yang melakukan pembuatan ekstrak bahan alam, produk obat bahan alam dan/atau suplemen kesehatan untuk semua tahapan dan/atau sebagian tahapan meliputi industri obat tradisional, Industri Ekstrak bahan alam, Usaha

Kecil Obat Tradisional, Usaha mikro obat tradisional, industri suplemen kesehatan

- Fasilitas produksi kosmetik, yaitu industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.
- Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan inspeksi pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan
- Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada :regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Dikarenakan pada wilayah pengawasan Balai POM di Pangkal Pinang untuk sarana produksi sediaan farmasi hanya terdapat sarana produksi Obat Bahan Alam (OBA) yaitu Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) dan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) maka perhitungan persentase pada indikator ini hanya diambil dari persentase persentase Sarana produksi Obat Bahan Alam. Adapun untuk perhitungan capaian persentase pada indikator ini adalah sebagai berikut :

% Sarprod OBA = Rata-rata (A+B+C+D)

A. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi

= (Jumlah realisasi pengawasan sarana / jumlah target pengawasan inspeksi sesuai Renlak) X 100%

B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat

= (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%

C. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi

= (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%

D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana

= (Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindak lanjut) x 100%

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan I Tahun 2026

Tabel 3.31 Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator	Kinerja			Kategori & Notifikasi Warna
	Target	Realisasi	%Capaian	
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94,25	100,00	106,10%	Sangat Baik

Berdasarkan Tabel diatas, realisasi persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan I Tahun 2026 mencapai 100%, melampaui target yang ditetapkan sebesar 94,25%, dengan capaian sebesar 106,10% dengan kategori sangat baik dengan notifikasi warna berwarna biru.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2026

Tabel 3.32 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2026 Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Target Tahun 2026	Realisasi Triwulan I	% Capaian Terhadap Target Tahunan	Kategori
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94,25	100,00	106,10 	Tercapai/ Melampaui

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada Triwulan I Tahun 2026, indikator *Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan* menunjukkan capaian yang sangat optimal. Target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2026 sebesar **94,25%**, sedangkan realisasi pada Triwulan I telah mencapai **100,00%**. Dengan demikian, tingkat capaian terhadap target tahunan adalah sebesar **106,10%**, sehingga termasuk dalam kategori **tercapai/melampaui target**.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Keberhasilan capaian realisasi indikator Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti pada Triwulan I tahun 2026 merupakan hasil dari pelaksanaan pengawasan yang terencana dengan baik dan keterlibatan aktif seluruh tim. Capaian ini didukung oleh perencanaan yang matang, dimulai dari penetapan target sarana prioritas berdasarkan pemetaan risiko, pelaksanaan inspeksi sesuai jadwal, hingga penerbitan tindak lanjut yang sistematis dan sesuai dengan regulasi.

Setiap tahapan pengawasan telah dilaksanakan dengan mengacu pada standar operasional prosedur (SOP), dan seluruh proses mulai dari pemeriksaan hingga tindak lanjut didokumentasikan secara terintegrasi melalui Sistem Informasi Pengawasan Terpadu (SIPT), yang mempermudah pelaporan dan monitoring capaian. Selain itu, keberhasilan ini juga ditunjang oleh kinerja petugas yang responsif dan sigap dalam menindaklanjuti hasil pengawasan. Petugas inspeksi telah memahami pedoman yang berlaku dan melaksanakan tugas sesuai ketentuan. Untuk menjaga konsistensi capaian, diperlukan komitmen berkelanjutan dari pelaku usaha agar menindaklanjuti setiap rekomendasi secara tepat waktu. Monitoring berkala melalui tools monev juga perlu terus dioptimalkan agar setiap rekomendasi dapat ditindaklanjuti sesuai timeline yang telah ditetapkan.

d. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian indikator pemeriksaan dan tindak lanjut sarana produksi Pangan Olahan, beberapa langkah perbaikan perlu dilakukan. Pertama, dilakukan peningkatan kualitas perencanaan pengawasan berbasis data risiko yang lebih komprehensif, guna memastikan sasaran pengawasan lebih tepat dan berdampak signifikan terhadap keamanan produk yang telah diproduksi oleh sarana tersebut.

Kedua, diperlukan penguatan kapasitas SDM, baik dalam aspek teknis pemeriksaan maupun kemampuan komunikasi dengan pelaku usaha, agar proses pengawasan berjalan efektif dan tindak lanjut dapat dilakukan lebih cepat. Ketiga, perlu optimalisasi pemanfaatan sistem informasi pengawasan, untuk mempercepat pelaporan, monitoring, serta evaluasi hasil pengawasan dan tindak lanjutnya. Selain itu, peningkatan koordinasi lintas sektor dan pembinaan terhadap pelaku usaha secara berkelanjutan akan memperkuat pemahaman terhadap regulasi serta mendorong kepatuhan yang lebih tinggi, sehingga proses tindak lanjut dapat berjalan lancar.

Tabel 3.33 Matriks Rekomendasi Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Januari	Sampai dengan akhir tahun 2025, target IKU telah tercapai sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Seluruh target output juga telah terpenuhi, sehingga capaian IKU dinyatakan selesai.	-	-	-	-	-	-
Februari	Tidak terdapat target pemeriksaan sarana produksi Pangan Olahan pada bulan Januari. Sesuai perencanaan, pemeriksaan sarana produksi Pangan Olahan (MD) akan dimulai pada bulan Februari	-	-	-	-	-	-
Maret	Telah dilakukan pemeriksaan dan pemberian tindak lanjut sarana produksi pangan olahan (MD) terhadap 2 sarana dengan persentase 100%	-	-	-	-	-	-

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program yang berkontribusi besar terhadap keberhasilan ini antara lain adalah Program Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan, yang mencakup kegiatan inspeksi rutin sarana produksi, pembinaan kepada pelaku usaha, serta tindak lanjut hasil pemeriksaan. Kegiatan ini didukung dengan perencanaan berbasis risiko dan monitoring evaluasi menggunakan tool money RHPK inovasi dari Balai POM Pangkal Pinang (AMOI CAKEP). Selain itu, ketersediaan SDM yang kompeten, pelaksanaan pengawasan sesuai SOP, serta pemanfaatan sistem informasi seperti SIPT (Sistem Informasi Pengawasan Terpadu) juga menjadi faktor pendorong utama. SIPT memungkinkan proses pelaporan dan tindak lanjut dilakukan secara sistematis dan terekam dengan baik, sehingga memperkuat akuntabilitas dan transparansi kinerja. Keberhasilan pencapaian kinerja juga sangat bergantung pada sinergi antara perencanaan program yang baik, pelaksanaan kegiatan yang efisien, dukungan teknologi informasi, serta keterlibatan aktif seluruh petugas pengawas.

f. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3.34 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian
	T	R	%	Target (RPD TW I)	Realisasi	%			
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94,25	100	106,10	11.009.400	10.240.178	93,01	1,14	0,14	100% (Efisien)

1) Efisiensi penggunaan anggaran

Berdasarkan Tabel 3.35, efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan menunjukkan kinerja yang optimal, dimana dari sisi output realisasi mencapai 100% dari target 94,25% dengan capaian kinerja sebesar 106,10%, sedangkan dari sisi input realisasi anggaran hanya sebesar 93,01% dari target yang direncanakan, sehingga menunjukkan bahwa pencapaian kinerja yang melampaui target dapat diraih dengan penggunaan anggaran yang lebih rendah; hal ini diperkuat dengan nilai Indeks Efisiensi (IE) sebesar 1,14 dan Tingkat Efisiensi (TE) sebesar 0,14 yang mengindikasikan bahwa kinerja pelaksanaan kegiatan tergolong efisien, didukung oleh perencanaan yang baik, optimalisasi pelaksanaan kegiatan, serta pengendalian anggaran yang efektif, namun demikian efisiensi tersebut tetap perlu dijaga dengan memastikan kualitas pelaksanaan kegiatan tidak menurun pada triwulan berikutnya.

2) Upaya mencapai efisiensi penggunaan anggaran

Untuk mencapai efisiensi penggunaan anggaran dalam kegiatan pengawasan sarana produksi pangan olahan, perlu dilakukan optimalisasi perencanaan sehingga proses pengawasan hingga pertanggungjawaban anggaran dapat terlaksana tepat waktu. Selain itu, penggabungan jadwal dengan kegiatan pengawasan lain di lokasi yang berdekatan sehingga perjalanan petugas ke lokasi sarana lebih efektif dari sisi waktu dan biaya dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaporan dan dokumentasi turut mendukung efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator ini.

g. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

1) Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja

- Meningkatkan koordinasi yang lebih efektif antara UPT dan pemangku kepentingan, sehingga keputusan/rekomendasi hasil inspeksi dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait lintas sektor.
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap rekomendasi yang telah disampaikan kepada stakeholder serta menindaklanjuti progres pelaksanaannya.
- Monitoring evaluasi bisa difokuskan pada stakeholder yang tingkat tindak lanjutnya rendah untuk meningkatkan persentase capaian.

2) Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja

- Melakukan revisi dan penyesuaian anggaran perjalanan dinas, khususnya untuk mendukung kegiatan pencapaian pada indikator ini khususnya untuk menyiasati adanya efisiensi anggaran
- Melakukan revisi anggaran pelatihan guna meningkatkan kapasitas petugas Balai POM di Pangkal Pinang dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan.

3) Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja

- Melakukan evaluasi atas masalah atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja pada tahun sebelumnya, serta merumuskan langkah-langkah tindak lanjut yang diperlukan.
- Mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan capaian indikator pada tahun 2026 dengan menganalisis capaian yang belum optimal berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya.
- Laporan kinerja tahun 2025 digunakan untuk mengkaji apakah bentuk rekomendasi yang diberikan sudah cukup jelas dan mudah bagi stakeholder dalam menindaklanjutinya.
- Melaksanakan evaluasi apakah stakeholder yang sebelumnya belum menindaklanjuti sudah diberikan rencana aksi, tindak lanjut atau surat pengingat, dan sejauh mana keberhasilannya.

4) Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya.

- Melakukan penyesuaian pada perencanaan kinerja, khususnya pada sub-indikator terkait rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pemangku kepentingan
- Melakukan penyesuaian sistem monitoring dan follow-up yang lebih sistematis agar rekomendasi pengawasan tidak berhenti hanya di level surat atau rekomendasi saja sehingga dapat

9. Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Sarana distribusi sediaan farmasi adalah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan dan melakukan distribusi sediaan farmasi, yang meliputi:

- Fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi obat dan bahan obat meliputi Pedagang Besar Farmasi dan Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian;
- Fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat meliputi Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Apotek, Toko Obat dan fasilitas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Sarana yang melakukan distribusi obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang terdiri dari usaha perorangan, badan usaha di bidang pemasaran suplemen kesehatan, distributor, agen, swalayan, apotik, toko obat, depot jamu, stokis MLM, dan pengecer;
- Fasilitas distribusi sediaan farmasi meliputi fasilitas distribusi kosmetik, yaitu fasilitas distribusi pemilik notifikasi dan fasilitas distribusi bukan pemilik notifikasi.

Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Sedangkan sesuai ketentuan mengacu pada: regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana distribusi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan I Tahun 2026

Tabel 3.35 Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator	Kinerja			Kategori & Notifikasi Warna
	Target	Realisasi	%Capaian	
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,6	100,00	103,52%	Sangat Baik

Dari hasil perhitungan realisasi berbanding target, diperoleh persentase capaian indikator Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada Triwulan I tahun 2026 yaitu sebesar 103,52%. Capaian ini termasuk dalam kategori capaian yang sangat baik dengan ditandai notifikasi warna biru.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2026

Tabel 3.36 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2026 Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Target Tahun 2026	Realisasi Triwulan I	% Capaian Terhadap Target Tahunan	Kategori
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,60	100,00	103,52 	Tercapai/ Melampaui

Hasil realisasi Triwulan I pada indikator kinerja Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yaitu sebesar 100. Jika dilakukan perbandingan antara realisasi tersebut dengan target tahun 2026, diperoleh nilai persentase capaian sebesar 103,52%. Hasil ini menunjukkan bahwa realisasi Triwulan I termasuk dalam kategori tercapai/ melampaui.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Capaian pada indikator ini telah melampaui target yang ditetapkan, dengan capaian sebesar 103,52%. Hal ini menunjukkan bahwa Indikator Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan telah berhasil dicapai.

Keberhasilan pencapaian indikator ini mencerminkan adanya keterpaduan dan kesinambungan dalam seluruh tahapan pengawasan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Beberapa faktor utama yang mendukung capaian tersebut antara lain:

1. Perencanaan yang tepat sasaran

Proses perencanaan dilakukan dengan mengacu pada data analisis risiko dan hasil pemetaan tahunan menggunakan *history* hasil pengawasan fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperoleh dari Sistem Informasi Pelaporan Terpadu Badan Pengawas Obat dan Makanan RI. Penetapan prioritas sasaran pemeriksaan berbasis risiko memungkinkan kegiatan pengawasan difokuskan pada fasilitas yang memiliki potensi ketidaksesuaian tertinggi, sehingga penggunaan sumber daya menjadi lebih efektif dan tepat guna.

2. Pelaksanaan yang efisien dan sesuai SOP

Pemeriksaan dilakukan oleh petugas yang kompeten dan terlatih, dengan mengacu pada standar operasional prosedur (SOP) dan ketentuan yang berlaku. Kesiapan tim pengawas, dukungan sarana prasarana, serta koordinasi internal yang solid berkontribusi besar dalam memastikan bahwa pemeriksaan berjalan sesuai ketentuan, baik dari sisi teknis maupun administratif.

3. Pelaporan yang tepat waktu dan terintegrasi

Hasil pemeriksaan dilaporkan secara sistematis melalui Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, yang mendukung efisiensi dalam dokumentasi serta mempercepat proses penilaian dan tindak lanjut. Pemanfaatan SIPT juga mempermudah pelacakan status rekomendasi dan meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan pengawasan. Selain itu, terdapat Aplikasi Monitoring Capa Pelaku Usaha (AMOI CAKEP) yang bermanfaat untuk memonitoring ketepatan waktu petugas dalam memberikan tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana dan melaporkannya melalui SIPT.

4. Evaluasi dan Tindak Lanjut yang Konsisten

Tindak lanjut hasil pemeriksaan dilaksanakan secara cepat dan terarah, baik melalui pembinaan langsung kepada fasilitas distribusi maupun penerbitan sanksi administratif apabila diperlukan. Evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan setiap rekomendasi ditindaklanjuti tepat waktu. Koordinasi dan komunikasi yang baik dengan pelaku usaha turut mendorong tingginya tingkat kepatuhan.

Secara keseluruhan, keberhasilan ini merupakan hasil sinergi antara perencanaan strategis, pelaksanaan teknis yang disiplin, pelaporan yang tepat

waktu, serta tindak lanjut dan evaluasi yang konsisten. Capaian ini juga mencerminkan komitmen Balai POM Pangkal Pinang dalam memastikan bahwa sediaan farmasi yang beredar di masyarakat melalui jalur distribusi resmi yang berada dalam pengawasan yang ketat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Untuk menjaga keberlanjutan capaian dan meningkatkan kualitas pengawasan fasilitas distribusi sediaan farmasi, berikut adalah beberapa rekomendasi perbaikan kinerja yang dapat dilakukan:

1. Penguatan Perencanaan Berbasis Risiko

Perlu dilakukan penyempurnaan dalam pemetaan dan analisis risiko fasilitas distribusi serta pembaharuan *database* secara berkala, agar perencanaan pengawasan lebih tepat sasaran dan berbasis data terkini. Ini dapat dilakukan melalui integrasi data pengawasan tahun sebelumnya dengan hasil evaluasi risiko terbaru.

2. Peningkatan Kapasitas SDM Pengawas

Peningkatan kompetensi teknis dan administratif petugas pengawas perlu terus dilakukan secara berkelanjutan, melalui pelatihan, workshop, atau bimbingan teknis, guna memastikan pemeriksaan dilakukan sesuai standar dan mendalam.

3. Optimalisasi Penggunaan SIPT dan Sistem Pelaporan Digital

Diperlukan penguatan dalam pemanfaatan Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) agar seluruh tahapan – dari pemeriksaan hingga tindak lanjut – dapat terdokumentasi dengan baik, serta memudahkan monitoring dan pelaporan kinerja.

4. Percepatan Tindak Lanjut dan Peningkatan Pembinaan:

Mendorong pelaku usaha untuk segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan melalui peningkatan intensitas pembinaan, pendekatan persuasif, serta pemberian peringatan atau sanksi secara terstruktur bagi yang tidak patuh.

5. Monitoring dan Evaluasi Berkala

Melakukan evaluasi rutin atas tindak lanjut yang telah dilakukan dan kendala yang dihadapi, untuk dijadikan bahan perbaikan strategi pengawasan ke

depan. Aplikasi Monitoring Capa Pelaku Usaha (AMOI CAKEP) dapat dimanfaatkan untuk efisiensi proses ini.

6. Penguatan Sinergi Antar Stakeholder

Meningkatkan koordinasi lintas sektor, termasuk dengan dinas kesehatan, asosiasi profesi, asosiasi pelaku usaha, dan instansi terkait, guna memperluas jangkauan pembinaan dan mempercepat respons terhadap temuan lapangan.

Tabel 3.37 Matriks Rekomendasi Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Januari	Tidak terdapat kendala dalam pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi bulan Desember	-	-	-	-	-	-
Februari	Tidak terdapat kendala dalam pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi bulan Januari	-	-	-	-	-	-
Maret	Terdapat 1 sarana (Apotek Bunda 1) yang dikirimkan via SIPT melebihi tanggal 5 Maret sehingga tidak bisa menjadi capaian bulan Februari (Capaian terhitung 9 sarana), sedangkan target pemeriksaan bulan februari yaitu 10 sarana "	1. Melakukan pemeriksaan kembali status pengiriman SIPT agar tidak melebihi tanggal 5 bulan berikutnya 2. Memberitahukan kepada kepala Balai untuk dapat melakukan pengiriman SIPT, setelah laporan SIPT selesai diverifikasi oleh Ketua Tim	1. Melakukan pemeriksaan status pengiriman SIPT pemeriksaan sarana pelayanan kefarmasian dan distribusi obat setiap tanggal 4 bulan selanjutnya (agar tidak melebihi tanggal 5 bulan berikutnya) 2. Segera memberitahukan kepada kepala Balai untuk dapat melakukan pengiriman SIPT, setelah laporan SIPT selesai diverifikasi oleh Ketua Tim	Maret 2026	Y	O-15	Data pemeriksaan distribusi Sediaan Farmasi yang diinput pada SIPT tidak sesuai dengan jumlah sarana yang ditelaah diawasi

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan pencapaian indikator Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan yang dilaksanakan pada Triwulan I tahun 2026 didukung oleh pelaksanaan program pengawasan yang terencana dan terfokus. Penggunaan Sistem Informasi Pengawasan Terpadu (SIPT) membantu proses pelaporan dan tindak lanjut secara cepat dan akurat. Selain itu, kegiatan pembinaan kepada pelaku usaha serta koordinasi yang baik dengan lintas

sektor memperkuat efektivitas pengawasan. Monitoring dan evaluasi berkala menggunakan inovasi dari Balai POM di Pangkal Pinang yaitu AMOI CAKEP juga dioptimalkan untuk memastikan tindak lanjut berjalan sesuai ketentuan dan timeline yang telah ditetapkan, sehingga kinerja dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

f. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3.38 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian
	T	R	%	Target (RPD TW I)	Realisasi	%			
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,6	100	103,52	14.551.800	12.546.601	86,22	1,20	0,20	100% (Efisien)

1) Efisiensi penggunaan anggaran

Berdasarkan tabel 3.39, dapat diketahui bahwa realisasi anggaran untuk indikator ini yaitu mencapai 86,22% terhadap target RPD TW I, sedangkan realisasi output sebesar 100%, target output sebesar 96,6 sehingga persentase capaian output adalah 103,52% dengan tingkat efisiensi 0,20. Dengan kata lain penggunaan anggaran untuk mencapai target output pada indikator Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan capaiannya sebesar 86,22% dan termasuk dalam kategori capaian Efisien. Hal ini disebabkan karena biaya operasional yang dilakukan dalam mencapai target pada Triwulan I lebih kecil dibandingkan dengan Rencana penarikan dana yang telah ditetapkan.

2) Upaya mencapai efisiensi penggunaan anggaran

Untuk mencapai efisiensi penggunaan anggaran dalam kegiatan pengawasan sarana distribusi sediaan farmasi, perlu dilakukan optimalisasi perencanaan sehingga proses pengawasan hingga pertanggungjawaban anggaran dapat terlaksana tepat waktu. Selain itu, penggabungan jadwal dengan kegiatan pengawasan lain di lokasi yang berdekatan sehingga perjalanan petugas ke lokasi sarana lebih efektif dari sisi waktu dan biaya dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaporan dan dokumentasi turut mendukung efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator ini.

g. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

1) Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja

Pada Triwulan I Tahun 2026, Balai POM di Pangkal Pinang melakukan beberapa penyesuaian kegiatan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan capaian target IKU ini. Salah satu strategi yang diterapkan adalah penggabungan kegiatan pengawasan rutin dengan movev tindak lanjut hasil pemeriksaan, sehingga kegiatan dapat lebih efisien tanpa mengurangi kualitas. Selain itu, dilakukan perencanaan lebih awal agar pelaksanaan pemeriksaan dapat dilakukan lebih awal untuk mempercepat capaian indikator. Penambahan petugas lapangan dengan melibatkan petugas dari fungsi lain secara temporer juga dilakukan untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan di wilayah yang memiliki cakupan sarana distribusi cukup tinggi.

2) Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja

Penyesuaian anggaran dilakukan melalui revisi internal pada pos perjalanan dinas. Sebagian anggaran dari kegiatan lain yang tidak berjalan maksimal seperti kegiatan terpadu dengan pusat dialihkan untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan dan tindak lanjut. Efisiensi anggaran juga diperoleh melalui integrasi kegiatan pengawasan lintas program, sehingga beberapa kali kunjungan dapat mencakup lebih dari satu kegiatan pengawasan, termasuk pemeriksaan sarana distribusi. Hal ini mendukung pencapaian target kinerja dengan penggunaan anggaran yang lebih terarah dan terukur.

3) Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja

Hasil evaluasi terhadap Laporan Kinerja Tahun 2025 serta tindak lanjut rekomendasi yang disampaikan melalui aplikasi MADU PELAWAN menunjukkan progres capaian yang konsisten dan positif. Capaian pada tahun 2025 sebesar 101,88% dan telah melampaui target yang ditetapkan (94,75). Rekomendasi untuk menjaga kesinambungan tindak lanjut pemeriksaan telah dijalankan dengan baik, termasuk peningkatan koordinasi antar fungsi dan pemanfaatan data pengawasan tahun sebelumnya untuk menentukan prioritas pemeriksaan.

4) Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya.

Mengacu pada hasil evaluasi capaian Laporan Kinerja Tahun 2025, perencanaan TW I tahun 2026 difokuskan pada penguatan tindak lanjut hasil pengawasan, terutama pada sarana yang belum memenuhi ketentuan dan belum memberikan respon (CAPA) terhadap rekomendasi yang diberikan oleh Balai POM di Pangkal Pinang. Selain itu, akan dilakukan penyesuaian kembali target pemeriksaan untuk menyeimbangkan proporsi pengawasan antar wilayah dan menghindari potensi penumpukan pada akhir tahun. Pelaporan hasil tindak lanjut akan dioptimalkan melalui pendampingan teknis kepada petugas pengawasan dan pemanfaatan aplikasi pelaporan yang lebih terintegrasi.

10. Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Sarana distribusi pangan olahan adalah tempat melakukan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pemajangan, distribusi, pengangkutan, dan/atau penyaluran Pangan Olahan. Sedangkan pengertian diperiksa sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman pemeriksaan sarana peredaran, pedoman tindak lanjut, serta SOP terkait, meliputi:

1. Pemenuhan target sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa
2. Ketepatan waktu pelaporan
3. Kesesuaian tindak lanjut (TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan I Tahun 2026

Tabel 3.39 Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator	Kinerja			Kategori & Notifikasi Warna
	Target	Realisasi	%Capaian	
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,25	98,33	105,45%	Sangat Baik

Dari hasil perhitungan realisasi berbanding target, diperoleh persentase capaian indikator Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada Triwulan I tahun 2026 yaitu sebesar 105,45%. Capaian ini termasuk dalam kategori capaian yang sangat baik dengan ditandai notifikasi warna biru.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2026

Tabel 3.40 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2026 Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Target Tahun 2026	Realisasi Triwulan I	% Capaian Terhadap Target Tahunan	Kategori
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,25	98,33	105,45 	Tercapai/ Melampaui

Hasil realisasi Triwulan I pada indikator kinerja Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yaitu sebesar 98,33. Jika dilakukan perbandingan antara realisasi tersebut dengan target tahun 2026, diperoleh nilai persentase capaian sebesar 105,45%. Hasil ini menunjukkan bahwa realisasi Triwulan I termasuk dalam kategori tercapai/ melampaui.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Capaian pada indikator ini telah melampaui target yang ditetapkan, dengan capaian sebesar 105,45%. Hal ini menunjukkan bahwa Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan telah berhasil dicapai. Keberhasilan pencapaian indikator ini mencerminkan adanya keterpaduan dan kesinambungan dalam seluruh tahapan pengawasan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Beberapa faktor utama yang mendukung capaian tersebut antara lain:

1. Perencanaan yang tepat sasaran

Proses perencanaan dilakukan dengan mengacu pada data analisis risiko dan hasil pemetaan tahunan menggunakan *history* hasil pengawasan sarana distribusi pangan olahan yang diperoleh dari Sistem Informasi Pelaporan Terpadu Badan Pengawas Obat dan Makanan RI. Penetapan prioritas sasaran pemeriksaan berbasis risiko memungkinkan kegiatan pengawasan difokuskan pada fasilitas yang memiliki potensi ketidaksesuaian tertinggi, sehingga penggunaan sumber daya menjadi lebih efektif dan tepat guna.

2. Pelaksanaan yang efisien dan sesuai SOP

Pemeriksaan dilakukan oleh petugas yang kompeten dan terlatih, dengan mengacu pada standar operasional prosedur (SOP) dan ketentuan yang berlaku. Kesiapan tim pengawas, dukungan sarana prasarana, serta koordinasi internal yang solid berkontribusi besar dalam memastikan bahwa pemeriksaan berjalan sesuai ketentuan, baik dari sisi teknis maupun administratif.

3. Pelaporan yang tepat waktu dan terintegrasi

Hasil pemeriksaan dilaporkan secara sistematis melalui Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, yang mendukung efisiensi dalam dokumentasi serta mempercepat proses penilaian dan tindak lanjut. Pemanfaatan SIPT juga mempermudah pelacakan status rekomendasi dan meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan pengawasan. Selain itu, terdapat Aplikasi Monitoring Capa Pelaku Usaha (AMOI CAKEP) yang bermanfaat untuk memonitoring ketepatan waktu petugas dalam memberikan tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana dan melaporkannya melalui SIPT.

4. Evaluasi dan Tindak Lanjut yang Konsisten

Tindak lanjut hasil pemeriksaan dilaksanakan secara cepat dan terarah, baik melalui pembinaan langsung kepada sarana distribusi maupun penerbitan sanksi administratif apabila diperlukan. Evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan setiap rekomendasi ditindaklanjuti tepat waktu. Koordinasi dan komunikasi yang baik dengan pelaku usaha turut mendorong tingginya tingkat kepatuhan.

d. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Untuk menjaga keberlanjutan capaian dan meningkatkan kualitas pengawasan sarana distribusi pangan olahan, berikut adalah beberapa rekomendasi perbaikan kinerja yang dapat dilakukan:

1. Penguatan Perencanaan Berbasis Risiko

Perlu dilakukan penyempurnaan dalam pemetaan dan analisis risiko sarana distribusi serta pembaharuan *database* secara berkala, agar perencanaan pengawasan lebih tepat sasaran dan berbasis data terkini. Ini dapat dilakukan melalui integrasi data pengawasan tahun sebelumnya dengan hasil evaluasi risiko terbaru.

2. Peningkatan Kapasitas SDM Pengawas

Peningkatan kompetensi teknis dan administratif petugas pengawas perlu terus dilakukan secara berkelanjutan, melalui pelatihan, workshop, atau bimbingan teknis, guna memastikan pemeriksaan dilakukan sesuai standar dan mendalam.

3. Optimalisasi Penggunaan SIPT dan Sistem Pelaporan Digital

Diperlukan penguatan dalam pemanfaatan Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) agar seluruh tahapan – dari pemeriksaan hingga tindak lanjut – dapat terdokumentasi dengan baik, serta memudahkan monitoring dan pelaporan kinerja.

4. Percepatan Tindak Lanjut dan Peningkatan Pembinaan:

Mendorong pelaku usaha untuk segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan melalui peningkatan intensitas pembinaan, pendekatan persuasif, serta pemberian peringatan atau sanksi secara terstruktur bagi yang tidak patuh.

5. Monitoring dan Evaluasi Berkala

Melakukan evaluasi rutin atas tindak lanjut yang telah dilakukan dan kendala yang dihadapi, untuk dijadikan bahan perbaikan strategi pengawasan ke depan. Aplikasi Monitoring Capa Pelaku Usaha (AMOI CAKEP) dapat dimanfaatkan untuk efisiensi proses ini.

Dengan penerapan strategi tersebut secara konsisten, diharapkan kinerja pengawasan terhadap sarana distribusi pangan olahan dapat terus ditingkatkan dan berkontribusi pada perlindungan keamanan pangan olahan yang dikonsumsi oleh masyarakat.

Tabel 3.41 Matriks Rekomendasi Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Januari	Tidak terdapat kendala dalam pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan bulan Desember	-	-	-	-	-	-
Februari	Realisasi sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada bulan Januari sebesar 94.17%. Hal ini disebabkan adanya ketidaktepatan dalam memberikan tindak lanjut ke 1 Sardist Pangan Modern (Perihal surat TL yang dibuat yaitu "Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan", Seharusnya yaitu "Peringatan Keras" karena adanya Temuan Produk PIRT yang telah habis masa berlaku NIE nya)	Akan dilakukan verifikasi yang lebih detail terkait surat tindak lanjut yang akan dikirimkan ke sarana	Melakukan verifikasi kesesuaian TL saat akan melakukan verifikasi Surat TL di SRIKANDI dan verifikasi Surat TL sebelum dikirimkan melalui SIPT	Februari 2026	T	-	-
Maret	Tidak terdapat kendala dalam pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan bulan februari	Ketua tim agar segera menginfokan kepada kepala Balai untuk dapat melakukan pengiriman SIPT, setelah laporan SIPT selesai diverifikasi oleh Ketua Tim	Melakukan konfirmasi kembali via Whatsapp kepada kepala balai setiap selesai melakukan verifikasi laporan SIPT	Maret 2026	T	-	-

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan pencapaian indikator Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan yang dilaksanakan pada Triwulan I tahun 2026 didukung oleh pelaksanaan program pengawasan yang terencana dan terfokus. Penggunaan Sistem Informasi Pengawasan Terpadu (SIPT) membantu proses pelaporan dan tindak lanjut secara cepat dan akurat. Selain itu, kegiatan pembinaan kepada pelaku usaha serta koordinasi yang baik dengan lintas sektor memperkuat efektivitas pengawasan. Monitoring dan evaluasi berkala menggunakan inovasi dari Balai POM di Pangkal Pinang yaitu AMOI CAKEP juga dioptimalkan untuk memastikan tindak lanjut berjalan sesuai ketentuan dan timeline yang telah ditetapkan, sehingga kinerja dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

f. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3.42 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian
	T	R	%	Target (RPD TW I)	Realisasi	%			
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,25	98	105,45	49.526.200	77.701.250	156,89	0,67	-0,33	Tidak Efisien

1) Efisiensi penggunaan anggaran

Berdasarkan tabel 3.43, dapat diketahui bahwa realisasi anggaran untuk indikator ini yaitu mencapai 156,89% terhadap target RPD TW I, sedangkan realisasi output sebesar 98,33 sehingga persentase capaian output adalah 105,45% dengan tingkat efisiensi-0,33. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran pada indikator Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan dikategorikan “Tidak Efisien”. Kondisi tersebut terjadi karena terdapat beberapa kegiatan yang terealisasi melebihi nilai Rencana Penarikan Dana (RPD) yang telah ditetapkan sebelumnya. Akibatnya, penyerapan anggaran menjadi tidak sesuai karena realisasi belanja melampaui alokasi yang direncanakan pada periode tersebut.

2) Upaya mencapai efisiensi penggunaan anggaran

Untuk mencapai efisiensi penggunaan anggaran pada indikator Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan, dilakukan upaya optimalisasi perencanaan kegiatan berbasis prioritas dan risiko, sehingga pemeriksaan difokuskan pada sarana dengan potensi ketidaksesuaian yang tinggi. Selain itu, pelaksanaan kegiatan dilakukan secara terpadu dengan kegiatan sejenis guna menghemat biaya operasional, serta didukung pemanfaatan teknologi informasi untuk pelaporan dan dokumentasi hasil pengawasan. Pengendalian dan pemantauan realisasi anggaran dilakukan secara berkala agar pelaksanaan kegiatan tetap sesuai dengan rencana penarikan dana (RPD) yang telah ditetapkan.

g. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

1) Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja

Pada Triwulan I Tahun 2026, Balai POM di Pangkal Pinang melakukan beberapa penyesuaian kegiatan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan capaian target IKU ini. Salah satu strategi yang diterapkan adalah penggabungan kegiatan pengawasan rutin dengan kegiatan intensifikasi pengawasan pangan olahan ramadhan dan lebaran idul fitri, sehingga kegiatan dapat lebih efisien tanpa mengurangi kualitas. Selain itu, dilakukan perencanaan lebih awal agar pelaksanaan pemeriksaan dapat dilakukan lebih awal untuk mempercepat capaian indikator. Penambahan petugas lapangan dengan melibatkan petugas dari fungsi lain secara temporer juga dilakukan untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan di wilayah yang memiliki cakupan sarana distribusi cukup tinggi.

2) Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja

Penyesuaian anggaran dilakukan melalui revisi internal pada pos perjalanan dinas. Sebagian anggaran dari kegiatan lain yang tidak berjalan maksimal seperti kegiatan terpadu dengan pusat dialihkan untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan dan tindak lanjut. Efisiensi anggaran juga diperoleh melalui integrasi kegiatan pengawasan lintas program, sehingga beberapa kali kunjungan dapat mencakup lebih dari satu kegiatan pengawasan, termasuk pemeriksaan sarana distribusi. Hal ini mendukung pencapaian target kinerja dengan penggunaan anggaran yang lebih terarah dan terukur.

3) Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja

Hasil evaluasi terhadap Laporan Kinerja Tahun 2025 serta tindak lanjut rekomendasi yang disampaikan melalui aplikasi MADU PELAWAN menunjukkan progres capaian yang konsisten dan positif. Capaian pada tahun 2025 sebesar 102,42% dan telah melampaui target yang ditetapkan (91). Rekomendasi untuk menjaga kesinambungan tindak lanjut pemeriksaan telah dijalankan dengan baik, termasuk peningkatan koordinasi antar fungsi dan pemanfaatan data pengawasan tahun sebelumnya untuk menentukan prioritas pemeriksaan.

4) Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya.

Mengacu pada hasil evaluasi capaian Laporan Kinerja Tahun 2025, perencanaan TW I tahun 2026 difokuskan pada penguatan tindak lanjut hasil pengawasan, terutama pada sarana yang belum memenuhi ketentuan dan

belum memberikan respon (CAPA) terhadap rekomendasi yang diberikan oleh Balai POM di Pangkal Pinang. Selain itu, akan dilakukan penyesuaian kembali target pemeriksaan untuk menyeimbangkan proporsi pengawasan antar wilayah dan menghindari potensi penumpukan pada akhir tahun. Pelaporan hasil tindak lanjut akan dioptimalkan melalui pendampingan teknis kepada petugas pengawasan dan pemanfaatan aplikasi pelaporan yang lebih terintegrasi.

11. Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan

Indikator Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja Balai POM di Pangkal Pinang. Yang dimaksud Iklan sediaan farmasi disini mencakup Iklan Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi.

Sedangkan yang dimaksud dari Iklan sendiri adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan dalam bentuk visual, audio, audiovisual, untuk pemasaran dan/atau perdagangan Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan. Kemudian yang dimaksud diawasi sesuai ketentuan berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan; pedoman pengawasan periklanan obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan; pedoman tindak lanjut; serta *timeline* yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Adapun untuk perhitungan persentase capaian pada indikator ini dengan cara menghitung rata-rata capaian persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = $(A+B+C+D+E)/5$

$$A. \text{ Persentase Iklan obat yang diawasi sesuai ketentuan } = \frac{a+b}{2}$$

a. Pemenuhan jumlah target pengawasan

$$= \frac{\text{Jumlah iklan yang selesai diawasi}}{\text{Jumlah target iklan yang diawasi sesuai rencana}} \times 100\%$$

b. Ketepatan waktu pelaporan

$$= \frac{\text{Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu}}{\text{Jumlah target iklan yang diawasi}} \times 100\%$$

- B.. Persentase iklan Obat Bahan Alam dan Obat Kuasi yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata (a+b+c)
- Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang selesai diawasi/ jumlah target iklan pengawasan sesuai Renlak) X100%
 - Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah iklan yang selesai diawasi) X 100%
 - Akurasi pengambilan keputusan = (Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai/ jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan) X 100%
- C. Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata (a+b+c)
- Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang selesai diawasi/ jumlah target iklan pengawasan sesuai Renlak) X100%
 - Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah iklan yang selesai diawasi) X 100%
 - Akurasi pengambilan keputusan = (Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai/ jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan) X 100%
- D. Persentase iklan kosmetik yang diawasi sesuai ketentuan = (a+b) / 2
- Rerata persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = Jumlah persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target / jumlah media (4)
 - Persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = (capaian jumlah iklan per media / jumlah target per media) x 100%
- Keterangan : capaian per media tidak lebih dari sama dengan 100%
- Rerata persentase iklan yang dilaporkan tepat waktu = (Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT + Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat) / 2
 - Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT = (Jumlah iklan yang evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT yang tepat waktu / jumlah iklan yang dievaluasi) x 100%

- Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat = $(\text{Jumlah iklan yang dilaporkan ke Operator Pusat yang tepat waktu} / \text{jumlah iklan yang dievaluasi}) \times 100\%$

E. Persentase iklan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = $(a+b+c)$

- Pemenuhan target pengawasan = $(\text{Jumlah iklan yang diawasi} / \text{jumlah target iklan sesuai renlak}) \times 40\%$
- Kesesuaian proporsi media iklan yang disampling = Rata-rata dari perhitungan $((\text{jumlah iklan yang diawasi per media iklan} / \text{jumlah iklan yang diawasi}) / \text{proporsi target media}) \times 20\%$
- Ketepatan waktu pelaporan = $(\text{Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu} / \text{jumlah iklan yang diawasi}) \times 40\%$

Catatan: poin a dan b, jika realisasi di atas target maka realisasi maksimal dihitung 100%

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan I Tahun 2026

Tabel 3.43 Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan

Indikator	Kinerja			Kategori & Notifikasi Warna
	Target	Realisasi	%Capaian	
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	93,83	93,34	99,48%	Baik

Pada Triwulan I, realisasi persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan oleh Balai POM di Pangkal Pinang mencapai 93,34%. Persentase tersebut dibawah target triwulanan, dengan capaian terhadap target triwulan I tahun 2026 sebesar 99,48%, yang dikategorikan dalam kriteria Baik.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2026

Tabel 3.44 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2026 Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Target Tahun 2026	Realisasi Triwulan I	% Capaian Terhadap Target Tahunan	Kategori
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	93,83	93,34	99,48 	Akan Tercapai

Pada Triwulan I, realisasi persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan oleh Balai POM di Pangkal Pinang mencapai 99,48%. Persentase tersebut masih di bawah target, dengan capaian terhadap target tahunan tahun 2026 sebesar 99,48%, yang dikategorikan dalam kriteria akan tercapai.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Capaian indikator Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan pada Triwulan I Tahun 2026 sebesar 93,34% atau 99,48% terhadap target tahunan 93,83% menunjukkan bahwa kinerja belum sepenuhnya mencapai target, namun masih berada dalam kategori “Akan Tercapai”. Belum optimalnya capaian ini terutama disebabkan oleh adanya keterlambatan dalam pelaporan pada bulan Januari 2026, yang berdampak pada belum terpenuhinya seluruh hasil pengawasan dalam periode pelaporan Triwulan I. Keterlambatan tersebut memengaruhi nilai realisasi yang tercatat, meskipun secara substantif kegiatan pengawasan telah dilaksanakan. Dengan demikian, diperlukan perbaikan dalam ketepatan waktu pelaporan, penguatan sistem monitoring, serta peningkatan koordinasi internal agar capaian kinerja pada periode selanjutnya dapat tercatat secara optimal dan target tahunan dapat tercapai.

d. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan difokuskan pada peningkatan ketepatan waktu dan kualitas pelaporan, antara lain melalui penguatan sistem monitoring dan evaluasi pelaporan secara berkala, penerapan mekanisme pengingat (reminder) dan batas waktu yang lebih tegas, serta optimalisasi

pemanfaatan sistem pelaporan yang diinput secara tepat waktu. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan koordinasi dan komunikasi internal untuk memastikan kelancaran alur pelaporan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan keterlambatan pelaporan tidak terulang dan capaian kinerja pada periode selanjutnya dapat tercatat secara optimal serta target tahunan dapat tercapai.

Tabel 3.45 Matriks Rekomendasi Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Januari	Pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan bulan Januari telah dilaksanakan dengan realisasi 81,83% Kendala: adanya keterlambatan pelaporan iklan ke operator pusat sehingga target tidak terpenuhi	Segera meneruskan laporan penandaan iklan dari supervisor ke Kepala Balai	Melakukan penarikan data di SIPT untuk setiap pelaporan iklan di setiap bulan agar dapat diverifikasi ketepatan waktu pengiriman dari balai ke operator pusat	Februari	Ya	O-19	Pelaporan pengawasan iklan obat di SIPT tidak dilaporkan tepat waktu sesuai dengan ketentuan
Februari	Pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan bulan Februari telah dilaksanakan dengan realisasi 92,23%	Segera meneruskan laporan penandaan iklan dari supervisor ke Kepala Balai	Melakukan penarikan data di SIPT untuk setiap pelaporan iklan di setiap bulan agar dapat diverifikasi ketepatan waktu pengiriman dari balai ke operator pusat	Maret	Ya	O-19	Pelaporan pengawasan iklan obat di SIPT tidak dilaporkan tepat waktu sesuai dengan ketentuan
Maret	Pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan bulan Maret telah dilaksanakan dengan realisasi 93,34% - Kendala dalam pemenuhan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan - Terdapat pelaporan iklan OBA dan SK yang dilaporkan tidak tepat waktu - Terdapat keterbatasan media luar ruang yang diawasi untuk iklan kosmetik	- Melakukan verifikasi data iklan yang telah dientri agar tidak melebihi tanggal yang telah ditetapkan di SIPT - Segera meneruskan laporan penandaan iklan dari supervisor ke Kepala Balai"	- Melakukan penarikan data di SIPT untuk setiap pelaporan iklan di setiap bulan - Melakukan konfirmasi segera kepada kepala balai jika sudah meneruskan data Iklan di setiap bulannya	April	Ya	O-19	Pelaporan pengawasan iklan obat di SIPT tidak dilaporkan tepat waktu sesuai dengan ketentuan

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Berdasarkan tabel kendala, rekomendasi, dan tindak lanjut kegiatan pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan periode Januari–Maret

2026, dapat dianalisis bahwa program/kegiatan pengawasan iklan secara umum telah mendukung ketercapaian kinerja, meskipun masih terdapat beberapa faktor yang menghambat optimalisasi capaian. Kegiatan yang paling mendukung ketercapaian kinerja adalah pelaksanaan pengawasan rutin yang disertai dengan tindak lanjut berupa verifikasi data di sistem pelaporan (SIPT) serta penarikan dan perbaikan data secara berkala setiap bulan, yang terbukti mampu meningkatkan realisasi capaian dari 81,83% pada Januari menjadi 93,34% pada Maret. Selain itu, adanya mekanisme koordinasi berjenjang melalui penyampaian laporan dari supervisor kepada pimpinan juga memperkuat akuntabilitas pelaksanaan kegiatan. Namun demikian, terdapat kegiatan yang belum optimal dalam mendukung pencapaian kinerja, terutama yang berkaitan dengan ketepatan waktu pelaporan dan keterbatasan pengawasan, seperti keterlambatan pelaporan yang berdampak pada belum maksimalnya capaian pada awal periode. Jika dikaitkan dengan alokasi anggaran, kegiatan pengawasan yang bersifat rutin dan administratif cenderung tidak memerlukan anggaran besar namun memberikan dampak signifikan terhadap capaian kinerja, sedangkan keterbatasan sumber daya dan cakupan pengawasan mengindikasikan perlunya optimalisasi penggunaan anggaran, khususnya untuk mendukung perluasan jangkauan pengawasan dan peningkatan kapasitas pelaporan. Dengan demikian, efektivitas program lebih ditentukan oleh kualitas pelaksanaan, koordinasi, dan ketepatan waktu pelaporan dibandingkan besaran anggaran semata.

f. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3.46 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan

Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian
	T	R	%	Target (RPD TW I)	Realisasi	%			
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	93,83	93,34	99,48	0	0	-	-	-	-

1) Efisiensi penggunaan anggaran

Berdasarkan tabel di atas, efisiensi tidak dapat dihitung karena untuk memenuhi indikator Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan tidak membutuhkan anggaran.

2) Upaya mencapai efisiensi penggunaan anggaran

Efisiensi anggaran diupayakan melalui optimalisasi perencanaan kegiatan, khususnya dengan mengintegrasikan jadwal pengawasan lintas program untuk menekan biaya operasional contohnya melakukan pengawasan iklan bersamaan dengan saat pemeriksaan sarana maupun saat sampling produk obat dan makanan. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaporan dan dokumentasi turut mengurangi penggunaan sumber daya manual. Selain itu, pendekatan pengawasan berbasis risiko memungkinkan fokus pada sasaran prioritas dan sinergi lintas sektor membantu memperluas cakupan tanpa menambah beban anggaran. Ke depan, diperlukan penyesuaian antara capaian kinerja dan penggunaan anggaran agar lebih proporsional, sehingga tingkat efisiensi dapat ditingkatkan dan penggunaan anggaran menjadi lebih optimal.

g. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

1) Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja

Selama pelaksanaan Triwulan I, Balai POM di Pangkal Pinang melakukan beberapa penyesuaian kegiatan untuk mempertahankan capaian indikator, yang sebelumnya telah melampaui target pada tahun 2025. Penyesuaian tersebut antara lain :

- Penggabungan kegiatan pengawasan iklan secara digital dan manual ke dalam satu kegiatan terintegrasi agar lebih efisien dalam penggunaan sumber daya.
- Perubahan perencanaan pelaksanaan kegiatan pengawasan, dengan fokus pada media digital dan platform yang memiliki trafik tinggi serta potensi pelanggaran lebih besar.
- Penambahan frekuensi pemantauan terhadap media sosial dan platform e-commerce yang berisiko tinggi terhadap penyebaran iklan yang tidak sesuai ketentuan.
- Peningkatan kolaborasi antar-fungsi, khususnya dengan fungsi penindakan untuk memanfaatkan hasil patroli siber dalam pengawasan iklan yang tidak sesuai ketentuan.

2) Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja

Dalam upaya mendukung pencapaian kinerja indikator ini, dilakukan pula penyesuaian anggaran. Beberapa penyesuaian yang dilakukan antara lain:

- Penguatan anggaran operasional pemantauan iklan dilakukan melalui revisi anggaran pada pos perjalanan dinas, sehingga kegiatan pengawasan iklan dapat dilaksanakan secara terpadu bersama pengawasan rutin
- Pengalihan sebagian anggaran perjalanan dinas untuk mendukung kegiatan pengawasan dan peningkatan kapasitas petugas dalam menilai kepatuhan iklan

3) Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja

Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Triwulan III menunjukkan bahwa indikator berhasil dipertahankan di atas target, meskipun terdapat sedikit penurunan capaian dibanding Triwulan I. Capaian ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan iklan berjalan cukup stabil dan responsif.

Tindak lanjut atas rekomendasi kinerja yang tertuang dalam Lapkin tahun 2025 dan hasil monitoring bulanan MADU PELAWAN juga telah dilaksanakan, antara lain :

- Peningkatan intensitas pengawasan media sosial yang sebelumnya diidentifikasi sebagai sumber dominan pelanggaran.
- Penyempurnaan dokumentasi pelaporan dan pemetaan risiko media iklan secara berkala agar GAP antara penilaian UPT dan Pusat dapat dikurangi

4) Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya.

Berdasarkan hasil monev bulan Maret melalui platform MADU PELAWAN dan evaluasi capaian TW I, beberapa penyesuaian akan dilakukan pada Triwulan II untuk menjaga keberlanjutan kinerja, antara lain:

- Pemetaan dan pengelompokan platform iklan berisiko tinggi untuk dijadikan prioritas pemantauan berkala.
- Pelaksanaan pelatihan teknis internal melalui aplikasi pelatihan mandiri IDEAS terkait identifikasi pelanggaran iklan dan penguatan regulasi.
- Penyesuaian target bulanan, agar pelaksanaan lebih terukur dan progres capaian lebih mudah dikendalikan

12. Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai

Standar

- a. Label Produk tembakau dan atau rokok elektronik adalah setiap keterangan mengenai produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada produk tembakau, dimasukkan ke dalam, ditempatkan pada atau merupakan bagian dari kemasan produk tembakau.
- b. Pengawasan Label dilaksanakan dengan menilai kesesuaian terhadap standar pencantuman Peringatan Kesehatan termasuk Informasi pada Kemasan Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik.
- c. Pengawasan Label dilakukan terhadap kemasan sampel Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang diambil di peredaran (tempat penjualan dan/atau distributor).
- d. Sesuai standar berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan mencakup peraturan pemerintah, petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan produk tembakau; pedoman tindak lanjut dan ketentuan lain yang berlaku.
- e. Produk Tembakau adalah setiap produk yang seluruhnya atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dipanaskan, diuapkan, dihisap, dihirup, dikunyah, atau dengan cara konsumsi apapun. Produk Tembakau tersebut meliputi:
 - a.rokok;
 - b.cerutu;
 - c.rokok daun;
 - d.tembakau iris;
 - e. tembakau padat dan cair dan;
 - f.hasil pengolahan tembakau lainnya.
- f. Rokok Elektronik adalah hasil tembakau dan/atau nikotin dan/atau bahan lain berbentuk cair, padat, atau bentuk lainnya yang berasal dari pengolahan daun tembakau maupun bahan lainnya yang Dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektronik kemudian dihisap.

Cara Perhitungan Dan Formula:

% Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar
 $= (A+B)/2$

Keterangan:

A: Persentase Pemenuhan jumlah target pengawasan label :

(Jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang selesai diawasi /
 Jumlah target pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang
 diawasi) x 100%

B: Persentase ketepatan waktu pelaporan label:

(Jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang selesai diawasi dan
 dilaporkan tepat waktu / Jumlah target pengawasan label produk tembakau
 dan/atau rokok elektronik yang diawasi) x 100%

Keterangan:

- Jumlah label yang selesai diawasi adalah jumlah label yang telah selesai diinput melalui SIPT dan dikirimkan oleh Kepala UPT ke BPOM Pusat.
- Jumlah target label yang diawasi adalah jumlah target yang ditetapkan untuk masing-masing UPT yang telah ditetapkan BPOM pusat setiap tahunnya dan disampaikan melalui surat edaran.
- Jumlah label yang dilaporkan tepat waktu adalah jumlah label yang selesai diawasi, dilaporkan dan dikirimkan oleh Kepala UPT ke BPOM Pusat melalui SIPT secara periodik setiap bulan paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya.
- Sumber data baik jumlah label maupun ketepatan waktu pelaporan berasal dari data tarikan laporan pengawasan penandaan pada aplikasi SIPT.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan I Tahun 2026

Tabel 3.47 Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar

Indikator	Kinerja			Kategori & Notifikasi Warna
	Target	Realisasi	%Capaian	
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	84,04	100,00	118,99%	Tidak Dapat Disimpulkan

Pada Triwulan I, realisasi persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar oleh Balai POM di Pangkal Pinang mencapai 100 %. Persentase tersebut telah melampaui target triwulan, dengan capaian terhadap target triwulan I tahun 2026 sebesar 118,99%, yang dikategorikan dalam kategori tidak dapat disimpulkan.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2026

Tabel 3.48 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2026 Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Target Tahun 2026	Realisasi Triwulan I	% Capaian Terhadap Target Tahunan	Kategori
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	84,04	100,00	118,99 	Tercapai/Melampaui

Pada Triwulan I, realisasi persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar oleh Balai POM di Pangkal Pinang mencapai 118,99%. Persentase tersebut telah melampaui target tahunan, dengan capaian terhadap target tahun 2026 sebesar 84,04 %, yang dikategorikan dalam kriteria Tercapai/Melampaui.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Keberhasilan capaian indikator Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar pada Triwulan I Tahun 2026 oleh Balai POM di Pangkal Pinang menunjukkan kinerja yang sangat baik, dengan realisasi capaian sebesar 118,99% dari target yang telah ditetapkan. Secara umum, capaian kinerja tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Peningkatan kinerja terutama didorong oleh pelaksanaan kegiatan pengawasan yang dilakukan secara lebih terencana, terarah, dan berfokus pada pemenuhan standar pelabelan produk tembakau dan/atau rokok elektronik.

Selain itu, peningkatan kapasitas petugas pengawas melalui kegiatan bimbingan teknis terkait ketentuan penandaan dan pelabelan produk turut berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas pelaksanaan pengawasan di lapangan. Faktor pendukung lainnya adalah pemanfaatan sistem pelaporan melalui SIPT yang telah berjalan lebih tertib, terintegrasi, dan akurat, sehingga memudahkan

proses pemantauan, pelaporan, serta validasi data hasil pengawasan. Sinergi antara pelaksanaan pengawasan yang terstruktur, peningkatan kompetensi petugas, dan optimalisasi sistem pelaporan menjadi kunci keberhasilan dalam pencapaian kinerja indikator ini pada periode pelaporan.

d. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan dalam pelaksanaan pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik difokuskan pada penguatan strategi dan efektivitas kegiatan pengawasan. Ke depan, Balai POM di Pangkal Pinang perlu melakukan perencanaan pengawasan yang lebih terstruktur dan berbasis risiko, dengan mempertimbangkan sebaran produk di wilayah pengawasan agar pelaksanaan kegiatan menjadi lebih tepat sasaran dan efisien. Selain itu, peningkatan kapasitas dan kompetensi petugas pengawas akan terus dilakukan melalui kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis secara berkala, khususnya terkait dengan ketentuan terbaru mengenai pelabelan produk tembakau dan rokok elektronik.

Optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan Terpadu (SIPT) juga menjadi fokus utama perbaikan, dengan memastikan ketertiban, akurasi, dan validitas data yang diinput melalui mekanisme monitoring dan evaluasi rutin. Dalam mendukung hal tersebut, koordinasi dan sinergi antar unit terkait, baik di tingkat pusat maupun UPT Balai POM, akan terus diperkuat untuk memastikan keseragaman interpretasi standar pelabelan dan peningkatan efektivitas pengawasan di lapangan. Selain itu, penyusunan dan pemutakhiran database pengawasan akan dilakukan secara berkelanjutan untuk menyediakan data yang lebih komprehensif dan terintegrasi, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan pengawasan berikutnya.

Tabel 3.49 Matriks Rekomendasi Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Januari	Pengawasan label tembakau pada bulan Januari telah dilaksanakan sesuai dengan target bulanan dengan realisasi 100%	Melakukan verifikasi data produk tembakau yang telah diawasi agar tidak melebihi tanggal yang telah ditetapkan di SIPT	Melakukan penarikan data di SIPT untuk setiap pelaporan di setiap bulan	Februari	Ya	O-65	Adanya pengambilan sampel secara berulang terhadap merek produk tembakau yang sama.
Februari	Pengawasan label tembakau pada bulan Februari telah dilaksanakan sesuai dengan target bulanan dengan realisasi 100%	Melakukan verifikasi data produk tembakau yang telah diawasi agar tidak melebihi tanggal yang telah ditetapkan di SIPT	Melakukan penarikan data di SIPT untuk setiap pelaporan di setiap bulan	Maret	Ya	O-65	Adanya pengambilan sampel secara berulang terhadap merek produk tembakau yang sama.
Maret	Pengawasan label tembakau pada bulan Maret telah dilaksanakan sesuai dengan target bulanan dengan realisasi 100%	Melakukan verifikasi data produk tembakau yang telah diawasi agar tidak melebihi tanggal yang telah ditetapkan di SIPT	Melakukan penarikan data di SIPT untuk setiap pelaporan di setiap bulan Melakukan konfirmasi segera kepada Kepala balai setelah meneruskan SIPT di setiap bulannya	April	Ya	O-65	Adanya pengambilan sampel secara berulang terhadap merek produk tembakau yang sama.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Capaian kinerja indikator Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar pada Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan realisasi yang melampaui target. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung peningkatan efektivitas pengawasan di lapangan. Salah satu kegiatan utama yang berkontribusi signifikan adalah pelaksanaan pengawasan rutin dan terjadwal terhadap produk tembakau dan rokok elektronik, yang dilakukan secara sistematis.

Selain itu Implementasi Sistem Informasi Pengawasan Terpadu (SIPT) juga menjadi faktor pendukung penting, karena memungkinkan proses pelaporan hasil pengawasan dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan terdokumentasi dengan baik.

f. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3.50 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar

Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian
	T	R	%	Target (RPD TW I)	Realisasi	%			
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	84,04	100	118,99	1.088.100	957.100	87,96	1,35	0,35	95% (Efisien)

1) Efisiensi penggunaan anggaran

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai indikator Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar sebesar 87,96 %, jika dibandingkan antara target RPD dan realisasi anggaran. Jika dibandingkan antara capaian kinerja dan realisasi anggaran, diperoleh tingkat efisiensi sebesar 0,35 dengan capaian 95 % (efisien). Hal ini didukung oleh perencanaan kegiatan berbasis risiko yang tepat sasaran, pemanfaatan SIPT untuk pelaporan digital, serta pelaksanaan pengawasan yang terintegrasi dan optimalisasi dalam penggunaan anggaran. Pencapaian ini akan terus dioptimalkan pada triwulan berikutnya.

2) Upaya mencapai efisiensi penggunaan anggaran

Dalam upaya mencapai efisiensi penggunaan anggaran pada indikator Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar, Balai POM di Pangkal Pinang menerapkan strategi pengawasan berbasis risiko dengan memprioritaskan pengawasan pada produk yang memiliki potensi ketidaksesuaian tinggi, sehingga penggunaan anggaran menjadi lebih tepat sasaran. Kegiatan pengawasan dilaksanakan secara terpadu dengan kegiatan lain di bidang obat dan makanan untuk mengoptimalkan sumber daya serta menekan biaya operasional. Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan Terpadu (SIPT) juga turut meningkatkan efisiensi melalui proses pelaporan elektronik yang lebih cepat dan hemat biaya administrasi.

g. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan informasi kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja tahun 2025:

1) Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja

Penyesuaian kegiatan dilakukan sebagai strategi untuk mencapai target kinerja melalui integrasi pelaksanaan pengawasan produk tembakau dengan kegiatan pengawasan obat dan makanan lainnya. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengawasan di lapangan, dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal serta memperluas cakupan pengawasan dalam satu waktu pelaksanaan

2) Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja

Penyesuaian kegiatan dilakukan sebagai upaya mencapai target kinerja dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi anggaran, melalui integrasi pelaksanaan pengawasan produk tembakau dengan kegiatan pengawasan obat dan makanan lainnya. Pendekatan ini memungkinkan optimalisasi penggunaan sumber daya, baik dari sisi pembiayaan, waktu, maupun tenaga, sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi lebih hemat tanpa mengurangi kualitas pengawasan.

3) Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja

Pencapaian keberhasilan kinerja didukung oleh komitmen petugas dalam melaksanakan pengawasan produk tembakau secara konsisten dan sesuai ketentuan, serta didukung oleh kedisiplinan dalam penyampaian laporan secara tepat waktu

4) Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya.

Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode selanjutnya dilakukan sebagai langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas pencapaian target, dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan kinerja pada periode sebelumnya. Melalui penyesuaian tersebut, diharapkan perencanaan kinerja menjadi lebih realistis, terukur, dan adaptif terhadap kondisi yang ada, termasuk dalam hal ketersediaan sumber daya dan dinamika pelaksanaan kegiatan di lapangan.

13. Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah UPT

Indikator “Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT” mengukur kesesuaian Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM dalam melaksanakan kegiatan pengendalian Antimicrobial Resistance (AMR) dan mencapai target yang telah ditetapkan. Target yang dimaksud adalah indikator teknis pengendalian AMR sebagaimana tertuang dalam rencana aksi pengendalian AMR di lingkungan Badan POM.

Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah UPT dihitung berdasarkan rerata capaian UPT dalam melaksanakan rencana aksi pengendalian AMR sesuai target yang ditetapkan, yaitu:

- 1) Penggunaan Tools Pengawasan AMR (A)
- 2) Pelaksanaan Bimtek (B)
- 3) Pelaksanaan Advokasi (C), dan
- 4) Pelaksanaan Publikasi (D)

Formula untuk menghitung “Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT” yaitu:

$$\text{Capaian UPT} = 25\% A + 25\% B + 25\% C + 25\% D$$

Penilaian pemenuhan target pengendalian AMR dihitung dengan cara:

- 1) 25% dari persentase jumlah penggunaan dan ketepatan pengisian tools antibiotik pada pemeriksaan Apotek (A).
(A) dihitung berdasarkan jumlah penggunaan tools antibiotik terhadap jumlah target apotek dan ketepatan pengisian setiap pertanyaan dalam tools antibiotik.
- 2) 25% dari persentase capaian pelaksanaan bimbingan teknis terkait pengendalian resistensi antimikroba (B).
(B) dihitung berdasarkan Jumlah kegiatan bimbingan teknis kepada sarana pelayanan kefarmasian khususnya Apotek dengan topik pengendalian resistensi antimikroba dibandingkan target tahunan bagi setiap UPT
- 3) 25% dari persentase capaian pelaksanaan advokasi lintas sektor terkait pengendalian resistensi antimikroba (C).

(C) dihitung berdasarkan Jumlah kegiatan advokasi dengan stakeholder dalam topik pengendalian resistensi antimikroba dibandingkan target tahunan bagi setiap UPT.

4) 25% dari persentase capaian publikasi hasil pengawasan apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter (D).

(D) dihitung berdasarkan Jumlah publikasi hasil pengawasan apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter

Formula:

Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT

$$= 25\% A + 25\% B + 25\% C + 25\% D$$

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan I Tahun 2026

Tabel 3.51 Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah UPT

Indikator	Kinerja			Kategori & Notifikasi Warna
	Target	Realisasi	%Capaian	
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	-	-	-	

Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah UPT merupakan target tahunan yang capaiannya baru bisa diukur di akhir periode tahun 2026 sehingga belum bisa dievaluasi pencapaian targetnya pada Triwulan I.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2026

Tabel 3.52 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2026 Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah UPT

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Target Tahun 2026	Realisasi Triwulan I	% Capaian Terhadap Target Tahunan	Kategori
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	-	-	

Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah UPT merupakan target tahunan yang capaiannya baru bisa diukur di akhir periode tahun 2026 sehingga belum bisa dievaluasi perbandingan antara pencapaian targetnya pada Triwulan I dan target tahun 2026.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Capaian kinerja indikator Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT pada periode pelaporan dipengaruhi oleh efektivitas pelaksanaan kegiatan pengendalian resistensi antimikroba (AMR) di masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT). Secara umum, keberhasilan atau peningkatan kinerja dicapai oleh UPT yang mampu melaksanakan keempat komponen utama pengendalian AMR secara konsisten, yaitu penggunaan tools pengawasan antibiotik, pelaksanaan bimbingan teknis, advokasi lintas sektor, dan publikasi hasil pengawasan. Keberhasilan ini didukung oleh adanya perencanaan kegiatan yang matang, ketersediaan sumber daya yang memadai, serta koordinasi yang baik antara UPT dan Pusat. Selain itu, peningkatan kapasitas petugas melalui pelatihan serta penerapan tools pengawasan antibiotik secara rutin dan akurat turut memperkuat capaian indikator ini.

Capaian indikator ini sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan empat komponen utama kegiatan, dukungan sumber daya, dan efektivitas koordinasi antara pusat dan daerah. Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja ke depan, diperlukan penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi AMR di tingkat UPT serta peningkatan pendampingan teknis dalam penerapan tools pengawasan antibiotik secara berkesinambungan.

d. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan dalam pelaksanaan pengendalian resistensi antimikroba (AMR) difokuskan pada peningkatan konsistensi pelaksanaan keempat komponen kegiatan, yaitu penggunaan tools pengawasan antibiotik, pelaksanaan bimbingan teknis, advokasi lintas sektor, dan publikasi hasil pengawasan. Untuk mendukung hal tersebut, Balai POM di Pangkal Pinang akan memperkuat mekanisme monitoring dan supervisi berkala terhadap pelaksanaan penggunaan tools pengawasan antibiotik di sarana pelayanan kefarmasian guna memastikan ketepatan pengisian dan keseragaman penerapan antar petugas.

Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia akan menjadi prioritas melalui penyelenggaraan pelatihan dan bimbingan teknis lanjutan terkait

pengendalian AMR, baik secara internal maupun melalui kolaborasi dengan unit teknis pusat. Dalam rangka memperluas cakupan dan efektivitas advokasi lintas sektor, perlu dilakukan penguatan koordinasi dengan dinas kesehatan, organisasi profesi, dan instansi terkait guna mendorong sinergi kebijakan dan tindakan nyata di lapangan.

Tabel 3.53 Matriks Rekomendasi Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah UPT

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Januari	Merupakan target tahunan. Pada bulan Januari telah digunakan Tools pemetaan penggunaan antibiotik terhadap 2 Sarana Apotek yang menjadi target pemeriksaan Belum terdapat kendala selama perencanaan bulan Januari	Melakukan perencanaan pelaksanaan setiap butir kegiatan yang menunjang IKU AMR	Mengidentifikasi Kabupaten yang akan menjadi target intervensi	Februari	Ya	O-67	Tools antibiotik tidak digunakan secara konsisten dalam kegiatan pengawasan antibiotik di sarana pelayanan kefarmasian khususnya Apotek
Februari	Merupakan target tahunan. Hingga bulan februari telah digunakan Tools pemetaan penggunaan antibiotik terhadap 6 Sarana Apotek yang menjadi target pemeriksaan. Telah dilakukan identifikasi kabupaten yang akan dilakukan intervensi yaitu Kab. Bangka Tengah dan Kab. Bangka Selatan Belum terdapat kendala selama perencanaan bulan Februari	Melakukan koordinasi terkait pelaksanaan Bimtek AMR dan Join Inspection ke Dinas Kesehatan Kabupaten yang menjadi target	Melaksanakan rapat koordinasi pelaksanaan Bimtek AMR dan Join Inspection dengan Dinkes Kab. Bangka Tengah dan Dinkes Kab. Bangka Selatan yang memperoleh DAK Pengawasan Saryanfar 2026	Maret	Ya	O-67	Tools antibiotik tidak digunakan secara konsisten dalam kegiatan pengawasan antibiotik di sarana pelayanan kefarmasian khususnya Apotek
Maret	Merupakan target tahunan. 1. Hingga bulan Maret telah digunakan Tools pemetaan penggunaan antibiotik terhadap 10 Sarana Apotek yang menjadi target pemeriksaan. 2. Telah dilakukan advokasi terkait pelaksanaan SE Larangan Penjualan Antibiotik Tanpa Resep Dokter ke Sekretariat Daerah Pemerintah Kab. Bangka Selatan pada tanggal 11 Maret 2026 3. Telah dilakukan publikasi data kepatuhan penyerahan antibiotik di pulau Bangka selama tahun 2025 pada tanggal 13 Maret 2026 di	1. Mengarsipkan seluruh data dukung terkait pengendalian AMR tahun 2026 2. Agar dilakukan follow up ke Sekretariat Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung dan ke Sekretariat Daerah Kab. Bangka terkait proses penerbitan SE Gubernur tentang Larangan Penyerahan Antibiotik Tanpa Resep Dokter	Mengingatkan kembali PJ AMR untuk mengarsipkan data dukung seluruh kegiatan pengendalian AMR di cloud dan gdrive data dukung AMR 2026	April	Ya	O-67	Tools antibiotik tidak digunakan secara konsisten dalam kegiatan pengawasan antibiotik di sarana pelayanan kefarmasian khususnya Apotek

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	Sosial Media Balai POM di Pangkal Pinang Kendala : Belum terbit SE dari Gubernur dan Bupati Kab. Bangka terkait hasil advokasi sebelumnya mengenai Larangan Penjualan Antibiotik Tanpa Resep Dokter						

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan advokasi lintas sektor dengan dinas kesehatan, organisasi profesi, serta instansi terkait turut memperkuat komitmen bersama dalam implementasi strategi pengendalian AMR di tingkat daerah. Faktor pendukung lainnya adalah pemanfaatan tools pengawasan antibiotik yang telah diintegrasikan dalam kegiatan pemeriksaan rutin di apotek, sehingga pengawasan terhadap penyerahan antibiotik tanpa resep dokter dapat dilakukan secara lebih sistematis dan terukur. Kegiatan publikasi hasil pengawasan juga menjadi salah satu bentuk transparansi dan upaya edukatif yang efektif dalam meningkatkan kesadaran publik serta mendorong kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan peresepan antibiotik.

f. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3.54 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah UPT

Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian
	T	R	%	Target (RPD TW I)	Realisasi	%			
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	-	-	-	2.959.000	2.550.380	86,19	-	-	-

1) Efisiensi penggunaan anggaran

Efisiensi anggaran pada triwulan I tahun 2026 belum dapat dihitung karena capaian indikator output belum tersedia.

2) Upaya mencapai efisiensi penggunaan anggaran

Upaya efisiensi penggunaan anggaran pada indikator Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT dilakukan melalui integrasi kegiatan pengawasan AMR dengan pengawasan rutin di sarana pelayanan kefarmasian, sehingga tidak memerlukan tambahan biaya operasional. Pelaksanaan bimbingan teknis dan advokasi lintas sektor juga dilakukan secara terpadu dengan program lain yang relevan untuk menghemat sumber daya. Selain itu, pemanfaatan media daring dalam koordinasi dan publikasi hasil pengawasan turut menekan biaya perjalanan dinas dan logistik, sehingga pelaksanaan kegiatan tetap efektif dengan penggunaan anggaran yang efisien.

g. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan informasi kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja tahun 2025:

1) Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja

Penyesuaian kegiatan dilakukan sebagai upaya untuk mencapai target kinerja penggunaan sumber daya pada indikator pemenuhan target pengendalian AMR (Antimicrobial Resistance), dengan mengoptimalkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan secara lebih terintegrasi dan berbasis prioritas risiko. Strategi ini dilaksanakan melalui penggabungan kegiatan yang sejenis, pemanfaatan data pengawasan yang telah tersedia, serta penguatan koordinasi lintas program dan lintas sektor.

2) Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target kinerja dengan penggunaan anggaran yang efisien dilaksanakan melalui rasionalisasi kegiatan, penggabungan aktivitas yang sejenis, serta penyesuaian prioritas berdasarkan tingkat urgensi dan dampaknya terhadap indikator kinerja. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian target yang telah ditetapkan.

Selain itu, optimalisasi sumber pendanaan juga dilakukan melalui pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada kabupaten/kota yang memperoleh alokasi tersebut, sehingga dapat mendukung pelaksanaan kegiatan secara lebih luas tanpa membebani anggaran utama. Sinergi antara sumber anggaran ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas

pelaksanaan program, memperluas cakupan kegiatan, serta tetap menjaga prinsip efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran

- 3) Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja

Kegiatan advokasi lintas sektor dengan dinas kesehatan, organisasi profesi, serta instansi terkait turut memperkuat komitmen bersama dalam implementasi

Strategi pengendalian AMR di tingkat daerah Faktor pendukung lainnya adalah pemanfaatan tools pengawasan antibiotik yang telah diintegrasikan dalam kegiatan pemeriksaan rutin di apotek, sehingga pengawasan terhadap penyerahan antibiotik tanpa resep dokter dapat dilakukan secara lebih sistematis dan terukur. Kegiatan publikasi hasil pengawasan juga menjadi salah satu bentuk transparansi dan upaya edukatif yang efektif dalam meningkatkan kesadaran publik serta mendorong kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan peresepan antibiotik

- 4) Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya.

Target pada indikator ini merupakan indikator kinerja yang diukur secara tahunan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya, penyesuaian perencanaan kinerja dapat dilakukan apabila diperlukan sebagai upaya untuk memastikan pencapaian target secara optimal. Penyesuaian tersebut difokuskan pada peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator pemenuhan target pengendalian AMR (Antimicrobial Resistance). Melalui optimalisasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang lebih terintegrasi serta berbasis pada prioritas risiko, sehingga kegiatan yang dilaksanakan benar-benar menysasar area dengan dampak paling signifikan sehingga penggunaan sumber daya menjadi lebih efektif dan terarah, serta tetap mampu mendukung pencapaian target kinerja pengendalian AMR secara optimal.

14. Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai

Standar Kemampuan Laboratorium

Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) merupakan seperangkat standar yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai bagian dari

kebijakan strategis dalam meningkatkan kapasitas, kapabilitas, serta mutu kinerja laboratorium pengujian di lingkungan BPOM. Penyusunan SKL didasarkan pada rencana pengembangan laboratorium yang terstruktur dan berkelanjutan, yang mencakup penguatan sumber daya manusia, peralatan, metode analisis, serta ruang lingkup pengujian. Secara konseptual, SKL merupakan agregasi dari empat tingkatan kemampuan laboratorium, yaitu tingkat 1 hingga tingkat 4, yang masing-masing mencerminkan kompleksitas dan kedalaman kemampuan pengujian yang dimiliki.

Dalam kerangka tersebut, BPOM Pangkal Pinang diklasifikasikan sebagai laboratorium tingkat 3 (tier 3). Laboratorium pada tingkat ini memiliki peran strategis dalam melaksanakan pengujian dasar kimia dan mikrobiologi, termasuk pengujian terhadap parameter-parameter non-unggulan. Selain itu, laboratorium tingkat 3 juga berfungsi sebagai unit verifikasi dengan melakukan pengujian konfirmasi terhadap hasil pengujian yang berasal dari laboratorium pada tingkat di bawahnya. Dengan demikian, keberadaan laboratorium tingkat 3 tidak hanya berperan sebagai pelaksana pengujian, tetapi juga sebagai pengendali mutu internal dalam sistem laboratorium berjenjang.

Penilaian terhadap pemenuhan SKL pada laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan dilakukan melalui pendekatan multidimensional yang mencakup empat komponen utama. Keempat komponen tersebut dirancang untuk menggambarkan secara komprehensif tingkat kesiapan dan kemampuan laboratorium, baik dari aspek teknis maupun operasional. Penilaian ini tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur capaian kinerja laboratorium, tetapi juga sebagai instrumen evaluatif dan perencanaan dalam rangka peningkatan mutu secara berkelanjutan (continuous improvement). Selain itu, hasil penilaian SKL menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan terkait pengembangan laboratorium guna mendukung perlindungan masyarakat terhadap keamanan, mutu, dan khasiat produk farmasi serta pangan olahan.

Adapun empat komponen utama dalam SKL untuk laboratorium tingkat 3 meliputi:

1. Standar Ruang Lingkup (SRL)
2. Standar Peralatan
3. Standar Kompetensi Laboratorium
4. Standar Metode Analisis (MA) Terverifikasi

Keempat komponen tersebut memiliki keterkaitan yang erat dan saling melengkapi dalam merepresentasikan kapasitas laboratorium secara menyeluruh. Nilai akhir

pemenuhan SKL dihitung berdasarkan kontribusi masing-masing komponen sesuai dengan formula yang telah ditetapkan oleh BPOM, sehingga menghasilkan suatu nilai komposit yang mencerminkan tingkat pemenuhan standar oleh laboratorium yang bersangkutan.

Standar Ruang Lingkup (SRL) didefinisikan sebagai himpunan parameter uji atau metode analisis (MA) yang telah mampu dilaksanakan oleh suatu laboratorium. SRL mencerminkan cakupan kemampuan teknis laboratorium dalam melakukan berbagai jenis pengujian. Dalam konteks penilaian Standar Kompetensi Laboratorium, SRL diklasifikasikan ke dalam dua aspek utama, yaitu: (1) Aspek 1, yang mencakup SRL yang dapat diuji oleh minimal satu orang penguji; dan (2) Aspek 2, yang mencakup SRL yang dapat diuji oleh minimal dua orang penguji. Pembagian ini bertujuan untuk menilai tidak hanya ketersediaan kemampuan pengujian, tetapi juga tingkat redundansi dan keberlanjutan kompetensi sumber daya manusia dalam laboratorium.

Apabila jumlah SRL yang dimiliki laboratorium sama dengan jumlah SRL pada Aspek 1, maka laboratorium tersebut memperoleh nilai maksimal sebesar 10 untuk Aspek 1. Demikian pula, apabila jumlah SRL yang dimiliki sebanding dengan jumlah SRL pada Aspek 2, maka laboratorium memperoleh nilai maksimal sebesar 10 untuk Aspek 2. Dengan demikian, total nilai maksimal yang dapat diperoleh pada komponen Standar Kompetensi Laboratorium adalah sebesar 20. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kompetensi laboratorium tidak hanya diukur dari kemampuan individu, tetapi juga dari distribusi dan keberlanjutan kompetensi di antara personel laboratorium.

Standar Peralatan merupakan komponen yang menilai ketersediaan serta kesesuaian jenis dan jumlah peralatan laboratorium dengan kebutuhan pengujian berdasarkan klasifikasi tingkat (tier) laboratorium. Pemenuhan standar peralatan menjadi faktor krusial dalam menjamin keakuratan, ketepatan, dan keandalan hasil pengujian. Oleh karena itu, setiap laboratorium diwajibkan untuk memiliki peralatan yang memadai, terkalibrasi, serta terpelihara dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, Standar Metode Analisis (MA) Terverifikasi merujuk pada metode analisis yang telah melalui proses verifikasi oleh laboratorium untuk memastikan kesesuaian, validitas, dan kinerjanya dalam kondisi operasional setempat. Proses verifikasi ini penting untuk menjamin bahwa metode yang digunakan mampu

menghasilkan data yang akurat, presisi, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Dalam implementasinya, terdapat perubahan kebijakan terkait pembuktian penambahan SRL. Sebelum tahun 2025, penambahan SRL dapat dibuktikan melalui Lampiran Catatan Pengujian (LCP) yang disusun oleh analis sebagai dokumentasi pelaksanaan pengujian. Namun, sejak tahun 2025, kebijakan tersebut mengalami penyesuaian, di mana penambahan SRL harus didukung oleh laporan hasil verifikasi metode analisis (MA). Perubahan ini menunjukkan adanya peningkatan standar pembuktian yang lebih menekankan pada validitas metode secara ilmiah.

Meskipun demikian, dalam praktiknya masih terdapat ketidaksesuaian antara SRL dan daftar MA terverifikasi, di mana tidak seluruh metode analisis yang tercantum dalam SRL telah termasuk dalam daftar metode analisis yang terverifikasi. Hal ini mengindikasikan adanya tantangan dalam proses harmonisasi antara cakupan pengujian dan pemenuhan persyaratan verifikasi metode, yang perlu menjadi perhatian dalam upaya peningkatan mutu laboratorium ke depan.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan I Tahun 2026

Tabel 3.55 Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Indikator	Kinerja			Kategori & Notifikasi Warna
	Target	Realisasi	%Capaian	
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	78,2	78,20	100,00%	Baik

Tabel di atas menyajikan capaian indikator kinerja nilai pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) yang menjadi salah satu tolok ukur utama dalam menjamin mutu layanan pengujian produk farmasi dan pangan olahan. Pada triwulan I, target yang ditetapkan sebesar 78,2 dan realisasi capaian hingga akhir periode pelaporan juga tercatat sebesar 78,2. Dengan demikian, tingkat capaian indikator ini mencapai 100% dan dikategorikan dalam klasifikasi “Baik”.

Nilai target sebesar 78,2 pada triwulan I ini merupakan nilai yang sama dengan realisasi tahun 2025. Pada periode pelaporan ini, terdapat penambahan kegiatan yang mencerminkan peningkatan cakupan layanan laboratorium, yaitu penambahan 1 MA Terverifikasi pada laboratorium obat tradisional (OT), 1 MA

Terverifikasi pada laboratorium kosmetik, serta 2 MA Terverifikasi pada laboratorium mikrobiologi. Meskipun demikian, peningkatan aktivitas tersebut belum diikuti dengan kenaikan nilai capaian SKL, yang masih berada pada level yang sama dengan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2026, terdapat perubahan pada aspek penilaian standar peralatan dan capaian kompetensi laboratorium. Perubahan pada aspek kompetensi dipengaruhi oleh adanya mutasi dan rotasi personel, sedangkan pada aspek peralatan terjadi penyesuaian mekanisme penilaian, dari sebelumnya menggunakan tools SKL menjadi pemanfaatan data yang diambil langsung dari sistem DIKOLABORASI.

Selain itu, dilakukan penyesuaian terhadap standar peralatan laboratorium. Pada laboratorium kimia, penghapusan alat conductivity meter menyebabkan penurunan nilai dari 91,6 menjadi 91,25. Sementara itu, pada laboratorium mikrobiologi, penghapusan conductivity meter dan inkubator CO₂ (karena telah tersedia 15 anaerobic jar), serta masih tercatatnya 1 unit inkubator yang telah rusak berat sejak tahun 2022 hingga Desember 2025, justru berdampak pada peningkatan nilai dari 79,86 menjadi 81,07. Perubahan standar ini baru dilakukan ketika penilaian tools SKL pada bulan akhir Maret 2026.

Pada aspek kompetensi laboratorium, terjadi perubahan yang dipengaruhi oleh dinamika sumber daya manusia. Rencana peningkatan kompetensi pada laboratorium kosmetik (Aspek 2) belum tercapai akibat mutasi 1 personel. Hal ini berdampak pada penurunan jumlah pada Aspek 1 dari 113 menjadi 112, serta pada Aspek 2 dari 112 menjadi 104. Selain itu, penurunan juga terjadi pada standar kompetensi Aspek 2 laboratorium OTOKSK, dari 125 menjadi 116. Kondisi ini disebabkan oleh adanya rotasi 1 personel dan 1 personel lainnya yang sedang melaksanakan tugas belajar.

Penurunan standar kompetensi pada Aspek 1 laboratorium kosmetik sempat menyebabkan nilai realisasi SKL turun dari 78,2 menjadi 76,2. Namun demikian, kondisi tersebut telah dapat dipenuhi kembali melalui pelaksanaan pengujian DMDM Hydantoin sehingga capaian akhir tetap berada pada angka 78,2 sesuai target yang ditetapkan.

Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan bahwa laboratorium mampu mempertahankan kinerja sesuai target di tengah adanya penambahan kegiatan dan

penyesuaian standar. Ke depan, diperlukan upaya optimalisasi agar peningkatan aktivitas yang telah dilakukan dapat semakin berkontribusi terhadap peningkatan nilai capaian SKL pada periode berikutnya.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2026

Tabel 3.56 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2026 Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Target Tahun 2026	Realisasi Triwulan I	% Capaian Terhadap Target Tahunan	Kategori
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	78,60	78,20	99,49 	Akan Tercapai

Tabel di atas menyajikan perbandingan antara realisasi kinerja Triwulan I dengan target tahunan 2026 untuk indikator nilai pemenuhan SKL. Target tahun 2026 ditetapkan sebesar 78,6, sementara hingga Triwulan I realisasi yang dicapai adalah sebesar 78,2, dengan persentase capaian sebesar 99,49% terhadap target tahunan.

Dengan capaian sebesar 99,49% tersebut, indikator ini dikategorikan sebagai “Akan Tercapai”. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja pada Triwulan I telah mendekati target tahunan, sehingga memberikan gambaran awal yang positif terhadap pencapaian indikator pada akhir tahun.

Capaian ini juga mencerminkan bahwa pelaksanaan kegiatan pengujian telah berjalan secara efektif dan selaras dengan rencana yang telah ditetapkan. Konsistensi kinerja pada awal tahun ini menjadi modal penting dalam menjaga tren pencapaian, sehingga target tahunan berpeluang besar untuk dapat direalisasikan secara optimal.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Pemenuhan target pada triwulan I direncanakan melalui penambahan 2 MA Terverifikasi di Laboratorium Mikrobiologi, yang ditujukan untuk meningkatkan nilai Standar MA Terverifikasi dari 34,0 menjadi 34,4. Secara keseluruhan, nilai pemenuhan SKL pada triwulan I ditargetkan setara dengan capaian pada akhir tahun 2025.

Dalam pelaksanaannya, terdapat tambahan 1 MA terverifikasi di Laboratorium OTOKSK, sehingga secara perhitungan awal realisasi nilai seharusnya mencapai 78,3. Namun, pada proses penilaian di akhir Maret, terjadi perubahan pada standar peralatan laboratorium serta penyesuaian data peralatan, yaitu berkurangnya 1 unit inkubator yang telah dinyatakan rusak berat sejak tahun 2022 namun sebelumnya masih tercatat sebagai peralatan existing.

Selain itu, proses mutasi personel di Laboratorium Kosmetik menyebabkan nilai kompetensi pada Aspek 1 sempat turun dari 10 menjadi 0. Kondisi ini kemudian diantisipasi melalui penambahan pengujian DMDM Hydantoin di Laboratorium Kosmetik, sehingga nilai kompetensi pada akhirnya tidak mengalami perubahan. Pada triwulan I juga belum terdapat peningkatan nilai SRL dan tidak ada penambahan peralatan laboratorium, mengingat proses pengadaan masih berlangsung dan direncanakan selesai pada triwulan II.

d. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Kegiatan-kegiatan yang mendukung pemenuhan SKL telah dituangkan dalam rencana aksi SKP tahunan setiap anggota tim. Perencanaan ini menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan agar selaras dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan kegiatan tersebut dievaluasi secara berkala pada bulan ketiga setiap triwulan, guna memastikan bahwa seluruh kegiatan dan data dukung telah atau akan terselesaikan pada saat penilaian SKL oleh PPPOMN, yang dilaksanakan setiap tanggal 20 pada bulan ketiga tiap triwulan.

Masih ditemukannya peralatan dengan kondisi “rusak berat” yang tercatat sebagai existing dalam tools SKL menunjukkan bahwa pengelolaan dan pencatatan peralatan laboratorium belum sepenuhnya terkendali. Ke depan, pencatatan peralatan akan dilakukan secara terintegrasi melalui aplikasi DIKOLABORASI dan dikawal oleh Kelompok Pengelola Peralatan Laboratorium sebagai bagian dari sistem mutu laboratorium, sehingga diharapkan proses pencatatan dapat berjalan lebih tertib, akurat, dan terkendali.

Tabel 3.57 Matriks Rekomendasi Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Januari	1. Standar kompetensi Lab Kosmetik yang direncanakan mencapai 100% di TW 1 2026 tidak terpenuhi karena adanya mutasi pegawai a.n Silvia Anggraini yang menyebabkan jumlah Aspek 1 turun dari 113 menjadi 112 dan Aspek 2 turun dari 112 menjadi 104. 2. Standar kompetensi Aspek 2 Lab OBASKOK turun dari 125 menjadi 116 karena adanya analis yang tubel a.n Atika Melati dan rotasi pegawai a.n Septo Dwi Yan Purnomo. 3. Penurunan standar kompetensi Aspek 1 di Lab Kosmetik menyebabkan perubahan nilai real SKL dari 78,2 menjadi 76,2. Aspek 1 direncanakan terpenuhi di TW 1 2026. Rencana pemenuhan SKL 2026 di masing-masing lab telah disusun. Target yang direncanakan untuk TW 1, 2, 3 dan 4 masing-masing adalah 78,2; 78,4; 78,5; 78,6.	Lakukan perubahan target sesuai perencanaan yang telah disusun.	Melakukan perubahan target IKU "Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium" tahun 2026 dari 77 menjadi 78,6.	Februari 2026	Ya	SDM-18	Laboratorium kehilangan personel kompeten.
Februari	Pengisian tools SKL tw 1 dilakukan pada bulan maret	Lakukan monitoring pengisian tools SKL sesuai arahan PPPOMN.	Melakukan pengisian dan monitoring tools SKL PPPOMN.	Maret 2026	Tidak	-	-
Maret	1. Terjadi perubahan standar peralatan kimia dan biologi. - Kimia : conductivity meter dikeluarkan dari standar. - Biologi : conductivity meter dikeluarkan dari standar, inkubator CO2 tidak dihitung sebagai standar karena sudah memiliki 15 unit anaerobic jar. Inkubator yang seharusnya sudah rusak berat dan dimusnahkan tahun 2022 masih tercatat existing s/d Desember 2025. Sudah dilakukan penyesuaian data di DIKOLABORASI.	Lakukan perhitungan perencanaan untuk TW 2 untuk melihat apakah dengan penurunan capaian karena perubahan standar peralatan. target TW 2 masih bisa tercapai.	Melakukan perhitungan perencanaan pemenuhan SKL TW 2.	April 2026	Tidak	-	-

- e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Nilai pemenuhan SKL dicapai melalui sejumlah langkah :

1. Koordinasi dengan fungsi Pemeriksaan untuk menyampling sampel yang dibutuhkan dalam pengujian SRL, Standar Kompetensi Laboratorium dan Standar MA Terverifikasi.
2. Koordinasi perencanaan jadwal sampling masuk dengan fungsi Pemeriksaan sehingga memberikan waktu bagi laboratorium untuk melaksanakan verifikasi MA setelah pengujian sampel.
3. Perencanaan pengadaan reagensia dan pendukung pengujian yang menjamin ketersediaan bahan yang dibutuhkan untuk pengujian SRL, Standar Kompetensi Laboratorium dan Standar MA Terverifikasi.
4. Pelaksanaan kalibrasi dan verifikasi instrumen serta pemeliharaan peralatan untuk memonitoring dan memelihara fungsi peralatan laboratorium.
5. Pengadaan peralatan laboratorium yang dilaksanakan tepat waktu.

- f. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3.58 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian
	T	R	%	Target (RPD TW I)	Realisasi	%			
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	78,2	78,2	100,00	233.387.999	146.035.605	62,57	1,60	0,60	92% (Efisien)

- 1) Efisiensi penggunaan anggaran

Berdasarkan ketentuan matriks kinerja dan pendanaan BPOM tahun 2025-2009, Indikator ini mempunyai mapping/tagging anggaran dari RO Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium (RAB) dan RO Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium (PDD). Untuk RO PDD tidak

seluruhnya secara langsung berpengaruh dalam pencapaian target output indikator ini. RPD untuk anggaran yang telah dipetakan pada indikator ini dapat tercapai sebesar 62,57%, dengan capaian output 92% sehingga efisiensi penggunaan sumber daya dapat dikategorikan efisien.

Pada triwulan I tahun 2026, belum terdapat penambahan peralatan laboratorium, baik yang termasuk dalam Standar Peralatan Laboratorium maupun di luar standar tersebut. Namun demikian, sebagian peralatan telah melalui proses pembayaran pada bulan Maret 2026. Pembayaran lanjutan direncanakan akan dilaksanakan pada triwulan II tahun 2026. Pada periode yang sama, juga direncanakan proses penerimaan peralatan di laboratorium.

Kondisi tersebut mengakibatkan capaian output tidak sepenuhnya sejalan dengan realisasi input keuangan pada periode pelaporan. Oleh karena itu, perlu kehati-hatian dalam menafsirkan hubungan antara capaian fisik dan anggaran, terutama pada triwulan awal tahun berjalan. Pengelolaan pelaporan harus mencerminkan dinamika ini agar tidak terjadi ketimpangan penilaian kinerja, serta tetap menjamin akuntabilitas dalam proses perencanaan dan evaluasi anggaran.

2) Upaya mencapai efisiensi penggunaan anggaran

Kegiatan-kegiatan yang mendukung capaian SKL dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Setiap langkah pelaksanaan dirancang untuk memastikan ketercapaian target strategis, baik dari sisi substansi kegiatan maupun efisiensi pelaksanaannya. Hal ini menunjukkan bahwa proses perencanaan berjalan secara sistematis dan telah mempertimbangkan kesinambungan antarperiode anggaran.

Pada triwulan II tahun 2026, terdapat satu peralatan yang termasuk dalam Standar Peralatan Laboratorium yang direncanakan untuk dilakukan pembayaran dan sekaligus penerimaan pada periode yang sama, yaitu AAS (Atomic Absorption Spectrophotometer) di laboratorium kosmetik.

g. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan informasi kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja tahun 2025:

1) Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja

Target ini dikawal dalam rencana aksi nilai pemenuhan SKL melalui SKP.

2) Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja

Dilakukan pengadaan bahan pendukung pengujian sesuai kebutuhan, dan adanya alokasi rutin pembelian sampel baik untuk peningkatan kompetensi ataupun verifikasi MA.

- 3) Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja

Semua mikropipet yang masuk ke dalam Ruang Lingkup Akreditasi atau digunakan dalam Penetapan Kadar direncanakan akan dikalibrasi pada tahun 2026.

- 4) Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya.

Pada triwulan selanjutnya akan dilakukan monitoring realisasi kegiatan yang sudah direncanakan untuk menjaga capaian tidak kurang dari 100%.

15. Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman

Program Kabupaten/Kota Pangan Aman adalah program yang melibatkan Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pengawasan dan pemberdayaan keamanan pangan sesuai dengan ketentuan.

Pelaksanaan pendampingan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota oleh UPT dilakukan pada kegiatan/Tahapan Penilaian Mandiri dan pengumpulan data dukung Pemerintah Daerah Kab/Kota. Kegiatan yang dilakukan yaitu:

1. Advokasi ke Seluruh Kabupaten/Kota, UPT BPOM melakukan advokasi kepada seluruh Kabupaten/Kota yang masuk kedalam wilayah kerjanya agar melakukan penilaian mandiri program Kabupaten/Kota Pangan Aman. Dalam kegiatan tersebut disampaikan manfaat dari penilaian mandiri yang dilakukan dan melihat komitmen Pemerintah Daerah untuk kemudian dilakukan tahapan seleksi untuk Kabupaten/Kota yang akan didampingi.
2. Seleksi Kabupaten/Kota yang akan didampingi, Kabupaten/Kota terpilih akan diberikan pendampingan dalam melakukan pengisian tools Kabupaten/Kota Pangan Aman agar data dukung yang diberikan sesuai dengan Pedoman Penilaian Mandiri Kabupaten/Kota Pangan Aman.
3. Pendampingan, Pendampingan dilakukan dengan memantau pelaksanaan pengisian tools penilaian mandiri agar terisi dengan baik dan benar, menjawab pertanyaan Kabupaten/Kota, dan menilai kesesuaian data dukung yang diisi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Selain itu dilakukan monitoring agar seluruh pengisian data dukung

selesai sesuai batas waktu pengisian, sehingga persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman dapat tercapai.

4. Pelaporan, Pelaporan dalam kegiatan pendampingan Kabupaten/Kota Pangan Aman memiliki peran penting dalam memastikan efektivitas dan keberlanjutan program keamanan pangan di daerah serta menjadi point penilaian atas keberhasilan UPT dalam melakukan advokasi di daerah.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan I Tahun 2026

Tabel 3.59 Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman

Indikator	Kinerja			Kategori & Notifikasi Warna
	Target	Realisasi	%Capaian	
Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	-	-	-	

Indikator Persentase Kabupaten/ Kota yang didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/ Kota Pangan Aman merupakan Indikator dengan Target Tahunan, sehingga pada triwulan I tahun 2026 belum terdapat target maupun realisasi yang dapat diukur.

Pengukuran capaian indikator ini dilakukan pada akhir periode pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu, capaian indikator ini baru dapat dihitung pada Triwulan IV Tahun 2026.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2026

Tabel 3.60 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2026 Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Target Tahun 2026	Realisasi Triwulan I	% Capaian Terhadap Target Tahunan	Kategori
Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	40,00	-	-	

Hasil pengukuran Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman merupakan target tahunan sehingga perbandingannya akan dilakukan pada Lapkin Tahunan.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Indikator Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman belum dapat dilakukan analisis keberhasilan maupun kegagalan kinerja pada Triwulan I Tahun 2026, karena indikator ini merupakan indikator dengan pengukuran capaian tahunan.

Dengan demikian, belum terdapat capaian yang dapat dianalisis sebagai keberhasilan atau kegagalan. Analisis kinerja akan dilakukan secara lebih komprehensif pada triwulan berikutnya, khususnya setelah tahapan advokasi, pendampingan dan pengumpulan data dukung mulai dilaksanakan.

d. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Dalam rangka mendukung pencapaian indikator Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman, upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan difokuskan pada penguatan tahapan awal pelaksanaan kegiatan.

Upaya yang dilakukan antara lain meningkatkan efektivitas advokasi kepada seluruh Kabupaten/Kota guna mendorong komitmen dan partisipasi aktif Pemerintah Daerah dalam program Kabupaten/Kota Pangan Aman sehingga Kabupaten/Kota terpilih memiliki kesiapan yang optimal dalam mengikuti tahapan selanjutnya.

Dengan upaya tersebut, diharapkan pelaksanaan kegiatan pada triwulan berikutnya dapat berjalan lebih efektif dan mendukung pencapaian target kinerja secara optimal.

Tabel 3.61 Matriks Rekomendasi Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Januari	Belum terdapat kendala merupakan Target Tahunan proses pendampingan akan mulai dilaksanakan segera setelah perencanaan kegiatan selesai di buat	Segera menyusun perencanaan Kegiatan Pendampingan KKPA	Menyusun perencanaan kegiatan pendampingan KKPA sesuai juknis	Maret	Ya	S-06, S-07	1.Kabupaten/Kota yang dilakukan pendampingan tidak mengisi tools penilaian dan Data Dukung KKPA 2.Kabupaten/Kota yang dilakukan pendampingan tidak mengisi tools penilaian dan Data Dukung KKPA
Februari	Belum terdapat kendala merupakan Target Tahunan proses pendampingan akan mulai dilaksanakan segera setelah perencanaan kegiatan selesai di buat	Segera menyusun perencanaan Kegiatan Pendampingan KKPA	Menyusun perencanaan kegiatan pendampingan KKPA sesuai juknis	Maret	Ya	S-06, S-07	1.Kabupaten/Kota yang dilakukan pendampingan tidak mengisi tools penilaian dan Data Dukung KKPA 2.Kabupaten/Kota yang dilakukan pendampingan tidak mengisi tools penilaian dan Data Dukung KKPA
Maret	Belum terdapat kendala merupakan Target Tahunan proses pendampingan akan mulai dilaksanakan segera setelah perencanaan kegiatan selesai di buat	Melakukan Koordinasi awal dengan Pemerintah Daerah terkait Program KKPA	Melaksanakan Rapat Advokasi ke Pemerintah Daerah terkait Prgoram KKPA melalui Zoom Meeting	April	Ya	S-06, S-07	1.Kabupaten/Kota yang dilakukan pendampingan tidak mengisi tools penilaian dan Data Dukung KKPA 2.Kabupaten/Kota yang dilakukan pendampingan tidak mengisi tools penilaian dan Data Dukung KKPA

- e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pencapaian indikator Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman belum dapat dianalisis pada Triwulan I Tahun 2026, karena belum terdapat pelaksanaan kegiatan pada periode tersebut.

Program Kabupaten/Kota Pangan Aman yang terdiri dari tahapan advokasi, seleksi, pendampingan, dan pelaporan direncanakan akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya. Oleh karena itu, belum terdapat program atau kegiatan yang secara langsung berkontribusi terhadap capaian kinerja pada Triwulan I.

Dengan demikian, analisis terhadap program/kegiatan yang menunjang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kinerja akan dilakukan pada periode selanjutnya, setelah kegiatan mulai dilaksanakan.

- f. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3.62 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman

Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian
	T	R	%	Target (RPD TW I)	Realisasi	%			
Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	-	-	-	17.160.000	0	0,00	-	-	-

- 1) Efisiensi penggunaan anggaran

Indikator Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman merupakan indikator dengan target tahunan, sehingga pada Triwulan I Tahun 2026 belum terdapat target output maupun realisasi yang dapat diukur.

Meskipun terdapat alokasi anggaran sebesar Rp17.160.000, namun belum terdapat realisasi anggaran (Rp0) karena kegiatan belum dilaksanakan. Dengan demikian, efisiensi penggunaan anggaran belum dapat dihitung, karena belum terdapat output maupun realisasi anggaran sebagai dasar perhitungan.

2) Upaya mencapai efisiensi penggunaan anggaran

Upaya yang akan dilakukan dalam rangka mencapai efisiensi penggunaan anggaran adalah dengan melaksanakan kegiatan secara terencana dan sesuai tahapan yang telah ditetapkan, sehingga penggunaan anggaran dapat selaras dengan pencapaian output. Dengan demikian, penggunaan anggaran diharapkan dapat berjalan secara efektif, tepat sasaran, dan efisien.

g. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan informasi kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja tahun 2025:

1) Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja

Penyesuaian aktivitas/kegiatan belum dilakukan pada Triwulan I Tahun 2026, mengingat pelaksanaan kegiatan masih berada pada tahap perencanaan dan akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan.

2) Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja

Evaluasi pencapaian kinerja belum dapat dilakukan pada Triwulan I karena kegiatan belum dilaksanakan. Tindak lanjut atas rencana aksi kinerja akan dilakukan pada triwulan berikutnya setelah kegiatan mulai berjalan.

3) Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya.

Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya dilakukan dengan memastikan pelaksanaan kegiatan indikator Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman berjalan sesuai tahapan yang telah direncanakan, yaitu advokasi, seleksi, pendampingan, dan pelaporan.

Melaksanakan kegiatan yang mendukung Persentase Kabupaten Kota Pangan Aman dengan mengacu pada Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Unit Pengampu dengan memperhatikan timeline yang ditetapkan.

SK 2 : Meningkatnya Efektivitas KIE

Capaian Sasaran Kegiatan **Meningkatnya efektivitas KIE** diukur dengan 4 indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut.

1. Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT adalah ukuran efektivitas pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan Balai Besar POM di Pangkal Pinang berdasarkan penerimaan audiens KIE terutama pada aspek sumber/narasumber, konten/informasi, pemahaman dan manfaat KIE.

Jenis ragam KIE meliputi KIE langsung kepada masyarakat maupun melalui media diantaranya media sosial, media cetak, media elektronik, media digital dan media luar ruang. Indeks Efektivitas KIE terdiri atas 4 Indikator/ Kriteria yaitu:

- 1) Sumber atau Narasumber KIE
- 2) Konten atau Informasi KIE
- 3) Pemahaman Audiens KIE
- 4) Manfaat KIE bagi Audiens KIE

Adapun Kategori Hasil Penilaian sebagai berikut:

Skor Indeks 100	Interpretasi efektivitas
< 65,00	Tidak Efektif
65,01 - 75,00	Kurang Efektif
75,01 - 85,00	Cukup Efektif
85,01 - 95,00	Efektif
95,01 - 100	Sangat Efektif

Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE BPOM di Pangkal Pinang atau responden

yang pernah mengakses kanal-kanal media KIE BPOM atau menerima produk informasi BPOM dalam 3 bulan terakhir.

Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman, Balai Besar POM di Pangkal Pinang telah melaksanakan edukasi kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE). Untuk mengevaluasi sejauh mana kegiatan KIE yang telah dilaksanakan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai maka diperlukan pengukuran Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Strategis Balai Besar POM di Pangkal Pinang tahun 2025-2029.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan I Tahun 2026

Tabel 3.63 Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Indikator	Kinerja			Kategori & Notifikasi Warna
	Target	Realisasi	%Capaian	
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,85	88,79	102,23%	Sangat Baik

Pada Triwulan I telah dilakukan survei kepada peserta yang telah mengikuti Kegiatan KIE Langsung maupun KIE melalui Media oleh Balai Besar POM di Pangkal Pinang pada bulan Januari – Maret 2026. Target Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Triwulan I sebesar 86,85 dan realisasi efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Balai Besar POM di Pangkal Pinang Triwulan I sebesar 88,79. Realisasi telah melampaui target dan diperoleh capaian sebesar 102,23% dengan kategori Sangat Baik.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2026

Tabel 3.64 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2026 Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Target Tahun 2026	Realisasi Triwulan I	% Capaian Terhadap Target Tahunan	Kategori
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87	88,79	102,23 	Tercapai/Melampaui

Tingkat Efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Pangkal Pinang memiliki target tahun 2026 sebesar 87. Pada

triwulan I, realisasi yang dicapai sebesar 88,79 sehingga persentase capaian terhadap target tahunan adalah sebesar 102,23%. Capaian Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan pada Triwulan I di Balai Besar POM di Pangkal Pinang telah melebihi target tahunan dengan kategori tercapai/ melampaui.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Pada Triwulan I Tahun 2026 Tingkat Efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan diatas target yang ditetapkan yaitu sebesar 88,79 (Efektif) dari Target 86,85 dengan capaian 102,23 % (Sangat Baik). Hasil Penilaian ini terdiri dari KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara langsung dengan hasil sebesar 89,22 dan KIE melalui Media (Media Sosial, Media Cetak, Media Elektronik, Media Digital dan Media Luar Ruang) dengan hasil sebesar 88,36. Pada saat pelaksanaan survei, Balai Besar POM di Pangkal Pinang juga menyediakan Survei dalam bentuk Hard Copy dikarenakan tidak semua peserta KIE mempunyai Handphone dan Paket Data. Secara keseluruhan Capaian Tingkat Efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melebihi target dengan kategori Tercapai/ Melampaui.

d. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Upaya-upaya perbaikan/ rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian efektifitas KIE adalah:

- Pembuatan materi disesuaikan dengan peserta/ audience yang akan mengikuti kegiatan, sehingga diharapkan akan lebih mudah menerima materi yang disampaikan.
- Penganekaragaman konten materi, terutama materi yang ditayangkan di media sosial, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang datang dari berbagai macam strata.
- Memperluas jangkauan KIE melalui radio, televisi, media cetak/koran yang sampai saat ini masih diakses oleh generasi non milenial.
- Memberikan materi berupa leaflet dan pemutaran video Obat dan Makanan pada saat KIE.

Tabel 3.65 Matriks Rekomendasi Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Januari	Belum terdapat kendala, Kegiatan KIE belum dilaksanakan pada bulan januari	Segera menyusun perencanaan Kegiatan KIE	Menyusun perencanaan kegiatan KIE sesuai juknis	Maret	Ya	O-23, F-14	1. Peserta mengalami kesulitan dalam mengisi survei tingkat efektifitas KIE 2. Peserta menandatangani kuitansi pertanggungjawaban kegiatan KIE yang belum ada nominalnya
Februari	Capaian Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT masih terkendala belum pastinya jumlah target output sasaran serta keterbatasan anggaran. Kondisi ini menyebabkan cakupan sasaran menjadi terbatas dan pemilihan target KIE belum dapat dilakukan secara optimal.	1. Menetapkan target output KIE sasaran secara jelas dengan mengkoordinasikan ke Biro Perencanaan dan Unit Pengampu, 2. Melakukan prioritas KIE berbasis risiko serta, 3. Mengoptimalkan metode KIE yang efisien sesuai ketersediaan anggaran.	1. Melakukan penetapan dan finalisasi target sasaran KIE, 2. Menyusun prioritas berbasis risiko, serta 3. menyesuaikan metode dan jadwal KIE dengan anggaran yang tersedia.	Maret	Tidak	-	-
Maret	Belum ditetapkannya jumlah target KIE menjadi kendala utama dalam perencanaan, karena menyebabkan belum dapat dipastikan kebutuhan sumber daya dalam menyapai target	Melaksanakan KIE Obat dan Makanan sesuai dengan target perencanaan yang sudah ditetapkan	Melaksanakan KIE Obat dan Makanan sesuai dengan target perencanaan yang sudah ditetapkan	April	Tidak	-	-

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator nilai Indeks efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan adalah Balai Besar POM di Pangkal Pinang melakukan:

1. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) secara langsung (Tatap Muka) dengan tema “Legalitas Pangan Olahan untuk Meningkatkan Daya Saing Produk” di SMK Negeri 4 Pangkal Pinang pada bulan Februari 2026.
2. Komunikasi, Informasi dan Edukasi melalui Media Elektronik Iklan Radio Sonora tentang Cegah Diabetes pada bulan Maret 2025

Selain itu, Balai POM di Pangkal Pinang juga aktif melakukan KIE melalui media sosial Instagram, Facebook dan X, pemutaran video pada saat KIE serta melalui Leaflet dan Banner.

f. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3.66 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian
	T	R	%	Target (RPD TW I)	Realisasi	%			
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,85	88,79	102,23	7.999.999	7.814.000	97,68	1,05	0,05	100% (Efisien)

1) Efisiensi penggunaan anggaran

Berdasarkan tabel tersebut, indikator Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Pangkal Pinang menunjukkan capaian output sebesar 102,23%, melampaui target yang telah ditetapkan. Di sisi lain, realisasi penggunaan anggaran hanya mencapai 97,68% dari target anggaran Triwulan I.

Perbandingan antara capaian output dan capaian input (anggaran) menghasilkan nilai Indeks Efisiensi (IE) sebesar 1,05, yang termasuk dalam kategori efisien. Hal ini mengindikasikan bahwa Balai Besar POM di Pangkal Pinang mampu menghasilkan kinerja yang lebih tinggi dari target dengan penggunaan sumber daya yang lebih rendah dari yang direncanakan.

2) Upaya mencapai efisiensi penggunaan anggaran

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran efisien. Capaian efisiensi penggunaan anggaran pada indikator KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan didukung oleh beberapa faktor antara lain perencanaan kegiatan yang optimal sehingga pelaksanaan KIE dapat berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan.

g. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan informasi kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja tahun 2025:

1) Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja

Penyesuaian kegiatan dalam mencapai target kinerja yang dilakukan pada triwulan I Tahun 2026 diantaranya :

- Melaksanakan Komunikasi, Informasi dan Edukasi ke SMK Negeri 4 Pangkal Pinang.
- Pada saat Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi dilakukan Pengukuran Pengetahuan Peserta Sebelum (Pre Test) dan Setelah (Post Test) agar lebih meningkatkan antusias dan pemahaman peserta.
- Materi Komunikasi, Informasi dan Edukasi dibuat dengan lebih menarik dan pada saat kegiatan dilakukan *ice breaking* dan kuis sehingga meningkatkan pemahaman serta minat peserta.

2) Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja

Pada Triwulan I Tahun 2026, penggunaan anggaran difokuskan pada pelaksanaan KIE yang memberikan dampak langsung terhadap peningkatan pemahaman masyarakat, baik melalui kegiatan tatap muka maupun melalui media. Selain itu, dilakukan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan, seperti pemanfaatan media yang lebih ekonomis namun tetap efektif (media sosial dan media elektronik).

3) Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja

Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Triwulan I Tahun 2026 sebesar 88,79 merupakan gabungan dari Pelaksanaan KIE secara langsung dan KIE menggunakan berbagai media. Kegiatan KIE yang memberikan nilai indeks tertinggi pada triwulan I Tahun 2026 adalah KIE secara Langsung. Kegiatan KIE secara langsung merupakan kegiatan KIE yang berdampak paling besar pada pencapaian pemberdayaan dan peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat. Hal ini disebabkan antara lain karena sebagian besar masyarakat Kepulauan Bangka Belitung tinggal di pedesaan dan kegiatan KIE secara langsung ini merupakan daya tarik tersendiri bagi masyarakat.

4) Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya.

Penyesuaian yang dapat dilakukan untuk periode berikutnya antara lain :

- a) Melaksanakan Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi pada triwulan selanjutnya.

- b) Pembuatan materi disesuaikan dengan peserta/ audience yang akan mengikuti kegiatan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat mengikuti kegiatan yang dilaksanakan BPOM
- c) Penganekaragaman konten materi, terutama materi yang ditayangkan di media sosial, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang datang dari berbagai macam strata.

2. Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan

Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan merupakan kegiatan yang didalamnya ada intervensi dan pemberdayaan keamanan pangan dan gizi kepada komunitas sekolah.

- a) Satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi dalam rangka pemberdayaan keamanan pangan terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA.
- b) Intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan adalah semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan meliputi tahapan advokasi lintas sektor, Sosialisasi Keamanan Pangan, Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah, Monitoring dan Sertifikasi Sekolah, dan Pengawasan sekolah yang sudah diintervensi.
- c) Kriteria Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan adalah:
 - a. Memiliki SK Tim dan Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif
 - b. Melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah
 - c. Mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan

Tujuan intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan yaitu memastikan anak usia sekolah khususnya, dan komunitas sekolah umumnya, memiliki pengetahuan dan perilaku keamanan pangan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan kesehatan.

Adapun Tahapan Kegiatan Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan adalah:

- a. Sekolah Full Intervensi:
 - 1. Advokasi lintas sektor program sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
 - 2. Sosialisasi Keamanan pangan sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
 - 3. Bimtek Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah

4. Monitoring dan sertifikasi sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
5. Pengawasan sekolah yang sudah di intervensi Keamanan pangan.
- b. Sekolah Perluasan: Sosialisasi Keamanan Pangan

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan I Tahun 2026

Tabel 3.67 Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan

Indikator	Kinerja			Kategori & Notifikasi Warna
	Target	Realisasi	%Capaian	
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	10	10	100,00%	Baik

Indikator Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan pada Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan capaian sebesar 100,00%, dengan target 10% dan realisasi 10%, sehingga termasuk dalam kategori Baik.

Capaian tersebut menggambarkan bahwa pelaksanaan intervensi sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan telah berjalan sesuai dengan target yang direncanakan pada Triwulan I.

Namun demikian, dalam perencanaan awal Tahun 2026, target intervensi ditetapkan sebanyak 7 sekolah (Full Intervensi). Seiring dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran, target tersebut disesuaikan menjadi 4 sekolah. Akan tetapi, berdasarkan Surat Sekretaris Utama BPOM Nomor: PR.05.03.2.04.26.254 tanggal 2 April 2026 tentang penundaan penyampaian usulan revisi DIPA kewenangan DJA, maka pelaksanaan kegiatan pada Triwulan I masih mengacu pada target awal yaitu 7 sekolah.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2026

Tabel 3.68 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2026 Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Target Tahun 2026	Realisasi Triwulan I	% Capaian Terhadap Target Tahunan	Kategori
Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	100	10,00	10,00 	Perlu Upaya Keras

Indikator Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan memiliki target tahunan sebesar 100%, dengan realisasi pada Triwulan I sebesar 10,00%, sehingga capaian terhadap target tahunan baru mencapai 10,00% dan berada pada kategori Perlu Upaya Keras.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa progres pelaksanaan kegiatan pada Triwulan I masih relatif rendah terhadap target tahunan, namun kondisi ini masih wajar mengingat pelaksanaan kegiatan dilakukan secara bertahap dan distribusi capaian belum merata di setiap triwulan.

Jika dibandingkan dengan target kumulatif Triwulan I sebesar 10%, realisasi yang dicapai telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Dengan demikian, meskipun terhadap target tahunan terlihat masih rendah, secara progres triwulanan pelaksanaan kegiatan telah berjalan sesuai perencanaan.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Capaian indikator Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan pada Triwulan I Tahun 2026 telah mencapai target yang ditetapkan (100%). Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan koordinasi yang baik dengan lintas sektor terkait, khususnya dalam penentuan sekolah sasaran dan penjadwalan kegiatan, sehingga pelaksanaan intervensi dapat berjalan sesuai rencana.

Koordinasi tersebut memungkinkan sinkronisasi program antara Balai POM di Pangkal Pinang dengan pihak sekolah dan instansi pendidikan, sehingga kegiatan dapat dilaksanakan secara tepat waktu dan efektif.

d. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Dalam rangka meningkatkan capaian indikator Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan agar target tahunan dapat tercapai secara optimal, akan dilakukan beberapa upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja.

Upaya yang akan dilakukan antara lain meningkatkan intensitas koordinasi dengan Pengampu dan Dinas terkait guna memastikan dukungan dalam penentuan dan kesiapan sekolah sasaran pada triwulan berikutnya. Selain itu juga setiap akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan Petunjuk Teknis dan disesuaikan dengan target bulanan yang telah ditetapkan. Penguatan monitoring dan evaluasi secara berkala juga akan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan kegiatan berjalan sesuai rencana serta mengantisipasi potensi kendala di lapangan.

Tabel 3.69 Matriks Rekomendasi Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Januari	Belum terdapat kendala, Kegiatan belum dilaksanakan, Proses Intervensi sekolah akan mulai dilaksanakan segera setelah perencanaan kegiatan selesai di buat	Segera menyusun perencanaan Kegiatan Intervensi Sekolah	Menyusun perencanaan kegiatan Intervensi Sekolah sesuai juknis	Maret	Ya	O-25, O-26, F-15	1. Pengawasan Sekolah tidak dilaksanakan oleh Sekolah yang sudah diintervensi oleh BPOM di Pangkal Pinang 2. Kader tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan Petunjuk Teknis 3. Peserta menandatangani kuitansi pertanggungjawaban kegiatan program sekolah yang belum ada nominalnya
Februari	Pencapaian indikator jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan masih menghadapi kendala, antara lain belum pastinya penetapan sekolah sasaran serta keterbatasan anggaran untuk mendukung kegiatan pendampingan dan monitoring. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya cakupan sekolah yang dapat diintervensi dan dibina secara berkelanjutan.	1. Mengkoordinasikan penetapan jumlah target sekolah sasaran secara lebih awal dengan berkoordinasi dengan unit pengampu dan Roren 2. Mengoptimalkan pendampingan melalui kolaborasi dengan Dinas Pendidikan guna memperluas cakupan pembudayaan keamanan pangan sesuai ketersediaan anggaran.	Melakukan koordinasi penetapan target sekolah serta menyusun pendampingan kolaboratif dengan Dinas Pendidikan guna memperluas cakupan pembudayaan keamanan pangan.	Maret	Tidak	-	-
Maret	Saat ini telah dilakukan penyesuaian target akan tetapi belum terdapat penetapan secara resmi dari unit pengampu, Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya cakupan sekolah yang dapat diintervensi dan dibina secara berkelanjutan.	1. Mengkoordinasikan penetapan jumlah target sekolah sasaran secara lebih awal dengan berkoordinasi dengan unit pengampu dan Roren 2. Melaksanakan Rapat Advokasi Program Nasional dengan target awal yaitu 7 Sekolah	Melaksanakan Rapat Advokasi Program Nasional dengan target 7 Sekolah	April	Tidak	-	-

- e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan program ini yaitu koordinasi yang baik dengan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dan Sekolah yang akan diintervensi Program Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan.

- f. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3.70 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan

Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian
	T	R	%	Target (RPD TW I)	Realisasi	%			
Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	10	10	100	2.845.000	1.820.000	63,97	1,56	0,56	92% (Efisien)

1) Efisiensi penggunaan anggaran

Indikator Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan menunjukkan bahwa realisasi output pada Triwulan I Tahun 2026 telah mencapai 100% (target 10% dan realisasi 10%). Sementara itu, realisasi anggaran sebesar Rp1.820.000 dari target Rp2.845.000 atau sebesar 63,97%.

Hal tersebut menunjukkan bahwa capaian output yang optimal dapat diraih dengan penggunaan anggaran yang lebih rendah dari yang direncanakan. Nilai Tingkat Efisiensi (TE) sebesar 0,56 dengan capaian efisiensi sebesar 92% (kategori efisien) mengindikasikan bahwa pelaksanaan kegiatan telah dilakukan secara hemat dan tepat guna tanpa mengurangi kualitas output yang dihasilkan.

Efisiensi ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan yaitu koordinasi yang efektif dengan dinas terkait, sehingga sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal.

2) Upaya mencapai efisiensi penggunaan anggaran

Upaya yang dilakukan dalam rangka mencapai efisiensi penggunaan anggaran pada indikator Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan antara lain melalui perencanaan kegiatan yang lebih terarah dan terukur, sehingga pelaksanaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan.

Selain itu, dilakukan optimalisasi koordinasi dengan dinas terkait dan pihak sekolah, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan secara terpadu. Pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara maksimal, termasuk pengaturan jadwal kegiatan yang efektif, juga menjadi faktor pendukung efisiensi.

g. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan informasi kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja tahun 2025:

- 1) Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja
Penyesuaian tersebut antara lain dilakukan melalui penyusunan jadwal kegiatan yang lebih terstruktur dan terdistribusi per triwulan, sehingga capaian kinerja dapat lebih terpantau dan terukur sejak awal tahun. Selain itu, dilakukan penentuan prioritas sekolah sasaran dengan mempertimbangkan kesiapan dan dukungan dari pihak sekolah serta dinas terkait, guna memastikan intervensi dapat berjalan lebih optimal.

Selanjutnya, dilakukan penguatan koordinasi lintas sektor serta penyesuaian metode pelaksanaan kegiatan agar lebih efisien dan tepat sasaran, sesuai dengan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun sebelumnya.

Dengan adanya penyesuaian aktivitas tersebut, diharapkan pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2026 dapat berjalan lebih efektif dan mampu mendukung pencapaian target kinerja secara optimal.

- 2) Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja

Pada Triwulan I, anggaran difokuskan pada kegiatan koordinasi lintas sektor dan survei sekolah sebagai tahap awal pelaksanaan intervensi. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan sekolah sasaran, memperoleh data awal yang akurat, serta membangun komitmen bersama dengan dinas terkait.

Penyesuaian penggunaan anggaran tersebut dilakukan agar pelaksanaan kegiatan pada triwulan selanjutnya dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran, sehingga mendukung percepatan pencapaian target kinerja secara keseluruhan.

- 3) Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja

Evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan awal berupa koordinasi lintas sektor dan survei sekolah telah memberikan dasar yang kuat dalam penentuan sasaran intervensi. Oleh karena itu, tindak lanjut yang dilakukan adalah optimalisasi hasil koordinasi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan lanjutan, serta peningkatan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan capaian kinerja tetap sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

4) Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya.

Penyesuaian perencanaan dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan Rapat Advokasi Keamanan Pangan pada bulan April, yang bertujuan untuk memperkuat komitmen dan dukungan dari dinas terkait serta pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan program di sekolah. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong percepatan implementasi intervensi pada Triwulan II.

3. Jumlah Desa Pangan Aman

Desa pangan aman adalah desa yang memiliki :

- 1) Kader keamanan pangan desa yang aktif
- 2) Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa
- 3) Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain)

Melalui intervensi keamanan pangan yang dilakukan pada Program Desa Pangan Aman ini diharapkan semakin banyak desa yang mandiri dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan terkait keamanan pangan yang dimasukkan dan diintegrasikan dalam program desa sehingga semakin banyak pula masyarakat yang terlindungi dari pangan yang tidak aman dan tidak bermutu.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan I Tahun 2026

Tabel 3.71 Jumlah Desa Pangan Aman

Indikator	Kinerja			Kategori & Notifikasi Warna
	Target	Realisasi	%Capaian	
Jumlah desa pangan aman	10	10,00	100,00%	Baik

Indikator Jumlah Desa Pangan Aman pada Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan capaian sebesar 100,00%, dengan target 10% dan realisasi 10%, sehingga termasuk dalam kategori Baik.

Capaian tersebut menggambarkan bahwa pelaksanaan intervensi Desa Pangan Aman telah berjalan sesuai dengan target yang direncanakan pada Triwulan I.

Namun demikian, dalam perencanaan awal Tahun 2026, target intervensi ditetapkan sebanyak 3 Desa. Seiring dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran, target tersebut disesuaikan menjadi 2 Desa. Akan tetapi, berdasarkan Surat Sekretaris Utama BPOM Nomor: PR.05.03.2.04.26.254 tanggal 2 April 2026 tentang penundaan penyampaian usulan revisi DIPA kewenangan DJA, maka pelaksanaan kegiatan pada Triwulan I masih mengacu pada target awal yaitu 3 Desa.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2026

Tabel 3.72 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2026 Jumlah Desa Pangan Aman

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Target Tahun 2026	Realisasi Triwulan I	% Capaian Terhadap Target Tahunan	Kategori
Jumlah desa pangan aman	100	10,00	10,00 ▼	Perlu Upaya Keras

Indikator Jumlah Desa Pangan Aman memiliki target tahunan sebesar 100%, dengan realisasi pada Triwulan I sebesar 10,00%, sehingga capaian terhadap target tahunan baru mencapai 10,00% dan berada pada kategori Perlu Upaya Keras.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa progres pelaksanaan kegiatan pada Triwulan I masih relatif rendah terhadap target tahunan, namun kondisi ini masih wajar mengingat pelaksanaan kegiatan dilakukan secara bertahap dan distribusi capaian belum merata di setiap triwulan.

Jika dibandingkan dengan target kumulatif Triwulan I sebesar 10%, realisasi yang dicapai telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Dengan demikian, meskipun terhadap target tahunan terlihat masih rendah, secara progres triwulanan pelaksanaan kegiatan telah berjalan sesuai perencanaan.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Capaian indikator Jumlah Desa Pangan Aman pada Triwulan I Tahun 2026 telah mencapai target yang ditetapkan (100%). Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan koordinasi yang baik dengan lintas sektor terkait, khususnya dalam penentuan desa sasaran dan penjadwalan kegiatan, sehingga pelaksanaan intervensi dapat berjalan sesuai rencana.

d. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Dalam rangka meningkatkan capaian indikator Jumlah Desa Pangan Aman agar target tahunan dapat tercapai secara optimal, akan dilakukan beberapa upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja.

Upaya yang akan dilakukan antara lain meningkatkan intensitas koordinasi dengan Pengampu dan Dinas terkait guna memastikan dukungan dalam penentuan dan kesiapan desa sasaran pada triwulan berikutnya. Selain itu juga setiap akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan Petunjuk Teknis dan disesuaikan dengan target bulanan yang telah ditetapkan. Penguatan monitoring dan evaluasi secara berkala juga akan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan kegiatan berjalan sesuai rencana serta mengantisipasi potensi kendala di lapangan.

Tabel 3.73 Matriks Rekomendasi Jumlah Desa Pangan Aman

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Januari	Belum terdapat kendala, Kegiatan belum dilaksanakan, Proses Intervensi desa akan mulai dilaksanakan segera setelah perencanaan kegiatan selesai di buat	Segera menyusun perencanaan Kegiatan Intervensi Desa	Menyusun perencanaan kegiatan Intervensi Desa sesuai juknis	Maret	Ya	SDM-04, F-16	1. Program Keamanan Pangan desa tidak dilanjutkan secara mandiri oleh desa yang telah diintervensi 2. Peserta menandatangani kuitansi pertanggungjawaban program desa pangan aman yang belum ada nominalnya
Februari	Pencapaian indikator jumlah Desa Pangan Aman masih menghadapi kendala, antara lain belum pastinya penetapan jumlah desa	1. Mengkoordinasikan penetapan jumlah target desa sasaran secara lebih awal kepada unit	1. Menyampaikan usulan dan melakukan koordinasi resmi dengan unit pengampu dan Biro Perencanaan untuk	Maret	Tidak	-	-

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	sasaran serta keterbatasan anggaran untuk mendukung kegiatan pembinaan, monitoring, dan evaluasi. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya cakupan desa yang dapat diintervensi dan dibina secara berkelanjutan sesuai standar program Desa Pangan Aman.	pengampu dan Biro perencanaan 2. Melakukan penyesuaian perencanaan kegiatan sesuai ketersediaan anggaran dengan memperkuat dukungan lintas sektor.	finalisasi serta pengesahan jumlah desa sasaran. 2. Menyusun revisi rencana kerja dan jadwal kegiatan berdasarkan pagu anggaran yang tersedia, serta mengintensifkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan lintas sektor guna mendukung pelaksanaan program.				
Maret	Saat ini telah dilakukan penyesuaian target akan tetapi belum terdapat penetapan secara resmi dari unit pengampu, Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya cakupan desa yang dapat diintervensi dan dibina secara berkelanjutan.	1. Mengkoordinasikan penetapan jumlah target desa sasaran secara lebih awal kepada unit pengampu dan Biro perencanaan 2. Melaksanakan Rapat Advokasi Program Nasional dengan target awal yaitu 3 Desa	Melaksanakan Rapat Advokasi Program Nasional dengan target 3 Desa	April	Tidak	-	-

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan program ini yaitu koordinasi yang baik dengan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dan Desa yang akan diintervensi Program Desa Pangan Aman Tahun 2026.

f. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3.74 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Jumlah Desa Pangan Aman

Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian
	T	R	%	Target (RPD TW I)	Realisasi	%			
Jumlah desa pangan aman	10	10	100	0	1.820.000	-	-	-	-

1) Efisiensi penggunaan anggaran

Berdasarkan tabel diatas, indikator Jumlah Desa Pangan Aman pada Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan capaian output sebesar 100% (target 10% dan realisasi 10%). Namun demikian, efisiensi penggunaan anggaran tidak dapat dihitung. Hal ini disebabkan karena pada perencanaan awal, target

anggaran (RPD Triwulan I) tercatat sebesar Rp0, sementara pada realisasinya terdapat penggunaan anggaran sebesar Rp1.820.000. Kondisi ini mengakibatkan tidak dapat dihitungnya nilai efisiensi (IE) dan tingkat efisiensi (TE), karena perhitungan efisiensi memerlukan perbandingan antara target dan realisasi anggaran.

Penggunaan anggaran pada Triwulan I tersebut untuk mendukung pelaksanaan kegiatan awal, yaitu koordinasi dan persiapan intervensi di desa sasaran, meskipun belum direncanakan dalam alokasi anggaran triwulanan.

Dengan demikian, meskipun capaian output telah optimal, analisis efisiensi tidak dapat dilakukan pada periode ini karena ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran.

2) Upaya mencapai efisiensi penggunaan anggaran

Upaya yang dilakukan dalam rangka mencapai efisiensi penggunaan anggaran pada indikator Jumlah Desa Pangan Aman dilakukan melalui pengendalian penggunaan anggaran secara selektif dan sesuai kebutuhan prioritas kegiatan.

Meskipun pada perencanaan awal Triwulan I belum dialokasikan anggaran (Rp0), realisasi anggaran yang digunakan difokuskan untuk mendukung kegiatan seperti koordinasi lintas sektor dan persiapan intervensi di desa sasaran. Penggunaan anggaran tersebut tetap mempertimbangkan prinsip efektivitas dan prioritas kebutuhan, sehingga output kegiatan tetap dapat tercapai secara optimal.

g. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan informasi kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja tahun 2025.

1) Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja

Penyesuaian tersebut antara lain dilakukan melalui penyusunan jadwal kegiatan yang lebih terstruktur dan terdistribusi per triwulan, sehingga capaian kinerja dapat lebih terpantau dan terukur sejak awal tahun. Selain itu, dilakukan penentuan prioritas desa sasaran dengan mempertimbangkan kesiapan dan

dukungan dari pihak desa serta dinas terkait, guna memastikan intervensi dapat berjalan lebih optimal.

Selanjutnya, dilakukan penguatan koordinasi lintas sektor serta penyesuaian metode pelaksanaan kegiatan agar lebih efisien dan tepat sasaran, sesuai dengan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun sebelumnya. Dengan adanya penyesuaian aktivitas tersebut, diharapkan pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2026 dapat berjalan lebih efektif dan mampu mendukung pencapaian target kinerja secara optimal.

2) Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja

Pada Triwulan I, anggaran difokuskan pada kegiatan koordinasi lintas sektor dan survei desa sebagai tahap awal pelaksanaan intervensi. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan desa sasaran, memperoleh data awal yang akurat, serta membangun komitmen bersama dengan dinas terkait.

Penyesuaian penggunaan anggaran tersebut dilakukan agar pelaksanaan kegiatan pada triwulan selanjutnya dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran, sehingga mendukung percepatan pencapaian target kinerja secara keseluruhan.

3) Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja

Evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan awal berupa koordinasi lintas sektor dan survei desa telah memberikan dasar yang kuat dalam penentuan sasaran intervensi. Oleh karena itu, tindak lanjut yang dilakukan adalah optimalisasi hasil koordinasi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan lanjutan, serta peningkatan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan capaian kinerja tetap sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

4) Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya.

Penyesuaian perencanaan dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan Rapat Advokasi Keamanan Pangan pada bulan April, yang bertujuan untuk memperkuat komitmen dan dukungan dari dinas terkait serta pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan program Desa Pangan Aman. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong percepatan implementasi intervensi pada Triwulan II.

4. Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari komunitas pasar dan pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi Supply (Pengelola Pasar, Pedagang Pasar, Asosiasi Pasar, Pemasok) dan dari sisi Demand (Pengunjung Pasar).

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan I Tahun 2026

Tabel 3.75 Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Indikator	Kinerja			Kategori & Notifikasi Warna
	Target	Realisasi	%Capaian	
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	10	10	100,00%	Baik

Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di wilayah Kerja Balai POM di Pangkal Pinang pada tahun 2026 menetapkan target sebanyak 1 Pasar.

Indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas pada Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan capaian sebesar 100,00%, dengan target 10% dan realisasi 10%, sehingga termasuk dalam kategori Baik. Capaian tersebut menggambarkan bahwa pelaksanaan intervensi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas telah berjalan sesuai dengan target yang direncanakan pada Triwulan I.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2026

Tabel 3.76 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2026 Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Target Tahun 2026	Realisasi Triwulan I	% Capaian Terhadap Target Tahunan	Kategori
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	100	10,00	10,00 	Perlu Upaya Keras

Indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas memiliki target tahunan sebesar 100%, dengan realisasi pada Triwulan I sebesar 10,00%, sehingga capaian terhadap target tahunan baru mencapai 10,00% dan berada pada kategori Perlu Upaya Keras.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa progres pelaksanaan kegiatan pada Triwulan I masih relatif rendah terhadap target tahunan, namun kondisi ini masih

wajar mengingat pelaksanaan kegiatan dilakukan secara bertahap dan distribusi capaian belum merata di setiap triwulan.

Jika dibandingkan dengan target kumulatif Triwulan I sebesar 10%, realisasi yang dicapai telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Dengan demikian, meskipun terhadap target tahunan terlihat masih rendah, secara progres triwulanan pelaksanaan kegiatan telah berjalan sesuai perencanaan.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Capaian indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas pada Triwulan I Tahun 2026 telah mencapai target yang ditetapkan (100%). Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan koordinasi yang baik dengan lintas sektor terkait, khususnya dalam penentuan pasar dan penjadwalan kegiatan, sehingga pelaksanaan intervensi dapat berjalan sesuai rencana.

d. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Dalam rangka meningkatkan capaian indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas agar target tahunan dapat tercapai secara optimal, akan dilakukan beberapa upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja.

Upaya yang akan dilakukan antara lain meningkatkan intensitas koordinasi dengan Pengampu dan Dinas terkait guna memastikan dukungan dalam kesiapan Pasar yang akan diintervensi pada triwulan berikutnya. Selain itu juga setiap akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan Petunjuk Teknis dan disesuaikan dengan target bulanan yang telah ditetapkan. Penguatan monitoring dan evaluasi secara berkala juga akan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan kegiatan berjalan sesuai rencana serta mengantisipasi potensi kendala di lapangan.

Tabel 3.77 Matriks Rekomendasi Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Januari	Belum terdapat kendala, Kegiatan belum dilaksanakan, Proses Intervensi pasar akan mulai dilaksanakan segera setelah perencanaan kegiatan selesai di buat	Segera menyusun perencanaan Kegiatan Intervensi Pasar	Menyusun perencanaan kegiatan Intervensi Pasar sesuai juknis	-	Ya	F-17, O-56	1. Peserta menandatangani kuitansi pertanggungjawaban kegiatan program pasar pangan aman yang belum ada nominalnya 2. Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas tidak dilanjutkan oleh Pemerintah Daerah
Februari	Pencapaian indikator jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas masih menghadapi kendala karena penetapan target desa dan sekolah belum dilakukan. Sementara itu, pelaksanaan kegiatan Pasar Pangan Aman perlu dilaksanakan secara bersamaan dan terintegrasi dengan intervensi di desa dan sekolah. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan kegiatan belum dapat berjalan sesuai rencana.	Melakukan koordinasi dengan unit pengampu dan Biro Perencanaan (Roren) untuk percepatan penetapan target sekolah dan desa, sehingga pelaksanaan intervensi di pasar dapat segera dilaksanakan.	Melakukan koordinasi dan percepatan finalisasi target sekolah dan desa sebagai dasar penyusunan jadwal intervensi pasar.	Maret	Tidak	-	-
Maret	Saat ini telah dilakukan penyesuaian target akan tetapi belum terdapat penetapan secara resmi dari unit pengampu, Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya cakupan pasar yang dapat diintervensi dan dibina secara berkelanjutan.	1. Melakukan koordinasi dengan unit pengampu dan Biro Perencanaan (Roren) untuk percepatan penetapan target sekolah dan desa, sehingga pelaksanaan intervensi di pasar dapat segera dilaksanakan. 2. Melaksanakan Rapat Advokasi Program Nasional dengan target 1 pasar	Melaksanakan Rapat Advokasi Program Nasional dengan target 1 Pasar	April	Tidak	-	-

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan program ini yaitu koordinasi yang baik dengan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dan Pasar yang akan diintervensi Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Tahun 2026.

f. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3.78 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian
	T	R	%	Target (RPD TW I)	Realisasi	%			
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	10	10	100	0	0	-	-	-	-

1) Efisiensi penggunaan anggaran

Berdasarkan tabel diatas, Indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas pada Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan capaian output sebesar 100% (target 10% dan realisasi 10%). Namun demikian, efisiensi penggunaan anggaran tidak dapat dihitung.

Hal ini disebabkan karena tidak terdapat alokasi anggaran (target Rp0) maupun realisasi anggaran (Rp0) pada Triwulan I. Dengan demikian, perhitungan efisiensi (IE) dan tingkat efisiensi (TE) tidak dapat dilakukan karena tidak adanya komponen input anggaran yang menjadi dasar perhitungan.

Capaian output yang tetap terpenuhi pada kondisi tanpa penggunaan anggaran menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pada Triwulan I dilakukan melalui optimalisasi sumber daya non-anggaran. Hal ini dikarenakan pelaksanaan koordinasi lintas sektor dilakukan secara terintegrasi dengan program sekolah dan desa pangan aman, sehingga tidak memerlukan alokasi anggaran tersendiri. Sinergi tersebut memungkinkan pemanfaatan sumber daya secara lebih efisien tanpa mengurangi capaian output yang telah ditetapkan.

2) Upaya mencapai efisiensi penggunaan anggaran

Upaya yang dilakukan dalam rangka mencapai efisiensi penggunaan anggaran pada indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dilakukan melalui integrasi pelaksanaan koordinasi lintas sektor dengan program lain, yaitu program sekolah dan desa pangan aman.

Pelaksanaan koordinasi dilakukan secara bersamaan dengan kegiatan yang telah berjalan, sehingga tidak memerlukan alokasi anggaran tambahan.

Selain itu, dilakukan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia maupun dukungan dari pemangku kepentingan terkait.

Ke depan, upaya efisiensi akan terus dilakukan melalui penguatan sinergi antar program dan peningkatan perencanaan kegiatan secara terpadu, sehingga penggunaan anggaran dapat lebih efektif dan tepat sasaran.

g. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan informasi kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja tahun 2025:

1. Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja

Berdasarkan informasi kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja Tahun 2025, dilakukan penyesuaian aktivitas/kegiatan pada Tahun 2026 guna mendukung pencapaian indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas.

Penyesuaian dilakukan melalui integrasi pelaksanaan kegiatan dengan program sekolah dan desa pangan aman, sehingga kegiatan koordinasi dapat dilaksanakan secara bersamaan. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan, tetapi juga memungkinkan optimalisasi sumber daya yang tersedia.

Dengan penyesuaian tersebut, pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2026 diharapkan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan tetap mampu mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

2. Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja

Pada Triwulan I, pelaksanaan kegiatan dilakukan tanpa penggunaan anggaran, dengan mengintegrasikan kegiatan ke dalam program sekolah dan desa pangan aman. Penyesuaian ini dilakukan sebagai strategi untuk tetap mencapai target kinerja melalui optimalisasi sumber daya non-anggaran dan dukungan pemangku kepentingan terkait.

Ke depan, penggunaan anggaran akan disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan pada triwulan berikutnya, sehingga dapat mendukung percepatan capaian kinerja secara lebih optimal dan terukur.

3. Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja

Indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas telah mencapai target triwulanan (100%) meskipun dilaksanakan tanpa penggunaan anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa strategi integrasi kegiatan dengan program sekolah dan desa pangan aman berjalan efektif.

Tindak lanjut atas rekomendasi dan rencana aksi kinerja difokuskan pada penguatan sinergi antar program dan pemangku kepentingan, agar pelaksanaan kegiatan pada triwulan berikutnya dapat dilakukan secara lebih masif. Selain itu, akan dilakukan peningkatan intensitas koordinasi dan pendampingan kepada pasar sasaran guna mendukung keberlanjutan program.

4. Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya.

Penyesuaian perencanaan dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan Rapat Advokasi Keamanan Pangan pada bulan April, yang bertujuan untuk memperkuat komitmen dan dukungan dari dinas terkait serta pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong percepatan implementasi intervensi pada Triwulan II.

SK 3 : Meningkatnya Pendampingan UMKM dalam Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu

Sasaran Kegiatan **Meningkatnya Pendampingan UMKM dalam Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu** diukur dengan indikator kinerja utama sebagai berikut:

1. Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan

UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi adalah UMK Pangan Olahan yang mampu menerapkan prinsip CPPOB ditandai dengan diterbitkannya IP CPPOB skala UMK. Sedangkan untuk UMKM OBA (Obat Bahan Alam) yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan Obat Bahan Alam yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat CPOTB secara Bertahap (tahap 1 atau tahap 1 ke tahap 2 atau tahap 2 ke tahap 3). Sedangkan untuk UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat Pemenuhan Aspek (SPA) CPKB.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan I Tahun 2026

Tabel 3.79 Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan

Indikator	Kinerja			Kategori & Notifikasi Warna
	Target	Realisasi	%Capaian	
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	12,9	12,49	96,82%	Baik

Dari hasil perhitungan, persentase capaian indikator Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan pada Triwulan I Tahun 2026 sebesar 96,82 % dengan realisasi sebesar 12,49 % dari target pada Triwulan I yaitu 12,9 %. Sehingga untuk Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan

masuk dalam kategori Baik. Capaian indikator ini merupakan realisasi yang dihitung berdasarkan tahapan dalam proses pendampingan UMKM Pangan Olahan yang telah dilaksanakan pada triwulan I.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2026

Tabel 3.80 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2026 Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Target Tahun 2026	Realisasi Triwulan I	% Capaian Terhadap Target Tahunan	Kategori
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	31,25	12,49	39,97	

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap data pada Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2026, dapat disampaikan bahwa indikator persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB), Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB), dan/atau Industri Pangan Olahan yang memenuhi ketentuan (IP CPPOB) belum dapat dibandingkan secara langsung dengan target tahunan. Hal ini disebabkan oleh perbedaan metode perhitungan antara target bulanan dan target tahunan.

Pada target bulanan, capaian realisasi dihitung berdasarkan progres tahapan pendampingan yang telah dilaksanakan kepada UMKM selama tahun berjalan. Sementara itu, target tahunan dihitung berdasarkan persentase jumlah UMKM yang didampingi pada tahun berjalan terhadap target kumulatif pendampingan UMKM dalam periode lima tahun. Perbedaan pendekatan ini menyebabkan capaian pada triwulan berjalan belum sepenuhnya merepresentasikan tingkat pencapaian terhadap target tahunan, sehingga diperlukan analisis lebih lanjut dengan mempertimbangkan tahapan pendampingan yang sedang dilaksanakan.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Capaian kinerja pada indikator ini sebesar 12,49% dari target Triwulan I sebesar 12,9%, sehingga belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan. Capaian tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain belum terpenuhinya jumlah target UMKM yang akan didampingi pada tahun 2026.

Upaya yang telah dilakukan dalam penetapan target pendampingan antara lain melalui koordinasi dengan lintas sektor di daerah guna memperoleh data dan rekomendasi UMKM yang memenuhi ketentuan untuk didampingi

. Dari total target pendampingan tahun 2026 sebanyak 9 UMKM, hingga Triwulan I baru ditetapkan 7 UMKM sebagai sasaran pendampingan, yang terdiri dari 6 UMKM pangan olahan dan 1 UMKM obat tradisional. Belum terpenuhinya target pendampingan UMKM pangan olahan disebabkan oleh masih terbatasnya UMKM yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai sasaran pendampingan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian kinerja tidak hanya dipengaruhi oleh pelaksanaan tahapan pendampingan, tetapi juga oleh ketersediaan UMKM yang memenuhi kriteria untuk didampingi. Oleh karena itu, diperlukan upaya identifikasi dan penjangkaran UMKM potensial secara lebih intensif guna mendukung pencapaian target pada periode selanjutnya.

d. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Upaya-upaya perbaikan/ rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian indikator ini adalah:

1. Melakukan koordinasi secara intensif dengan lintas sektor di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi, khususnya dalam hal penentuan dan rekomendasi UMKM yang akan menjadi sasaran kegiatan pendampingan. Kolaborasi ini penting guna memastikan keterpaduan program dan ketepatan sasaran UMKM binaan.
2. Selain melalui koordinasi lintas sektor, upaya penetapan dan pemenuhan target pendampingan juga dapat diperkuat melalui program *Corporate Social*

Responsibility (CSR) dari BUMN yang merupakan wadah pemberdayaan UMKM yang ada di wilayah kerja di Pulau Bangka.

3. Mengintensifkan kegiatan sosialisasi inovasi UMKM PACAK melalui berbagai kanal media sosial resmi BPOM di Pangkal Pinang. Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dalam hal pemenuhan sarana produksi terhadap persyaratan IP CPPOB, dan registrasi produk sehingga dapat meningkatkan saing produk pangan olahan.

Tabel 3.81 Matriks Rekomendasi Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Januari	Terdapat perubahan tahapan dalam pendampingan UMKM pangan olahan yang sehingga masih menunggu revisi pedoman tahapan pendampingan sesuai dengan Kepka BPOM yang terbaru Upaya: Telah dilakukan permintaan data UMKM melalui lintas sektor dan pendataan UMKM melalui inovasi UMKM PACAK	Setiap tahapan dalam proses pendampingan dilakukan sesuai dengan pedoman yang berlaku dan dalam setiap tahapan dilakukan pendokumentasian untuk mendukung program kerja Zona Integritas mencapai WBBM	Pengumpulan data UMKM yang akan dilakukan seleksi melalui verifikasi data yang telah disampaikan disertai dengan dokumentasi	Februari	Ya	O-28	Rendahnya komitmen UMKM untuk melanjutkan proses pendaftaran izin edar
Februari	- Telah dilakukan pengumpulan data pelaku usaha UMKM melalui rekomendasi lintas sektor dan juga melalui inovasi UMKM Pacak yang selanjutnya akan dijadikan database UMKM - Telah dilakukan Sosialisasi Keamanan Pangan kepada Pelaku Usaha yang termasuk kedalam database	Seleksi UMKM yang akan ditetapkan sebagai target pendampingan melalui hasil KIE Keamanan Pangan	Melakukan GAP Asesment terhadap Pelaku usaha UMKM yang telah mengikuti KIE untuk selanjutnya dilakukan verifikasi sebelum ditetapkan sebagai target pendampingan	Maret	Ya	O-28	Rendahnya komitmen UMKM untuk melanjutkan proses pendaftaran izin edar
Maret	Telah dilakukan penetapan target pendampingan sebanyak 7 sarana yang terdiri dari 1 sarana Obat Tradisional dan 6 sarana Pangan Olahan Kendala: Masih terdapat kekurangan 2 target sarana Pangan Olahan dikarenakan adanya sarana yang direkomendasikan belum memenuhi ketentuan untuk dilakukan pendampingan	Koordinasi dengan wadah pemberdayaan UMKM BUMN dan lintas sektor terkait guna memperoleh rekomendasi UMKM yang berpotensi untuk ditingkatkan dan dilakukan pendampingan	- Penambahan target UMKM pangan olahan sebanyak 2 sarana - Konfirmasi sarana hasil rekomendasi lintas sektor - Melanjutkan tahapan verifikasi sarana UMKM yang akan didampingi	April	Ya	O-28	Rendahnya komitmen UMKM untuk melanjutkan proses pendaftaran izin edar

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Capaian realisasi indikator Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kosmetik yang Baik dan/atau Izin Penerapan IP- CPPOB Pangan Olahan pada Triwulan I Tahun 2026 dipengaruhi oleh pelaksanaan pendampingan UMKM pangan olahan yang telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan kegiatan hingga triwulan I. Adanya respon yang baik dari lintas sektor terhadap permintaan data pelaku usaha UMKM yang akan dilakukan pendampingan ikut mendukung realisasi terhadap kinerja ini. Namun data UMKM yang disampaikan oleh lintas sektor, masih diperlukan verifikasi lapangan terhadap sarana produksi UMKM yang diusulkan sebagai calon sasaran pendampingan. Namun demikian, pelaksanaan kegiatan verifikasi tersebut belum dapat dilakukan secara optimal, antara lain disebabkan oleh keterbatasan anggaran sebagai dampak kebijakan efisiensi.

Kondisi ini mengakibatkan pada terbatasnya jumlah UMKM yang dapat ditetapkan sebagai sasaran pendampingan, sehingga turut mempengaruhi pencapaian target yang telah ditetapkan.

f. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3.82 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan

Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian
	T	R	%	Target (RPD TW I)	Realisasi	%			
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	12,9	12,49	96,82	2.670.000	2.330.000	87,27	1,11	0,11	100% (Efisien)

1) Efisiensi penggunaan anggaran

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa capaian tingkat efisiensi penggunaan anggaran pada indikator Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kosmetik yang Baik

dan/atau Izin Penerapan IP CPPOB Pangan Olahan adalah sebesar 0,11 , yang menunjukkan kondisi efisien.

Perhitungan tingkat efisiensi ini diperoleh melalui perbandingan antara persentase capaian output dengan persentase capaian input (anggaran), di mana capaian output sebesar 96,82% dan capaian input sebesar 87,27%.

2) Upaya mencapai efisiensi penggunaan anggaran

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumberdaya/anggaran efisien karena capaian indikator lebih tinggi daripada persentase realisasi anggaran. Untuk itu selanjutnya akan dilakukan penyesuaian realisasi anggaran dan juga target output pada triwulan berikutnya sehingga capaian terhadap indikator ini dapat lebih efektif dan optimal.

g. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan informasi kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja tahun 2025:

1) Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja

Penyesuaian kegiatan dalam mencapai target kinerja yang dilakukan pada triwulan I diantaranya:

- Melakukan seleksi awal untuk UMKM yang akan ditetapkan sebagai target pendampingan untuk menilai kelayakan sarana produksi UMKM yang akan dilakukan pendampingan.
- Melakukan koordinasi dengan lintas sektor untuk UMKM potensial yang akan direkomendasikan sebagai target pendampingan.

2) Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja

Dalam rangka pencapaian target kinerja peningkatan pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu, telah dilakukan penyesuaian anggaran kegiatan melalui mekanisme revisi anggaran guna mendukung pelaksanaan fasilitasi pendampingan. Penyesuaian ini bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan seluruh tahapan kegiatan pendampingan agar berjalan secara efektif, sehingga target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal.

3) Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja

Capaian indikator terhadap persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik

dan/atau IP CPPOB pangan olahan pada triwulan I memberikan capaian yang baik. Hal ini disebabkan antara lain karena meningkatnya kesadaran pelaku usaha UMKM untuk memiliki izin edar BPOM.

Berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja yang telah dicapai pada triwulan I, hal-hal yang dapat dilakukan untuk pencapaian target:

- Melaksanakan tahapan pendampingan sesuai dengan petunjuk teknis pendampingan UMKM
- Melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait di pemerintah daerah untuk memperoleh rekomendasi pelaku usaha UMKM yang akan dijadikan target tambahan pendampingan pada tahun 2026

4) Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya.

Penyesuaian yang dapat dilakukan untuk periode berikutnya antara lain:

- Melanjutkan tahapan fasilitasi pendampingan penerapan CPPOB pada UMK yang menjadi target.
- Mengusulkan revisi rencana penarikan dana anggaran agar kegiatan pendampingan dapat berjalan sesuai dengan target output kegiatan.

SK 4 : Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di Wilayah Kerja UPT

Berdasarkan Peraturan BPOM No. 26 tahun 2017, Deputi Bidang Penindakan bertugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penindakan di Bidang Obat dan Makanan merupakan upaya terakhir yang ditempuh dalam menjaga keamanan obat dan makanan yang beredar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya pencegahan, pelaksanaan inspeksi rutin dan Komunikasi, Edukasi dan Informasi (KIE) diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan para pelaku usaha dan mencerdaskan masyarakat dalam rangkaian proses produksi, distribusi dan penggunaan produk obat dan makanan.

- a. Penilaian Persentase keberhasilan penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut:
 - 1) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sebesar 15%;
 - 2) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)) sebesar 40%;
 - 3) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) sebesar 30%; dan
 - 4) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) sebesar 15%
- b. Setelah itu, dilakukan pembobotan terhadap 4 (empat) tahapan penyelesaian berkas perkara sebagai berikut:
$$= ((\text{Jumlah perkara SPDP} \times 0.15 + \text{Jumlah perkara Tahap I} \times 0.55 + \text{Jumlah perkara P21} \times 0.85 + \text{Jumlah perkara Tahap II} \times 1) / \text{Jumlah target perkara}) \times 100\%$$
- c. Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot

perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai oleh perkara SP3 tersebut

- d. Perkara carryover yang dihitung menjadi capaian perkara merupakan seluruh perkara yang belum tahap 2 sampai dengan tahun N-1. Perkara carry over dikecualikan apabila telah ditetapkan DPO atau dalam proses penetapan DPO atau sudah ditetapkan SP3.

1. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan I Tahun 2026

Tabel 3.83 Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Indikator	Kinerja			Kategori & Notifikasi Warna
	Target	Realisasi	%Capaian	
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	33,33	33,33	100,00%	Baik

1. Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan per-UU di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
2. Kegiatan penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT.

Tahapan Penindakan antara lain:

- a) SPDP (Surat Pemberitahuan Dim'ulainya Penyidikan)
- b) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
- c) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
- d) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

Presentasi keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di Balai POM di Pangkal Pinang memiliki target pada Triwulan I tahun 2026 sebesar 33,33 dengan realisasi sampai dengan Triwulan I tahun 2026 sebesar 33,33. Capaian terhadap target sebesar 100% dengan kriteria “Baik”.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2026

Tabel 3.84 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2026 Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Target Tahun 2026	Realisasi Triwulan I	% Capaian Terhadap Target Tahunan	Kategori
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	92,5	33,33	36,03 	Perlu Upaya Keras

Perbandingan persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan Triwulan I dengan target 2026 menghasilkan capaian sebesar 36,03%. Hasil ini diperoleh dari realisasi kinerja Triwulan I sebesar 33,33 terhadap target 2026 sebesar 92,5. Hasil ini menunjukkan adanya progres untuk pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan I tahun 2026 namun memerlukan upaya yang keras untuk pencapaian target tahun 2026.

Maret						
Target		Realisasi		Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi
Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d bulan n	Perkara Carry Over			
2	1	0		0.15	0	33.33
		0	0	0.55	0	
		0	0	0.85	0	
		0	1	1	1	
2	1	0	1			

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

1. Hingga triwulan I tahun 2026 belum ada realisasi perkara sediaan farmasi dan pangan olahan yang dilakukan penyidikan oleh Tim Kerja Penindakan Balai Besar POM di Pangkal Pinang namun pada tahun 2026 ada 1 (satu) perkara carry over

atas nama tersangka H yang dilakukan Penyerahan tersangka dan Barang Bukti (Tahap 2) pada tanggal 05 Februari 2026.

2. Melakukan koordinasi dengan Korwas Polda Kep. Bangka Belitung dan Kejaksaan Kep. Bangka Belitung dalam rangka penyelesaian pemberkasan kedepannya, antara lain terkait upaya yang harus dilakukan dalam rangka penerapan Undang-Undang no 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang no 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- d. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)
 1. Dalam rangka penerapan Undang-Undang no 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang no 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) akan dilakukan proses Pemberkasan yang beriringan dengan selalu berkoordinasi dengan ICJS dalam hal ini Korwas PPNS dan Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung.
 2. Selalu berkonsultasi dengan Korwas PPNS dan JPU peneliti berkas dalam proses tahapan penyidikan hingga penyelesaian berkas perkara, agar dapat terlaksana secara efektif, efisien dan tidak menyalahi aturan.
 3. Melaksanakan kegiatan intelijen yang berfokus pada target potensial untuk dinaikkan ke proses penyidikan.
 4. Meningkatkan koordinasi dengan *Criminal Justice System* dalam hal penyelidikan, penyidikan hingga ke pemberkasan.
 5. Pengumpulan Bahan Keterangan dan pelaksanaan Pendalaman Informasi yang dilakukan melalui patroli siber dan *on site* di lapangan.
 6. Memperkuat jejaring intelijen dan pertukaran informasi terkait adanya pelanggaran maupun tindak pidana di bidang Obat dan Makanan dengan lintas sektor terkait seperti BNN, Bea Cukai dan Asperindo.

Tabel 3.85 Matriks Rekomendasi Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Januari	Target Capaian Perkara pada tahun 2026 adalah sebanyak 2 perkara 2026 dan 1 perkara carry over 2025 belum ada progress capaian perkara (perkara carry over) dengan tahapan terakhir adalah P-21 Kendala: belum tersedianya jadwal Tahap 2 atas perkara LK/02-25 karena JPU masih fokus terhadap penyesuaian penerapan KUHAP baru	Koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum terkait jadwal pelaksanaan Tahap 2	Melakukan koordinasi dengan JPU, yang direncanakan Pelaksanaan Tahap 2 pada tanggal 5 Februari 2026	Februari	Y	K3-02 O-30 O-57	Keselamatan Petugas terancam saat melakukan Kegiatan dan Operasi Intelijen Bocornya Informasi Kejahatan Obat dan Makanan Informasi pada kegiatan atau operasi intelijen tidak bisa dijadikan sumber informasi awal
Februari	1. Penyerahan Tersangka a.n H dan Barang Bukti (Tahap 2) ke Kejaksaan Tinggi Kep. Bangka Belitung dengan nomor Surat B-PD.03.03.7B.02.26.138 tanggal 3 Februari 2026 yang dilaksanakan pada tanggal 5 Februari 2026 2. Untuk pemenuhan target perkara pada tahun 2026 telah dilakukan Kegiatan Intelijen pada tanggal 10,11,24,25 Februari 2026 dengan menghasilkan 3 Laporan Informasi. dari 3 Laporan Informasi tersebut masih dibutuhkan pendalaman untuk bisa dinaikkan ke Proses Pro Justicia 3. Pada bulan Februari dilakukan pemotongan anggaran QCD sebesar Rp. 22.008.000 berdasar Surat Sestama nomor PR.05.03.2.02.26.132 tanggal 20 Februari 2026. sehingga dilakukan revisi anggaran (revisi4) terkait revisi target Output (dari 2 perkara menjadi 1 perkara) dan anggaran perjadi di kegiatan Forkom PPNS dan Diklat PPNS Kendala : Sebagai efek anggaran AEA sangat terbatas yaitu sebesar Rp. 5.230.000 yang	1. Memantau dan mengikuti update persidangan TSK H 2. Dalam penggunaan anggaran supaya efektif dan efisien maka dilakukan pendalaman informasi terhadap target-target potensial untuk dijadikan target perkara	1. menghadirkan saksi-saksi petugas dalam persidangan dan update tahap dan persidangan melalui sippn 2. melakukan kegiatan intelijen terhadap target-target potensial	Maret	Y	K3-02 O-30 O-57	Keselamatan Petugas terancam saat melakukan Kegiatan dan Operasi Intelijen Bocornya Informasi Kejahatan Obat dan Makanan Informasi pada kegiatan atau operasi intelijen tidak bisa dijadikan sumber informasi awal

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	seharusnya di dalamnya ada anggaran Kegiatan Terpadu sehingga Kegiatan Terpadu diakomodasikan ke anggaran QCD yaitu Forkom PPNS dan Diklat Pembentukan PPNS						
Maret	1. Pada bulan Maret Pemantauan jalannya persidangan Tersangka a.n H yaitu pada tanggal 12 Maret dibacakan putusan perkara dengan Vonis denda sebesar Rp. 2.000.000 2. Untuk pemenuhan target perkara pada tahun 2026 telah dilakukan Kegiatan Intelijen pada tanggal 3 Maret 2026 Kendala : Sebagai efek anggaran AEA sangat terbatas yaitu sebesar Rp. 5.230.000 yang seharusnya di dalamnya ada anggaran Kegiatan Terpadu sehingga Kegiatan Terpadu diakomodasikan ke anggaran QCD yaitu Forkom PPNS dan Diklat Pembentukan PPNS"	dalam penggunaan anggaran supaya efektif dan efisien maka dilakukan pendalaman informasi terhadap target-target potensial untuk dijadikan target perkara	melakukan kegiatan intelijen terhadap target-target potensial	Juni	Y	K3-02 O-30 O-57	Keselamatan Petugas terancam saat melakukan Kegiatan dan Operasi Intelijen Bocornya Informasi Kejahatan Obat dan Makanan Informasi pada kegiatan atau operasi intelijen tidak bisa dijadikan sumber informasi awal

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan atau program kerja tim kerja penindakan di tahun 2026 dilaksanakan untuk mendukung keberhasilan capaian kinerja. Pelaksanaan kegiatan intelijen dilakukan secara tersistem dari pengumpulan bahan awal, pendalaman informasi dan kegiatan intelijen berdasarkan pemetaan kerawanan kejahatan dari tahun sebelumnya. Penelusuran secara terselubung dari sarana eceran atau toko kelontong memberikan informasi penting mengenai sumber pasokan obat-obatan yang dijual tanpa kewenangan.

Informasi atau data potensi kerawanan kejahatan yang diperoleh melalui rekomendasi fungsi pemeriksaan, hasil profiling atau patroli siber menjadi titik awal pelaksanaan kegiatan penindakan dalam mengupayakan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Untuk itu komunikasi dan kerja sama antara fungsi

penindakan dan pemeriksaan juga memiliki peran yang tidak kalah penting untuk mendukung pencapaian kinerja yang lebih baik. Kegiatan rutin operasi intelijen dan verifikasi data patrol siber dilaksanakan secara sinergis menghasilkan data atau informasi yang dapat menjadi acuan bagi Tim Kerja Pemeriksaan maupun Tim Kerja Penindakan.

Dalam penyelesaian target perkara, fungsi penindakan aktif melakukan koordinasi dan menjalin hubungan lintas sektor dalam hal ini CJS (Criminal Justice System) atau melakukan fungsi respon kepada lintas sektor terkait dengan “INOVASI PULAU BANGKA” (Penggulangan Lintas Sektor untuk Bersinergi melawan Kejahatan Obat dan Makanan).

f. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3.86 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian
	T	R	%	Target (RPD TW I)	Realisasi	%			
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	33,33	33,33	100,0	14.699.996	12.384.000	84,24	1,19	0,19	100% (Efisien)

1) Efisiensi penggunaan anggaran

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Capaian Tingkat Efisiensi Indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT “Efisien”. Hal ini dikarenakan capaian Target IKU di angka 33,33 dengan realisasi sebesar 33,33, sehingga Persentase Capaian Output adalah 100% dengan Persentase Capaian Anggaran 84,24%. Adanya pergeseran modus Operandi kejahatan obat dan makanan menyebabkan Anggaran yang dikeluarkan lebih banyak dalam kegiatan intelijen guna mengungkap kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di Pulau Bangka.

2) Upaya mencapai efisiensi penggunaan anggaran

Upaya yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian efisiensi pada Triwulan I tahun 2026 yaitu dilakukannya proses kegiatan intelijen, kegiatan pengawasan pengamatan penelitian pemeriksaan dan operasi intelijen dilakukan secara tersistem dari pengumpulan bahan awal, pendalaman informasi dan kegiatan intelijen

berdasarkan pemetaan kerawanan kejahatan dari tahun sebelumnya. Penelusuran disasar untuk mendapatkan informasi mengenai sumber pasokan obat-obatan yang dijual tanpa kewenangan.

g. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan informasi kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja tahun 2025:

- 1) Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja
 - a. Memaksimalkan investigasi atau penelusuran kasus yang didasarkan pelaporan dari masyarakat melalui infokom/ masyarakat dan diteruskan ke fungsi penindakan sehingga dapat dihasilkan output berupa perkara dari pelaporan tersebut.
 - b. Memaksimalkan Data Patroli Siber sehingga bisa dilakukan Profiling terhadap akun tersebut dapat dihasilkan output berupa perkara.
 - c. Melakukan Investigasi Lanjutan terhadap sarana-sarana sebelumnya yang telah dilakukan target namun belum bisa dilakukan Operasi Penindakan dikarenakan belum cukup alat bukti.
- 2) Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja
 - a. Terjadi penurunan anggaran jika dibandingkan dengan tahun 2025, sehingga dilakukan permohonan penyesuaian target yang hingga saat ini masih dalam tahap telaah oleh BAPPENAS. Penyesuaian anggaran dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap Hasil Identifikasi Kementerian Keuangan pada Lampiran Nota Dinas Sekretariat Utama Nomor: PR.04.02.2.12.25.771 tanggal 22 Desember 2025.
 - b. Pada TW I telah dilakukan 5 kali revisi, diantaranya :
 - i) Tindak Lanjut penyesuaian terhadap Hasil Identifikasi Kementerian Keuangan.
 - ii) Pemunculan Kegiatan baru sebagai bentuk pengembangan kompetensi petugas yang anggarannya tidak diakomodir di Anggaran AEA yaitu Diklat pembentukan PPNS dan Kegiatan Pertemuan Peningkatan Kinerja, Profesionalisme, dan Koordinasi PPNS

- 3) Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja
 - i. Berdasarkan rekomendasi pada Laporan Kinerja tahun 2025 dengan rekomendasi memanfaatkan anggaran yang tersedia untuk melakukan kegiatan intelijen yang berfokus pada target sasaran yang akan dilakukan penyidikan pada triwulan selanjutnya. Telah dilakukan beberapa kegiatan intelijen yang menargetkan informasi A1 untuk target operasi penindakan.
 - ii. Melakukan evaluasi masalah/kendala yang dihadapi dalam pencapaian target selama tahun sebelumnya dan menentukan langka-langkah tindak lanjut yang dapat dilakukan
 - iii. Secara terus menerus melakukan Koordinasi dan Kerja sama dengan *Criminal Justice System* untuk mendukung capaian target 2026.
- 4) Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya.
 - i. Melaksanakan proses pemberkasan penyidikan perkara sediaan farmasi dan pangan olahan dengan tetap memperhatikan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan selalu berkoordinasi dengan ICJS dalam hal ini Korwas PPNS dan Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung terkhusus terkait penerapan Undang-Undang no 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang no 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - ii. Telah dilakukan permohonan penyesuaian target yang hingga saat ini masih dalam tahap telaah oleh BAPPENAS. Dengan justifikasi penurunan anggaran pada tahun 2026 jika dibandingkan dengan tahun 2025.
 - iii. Realisasi Target Perkara pada tahun 2026 dengan melakukan kegiatan intelijen dan pengumpulan informasi terkait kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja BBPOM Pangkal Pinang.

SK 5 : Terlaksananya Kegiatan Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di Wilayah Kerja UPT

Kegiatan deteksi dini kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan merupakan usaha, kegiatan atau tindakan mengetahui, merumuskan, dan mengidentifikasi masalah dugaan dan potensi kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan sehingga dapat mengantisipasi berbagai perkembangan situasi dan dapat ditangani secara profesional dan proporsional sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Deteksi dini dilakukan dengan menyusun laporan Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejak Digital (Profiling Siber) dan Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT.

1. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan I Tahun 2026

Tabel 3.87 Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar

Indikator	Kinerja			Kategori & Notifikasi Warna
	Target	Realisasi	%Capaian	
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50%	50%	100,00%	Baik

Analisis Kejahatan Obat dan Makanan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejak Digital (Profiling Siber) yang dilakukan berdasarkan identifikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diperjual-belikan atau didistribusikan secara daring di lingkup wilayah kerja UPT BPOM yang dilaporkan setiap bulan kepada Direktur Siber Obat dan Makanan sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.02.22.97 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Siber Obat dan Makanan dan Surat Direktur Siber Obat dan Makanan Nomor T-PD.04.01.63.01.24.16 tanggal 15 Januari 2024 perihal Pelaporan Laporan Siber (Patroli Siber dan Profiling).
2. Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.01.22.12

Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang terdiri dari:

- Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan (**1 laporan dilaporkan tiap tahun**).
- Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan (**1 laporan dilaporkan tiap tahun**).

Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar di Balai Besar POM di Pangkal Pinang memiliki target pada Triwulan I tahun 2026 sebesar 50 dengan realisasi sampai dengan Triwulan I tahun 2026 sebesar 50. Capaian terhadap target sebesar 100% dengan kategori “Baik”.

- Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2026

Tabel 3.88 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2026 Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Target Tahun 2026	Realisasi Triwulan I	% Capaian Terhadap Target Tahunan	Kategori
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	94	50,00	53,19 	Perlu Upaya Keras

Realisasi kinerja Triwulan I sebesar 50 yang apabila dibandingkan dengan target tahun 2026 sebesar 94 menghasilkan persentase capaian sebesar 53,19% dengan kategori “Perlu Upaya Keras”. Capaian ini masih dinilai on the track dikarenakan s.d TW I Kinerja yang dinilai adalah Analisis Penelusuran Siber yang terdiri Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejak Digital (bobot 50%) dimana Pelaporan BBPOM di Pangkal Pinang selalu tepat waktu. Sementara target lainnya yaitu Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan (bobot 25%) dan Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan (bobot 25%) dinilai di B12.

- c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja
 1. Melakukan Kegiatan Patroli Siber secara komprehensif dan dilaporkan secara tepat waktu.
 2. Walaupun anggaran dilakukan pemblokiran namun masih bisa melaporkan Laporan Profiling Siber dengan tidak melakukan Kegiatan Verifikasi Hasil Patroli Siber ke sarana hanya melalui akun yang bersangkutan ataupun memanfaatkan Anggaran QCD untuk melakukan kegiatan Verifikasi Hasil Patroli Siber ke sarana target profiling.
- d. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)
 1. Memperkuat Komunikasi antar fungsi seperti Infokom, pemeriksaan, dan Pengujian guna menindaklanjuti Rekomendasi Tindak Lanjut yang diberikan oleh Direktorat Cegah Tangkal
 2. Mengikuti pelatihan dan peningkatan kompetensi yang diselenggarakan oleh Badan POM, Polri, maupun UPT lainnya di lingkungan Badan POM.
 3. Akan dilakukan kegiatan pengumpulan data bahan keterangan dari Hasil Kegiatan Intelijen dan Kegiatan Pengawasan dalam rangka penyusunan Analisis Kejahatan pada dengan tema yang dinilai menjadi permasalahan utama dalam sektor pengawasan obat dan makanan di wilayah Pulau Bangka. Untuk saat ini hasil Kerawanan Kejahatan di Pulau Bangka dengan kasus dengan jumlah terbanyak yaitu komoditi obat.
 4. Koordinasi dengan Tim Kerja Pemeriksaan dan melakukan perencanaan kedepannya terkait pengumpulan Peserta dari Asosiasi atau yang lainnya sehingga tim kerja penindakan bisa ikut serta untuk pemaparan kegiatan penggalangan

Tabel 3.89 Matriks Rekomendasi Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Januari	Dalam mendukung tercapainya IKU ini telah dilakukan: 1. Pelaporan Laporan Penjejak Digital yaitu	Melaporkan Laporan Penjejak Digital dan Kerawanan Kejahatan secara tepat waktu	Melaporkan Laporan Penjejak Digital secara tepat waktu	-	T	-	-

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	Laporan Patroli Siber dan Laporan Profiling Siber bulan Januari secara tepat waktu 2. Laporan Patroli Siber terdiri dari 20 (dua puluh) link yang direkomendasikan takedown 3. Laporan Profiling NIHIL telah dilaporkan pada tanggal 23 Januari 2026 4. Pada bulan Januari dilakukan update rawan kasus dari hasil kegiatan intelijen sebanyak 5 (lima) data.						
Februari	Dalam mendukung tercapainya IKU ini telah dilakukan: 1. Pelaporan Laporan Penjejak Digital yaitu Laporan Patroli Siber dan Laporan Profiling Siber bulan Februari secara tepat waktu (a) Laporan Patroli Siber terdiri dari 19 (sembilan belas) link yang direkomendasikan takedown (b) Laporan Profiling bulan Februari telah dilaporkan melalui Aplikasi Dashboard Penindakan secara tepat waktu pada tanggal 23 Januari 2026 (c) Hasil Monitoring Rekomendasi takedown bulan Januari, sebanyak 14 link dari 20 link telah ditakedown (70%) 2. Tindak Lanjut atas Rekomendasi yang diberikan (a) Dari Analisis Kejahatan yang disusun UPT tentang Obat Setelan terdapat 5 Rekomendasi yang harus di TL oleh lintas fungsi terkait. Monitoring TL s.d Februari telah dilakukan terhadap 5 Rekomendasi (b) Analisis Kejahatan dari Dit CT belum tersedia di TW I 3. Analisis Kerawanan Kejahatan Telah dilaksanakan Update Kerawanan Kejahatan pada bulan Februari melalui ADP dengan jumlah 11 (sebelas) data Kendala : 1. Tindak Lanjut atas Rekomendasi yang lintas fungsi belum dilakukan secara komprehensif 2. Anggaran AEA yang sangat	1. Dalam penyusunan Laporan Profiling Siber di saat ketersediaan anggaran yang minim, diharap bisa memanfaatkan <i>Open Source Intelligence Platform</i> 2. Perlu dibuatkan tools dalam rangka monitoring TL Rekomendasi dan pemanfaatan Data Kerawanan yang melibatkan lintas fungsi sehingga Data Kerawanan bisa mendukung kegiatan teknis pengawasan, penindakan, pemberdayaan masyarakat, bimbingan teknis kepada pelaku usaha, sinergisme dengan pemangku kepentingan	1. Laporan Profiling Siber memanfaatkan <i>Open Source Intelligence Platform</i> atau melaporkan NIHIL apabila informasi terbatas 2. membuat tools yang bisa diakses lintas fungsi untuk memonitoring TL Rekomendasi dan pemanfaatan data kerawanan	Maret	Y	SDM-16 O-68 O-69	Data Kerawanan Kejahatan tidak menggambarkan peta profil sebenarnya Pemanfaatan data kerawanan kejahatan tidak digunakan dalam kegiatan teknis pengawasan, penindakan, pemberdayaan masyarakat dan sinergisme dengan pemangku kepentingan rekomendasi hasil analisis kejahatan tidak ditindaklanjuti

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	terbatas sehingga pelaporan Profiling Siber tidak dilakukan verifikasi lapangan						
Maret	Dalam mendukung tercapainya IKU ini telah dilakukan: 1. Pelaporan Laporan Penjejak Digital yaitu Laporan Patroli Siber dan Laporan Profiling Siber bulan Maret secara tepat waktu (a) Laporan Patroli Siber terdiri dari 17 (tujuh belas) link yang direkomendasikan takedown (b) Laporan Profiling bulan Maret telah dilaporkan melalui Aplikasi Dashboard Penindakan secara tepat waktu pada tanggal 16 Maret 2026 (c) Hasil Monitoring Rekomendasi takedown s.d Februari, sebanyak 23 link dari 39 link telah ditakedown (58,97%) 2. Tindak Lanjut atas Rekomendasi yang diberikan (a) Dari Analisis Kejahatan yang disusun UPT tentang Obat Setelan terdapat 5 Rekomendasi yang harus di TL oleh lintas fungsi terkait. Monitoring TL s.d Maret telah dilakukan terhadap 5 Rekomendasi. setiap bulan dimungkinkan Tindak Lanjut secara terus menerus (b) Analisis Kejahatan dari Dit CT belum tersedia di TW I 3. Analisis Kerawanan Kejahatan Telah dilaksanakan Update Kerawanan Kejahatan pada bulan Maret melalui ADP dengan jumlah 11 (sebelas) data Kendala : Anggaran AEA yang sangat terbatas sehingga pelaporan Profiling Siber tidak dilakukan verifikasi lapangan	Dalam penyusunan Laporan Profiling Siber di saat ketersediaan anggaran yang minim, diharap bisa memanfaatkan Open Source Intelligence Platform	Laporan Profiling Siber memanfaatkan Open Source Intelligence Platform atau melaporkan NIHIL apabila informasi terbatas	April	Y	SDM-16 O-68 O-69	Data Kerawanan Kejahatan tidak menggambarkan peta profil sebenarnya Pemanfaatan data kerawanan kejahatan tidak digunakan dalam kegiatan teknis pengawasan, penindakan, pemberdayaan masyarakat dan sinergisme dengan pemangku kepentingan rekomendasi hasil analisis kejahatan tidak ditindaklanjuti

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan atau program kerja tim kerja penindakan di tahun 2026 dilaksanakan untuk mendukung keberhasilan capaian kinerja. Secara rutin telah dilakukan pemenuhan laporan Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejak Digital (Profiling Siber) secara tepat waktu dan sesuai pedoman yang ditetapkan. Kegiatan penelusuran siber yang dilaksanakan mengacu pada data pemetaan kerawanan kejahatan dari tahun sebelumnya dan hasil kegiatan intelijen menggunakan berbagai platform media sosial, platform e-commerce dan hasil penelusuran pada open source lainnya. Selanjutnya dalam melakukan kegiatan deteksi dini dibutuhkan jejaring intelijen dan pertukaran informasi untuk mengidentifikasi masalah dugaan, potensi kejahatan dan tindak pidana kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Pangkal Pinang dengan lintas sektor terkait melalui kegiatan penggalangan lintas sektor seperti BINDA, BNN, Bea Cukai, Polri, Asperindo serta lintas sektor lainnya dengan Inovasi Pulau Bangka.

f. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3.90 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar

Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian
	T	R	%	Target (RPD TW I)	Realisasi	%			
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100,00	0	0	-	-	-	-

1) Efisiensi penggunaan anggaran

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa belum ada penggunaan sumber daya/anggaran pada triwulan I sesuai target RPD TW I.

2) Upaya mencapai efisiensi penggunaan anggaran

Adanya penurunan anggaran dari tahun sebelumnya 2025 jika dibandingkan dengan anggaran tahun 2026 dengan jumlah target yang sama. Sehingga diperlukan adanya penyesuaian anggaran dan kegiatan di dalam Indikator Kinerja ini.

g. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan informasi kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja tahun 2025:

1) Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja

Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang tersedia sehingga ada penyesuaian berupa dalam kegiatan pembuatan laporan Penjejak Digital (Profiling Siber). Tim kerja kegiatan penindakan melaksanakan penjejak hanya secara siber dengan memanfaatkan informasi yang didapatkan dari *Open Source* dengan melaksanakan *Open Source Intelligence* (OSINT) tanpa adanya kegiatan verifikasi lapangan.

2) Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja

Pada tahun 2026 dilakukan penyesuaian anggaran sebagai tindak lanjut terhadap Hasil Identifikasi Kementerian Keuangan pada Lampiran Nota Dinas Sekretariat Utama Nomor: PR.04.02.2.12.25.771 tanggal 22 Desember 2025.

3) Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja

- Melaksanakan monitoring evaluasi secara periodik untuk memastikan realisasi tercapai sesuai dengan target.
- Dalam upaya bentuk perkuatan jejaring dan pertukaran informasi dengan lintas sektor dilaksanakan koordinasi dengan Korwas PPNS Ditreskrimsus POLDA Bangka Belitung.

4) Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya.

- Melakukan perencanaan dan pelaksanaan Inovasi PULAU BANGKA dengan melaksanakan kegiatan dalam bentuk perkuatan jejaring dan pertukaran informasi dengan lintas sektor seperti Korwas PPNS, BNN, ASPERINDO dan lintas sektor lainnya terkait sediaan farmasi dan pangan olahan.
- Dibutuhkan pelaksanaan kegiatan pengumpulan bahan dan keterangan dari Hasil Kegiatan Intelijen dan Kegiatan Pengawasan dalam rangka penyusunan Analisis Kejahatan pada dengan tema yang dinilai menjadi permasalahan utama dalam sektor pengawasan obat dan makanan di wilayah Pulau Bangka. Untuk saat ini hasil Kerawanan Kejahatan di Pulau Bangka dengan kasus dengan jumlah terbanyak yaitu komoditi obat.

SK 6 : Layanan Publik UPT yang prima

Capaian Sasaran Kegiatan **Layanan Publik Balai POM di Pangkal Pinang yang Prima** diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) berikut:

1. Indeks Pelayanan Publik

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala BPOM Nomor 119 tahun 2026 tentang Pedoman Pembangunan dan evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada unit kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) yang akan melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Unit Kerja dan BB/BPOM menerangkan hal-hal berikut :

1. Zona Integritas yang selanjutnya disingkat ZI adalah instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.
2. Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, yang telah memenuhi Sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.
3. Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan sangat baik, dengan telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Rincian bobot komponen pengungkit:

1. Manajemen Perubahan: bobot 8%

2. Penataan Tatalaksana: bobot 7%
3. Penataan Sistem Manajemen SDM: bobot 10%
4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja: bobot 10%
5. Penguatan Pengawasan: bobot 15%
6. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik: bobot 10%

Rincian bobot komponen penilaian hasil

1. Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal): 17,5%
2. Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya: 5%
3. Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal): 15%
- a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan I Tahun 2026

Tabel 3.91 Indeks Pelayanan Publik

Indikator	Kinerja			Kategori & Notifikasi Warna
	Target	Realisasi	%Capaian	
Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-		

Indikator nilai pembangunan ZI merupakan indikator dengan target tahunan di TW IV sehingga belum bisa dievaluasi pencapaian targetnya pada Triwulan I.

- b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2026

Tabel 3.92 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2026 Indeks Pelayanan Publik

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Target Tahun 2026	Realisasi Triwulan I	% Capaian Terhadap Target Tahunan	Kategori
Indeks Pelayanan Publik UPT	4,85	-	-	

Indikator nilai pembangunan ZI merupakan indikator dengan target tahunan di TW IV sehingga belum bisa dievaluasi pencapaian targetnya pada Triwulan I.

- c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Pelaksanaan kegiatan untuk mendukung tercapainya nilai pembangunan ZI pada TW I telah berpedoman pada hasil evaluasi dari inspektorat tahun 2025. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target nilai 90,4 pada tahun 2026 diantaranya yaitu :

1. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja tim reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan. Kegiatan ini dilaksanakan per

triwulan secara rutin dengan melibatkan pimpinan dan seluruh perwakilan tim kerja.

2. Mengoptimalkan agen perubahan dalam mengakselerasi peningkatan pemahaman core value BERAKHLAK.
3. Menetapkan kebijakan/SOP/mekanisme internal serta mendorong bukti penerapan terhadap implementasi semua inovasi.
4. Mendorong pemanfaatan teknologi dalam proses pengukuran kinerja dengan optimalisasi inovasi MADU PELAWAN.
5. Menyusun pengembangan kompetensi pegawai dengan mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai.
6. Mendorong peningkatan kedisiplinan pegawai melalui program yang sesuai.
7. Mendorong implementasi pengawasan berbasis integritas untuk peningkatan kinerja melalui program yang sesuai.
8. Melakukan survei kepuasan masyarakat secara rutin dan mempublikasikan hasilnya melalui media sosial sebagai wujud evaluasi dan transparansi kinerja Balai POM di Pangkal Pinang.
9. Melaksanakan kegiatan untuk menambah kompetensi dan kebersamaan seluruh pegawai.
10. Melaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi untuk pegawai pengelola SAKIP berupa pelatihan melalui aplikasi IDEAS.
11. Menyusun daftar risiko sesuai pedoman manajemen risiko dan melakukan identifikasi risiko pada seluruh Sasaran Kegiatan
12. Melakukan kegiatan rutin seperti pelaporan SIMOD, monitoring capaian jam pelajaran (JP) pegawai, pelaporan benturan kepentingan, monitoring dan evaluasi penggunaan teknologi informasi, monitoring dan evaluasi pelayanan dan pengaduan, dan memastikan pelaksanaan seluruh inovasi Balai POM di Pangkal Pinang.
13. Melaksanakan continuous improvement dan meningkatkan kualitas dalam membangun ZI sehingga mampu menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Diharapkan dengan pelaksanaan yg konsisten dan berkelanjutan pencapaian target nilai indeks RB tahun 2026 dapat terpenuhi.

d. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

- Menyampaikan hasil reviu auditor Internal atas kelengkapan LKE dan data dukung PM-PZI pada media yang disediakan TPI tepat waktu.
- Melaksanakan rencana kerja pembangunan ZI sesuai dengan perencanaan dan mengunggah data dukung secara rutin setiap bulannya.
- Melaksanakan kegiatan yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat
- Meningkatkan kerja sama, koordinasi dan kolaborasi dengan lintas sektor.
- Meningkatkan publikasi kinerja kepada masyarakat.
- Menerapkan inovasi yang berdampak langsung kepada masyarakat sehingga akan meningkatkan kepuasan masyarakat.
- Meningkatkan kebersamaan antar pegawai melalui berbagai kegiatan yang melibatkan seluruh personil sehingga dapat bekerjasama dengan lebih baik.
- Melaksanakan rencana kerja yang telah disusun secara konsisten untuk mendukung penerapan pembangunan ZI di lingkungan Balai POM di Pangkal Pinang.

Tabel 3.93 Matriks Rekomendasi Indeks Pelayanan Publik

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Januari	Belum ada kendala/permasalahan	1. Melaksanakan sharing session dengan Balai lain untuk memberikan inspirasi dalam menciptakan inovasi, disarankan untuk dilaksanakan setiap TW ada kegiatan sharing session. 2. Melakukan pembentukan TimZi dan Tim AOC Tahun 2026	1. Akan melaksanakan sharing session TW 1 dengan Balai lain untuk menambah wawasan dalam pembangunan ZI di Balai POM di Pangkal Pinang. 2. Akan dilakukan pembahasan pembentukan tim ZI dan tim AOC tahun 2026.	Feb 2026	Y	1. O-34 2. O-46 3. O-47 4. O-48 5. O-58	1. Hasil penilaian pelaksanaan pembangunan ZI di BPOM Pangkalpinang belum optimal 2. ASN belum memahami terkait Reformasi Birokrasi dan memiliki pola pikir dan budaya kerja yang belum baik dalam mewujudkan zona integritas menuju WBK 3. Pengelolaan pengembangan kompetensi

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
							pegawai yang meliputi perencanaan sampai dengan evaluasinya belum termonitoring dengan optimal 4. Dokumen yang sudah inaktif masih digunakan . 5. Tidak adanya pelaporan Pengaduan Masyarakat
Februari	Belum ada kendala/permasalahan	1. Perlu dilakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait rencana kerja dan program prioritas tahun 2026 2. Perlu dilakukan revisi ST Tim RB untuk memastikan seluruh pegawai sudah tercantum dalam Surat Tugas. 3. Agar dilakukan sharing session dengan pihak Eksternal di TW 2 yaitu Kantor Imigrasi Tanjung Pandan Belitung 4. Agar diciptakan inovasi lokal spesifik Bangka Belitung yang khas sehingga mampu menjadi pendorong dalam pencapaian WBBM. 5. Agar dilakukan pendalaman terkait inovasi smart laura dari BBPOM Palangkaraya. 6. Agar dilakukan pengisian data dukung LKE dengan dateline 6 April 2026 7. Agar diterbitkan SK khusus terkait tim Zi	1. Dilakukan sosialisasi rencana kerja dan program prioritas tahun 2026 2. Dilakukan revisi ST yang telah mencantumkan seluruh pegawai. 3. Dilakukan komunikasi dan koordinasi dengan kantor imigrasi Tanjung Pandan Belitung. 4. Dilakukan pembahasan dan pembentukan tim terkait terkait inovasi lokal spesifik 5. Direncanakan untuk dilakukan sharing session dengan BBPOM Palangkaraya terkait inovasi smart Laura 6. Akan diumumkan kepada seluruh tim terkait pengisian data dukung LKE. 7. Akan dibuat SK khusus terkait tim ZI tahun 2026	Maret 2026	Y	O-34 O-46	-Hasil penilaian pelaksanaan pembangunan ZI di BPOM Pangkalpinang dibawah target yang ditetapkan -ASN belum memiliki pemahaman yang baik terkait reformasi birokrasi,pola pikir, dan budaya kerja guna mewujudkan zona integritas menuju WBBM
Maret	Belum ada kendala/permasalahan	1. Agar dilaksanakan rapat monitoring dan evaluasi RENJA TW 1 2. Agar dilaksanakan sharing session dengan kantor Imigrasi Tanjung Pandan terkait proses pembangunan WBBM (diluar agenda rakernas tanggal 15-19 april 2026) 3. Agar dipastikan pengisian LKE sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan oleh inspektorat.	1. Akan dilaksanakan rapat monitoring dan evaluasi RENJA TW 1 2. Akan dilaksanakan sharing session dengan kantor Imigrasi Tanjung Pandan 3. Akan dilakukan monitoring pengisian LKE	April- Juni 2026	Y	O-34 O-46	-Hasil penilaian pelaksanaan pembangunan ZI di BPOM Pangkalpinang dibawah target yang ditetapkan -ASN belum memiliki pemahaman yang baik terkait reformasi birokrasi,pola pikir, dan budaya kerja guna mewujudkan

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
							zona integritas menuju WBBM

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Untuk menunjang keberhasilan Balai POM di Pangkal Pinang dalam meningkatkan nilai indeks RB, *Agent of Change* memiliki beberapa program dan inovasi yang akan dijalankan di tahun 2026. Program dan inovasi *Agent of Change* tahun 2026 antara lain:

1. **BESTIE (BERAKHLAK ENGAGEMENT STRATEGY FORTRUST, INTEGRITY & EXCELLENCE)**

Program "BESTIE" di lingkungan Balai POM Pangkal Pinang berfungsi sebagai penggerak untuk menginternalisasi nilai-nilai dasar ASN ke dalam perilaku kerja sehari-hari secara konsisten dan berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan nilai Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, program ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang profesional, berintegritas, dan penuh semangat kebersamaan. Melalui pendekatan yang kreatif dan partisipatif, program ini diharapkan tidak hanya menjadi slogan semata, tetapi mampu mengubah pola pikir dan budaya kerja pegawai sehingga kualitas layanan publik Balai POM Pangkal Pinang dapat meningkat secara signifikan.

Program ini mencakup berbagai bentuk penguatan budaya kerja yang berjalan beriringan untuk menciptakan dampak yang maksimal. Salah satu pilar utamanya adalah pemilihan Duta Synergy On 7, yang bertujuan untuk menetapkan figur teladan sebagai representasi penerapan nilai-nilai organisasi bagi seluruh pegawai. Selain itu, dilakukan penguatan lingkungan kerja melalui pembuatan Artefak visual, seperti desain poster edukatif, wallpaper perangkat kerja, serta latar belakang virtual untuk pertemuan daring guna memastikan nilai-nilai budaya kerja selalu terinternalisasi dalam aktivitas sehari-hari.

Program ini juga didukung dengan aktivitas publikasi melalui konten media sosial, yang berfungsi sebagai sarana komunikasi strategis untuk membangun kepercayaan publik serta menunjukkan komitmen Balai POM Pangkal Pinang dalam menjunjung tinggi nilai-nilai BerAKHLAK dalam pekerjaan sehari-hari.

2. CFD (Chill & Fun at Work Day)

CFD merupakan salah satu program agen perubahan untuk mendukung terwujudnya *work life balance* bagi pegawai. Istilah *Work life balance* menggambarkan adanya keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi yang mana hal ini menjadi penting demi menjaga kesehatan mental dan fisik, mendukung kebahagiaan pegawai jangka panjang dan tentunya berpengaruh terhadap kinerja dan kontribusi yang diberikan pegawai bagi organisasi.

3. BESAME DIGITAL

BESAME DIGITAL merupakan program agen perubahan untuk mendukung penerapan digitalisasi dan peningkatan budaya inovasi di lingkungan kerja. BESAME DIGITAL merupakan akronim dari BERkas SAmpai, Media Elektronik DIGITAL. Kata BESAME diambil dari bahasa bangka yang berarti bersama, dengan itu program ini diharapkan dapat diterapkan oleh seluruh pegawai Balai POM di Pangkal Pinang bersama-sama. BESAME DIGITAL bertujuan untuk digitalisasi administrasi dan pengurangan penggunaan kertas di lingkungan kerja Balai POM Pangkal Pinang.

4. NGOPI SUAT(Ngobrol Santai Ulas Aspirasi Terkini)

Program Agen Perubahan yang dirancang sebagai bentuk kegiatan untuk memperkuat komunikasi dua arah antara pimpinan dan pegawai di lingkungan Balai POM di Pangkal Pinang. Program ini hadir sebagai wadah partisipatif yang memberikan ruang aman, terbuka, dan konstruktif bagi seluruh pegawai untuk menyampaikan ide, gagasan, saran, masukan, maupun permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Melalui pendekatan *active listening* NGOPI SUAT, pimpinan berperan sebagai pendengar aktif yang memberikan klarifikasi, tanggapan, serta komitmen tindak lanjut terhadap aspirasi yang disampaikan. NGOPI SUAT tidak hanya menjadi sarana penyampaian aspirasi, tetapi juga media membangun

kepercayaan, meningkatkan keterlibatan pegawai, serta memperkuat budaya komunikasi yang transparan dan kolaboratif.

Program ini dilaksanakan dalam bentuk forum aspirasi semesteran yang melibatkan seluruh pegawai serta didukung dengan kotak aspirasi digital yang dapat diakses secara berkelanjutan.

5. GERASAK (Gerakan Sadar Risiko)

Gerakan Sadar Risiko di Balai POM Pangkal Pinang dirancang untuk memperkuat pengawasan intern serta membangun budaya kerja yang proaktif dalam mengantisipasi dan mengelola risiko dengan menjadikan core values BerAKHLAK sebagai fondasi utama. Program ini dimulai dengan sosialisasi risiko yang menekankan nilai akuntabel dan kompeten, melalui pemaparan konsep dasar risiko serta relevansinya bagi tugas utama pegawai di Balai POM Pangkal Pinang. Selain itu, dilakukan *sharing session* dengan mengundang UPT eksternal untuk dapat dilakukan transfer informasi dalam mengatasi risiko sekaligus menjadi tempat diskusi pegawai dalam berbagi pengalaman nyata dalam menghadapi risiko sehingga tercipta pembelajaran bersama yang memperkuat solidaritas tim.

6. BELINYU (Belajar Integritas Yuk)

Program internal penguatan integritas yang diinisiasi sebagai komitmen Bersama seluruh pegawai dalam membangun budaya kerja yang jujur, transparan, akuntabel, dan profesional. Nama BELINYU tidak hanya merupakan akronim dari Belajar Integritas Yuk, tetapi juga mempresentasikan semangat lokalitas dan kedekatan dengan nilai-nilai masyarakat Bangka Belitung. Kata “yuk” mengandung ajakan yang inklusif bahwa membangun integritas bukan sekadar kewajiban formal, melainkan Gerakan Bersama yang dimulai dari diri sendiri. Adapun bentuk kegiatan dari BELINYU adalah penunjukan Agent champion integritas, Mengikuti e-learning PADI KPK, Sosialisasi Anti Korupsi minimal 3 kali, Kampanye Anti Gratifikasi dan Benturan Kepentingan, Optimalisasi Whistleblowing System (WBS), Mini Survei Integritas internal.

7. Serumpun SeBaLaL (Serentak Semangat Bersama Lahirkan Inovasi)

SERUMPUN SEBALAI dimaknai sebagai gerakan kolektif seluruh pegawai untuk bekerja secara sinergis, transparan, dan akuntabel dalam memberikan

pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kebersamaan tidak hanya dimaknai sebagai kerja tim, tetapi juga sebagai komitmen bersama untuk menjaga integritas, menolak korupsi, serta menumbuhkan budaya kerja yang profesional dan berorientasi pelayanan.

Nilai-nilai SERUMPUN SEBALAI diwujudkan dalam kolaborasi lintas unit, penguatan inovasi layanan publik, digitalisasi proses kerja, serta peningkatan efisiensi dan efektivitas organisasi. Setiap ide perbaikan dipandang sebagai kontribusi kolektif yang bertujuan menghadirkan pelayanan yang cepat, transparan, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Semangat Serumpun mencerminkan sinergi dan kesatuan langkah seluruh pegawai, sementara Sebalai melambangkan kebersamaan dalam tindakan nyata yang dilandasi integritas dan empati.

f. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3.94 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Indeks Pelayanan Publik

Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian
	T	R	%	Target (RPD TW I)	Realisasi	%			
Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-	1.520.000	510.000	33,55	-	-	-

1) Efisiensi penggunaan anggaran

Berdasarkan tabel di atas, anggaran yang dialokasikan untuk mencapai target nilai pembangunan ZI sebesar Rp 58.755.838 Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I yang digunakan untuk mendukung indikator nilai pembangunan ZI sebesar Rp 74.506.313 sehingga diperoleh capaian anggaran sebesar 126,81%. Anggaran tersebut digunakan untuk pelaksanaan kegiatan operasional dan pemeliharaan kantor, pembayaran gaji dan tunjangan, kegiatan untuk Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, kegiatan terpadu, dan perjalanan koordinasi. Namun efisiensi penggunaan anggaran untuk mencapai target indikator pembangunan ZI ini belum bisa dihitung karena belum ada capaian indikator pembangunan ZI pada Triwulan I.

2) Upaya mencapai efisiensi penggunaan anggaran

Beberapa upaya untuk mencapai efisiensi penggunaan anggaran pada indikator ini antara lain:

- Melakukan revisi anggaran dari kegiatan yang tidak jadi dilaksanakan secara luring maupun sisa anggaran dari kegiatan yang sudah terlaksana untuk kegiatan urgensi lainnya dalam rangka mengoptimalkan penyerapan anggaran.
- Melakukan optimalisasi anggaran operasional dan pemeliharaan kantor, gaji dan tunjangan.
- Melakukan pengawalan pencapaian output dengan melakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja pembangunan ZI dan kelengkapan data dukungnya secara rutin setiap triwulan. Selain itu, juga melakukan pembagian tugas anggota tim Pembangunan ZI untuk mencapai nilai pembangunan ZI sesuai target.

g. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan informasi kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja tahun 2025:

1) Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja

Beberapa penyesuaian yang dilakukan pada TW I untuk pencapaian target kinerja diantaranya yaitu :

- a. Melakukan revisi anggaran dari kegiatan yang tidak jadi dilaksanakan secara luring maupun sisa anggaran dari kegiatan yang sudah terlaksana untuk kegiatan lainnya.
- b. Melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan penerapan core value BERAKHLAK secara daring dengan tema-tema yang relevan dengan kebutuhan para pegawai.
- c. Membuat program perubahan *Agent of Change* sesuai dengan kebutuhan organisasi.

2) Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja

Dilakukan penyesuaian penggunaan anggaran diantaranya :

- a. Melakukan revisi anggaran dari kegiatan yang tidak jadi dilaksanakan secara luring maupun sisa anggaran dari kegiatan yang sudah terlaksana untuk kegiatan urgensi lainnya dalam rangka mengoptimalkan penyerapan anggaran.
- b. Melakukan optimalisasi anggaran operasional dan pemeliharaan kantor, gaji dan tunjangan.

- c. Melaksanakan kegiatan secara daring untuk meminimalkan anggaran yang dibutuhkan.
- 3) Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja

Telah dilakukan penyesuaian target kinerja per tim kerja RB dengan melakukan identifikasi hal-hal yang dapat dioptimalkan sehingga mendukung pencapaian target indikator pembangunan ZI tahun 2026. Beberapa rekomendasi atas pelaksanaan ZI tahun 2025 telah dilakukan tindak lanjut untuk memperbaiki penerapan ZI di lingkungan BBPOM di Pangkal Pinang.
- 4) Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya. Kegiatan yang akan dilakukan pada TW berikutnya diantaranya :
 - a. Akan dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja tim RB TW 2 pada bulan april, diharapkan dari kegiatan tersebut dapat dilihat kendala yang mungkin dihadapi.
 - b. Akan dilakukan pembahasan kebutuhan pegawai, maupun kebutuhan pelatihan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing pegawai dan organisasi.
 - c. Akan dilakukan *sharing session* mengenai pencapaian WBBM oleh instansi lain yang diharapkan memberikan motivasi penerapan reformasi birokrasi di lingkungan Balai POM Pangkal Pinang.

SK 7 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal

Capaian Sasaran Kegiatan **Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi Yang Optimal** diukur dengan 4 (empat) indikator berikut:

1. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala BPOM Nomor 119 tahun 2026 tentang Pedoman Pembangunan dan evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada unit kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) yang akan melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Unit Kerja dan BB/BPOM menerangkan hal-hal berikut :

4. Zona Integritas yang selanjutnya disingkat ZI adalah instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.
5. Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, yang telah memenuhi Sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.
6. Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan sangat baik, dengan telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Rincian bobot komponen pengungkit:

7. Manajemen Perubahan: bobot 8%
8. Penataan Tatalaksana: bobot 7%
9. Penataan Sistem Manajemen SDM: bobot 10%
10. Penguatan Akuntabilitas Kinerja: bobot 10%
11. Penguatan Pengawasan: bobot 15%
12. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik: bobot 10%

Rincian bobot komponen penilaian hasil

4. Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal): 17,5%
5. Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya: 5%
6. Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal): 15%

- a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan I Tahun 2026

Tabel 3.95 Nilai Pembangunan ZI

Indikator	Kinerja			Kategori & Notifikasi Warna
	Target	Realisasi	%Capaian	
Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	-	-		

Indikator nilai pembangunan ZI merupakan indikator dengan target tahunan di TW IV sehingga belum bisa dievaluasi pencapaian targetnya pada Triwulan I.

- b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2026

Tabel 3.96 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2026 Nilai Pembangunan ZI

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Target Tahun 2026	Realisasi Triwulan I	% Capaian Terhadap Target Tahunan	Kategori
Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	90,4	-	-	

Indikator nilai pembangunan ZI merupakan indikator dengan target tahunan di TW IV sehingga belum bisa dievaluasi pencapaian targetnya pada Triwulan I.

- c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Pelaksanaan kegiatan untuk mendukung tercapainya nilai pembangunan ZI pada TW I telah berpedoman pada hasil evaluasi dari inspektorat tahun 2025. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target nilai 90,4 pada tahun 2026 diantaranya yaitu :

1. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja tim reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan. Kegiatan ini dilaksanakan per triwulan secara rutin dengan melibatkan pimpinan dan seluruh perwakilan tim kerja.
2. Mengoptimalkan agen perubahan dalam mengakselerasi peningkatan pemahaman core value BERAKHLAK.
3. Menetapkan kebijakan/SOP/mekanisme internal serta mendorong bukti penerapan terhadap implementasi semua inovasi.
4. Mendorong pemanfaatan teknologi dalam proses pengukuran kinerja dengan optimalisasi inovasi MADU PELAWAN.
5. Menyusun pengembangan kompetensi pegawai dengan mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai.
6. Mendorong peningkatan kedisiplinan pegawai melalui program yang sesuai.
7. Mendorong implementasi pengawasan berbasis integritas untuk peningkatan kinerja melalui program yang sesuai.
8. Melakukan survei kepuasan masyarakat secara rutin dan mempublikasikan hasilnya melalui media sosial sebagai wujud evaluasi dan transparansi kinerja Balai POM di Pangkal Pinang.
9. Melaksanakan kegiatan untuk menambah kompetensi dan kebersamaan seluruh pegawai.
10. Melaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi untuk pegawai pengelola SAKIP berupa pelatihan melalui aplikasi IDEAS.
11. Menyusun daftar risiko sesuai pedoman manajemen risiko dan melakukan identifikasi risiko pada seluruh Sasaran Kegiatan
12. Melakukan kegiatan rutin seperti pelaporan SIMOD, monitoring capaian jam pelajaran (JP) pegawai, pelaporan benturan kepentingan, monitoring dan evaluasi penggunaan teknologi informasi, monitoring dan evaluasi pelayanan dan pengaduan, dan memastikan pelaksanaan seluruh inovasi Balai POM di Pangkal Pinang.
13. Melaksanakan continuous improvement dan meningkatkan kualitas dalam membangun ZI sehingga mampu menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Diharapkan dengan pelaksanaan yg konsisten dan berkelanjutan pencapaian target nilai indeks RB tahun 2026 dapat terpenuhi.

- d. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)
- Menyampaikan hasil reviu auditor Internal atas kelengkapan LKE dan data dukung PM-PZI pada media yang disediakan TPI tepat waktu.
 - Melaksanakan rencana kerja pembangunan ZI sesuai dengan perencanaan dan mengunggah data dukung secara rutin setiap bulannya.
 - Melaksanakan kegiatan yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat
 - Meningkatkan kerja sama, koordinasi dan kolaborasi dengan lintas sektor.
 - Meningkatkan publikasi kinerja kepada masyarakat.
 - Menerapkan inovasi yang berdampak langsung kepada masyarakat sehingga akan meningkatkan kepuasan masyarakat.
 - Meningkatkan kebersamaan antar pegawai melalui berbagai kegiatan yang melibatkan seluruh personil sehingga dapat bekerjasama dengan lebih baik.
 - Melaksanakan rencana kerja yang telah disusun secara konsisten untuk mendukung penerapan pembangunan ZI di lingkungan Balai POM di Pangkal Pinang.

Tabel 3.97 Matriks Rekomendasi Nilai Pembangunan ZI

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Januari	Belum ada kendala/permasalahan	1. Melaksanakan sharing session dengan Balai lain untuk memberikan inspirasi dalam menciptakan inovasi, disarankan untuk dilaksanakan setiap TW ada kegiatan sharing session. 2. Melakukan pembentukan TimZi dan Tim AOC Tahun 2026	1. Akan melaksanakan sharing session TW 1 dengan Balai lain untuk menambah wawasan dalam pembangunan ZI di Balai POM di Pangkal Pinang. 2. Akan dilakukan pembahasan pembentukan tim ZI dan tim AOC tahun 2026.	Feb 2026	Y	1. O-34 2. O-46 3. O-47 4. O-48 5. O-58	1. Hasil penilaian pelaksanaan pembangunan ZI di BPOM Pangkalpinang belum optimal 2. ASN belum memahami terkait Reformasi Birokrasi dan memiliki pola pikir dan budaya kerja yang belum baik dalam mewujudkan

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
							zona integritas menuju WBK 3. Pengelolaan pengembangan kompetensi pegawai yang meliputi perencanaan sampai dengan evaluasinya belum termonitoring dengan optimal 4. Dokumen yang sudah inaktif masih digunakan . 5. Tidak adanya pelaporan Pengaduan Masyarakat
Februari	Belum ada kendala/permasalahan	1. Perlu dilakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait rencana kerja dan program prioritas tahun 2026 2. Perlu dilakukan revisi ST Tim RB untuk memastikan seluruh pegawai sudah tercantum dalam Surat Tugas. 3. Agar dilakukan sharing session dengan pihak Eksternal di TW 2 yaitu Kantor Imigrasi Tanjung Pandan Belitung 4. Agar diciptakan inovasi lokal spesifik Bangka Belitung yang khas sehingga mampu menjadi pendorong dalam pencapaian WBBM. 5. Agar dilakukan pendalaman terkait inovasi smart laura dari BBPOM Palangkaraya. 6. Agar dilakukan pengisian data dukung LKE dengan dateline 6 April 2026 7. Agar diterbitkan SK khusus terkait tim Zi	1. Dilakukan sosialisasi rencana kerja dan program prioritas tahun 2026 2. Dilakukan revisi ST yang telah mencantumkan seluruh pegawai. 3. Dilakukan komunikasi dan koordinasi dengan kantor imigrasi Tanjung Pandan Belitung. 4. Dilakukan pembahasan dan pembentukan tim terkait terkait inovasi lokal spesifik 5. Direncanakan untuk dilakukan sharing session dengan BBPOM Palangkaraya terkait inovasi smart Laura 6. Akan diumumkan kepada seluruh tim terkait pengisian data dukung LKE. 7. Akan dibuat SK khusus terkait tim ZI tahun 2026	Maret 2026	Y	O-34 O-46	-Hasil penilaian pelaksanaan pembangunan ZI di BPOM Pangkalpinang dibawah target yang ditetapkan -ASN belum memiliki pemahaman yang baik terkait reformasi birokrasi,pola pikir, dan budaya kerja guna mewujudkan zona integritas menuju WBBM
Maret	Belum ada kendala/permasalahan	1. Agar dilaksanakan rapat monitoring dan evaluasi RENJA TW 1 2. Agar dilaksanakan sharing session dengan kantor Imigrasi Tanjung Pandan terkait proses pembangunan WBBM (diluar agenda rakernas tanggal 15-19 april 2026) 3. Agar dipastikan pengisian LKE sesuai dengan timeline	1. Akan dilaksanakan rapat monitoring dan evaluasi RENJA TW 1 2. Akan dilaksanakan sharing session dengan kantor Imigrasi Tanjung Pandan 3. Akan dilakukan monitoring pengisian LKE	April-Juni 2026	Y	O-34 O-46	-Hasil penilaian pelaksanaan pembangunan ZI di BPOM Pangkalpinang dibawah target yang ditetapkan -ASN belum memiliki pemahaman yang baik terkait reformasi

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		yang telah ditetapkan oleh inspektorat.					birokrasi, pola pikir, dan budaya kerja guna mewujudkan zona integritas menuju WBBM

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Untuk menunjang keberhasilan Balai POM di Pangkal Pinang dalam meningkatkan nilai indeks RB, *Agent of Change* memiliki beberapa program dan inovasi yang akan dijalankan di tahun 2026. Program dan inovasi *Agent of Change* tahun 2026 antara lain:

1. BESTIE (BERAKHLAK ENGAGEMENT STRATEGY FORTRUST, INTEGRITY & EXCELLENCE)

Program "BESTIE" di lingkungan Balai POM Pangkal Pinang berfungsi sebagai penggerak untuk menginternalisasi nilai-nilai dasar ASN ke dalam perilaku kerja sehari-hari secara konsisten dan berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan nilai Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, program ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang profesional, berintegritas, dan penuh semangat kebersamaan. Melalui pendekatan yang kreatif dan partisipatif, program ini diharapkan tidak hanya menjadi slogan semata, tetapi mampu mengubah pola pikir dan budaya kerja pegawai sehingga kualitas layanan publik Balai POM Pangkal Pinang dapat meningkat secara signifikan.

Program ini mencakup berbagai bentuk penguatan budaya kerja yang berjalan beriringan untuk menciptakan dampak yang maksimal. Salah satu pilar utamanya adalah pemilihan Duta Synergy On 7, yang bertujuan untuk menetapkan figur teladan sebagai representasi penerapan nilai-nilai organisasi bagi seluruh pegawai. Selain itu, dilakukan penguatan lingkungan kerja melalui pembuatan Artefak visual, seperti desain poster edukatif, wallpaper perangkat kerja, serta latar belakang virtual untuk pertemuan daring guna memastikan nilai-

nilai budaya kerja selalu terinternalisasi dalam aktivitas sehari-hari. Program ini juga didukung dengan aktivitas publikasi melalui konten media sosial, yang berfungsi sebagai sarana komunikasi strategis untuk membangun kepercayaan publik serta menunjukkan komitmen Balai POM Pangkal Pinang dalam menjunjung tinggi nilai-nilai BerAKHLAK dalam pekerjaan sehari-hari.

2. CFD (Chill & Fun at Work Day)

CFD merupakan salah satu program agen perubahan untuk mendukung terwujudnya *work life balance* bagi pegawai. Istilah *Work life balance* menggambarkan adanya keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi yang mana hal ini menjadi penting demi menjaga kesehatan mental dan fisik, mendukung kebahagiaan pegawai jangka panjang dan tentunya berpengaruh terhadap kinerja dan kontribusi yang diberikan pegawai bagi organisasi.

3. BESAME DIGITAL

BESAME DIGITAL merupakan program agen perubahan untuk mendukung penerapan digitalisasi dan peningkatan budaya inovasi di lingkungan kerja. BESAME DIGITAL merupakan akronim dari BERkas SAmpai, Media Elektronik DIGITAL. Kata BESAME diambil dari bahasa bangka yang berarti bersama, dengan itu program ini diharapkan dapat diterapkan oleh seluruh pegawai Balai POM di Pangkal Pinang bersama-sama. BESAME DIGITAL bertujuan untuk digitalisasi administrasi dan pengurangan penggunaan kertas di lingkungan kerja Balai POM Pangkal Pinang.

4. NGOPI SUAT(Ngobrol Santai Ulas Aspirasi Terkini)

Program Agen Perubahan yang dirancang sebagai bentuk kegiatan untuk memperkuat komunikasi dua arah antara pimpinan dan pegawai di lingkungan Balai POM di Pangkal Pinang. Program ini hadir sebagai wadah partisipatif yang memberikan ruang aman, terbuka, dan konstruktif bagi seluruh pegawai untuk menyampaikan ide, gagasan, saran, masukan, maupun permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Melalui pendekatan *active listening* NGOPI SUAT, pimpinan berperan sebagai pendengar aktif yang memberikan klarifikasi, tanggapan, serta komitmen tindak lanjut terhadap aspirasi yang disampaikan. NGOPI SUAT tidak hanya menjadi sarana penyampaian aspirasi, tetapi juga media membangun

kepercayaan, meningkatkan keterlibatan pegawai, serta memperkuat budaya komunikasi yang transparan dan kolaboratif.

Program ini dilaksanakan dalam bentuk forum aspirasi semesteran yang melibatkan seluruh pegawai serta didukung dengan kotak aspirasi digital yang dapat diakses secara berkelanjutan.

5. GERASAK (Gerakan Sadar Risiko)

Gerakan Sadar Risiko di Balai POM Pangkal Pinang dirancang untuk memperkuat pengawasan intern serta membangun budaya kerja yang proaktif dalam mengantisipasi dan mengelola risiko dengan menjadikan core values BerAKHLAK sebagai fondasi utama. Program ini dimulai dengan sosialisasi risiko yang menekankan nilai akuntabel dan kompeten, melalui pemaparan konsep dasar risiko serta relevansinya bagi tugas utama pegawai di Balai POM Pangkal Pinang. Selain itu, dilakukan *sharing session* dengan mengundang UPT eksternal untuk dapat dilakukan transfer informasi dalam mengatasi risiko sekaligus menjadi tempat diskusi pegawai dalam berbagi pengalaman nyata dalam menghadapi risiko sehingga tercipta pembelajaran bersama yang memperkuat solidaritas tim.

6. BELINYU (Belajar Integritas Yuk)

Program internal penguatan integritas yang diinisiasi sebagai komitmen Bersama seluruh pegawai dalam membangun budaya kerja yang jujur, transparan, akuntabel, dan profesional. Nama BELINYU tidak hanya merupakan akronim dari Belajar Integritas Yuk, tetapi juga mempresentasikan semangat lokalitas dan kedekatan dengan nilai-nilai masyarakat Bangka Belitung. Kata “yuk” mengandung ajakan yang inklusif bahwa membangun integritas bukan sekadar kewajiban formal, melainkan Gerakan Bersama yang dimulai dari diri sendiri. Adapun bentuk kegiatan dari BELINYU Adalah penunjukan Agent champion integritas, Mengikuti e-learning PADI KPK, Sosialisasi Anti Korupsi minimal 3 kali, Kampanye Anti Gratifikasi dan Benturan Kepentingan, Optimalisasi Whistleblowing System (WBS), Mini Survei Integritas internal.

7. Serumpun SeBaLaI (Serentak Semangat Bersama Lahirkan Inovasi)

SERUMPUN SEBALAI dimaknai sebagai gerakan kolektif seluruh pegawai untuk bekerja secara sinergis, transparan, dan akuntabel dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kebersamaan tidak hanya dimaknai

sebagai kerja tim, tetapi juga sebagai komitmen bersama untuk menjaga integritas, menolak korupsi, serta menumbuhkan budaya kerja yang profesional dan berorientasi pelayanan.

Nilai-nilai SERUMPUN SEBALAI diwujudkan dalam kolaborasi lintas unit, penguatan inovasi layanan publik, digitalisasi proses kerja, serta peningkatan efisiensi dan efektivitas organisasi. Setiap ide perbaikan dipandang sebagai kontribusi kolektif yang bertujuan menghadirkan pelayanan yang cepat, transparan, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Semangat Serumpun mencerminkan sinergi dan kesatuan langkah seluruh pegawai, sementara Sebalai melambangkan kebersamaan dalam tindakan nyata yang dilandasi integritas dan empati.

f. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3.98 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Nilai Pembangunan ZI

Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian
	T	R	%	Target (RPD TW I)	Realisasi	%			
Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	-	-	-	58.755.838	74.506.313	126,81	-	-	-

1) Efisiensi penggunaan anggaran

Berdasarkan tabel di atas, anggaran yang dialokasikan untuk mencapai target nilai pembangunan ZI sebesar Rp 58.755.838 Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I yang digunakan untuk mendukung indikator nilai pembangunan ZI sebesar Rp 74.506.313 sehingga diperoleh capaian anggaran sebesar 126,81%. Anggaran tersebut digunakan untuk pelaksanaan kegiatan operasional dan pemeliharaan kantor, kegiatan untuk Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, pembinaan kinerja oleh deputy pembina, pengelolaan limbah B3 dan perjalanan koordinasi lintas sektor. Namun efisiensi penggunaan anggaran untuk mencapai target indikator pembangunan ZI ini belum bisa dihitung karena belum ada capaian indikator pembangunan ZI pada Triwulan I.

2) Upaya mencapai efisiensi penggunaan anggaran

Beberapa upaya untuk mencapai efisiensi penggunaan anggaran pada indikator ini antara lain:

- Melakukan revisi anggaran dari kegiatan yang tidak jadi dilaksanakan secara luring maupun sisa anggaran dari kegiatan yang sudah terlaksana untuk kegiatan urgensi lainnya dalam rangka mengoptimalkan penyerapan anggaran.
- Melakukan optimalisasi anggaran operasional dan pemeliharaan kantor, gaji dan tunjangan.
- Melakukan pengawalan pencapaian output dengan melakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja pembangunan ZI dan kelengkapan data dukungnya secara rutin setiap triwulan. Selain itu, juga melakukan pembagian tugas anggota tim Pembangunan ZI untuk mencapai nilai pembangunan ZI sesuai target.

g. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

1) Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja

Beberapa penyesuaian yang dilakukan pada TW I untuk pencapaian target kinerja diantaranya yaitu :

- a. Melakukan revisi anggaran dari kegiatan yang tidak jadi dilaksanakan secara luring maupun sisa anggaran dari kegiatan yang sudah terlaksana untuk kegiatan lainnya.
- b. Melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan penerapan core value BERAKHLAK secara daring dengan tema-tema yang relevan dengan kebutuhan para pegawai.
- c. Membuat program perubahan *Agent of Change* sesuai dengan kebutuhan organisasi.

2) Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja

Dilakukan penyesuaian penggunaan anggaran diantaranya :

- a. Melakukan revisi anggaran dari kegiatan yang tidak jadi dilaksanakan secara luring maupun sisa anggaran dari kegiatan yang sudah terlaksana untuk kegiatan urgensi lainnya dalam rangka mengoptimalkan penyerapan anggaran.
- b. Melakukan optimalisasi anggaran operasional dan pemeliharaan kantor, gaji dan tunjangan.
- c. Melaksanakan kegiatan secara daring untuk meminimalkan anggaran yang dibutuhkan.

- 3) Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja

Telah dilakukan penyesuaian target kinerja per tim kerja RB dengan melakukan identifikasi hal-hal yang dapat dioptimalkan sehingga mendukung pencapaian target indikator pembangunan ZI tahun 2026. Beberapa rekomendasi atas pelaksanaan ZI tahun 2025 telah dilakukan tindak lanjut untuk memperbaiki penerapan ZI di lingkungan BBPOM di Pangkal Pinang.

- 4) Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya. Kegiatan yang akan dilakukan pada TW berikutnya diantaranya :
- a. Akan dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja tim RB TW 2 pada bulan april, diharapkan dari kegiatan tersebut dapat dilihat kendala yang mungkin dihadapi.
 - b. Akan dilakukan pembahasan kebutuhan pegawai, maupun kebutuhan pelatihan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing pegawai dan organisasi.
 - c. Akan dilakukan *sharing session* mengenai pencapaian WBBM oleh instansi lain yang diharapkan memberikan motivasi penerapan reformasi birokrasi di lingkungan Balai POM Pangkal Pinang

2. Nilai AKIP UPT BPOM

- a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan I Tahun 2026

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri PAN&RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Satuan Kerja dan/atau Unit Kerja.

Nilai AKIP adalah nilai hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas implementasi SAKIP Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II Mandiri Pusat, Balai Besar POM, Balai POM dan Loka POM di lingkungan BPOM.

Bobot 5 (lima) komponen penilaian AKIP, sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot
1	Perencanaan Kinerja	24
2	Pengukuran Kinerja	24
3	Pelaporan Kinerja	12
4	Evaluasi Kinerja Internal	20
5	Capaian Kinerja	20
	Nilai Evaluasi	100

Predikat nilai AKIP terdiri dari:

No	Predikat	Nilai	Interpretasi
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan. Telah terwujud <i>good governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh level. Telah terbentuk pemerintahan yang dinamis, adaptif dan efisiensi (<i>Reform</i>).
2	A	>80-90	Memuaskan. Terdapat gambaran bahwa Satuan Kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.
3	BB	>70-80	Sangat Baik.

No	Predikat	Nilai	Interpretasi
			Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.
4	B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada Satuan Kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.
5	CC	>50-60	Cukup (memadai). Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada Satuan Kerja.
6	C	>30-50	Kurang. Sistem dan tatatan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar.
7	D	0-30	Sangat Kurang. Sistem dan tatatan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih

No	Predikat	Nilai	Interpretasi
			perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar khususnya dalam implementasi SAKIP.

Tabel 3.99 Nilai AKIP

Indikator	Kinerja			Kategori & Notifikasi Warna
	Target	Realisasi	%Capaian	
Nilai AKIP UPT BPOM	-	-		

Penilaian indikator nilai AKIP Balai POM di Pangkal Pinang akan dilakukan oleh Inspektorat Utama pada Triwulan IV Tahun 2026 sehingga tidak ada capaian pada triwulan I.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2026

Tabel 3.100 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2026 Nilai AKIP

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Target Tahun 2026	Realisasi Triwulan I	% Capaian Terhadap Target Tahunan	Kategori
Nilai AKIP UPT BPOM	80,1	-	-	

Indikator Nilai AKIP Balai POM di Pangkal Pinang merupakan indikator tahunan dengan target tahun 2026 sebesar 80,1. Oleh karena itu, Nilai AKIP Balai POM di Pangkal Pinang pada Triwulan I ini belum ada sehingga belum bisa dilakukan perbandingan dengan target tahunannya.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Nilai AKIP Balai POM di Pangkal Pinang baru akan didapat pada akhir tahun, sehingga belum dapat dilakukan analisis penyebab keberhasilan ataupun kegagalan kinerja pada Triwulan. Namun berdasarkan hasil evaluasi SAKIP tahun 2025, diketahui hal-hal yang dapat menyebabkan kegagalan/penurunan kinerja diantaranya :

1. Rancangan Renstra belum memuat matriks pemetaan kebijakan dan strategi.
2. Hasil pengukuran data capaian kinerja belum sepenuhnya dilengkapi dengan data sumber dan/atau kertas kerja perhitungan realisasi/capaian kinerja seperti

pada indikator kinerja Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu.

3. Terdapat perubahan/kesalahan data pada indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan namun belum disertai dokumentasi kertas kerja sebelum dan setelah perubahan serta informasi data yang berubah dan justifikasinya.
4. Efisiensi penggunaan anggaran telah disajikan dalam Lapkin Interim dan Lapkin Tahunan, namun belum terdapat pembahasan efisiensi anggaran masing-masing indikator kinerja seperti belum menjelaskan upaya yang telah dilaksanakan jika disimpulkan hasilnya efisien dan kendala/hambatan maupun justifikasi jika disimpulkan hasilnya adalah adanya ketidakefisienan penggunaan sumber daya.
5. Hasil evaluasi kinerja internal belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai sarana perbaikan dan peningkatan kinerja. Evaluasi kinerja belum berdampak pada capaian kinerja, serta belum terdapat upaya perbaikan maupun penjelasan dalam proses monitoring kinerja seperti pada indikator Indeks Profesionalitas ASN target belum tercapai, namun belum terdapat upaya nyata yang akan dilakukan (rencana aksi) untuk mencapai kinerja.
6. Pembahasan hasil evaluasi internal yang tertuang pada notulen rapat belum menginformasikan arahan/keputusan yang jelas dari pimpinan terutama terkait IKU yang tidak dapat mencapai target $< 100\%$ atau IKU yang mencapai target lebih dari $> 120\%$.
7. Capaian output tahun 2024 dengan capaian tidak lebih baik dari tahun sebelumnya sebanyak 35%.
8. Indikator kinerja tahun 2024 yang tidak mencapai target sebanyak 11,76% dan Indikator kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tidak lebih baik dari tahun sebelumnya sebanyak 57,14%.

Oleh karena itu, Balai POM di Pangkal Pinang melakukan berbagai upaya dalam rangka pencapaian target. Upaya yang telah dilakukan sampai dengan Triwulan I 2026 antara lain:

1. Penetapan tim SAKIP tahun 2025 (penunjukkan ketua tim kerja, tim monitoring dan evaluasi, tim laporan kinerja dan tim penyusun renstra)

2. Melaksanakan Rapat Evaluasi kinerja Desember 2025 - Februari 2026 pada bulan Januari sd Maret 2026.
 3. Menetapkan Rencana Strategi Balai POM di Pangkal Pinang Tahun 2025 - 2029
 4. Menyusun dan menyampaikan laporan Evaluasi Internal triwulan IV tahun 2025 secara tepat waktu
 5. Menyampaikan data monitoring dan evaluasi Bulan Desember 2025
 6. Menyusun PoA kegiatan dan anggaran tahun 2026
 7. Menyampaikan surat usulan terkait komponen penilaian SAKIP ke Inspektorat Utama
 8. Menyusun dan menetapkan Perjanjian Kinerja dan Rencana Perjanjian Kinerja Tahun 2026 disertai dengan kertas kerja penetapan target
 9. Menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Tahun 2025 secara tepat waktu dan berpedoman pada Keputusan Kepala Badan POM tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP
 10. Mempublikasikan dokumen Rencana Strategis 2025-2029, Rencana Kinerja Tahun 2026, Perjanjian Kinerja Tahun 2026, Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2026 dan Laporan kinerja tahun 2025 di esr.menpan, subsite BPOM Pangkal Pinang dan website BPOM
 11. Pemberian reward punishment atas capaian kinerja Tahun 2025
 12. Publikasi capaian kinerja melalui Instagram dan whatsapp group Balai
 13. Melakukan penilaian sasaran kinerja pegawai (SKP) tw 4 tahun 2025 dan SKP tahunan 2025 serta Penyusunan MPH dan SKP Tahun 2026.
 14. Melaporkan data monev bulan Januari-Maret 2026 pada aplikasi Simetris E-Performance
 15. Menyusun rancangan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2027 dengan mengacu pada target Renstra 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja 2026.
- d. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)
- Pelaksanaan penyelenggaraan SAKIP perlu terus dilakukan secara berkesinambungan sesuai pedoman penyelenggaraan SAKIP di lingkungan Badan POM. Beberapa upaya yang akan terus dilakukan untuk mencapai target nilai AKIP di akhir tahun 2025:

1. Secara konsisten melaksanakan tindak lanjut atas hasil evaluasi SAKIP Tahun 2025.
2. Melakukan pengumpulan data kinerja setiap bulannya dan melaporkan pada aplikasi dan link yang tersedia secara tepat waktu.
3. Melaksanakan rapat evaluasi bulanan secara konsisten untuk mengevaluasi capaian kinerja dan anggaran setiap bulannya.
4. Menyusun Laporan evaluasi internal, laporan kinerja interim dan laporan kinerja tahunan dengan mengacu pada pedoman SAKIP, serta melaporkan pada link yang tersedia secara tepat waktu.
5. Meningkatkan kompetensi pegawai pengelola AKIP secara berkala.
6. Memastikan akurasi data kinerja yang dilaporkan setiap bulannya.
7. Melakukan pengumpulan sumber data (raw data) kinerja satu pintu pada MADU PELAWAN
8. Melakukan monitoring kertas kerja pencapaian kinerja lebih baik dari periode sebelumnya.

Tabel 3.101 Matriks Rekomendasi Nilai AKIP UPT BPOM

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Januari	Merupakan indikator dengan target tahunan. Pada bulan januari kegiatan pengelolaan SAKIP yang telah dilaksanakan : 1. Rapat Evaluasi kinerja tahun 2025 2. Penyampaian laporan Evaluasi Internal tw 4 tahun 2025 3. Penyampaian laporan monev bulan des 4. Penyusunan PoA kegiatan dan anggaran tahun 2025 5. Menyampaikan surat usulan terkait komponen penilaian SAKIP ke Inspektorat Utama Dari Laporan Hasil Evaluasi AKIP oleh inspektorat terdapat beberapa hal yang perlu untuk terus diperbaiki dan ditingkatkan dalam pengelolaan AKIP di BPOM Pangkal Pinang Tahun 2026. Terdapat perbedaan data yang disampaikan dalam hasil	Agar memperhatikan laporan hasil evaluasi AKIP tahun 2025 dari inspektorat, identifikasi hal-hal yang perlu diperbaiki dan dapat ditingkatkan dalam pelaksanaan AKIP tahun 2026. Untuk data yang tidak sesuai yang disampaikan pada Laporan hasil evaluasi AKIP, agar dilakukan klarifikasi. Lakukan penyusunan laporan kinerja tahun 2025 sesuai dengan pedoman SAKIP terbaru dan laporkan tepat waktu	1. Menyusun rencana Aksi/tindak lanjut hasil evaluasi AKIP Tahun 2025 2. Mengikuti Bimtek SAKIP dan Penyusunan Lapkin 2025 3. Menyusun Laporan Kinerja Tahun 2025 sesuai pedoman dan dilaporkan paling lambat 27 feb 4. Membuat surat klarifikasi data pada laporan evaluasi AKIP ke Inspektorat 5. Menyusun kertas kerja strategi pencapaian kinerja selama periode RENSTRA	Februari	Ya	SDM-06	Laporan kinerja yang disusun tidak sesuai dengan pedoman SAKIP

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	evaluasi AKIP dari inspektorat dengan data yang dimiliki Balai.						
Februari	Merupakan indikator dengan target tahunan. Pada bulan februari kegiatan pengelolaan SAKIP yang telah dilaksanakan adalah : 1. Rapat Perencanaan kinerja dan evaluasi bulan Januari 2026. 2. Mengikuti Bimtek SAKIP dan Penyusunan Lapkin tahun 2025 3. Penyampaian usulan target Perjanjian Kinerja Tahun 2026 4. Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 5. Publikasi Perjanjian Kinerja dan Laporan kinerja tahun 2025 di esr.menpan dan website BPOM. - Pelaporan data monev bulanan belum dapat dilakukan karena akses aplikasi pelaporan belum dibuka secara nasional. Dari Laporan Hasil Evaluasi AKIP oleh inspektorat terdapat beberapa hal yang perlu untuk terus diperbaiki dan ditingkatkan dalam pengelolaan AKIP di BPOM Pangkal Pinang Tahun 2026. Klarifikasi perbedaan data pada hasil evaluasi SAKIP oleh inspektorat belum dapat dilaksanakan karena banyaknya deadline yang harus diprioritaskan di Februari, sehingga direncanakan dilaksanakan pada bulan Maret.	1. Laksanakan rencana aksi yang telah disusun terkait tindak lanjut evaluasi SAKIP oleh Inspektorat dan laksanakan upaya untuk perbaikan dan peningkatan nilai AKIP tahun 2026. 2. Agar segera dilakukan cascading kinerja sampai kepada individu 3. Agar dicek secara berkala terkait media pelaporan data monev, segera laporkan apabila aplikasi telah dibuka. 4. Agar segera melakukan klarifikasi perbedaan data yang disampaikan pada Laporan hasil evaluasi AKIP dengan data yang dimiliki.	1. Menyiapkan media pengumpulan sumber data (raw data) satu pintu 2. Penyusunan cascading/ matrik pembagian peran dan hasil (MPH) dan SKP individu pada aplikasi SIMAKIN. 3. Melakukan pelaporan data monev pada aplikasi (jika telah dibuka akses) 4. Membuat surat klarifikasi data pada laporan evaluasi AKIP ke Inspektorat.	Maret	Tidak	-	-
Maret	Merupakan indikator dengan target tahunan. Pada bulan Maret kegiatan pengelolaan SAKIP yang telah dilaksanakan adalah : 1. Rapat Monev bulan Februari 2026. 2. Pemberian reward punishment atas capaian kinerja 3. Publikasi capaian kinerja melalui lg dan WAG Balai 4. Penyusunan MPH dan SKP Tahun 2026 5. Pelaporan Monev bulanan	Agar terus lakukan pemantauan aplikasi e-monev Bappenas, dan lakukan pelaporan segera setelah ases aplikasi dibuka Lakukan pelaporan monev, penyusunan laporan evaluasi internal dan laporan kinerja secara tepat waktu dan sesuai pedoman SAKIP Laporkan RATL Evaluasi AKIP yang telah dilaksanakan pada triwulan I	1. Melakukan Pelaporan Monev bulanan 2. Penyusunan Laporan Evaluasi Internal 3. Penyusunan laporan kinerja interim 4. Menyusun data dukung RATL Evaluasi AKIP yang telah dilaksanakan pada triwulan I dan menyampaikannya melalui SAPAAPIP	April	Ya	SDM-06	Laporan kinerja yang disusun tidak sesuai dengan pedoman SAKIP

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	di Simetris Laporan monev Bappenas sampai dengan saat ini masih belum bisa dilakukan karena aplikasi masih belum bisa diakses. Dari Laporan Hasil Evaluasi AKIP oleh inspektorat terdapat beberapa hal yang perlu untuk terus diperbaiki dan ditingkatkan dalam pengelolaan AKIP di BPOM Pangkal Pinang Tahun 2026.						

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

1. Pemanfaatan website madu pelawan untuk pengumpulan dan monitoring data kinerja BPOM di Pangkal Pinang (madupelawan.bpompp.info)
2. Melaksanakan pengumpulan data kinerja menggunakan teknologi informasi melalui monev online (aplikasi simetris, e-monev bappenas dan sakti kemenkeu)
3. Program peningkatan pemahaman personil SAKIP dalam pengelolaan SAKIP di lingkungan BPOM di Pangkal Pinang

f. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3.102 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Nilai AKIP UPT BPOM

Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian
	T	R	%	Target (RPD TW I)	Realisasi	%			
Nilai AKIP UPT BPOM	-	-	-	32.759.999	30.606.242	93,43	-	-	-

Berdasarkan tabel di atas, target anggaran rencana penarikan dana (target anggaran) sampai dengan Triwulan I yang dialokasikan untuk mendukung kegiatan pada indikator Nilai AKIP Balai POM di Pangkal Pinang sebesar Rp 32.759.999. Realisasi anggaran untuk mendukung kegiatan pada indikator Nilai AKIP sampai dengan Triwulan I sebesar Rp 30.606.242. Namun indikator Nilai AKIP merupakan indikator tahunan sehingga target dan realisasinya baru ada pada akhir tahun. Maka

dari itu, belum bisa dilakukan perhitungan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator ini.

Total anggaran yang dialokasikan untuk menunjang pencapaian nilai AKIP BPOM di Pangkal Pinang selama setahun pada dokumen Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2026 yaitu sebesar Rp 156.999.000. Anggaran ini akan digunakan untuk operasional pelaporan, perjalanan koordinasi/konsultasi pimpinan, peningkatan kompetensi petugas. Sedangkan beberapa kegiatan lainnya yang menunjang pencapaian nilai AKIP Balai POM di Pangkal Pinang tidak menggunakan anggaran.

Untuk mencapai efisiensi penggunaan anggaran pada indikator Nilai AKIP BPOM di Pangkal Pinang akan melakukan upaya sebagai berikut:

- Menyusun rencana tindak lanjut dan menindaklanjuti rekomendasi atas hasil evaluasi AKIP tahun 2025.
- Melakukan monitoring dan evaluasi capaian indikator dan capaian output setiap bulannya.
- Melakukan pengawalan dalam implementasi AKIP Balai POM di Pangkal Pinang untuk mencapai target nilai AKIP tahun 2025.
- Melakukan penyesuaian anggaran yang dipetakan (jika diperlukan) untuk peningkatan efektifitas pelaksanaan kegiatan.

g. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan informasi kinerja yang tertuang dalam laporan kinerja tahun 2025, Balai POM di Pangkal Pinang melakukan berbagai upaya dalam rangka pencapaian target kinerja. Pemanfaatan informasi kinerja tersebut diantaranya :

1) Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja

- Melakukan penyesuaian format laporan evaluasi internal dan monitoring evaluasi bulanan dengan melakukan identifikasi poin-poin yang ada pada Keputusan Kepala BPOM Nomor 676 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM dan menyesuaikan dengan hasil evaluasi SAKIP tahun 2025
- Menyusun kertas kerja penetapan target Renstra maupun Perjanjian Kinerja dengan menyesuaikan dengan manual iku yang terbaru.
- Melakukan penyesuaian target Perjanjian Kinerja Tahun 2026 dengan realisasi tahun 2025.

- Mengidentifikasi kesesuaian nomenklatur Indikator Kinerja dan Sasaran Kegiatan antar dokumen perencanaan
- Melakukan penyesuaian pada laporan kinerja sesuai hasil evaluasi SAKIP tahun 2025 dan pedoman SAKIP 2026.
- Mengajukan usulan perubahan target output dengan menyesuaikan pagu anggaran yang tersedia.

2) Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja

- Melakukan mapping anggaran yang menunjang pencapaian target indikator kinerja nilai AKIP
- Pagu anggaran yang dialokasikan untuk mendukung indikator kinerja nilai AKIP terbatas sehingga beberapa kegiatan dilaksanakan secara daring

3) Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja

Dari laporan kinerja Tahun 2025, diperoleh informasi bahwa target indikator Nilai SAKIP BPOM di Pangkal Pinang tahun 2025 belum tercapai, hal ini disebabkan karena penetapan target yang terlalu tinggi pada tahun 2025 sehingga capaian kinerja tidak lebih baik dari tahun sebelumnya serta pelaksanaan pengelolaan AKIP yang belum optimal. Berdasarkan hal tersebut sampai dengan triwulan I telah dilakukan :

- Pengusulan target AKIP periode renstra 2025-2029 yang dilengkapi dengan kertas kerja penetapan target.
- Menyusun rencana tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun 2025.

4) Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya.

Penyesuaian yang dapat dilakukan untuk triwulan berikutnya antara lain :

- Melakukan penyesuaian kertas kerja penetapan target kinerja sesuai dengan target dan manual iku terbaru.
- Melakukan penyesuaian dokumen perencanaan mengikuti hasil revisi target output (RO) tahun 2026.

3. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM

Nilai Kinerja Anggaran adalah penilaian terhadap kinerja anggaran UPT BPOM yang diperoleh dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

8 (Delapan) indikator pembentuk nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

1. Revisi DIPA (bobot 10%)
2. Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15%)
3. Penyerapan Anggaran (bobot 20%)
4. Belanja Kontraktual (bobot 10%)
5. Penyelesaian Tagihan (bobot 10%)
6. Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%)
7. Capaian Output (bobot 25%)
8. Dispensasi SPM (Pengurang nilai IKPA)

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan penilaian kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektifitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran. Indikator pembentuk Nilai EKA adalah:

1. Variabel efektivitas: Capaian RO (bobot 75%)
2. Variabel efisiensi: Penggunaan SBK (bobot 10%) dan Efisiensi SBK (bobot 15%)

Cara Perhitungan dan Formula:

$$\text{Nilai Kinerja Anggaran} = (\text{Nilai EKA} \times 50\%) + (\text{Nilai IKPA} \times$$

Kategori Konversi Nilai Kinerja Anggaran

Nilai	Kategori	Konversi Nilai
0 s.d. 50	Sangat Kurang	1
50,01 s.d. 60	Kurang	2
60,01 s.d. 80	Cukup	3
80,01 s.d. 90	Baik	4
90,01 s.d. 100	Sangat Baik	5

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan I Tahun 2026

Tabel 3.103 Nilai Kinerja Anggaran

Indikator	Kinerja			Kategori & Notifikasi Warna
	Target	Realisasi	%Capaian	
Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	-		

Pengukuran Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Pangkal Pinang berdasarkan nilai EKA dan nilai IKPA yang didapatkan pada Triwulan IV Tahun 2026, sehingga tidak ada target dan realisasi yang dapat dibandingkan pada triwulan I tahun 2026.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2026

Tabel 3.104 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2026 Nilai Kinerja Anggaran

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Target Tahun 2026	Realisasi Triwulan I	% Capaian Terhadap Target Tahunan	Kategori
Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	-	-	

Target Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Pangkal Pinang Tahun 2026 sebesar 5,00. Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Pangkal Pinang pada Triwulan I belum ada karena penilaian Kinerja Anggaran didapat pada triwulan IV tahun 2026.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Nilai kinerja anggaran baru akan didapat pada akhir tahun, sehingga belum dapat dilakukan analisis penyebab keberhasilan ataupun kegagalan kinerja sampai dengan Triwulan I. Namun berdasarkan evaluasi atas realisasi dan capaian Nilai

Kinerja Anggaran Tahun 2025, diketahui hal-hal yang dapat menyebabkan peningkatan kinerja pada tahun 2026, diantaranya:

1. Belanja kontraktual : Melakukan Kontrak Pra-DIPA dan percepatan pelaksanaan kontrak utamanya pada triwulan I.
2. Penyerapan anggaran : Melakukan perencanaan dan realisasi anggaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan Kemenkeu setiap triwulan.
3. Nilai efisiensi pada parameter EKA : melakukan pengawalan efisiensi penggunaan anggaran SBKK dan SBKU.
4. Melakukan revisi POK untuk menyesuaikan anggaran kegiatan yang di prioritaskan dilaksanakan triwulan I
5. Melakukan penyelesaian tagihan dibawah tenggat waktu yang diberikan oleh Kementerian Keuangan.

Pada triwulan I tahun 2026 terdapat satu (1) komponen penilaian IKPA yang tidak mendapatkan nilai 100 yaitu pada komponen Penyerapan Anggaran dengan nilai 83,58 sehingga nilai total IKPA sampai dengan bulan Maret sebesar 96,72. Penyebab tidak tercapainya komponen penyerapan anggaran dikarenakan terdapat dua (2) jenis belanja yang tidak mencapai target penyerapan untuk triwulan I yaitu pada Belanja Barang dan Belanja Modal. Hal ini dikarenakan adanya kendala ketersediaan barang yang dibeli atau diadakan di lapangan, sehingga rencana penarikan dana yang telah disusun tidak dapat tercapai.

Untuk mencapai Nilai Kinerja Anggaran tahun 2026, sampai dengan triwulan I terdapat beberapa hal yang telah dilakukan yaitu :

1. Penetapan Tim Pengelola Keuangan tahun 2026
 2. Melakukan pengajuan UP tahun 2026 dan melaksanakan revolving UP tepat waktu.
 3. Menyusun PoA kegiatan dan anggaran
 4. Melaksanakan revisi POK untuk penyesuaian kegiatan
 5. Menyusun kertas kerja monitoring anggaran dan RPD tahun 2026.
 6. Melakukan penyusunan RPD/Revisi Halaman III DIPA
 7. Pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa serta pencairan tagihan kontraktual dan non kontraktual sesuai ketentuan.
- d. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Adapun upaya untuk pencapaian target kinerja kedepannya :

1. Melakukan revisi Hal III DIPA triwulan II dengan melakukan penyesuaian dengan realisasi sd triwulan I.
 2. Mempertahankan pelaksanaan Revisi DIPA yang masuk ke jenis revisi perhitungan IKPA hanya sebanyak 2 kali setiap semester.
 3. Pemenuhan target serapan anggaran yang telah ditetapkan kemenkeu setiap triwulannya.
 4. Penyelesaian tagihan belanja tepat waktu
 5. Pertanggungjawaban uang persediaan (UP) secara tepat waktu dan optimalisasi penggunaannya sesuai target minimal *revolving*.
 6. Pencapaian target RPD (rencana penarikan dana) per jenis belanja dengan deviasi tidak lebih dari 5% setiap bulannya.
 7. Optimalisasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah
- Penyusunan target output bulanan dan pencapaian target output sesuai dengan target yang telah diinput pada aplikasi.

Tabel 3.105 Matriks Rekomendasi Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Januari	Merupakan indikator dengan target tahunan. Pada bulan januari kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencapaian target diantaranya : 1. Pelaporan Data Realisasi Capaian Output sampai dengan Desember 2025 2. Melakukan pengajuan UP tahun 2026 3. Melaksanakan revisi POK untuk penyesuaian kegiatan 4. Penyusunan PoA kegiatan dan anggaran tahun 2026 5. Pelaksanaan pencairan tagihan belanja kontraktual dan non kontraktual. Perlu terus dilakukan upaya pelaksanaan pengelolaan anggaran tahun 2026 secara berkesinambungan sesuai dengan ketentuan IKPA dan EKA	Lakukan penyusunan perencanaan realisasi anggaran dengan mempertimbangkan target serapan anggaran setiap triwulannya sebagaimana ketentuan IKPA (Kemenkeu)	1. Melakukan pemutakhiran Hal III DIPA tw 1 tahun 2026 paling lama 14 Feb 2026 2. Menyusun kertas kerja monitoring anggaran dan RPD tahun 2026	Februari	Ya	O-36	Tidak bisa diinputnya Revisi Halaman III DIPA/RPD untuk 1 triwulan kedepan
Februari	Merupakan indikator dengan target tahunan. Pada bulan	1. Pastikan RPD yang telah disusun dapat dipenuhi setiap	1. Monitoring RPD bulan maret dan serapan	Maret	Tidak	-	-

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	Februari kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencapaian target diantaranya : 1. Pelaksanaan pencairan tagihan belanja kontraktual dan non kontraktual. 2. Menyusun kertas kerja monitoring anggaran dan RPD tahun 2026 3. Pelaksanaan revolving UP tepat waktu 4. Melakukan penyusunan RPD / halaman III DIPA Perlu terus dilakukan upaya pelaksanaan pengelolaan anggaran tahun 2026 secara berkesinambungan sesuai dengan ketentuan IKPA dan EKA Laporan Target dan Realisasi output pada aplikasi SAKTI belum bisa dilakukan karena aplikasi belum dibuka, masih menunggu informasi dari Kemenkeu.	bulannya 2. lakukan pengecekan secara berkala terhadap aplikasi pelaporan output, agar segera dilakukan penyusunan rencana dan pelaporan realisasi setelah aplikasi dibuka.	anggaran sd Maret 2026 2. Menyampaikan rencana target output dan realisasi output sd maret (jika aplikasi telah dibuka akses)				
Maret	Merupakan indikator dengan target tahunan. Pada bulan Maret kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencapaian target diantaranya : 1. Pelaksanaan pencairan tagihan belanja kontraktual dan non kontraktual. 2. Pelaksanaan monitoring anggaran dan RPD Maret 2026 3. Pelaksanaan revolving UP tepat waktu 4. Mengikuti sosialisasi pelaporan output pada aplikasi SAKTI Laporan Target dan Realisasi output pada aplikasi SAKTI belum bisa dilakukan karena aplikasi belum dibuka, masih menunggu informasi dari Kemenkeu. Nilai IKPA sd bulan Maret masih belum optimal, karena nilai Caput belum ada. Komponen Revisi DIPA, Deviasi Hal III DIPA, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan dan pengelolaan UP/TUP memperoleh nilai 100, sedangkan untuk	Sudah memasuki bulan April, agar lakukan penyesuaian RPD triwulan II dan lakukan pemantauan pencapaian RPD secara berkala. Upayakan RPD yang disusun dapat memenuhi target serapan anggaran triwulan 2. Lakukan proses pencairan tagihan sesuai ketentuan. Lakukan pengecekan secara berkala terhadap aplikasi pelaporan output, agar segera dilakukan penyusunan rencana dan pelaporan realisasi setelah aplikasi dibuka.	1. Melakukan update RPD/ Revisi Hal III DIPA 2. Melakukan pemantauan RPD April secara berkala 3. Melakukan pencairan tagihan belanja sesuai ketentuan 4. Menyampaikan rencana target output dan realisasi output sd maret (jika aplikasi telah dapat diakses)	April	Ya	SDM-07, SDM-09, O-36	-Masih ditemukan pencairan anggaran dengan atribut dokumen yang belum lengkap. -Lambatnya proses pencairan tagihan -Tidak bisa diinputnya Revisi Halaman III DIPA/RPD untuk 1 triwulan kedepan

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	Penyerapan anggaran mendapat nilai 83,58. Perlu terus dilakukan upaya pelaksanaan pengelolaan anggaran tahun 2026 secara berkesinambungan sesuai dengan ketentuan IKPA dan EKA						

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

1. Menyusun POA Fisik dan POA Anggaran secara tepat.
2. Menyusun kertas kerja untuk monitoring dan evaluasi terhadap komponen komponen yang menjadi penilaian kinerja anggaran pada nilai IKPA Balai secara rutin.
3. Menyusun kertas kerja untuk monitoring dan evaluasi terhadap KRO SBKU dan SBKK untuk mengoptimalkan nilai EKA (NK Perencanaan Anggaran)
4. Melakukan rapat evaluasi secara rutin untuk membahas pelaksanaan kinerja anggaran.
5. Reminder berkala setiap minggunya untuk mengingatkan masing-masing ketua tim kerja agar melakukan pelaksanaan kegiatan dan pencairan anggaran sesuai dengan ketentuan IKPA.
6. Penggunaan aplikasi ASIKKEKKU versi 2 dalam proses pencairan tagihan.

f. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3.106 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM

Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian
	T	R	%	Target (RPD TW I)	Realisasi	%			
Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	-	-	1.292.420.643	1.291.037.379	99,89	-	-	-

1) Efisiensi penggunaan anggaran

Berdasarkan tabel di atas, anggaran yang dialokasikan sampai dengan Triwulan I untuk indikator Nilai Kinerja Anggaran adalah sebesar Rp 1.292.420.643 dan realisasi anggarannya sebesar Rp 1.291.037.379 sehingga

persentase capaian realisasi anggaran untuk indikator ini sebesar 99,89%. Namun pada Triwulan I ini belum ada target dan realisasi output karena indikator ini merupakan indikator yang nilainya diperoleh pada akhir tahun. Maka dari itu, tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator ini belum bisa dihitung.

2) Upaya mencapai efisiensi penggunaan anggaran

Anggaran yang dipetakan untuk indikator Nilai Kinerja Anggaran pada RAPK tahun 2026 adalah sebesar Rp 5.454.781.000. Anggaran ini akan digunakan untuk Pembayaran Gaji dan Tunjangan Balai, Langganan Daya Dan Jasa, Administrasi Kegiatan, Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi, Pengadaan Jasa Tenaga Outsourcing.

Upaya yang bisa dilakukan untuk mencapai efisiensi penggunaan anggaran pada indikator ini adalah dengan melakukan pencairan anggaran yang tepat sesuai dengan rencana penarikan dana yang sudah di susun disetiap awal triwulan dan selalu menjaga nilai pada indikator-indikator yang mempengaruhi nilai IKPA dan EKA sehingga target Output Nilai Kinerja Anggaran dapat tercapai. Kemudian melakukan revisi kewenangan DJA untuk pergeseran belanja pegawai ke belanja lainnya yang lebih membutuhkan jika terdapat kelebihan kebutuhan belanja pegawai dikarenakan pada 2026 sebanyak 5 orang pegawai Balai POM di Pangkal Pinang.

g. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan informasi yang tertuang dalam laporan kinerja periode sebelumnya, telah dilakukan pemanfaatan informasi tersebut berupa :

1) Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja

Penyesuaian aktivitas/kegiatan yang dilakukan pada triwulan I yaitu :

- Menyusun strategi ulang dalam pencapaian IKPA dengan memprioritaskan pencapaian komponen Halaman III DIPA sampai dengan bulan Maret, dikarenakan komponen penyerapan anggaran sudah dipastikan tidak dapat mencapai angka maksimal 100,00.
- Monitoring penyerapan KRO SBKK
- Melakukan revolving UP setiap 2 minggu, untuk menunjang pencapaian RPD yang telah ditetapkan, sehingga deviasi maksimal 5% masih dapat terpenuhi.

- Mempertahankan penggunaan inovasi ASIKKEKKU V.2 untuk menunjang percepatan pencairan tagihan sehingga menunjang pencapaian RPD dan serapan anggaran.
- Mengikuti Revisi Kewenangan DJA yang dibuka oleh Biro Perencanaan dan Keuangan untuk melakukan revisi optimalisasi anggaran untuk memenuhi anggaran dan target output yang akan dicapai.

2) Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja

Mapping anggaran pada Indikator Nilai Kinerja Anggaran berasal dari pembayaran Pembayaran Gaji dan Tunjangan Balai, Langgan Daya Dan Jasa, Administrasi Kegiatan, Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi, Pengadaan Jasa Tenaga Outsourcing.

Dalam upaya pencapaian target kinerja indikator NKA yang meliputi pengelolaan pelaksanaan anggaran untuk seluruh indikator dan output (RO) pada Balai POM di Pangkal Pinang, pada triwulan I tahun 2026 telah dilakukan beberapa penyesuaian penggunaan anggaran melalui revisi anggaran sebanyak 1 kali revisi kewenangan DJA, 1 kali revisi Kanwil dan 1 kali revisi POK yang bertujuan untuk :

- Penyesuaian kegiatan yang tidak dapat terlaksana sehingga RPD masih dapat terpenuhi.
- Penambahan kegiatan yang dapat mendukung pencapaian target output dan RPD.
- Optimalisasi anggaran untuk pengadaan barang/peralatan yang dibutuhkan dalam pencapaian output.

3) Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas Evaluasi sebelumnya.

Pada tahun triwulan I 2026 telah dilakukan tindak lanjut atas rekomendasi periode sebelumnya berupa:

- Melakukan revisi DIPA hanya satu kali dalam satu triwulan, sesuai ketentuan penilaian IKPA untuk bisa mendapatkan nilai komponen revisi anggaran pada IKPA secara optimal.
- Menyusun kertas kerja perhitungan efisiensi SBK tahun 2026
- Menyusun kertas kerja monitoring anggaran dan RPD tahun 2026

- Monitoring RPD dan serapan anggaran setiap bulannya

4) Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya.

Adapun penyesuaian perencanaan yang akan dilakukan pada periode berikutnya, berupa:

- Melakukan Revisi Pemutakhiran Halaman III DIPA (penyesuaian Rencana Penarikan Dana triwulan II sd IV)
- Melakukan pelaporan rencana target output tahun 2026 dan realisasi output bulanan.
- Melaksanakan revisi DIPA/ DJA untuk mengalihkan anggaran ke RO yang membutuhkan sebanyak 2 kali setiap semester ke KRO yang membutuhkan
- Melaksanakan revisi anggaran (POK) untuk penyesuaian kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2026.
- Melakukan revisi Belanja Pegawai ke output yang membutuhkan karena pada tahun 2026 sebanyak 5 orang pegawai Balai POM di Pangkal Pinang mutasi ke UPT BPOM lainnya sehingga terdapat kelebihan kebutuhan setelah dilakukan move belanja pegawai.
- Melakukan revisi DJA pada KRO SBKK yaitu pergeseran ke KRO lainnya yang membutuhkan agar nilai efisiensi SBK dan penyerapan anggaran bisa maksimal.

4. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan /sasaran organisasi.

Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi.

Kategori Tingkat Maturitas	Karakteristik
<i>Risk Naive</i>	Manajemen risiko tergantung pada individu perorangan
<i>Risk Aware</i>	Risiko didefinisikan dengan cara yang berbeda dan kedisiplinan dalam proses tidak ketat
<i>Risk Defined</i>	Kerangka penilaian/tanggapan umum terhadap risiko mulai teratur. Pemimpin eksekutif memberi pandangan terhadap risiko yang dihadapi organisasi secara keseluruhan. Pelaksanaan rencana diimplementasikan dengan memprioritaskan risiko yang tinggi.
<i>Risk Managed</i>	Aktivitas manajemen risiko organisasi terkoordinasi di seluruh area bisnis. Menggunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan
<i>Risk Enabled</i>	Mendiskusikan risiko bersama dengan perencanaan strategis, alokasi modal, dan dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Sistem peringatan dini untuk memberitahukan dewan dan manajemen apabila risiko berada di atas batas yang ditetapkan

Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko bertujuan untuk:

1. Mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah satu alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada stakeholder bahwa tujuan dan sasaran tercapai sebagaimana diharapkan
2. Memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko
3. Menjaga pemenuhan prinsip penerapan manajemen risiko

Nilai maturitas manajemen risiko diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Utama yang menggunakan kertas kerja evaluasi maturitas manajemen risiko yang nilainya terbagi dalam kategori sebagai berikut:

Menuju Tingkat Maturitas	Skor Total	Nilai Maturitas	Tingkat Maturitas
<i>Risk Naive</i>	0-16	1	-
<i>Risk Aware</i>	17-32	2	Peningkatan <i>Risk Naive</i> menuju <i>Risk Aware</i>
<i>Risk Defined</i>	33-48	3	Peningkatan <i>Risk Aware</i> menuju <i>Risk Defined</i>
<i>Risk Managed</i>	49-64	4	Peningkatan <i>Risk Defined</i> menuju <i>Risk Managed</i>
<i>Risk Enabled</i>	65-80	5	Peningkatan <i>Risk Managed</i> menuju <i>Risk Enabled</i>

Cara perhitungan level maturitas

$$\text{Skor Maturitas} = \frac{\text{Skor Total}}{16}$$

Keterangan:

- Skor maturitas merupakan nilai yang menjadi indeks maturitas manajemen risiko
- Skor Total merupakan nilai akhir dari pengisian kertas kerja evaluasi berdasarkan penilaian oleh Inspektorat Utama
- Angka 16 merupakan jumlah karakteristik kunci penilaian

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan I Tahun 2026

Tabel 3.107 Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Indikator	Kinerja			Kategori & Notifikasi Warna
	Target	Realisasi	%Capaian	
Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-		

Penilaian indikator Indeks Manajemen Risiko dilakukan oleh Inspektorat Utama dan nilai indeks akan diperoleh pada Triwulan IV Tahun 2026, sehingga pada Triwulan I tahun 2026 belum terdapat target dan realisasi yang dapat dilakukan.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2026

Tabel 3.108 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2026 Indeks Manajemen Risiko

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Target Tahun 2026	Realisasi Triwulan I	% Capaian Terhadap Target Tahunan	Kategori
Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,94	-	-	

Target Indeks Manajemen Risiko Tahun 2026 sebesar 2,94. Nilai Indeks Manajemen Risiko Tahun diukur pada akhir tahun sehingga tidak bisa dilakukan perbandingan realisasi Triwulan I dengan target tahunan.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Indeks Manajemen Risiko baru akan didapat pada akhir tahun, sehingga belum dapat dilakukan analisis penyebab keberhasilan ataupun kegagalan kinerja pada triwulan I. Namun berdasarkan hasil penilaian tingkat maturitas manajemen risiko tahun 2025, diketahui hal-hal yang dapat menyebabkan penurunan kinerja diantaranya :

1. Belum terdapat kertas kerja/ justifikasi penentuan skor risiko untuk seluruh level risiko sebagai dasar penentuan level kemungkinan dan dampak dalam risk register.
2. Telah dilakukan reviu risiko secara berkala sesuai dengan pedoman, namun belum dilakukan reviu oleh Auditor Internal (AI) sebelum dilakukan pelaporan manajemen risiko semester II tahun 2025 pada aplikasi SAPAAPIP.
3. Belum terdapat eskalasi risiko kepada tingkat yang lebih tinggi terhadap risiko yang belum dapat dikelola ke tingkat yang dapat diterima, baik melalui checklist pada aplikasi SAPAAPIP maupun pelaporan secara formal.
4. Telah dilakukan tagging risiko melalui RHK pegawai pada aplikasi SIASN namun belum sepenuhnya diterapkan pada seluruh risiko, seperti risiko yang diperlukan tindakan mitigasi kode risiko O-47.
5. Selera risiko telah ditetapkan dan dikomunikasikan, serta telah dilakukan penilaian risiko, namun berdasarkan hasil evaluasi masih terdapat kelemahan dalam penyusunan dokumen manajemen risiko, antara lain:

- Terdapat risk event yang merupakan negasi dari proses/kegiatan bisnis, misalnya pada kode risiko O-20, O-21, dan O-22.
- Terdapat risk event yang belum spesifik dan masih menggunakan narasi umum seperti "tidak optimal/tidak efektif/tidak memadai/tidak maksimal misalnya pada kode risiko O-57, O-34, O-47, O-31 dan O-60.
- Narasi pada akibat/potensi kerugian risiko sama dengan narasi pada risk event, misalnya pada kode risiko SDM-11.
- Telah dilakukan pengujian aktivitas pengendalian (existing control) terhadap risiko dengan level risiko inheren diatas selera risiko (≥ 16), namun metode yang dilakukan tidak sesuai dengan yang diatur pada juklak manajemen risiko, misalnya pada kode risiko K3-03.

Oleh karena itu, terdapat beberapa hal yang telah dilakukan dalam upaya pencapaian indeks manajemen risiko tahun 2026 yaitu :

1. Melakukan Reviu Risiko Semester 2 tahun 2025
 2. Menyusun Risiko Semester 1 tahun 2026
 3. Melaporkan pengelolaan risiko pada SAPAAPIP secara tepat waktu
 4. Melakukan Reviu SK level Kemungkinan dan Dampak dan melakukan perbaikan yang diperlukan.
 5. Menyusun Kertas Kerja Penentuan Skor Risiko
 6. Melakukan Reviu dan Perbaikan Risiko semester 1 tahun 2026
 7. Melakukan update daftar risiko di SAPAAPIP
 8. Melakukan internalisasi terkait risiko di Instagram (oleh tim kerja penguatan Pengawasan dan program dari tim AoC)
- d. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)
1. Melakukan evaluasi terhadap hasil maturitas risiko tahun 2025 serta menyusun rencana tindak lanjutnya.
 2. Menyusun rencana aksi/ tindak lanjut evaluasi maturitas risiko tahun 2026
 3. Melakukan sosialisasi Risiko semester 1 tahun 2026 kepada seluruh pegawai
 4. Melakukan update dan penyesuaian daftar risiko di SAPAAPIP
 5. Melakukan internalisasi terkait Manajemen Risiko
 6. Melakukan perbaikan identifikasi risiko pada program kerja baru AoC

Tabel 3.109 Matriks Rekomendasi Indeks Manajemen Risiko

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Januari	Merupakan indikator dengan target tahunan. Pada bulan Januari kegiatan yang telah dilakukan diantaranya 1. Melakukan reviu risiko sem 2 tahun 2025 2. Menyusun risiko sem 1 tahun 2026 3. melaporkan pengelolaan risiko pada SAPAAPIP secara tepat waktu Dari hasil indeks manajemen risiko tahun 2025 dan laporan evaluasi dari inspektorat, terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan dalam pengelolaan Manajemen Risiko BPOM di Pangkal Pinang pada tahun 2026	Lakukan evaluasi terhadap hasil maturitas risiko tahun 2025 serta susun rencana tindak lanjutnya. Lakukan pengelolaan manajemen risiko sesuai pedoman	1. menyusun rencana aksi/ tindak lanjut evaluasi maturitas risiko tahun 2026 2. Melakukan sosialisasi Risiko sem 1 tahun 2026 kepada seluruh pegawai 3. Melakukan internalisasi terkait Manrisk	Maret	Ya	SDM-10	penyelenggaraan manajemen risiko belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan pedoman
Februari	Merupakan indikator dengan target tahunan. Pada bulan Februari kegiatan yang telah dilakukan diantaranya 1. mereviu SK level Kemungkinan dan Dampak dan melakukan perbaikan yang diperlukan. 2. Menyusun kertas kerja penentuan skor risiko 3. Mereviu risiko sem 1 2026 Terdapat beberapa hal yang perlu disesuaikan pada daftar risiko yang telah dilaporkan di SAPAAPIP menyesuaikan dengan hasil penyusunan kertas kerja penentuan skor risiko. Dari hasil indeks manajemen risiko tahun 2025 dan laporan evaluasi dari inspektorat, terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan dalam pengelolaan Manajemen Risiko BPOM di Pangkal Pinang sepanjang tahun 2026	Segera lakukan penyesuaian pelaporan risiko di SAPAAPIP. Lakukan pengelolaan manajemen risiko sesuai pedoman	1. Melakukan penyesuaian risiko di SAPAAPIP 2. Melakukan sosialisasi Risiko sem 1 tahun 2026 kepada seluruh pegawai 3. Melakukan internalisasi terkait Manrisk	Maret	Ya	SDM-10	penyelenggaraan manajemen risiko belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan pedoman
Maret	Merupakan indikator dengan target tahunan. Pada bulan Maret kegiatan yang telah dilakukan diantaranya 1. Melakukan perbaikan risiko sem 1 tahun 2026 2. Melakukan update daftar risiko di SAPAAPIP 3. Melakukan internalisasi	Segera lakukan perbaikan atas risiko program kerja baru AoC dan lakukan update daftar risiko di SAPAAPIP Lakukan Sosialisasi Daftar Risiko kepada seluruh pegawai	1. Melakukan perbaikan identifikasi risiko program kerja baru AoC 2. Melakukan update daftar risiko di SAPAAPIP 3. Melakukan sosialisasi Risiko sem 1 tahun 2026 kepada seluruh pegawai	Maret	Ya	SDM-10	penyelenggaraan manajemen risiko belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan pedoman

Bulan	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	terkait risiko di Instagram (oleh tim kerja penguatan {engawasan}) Terdapat penyusunan risiko atas program kerja baru AoC yang perlu untuk diperbaiki, sehingga sosialisasi daftar risiko ditunda sampai dengan seluruh risiko final. Dari hasil indeks manajemen risiko tahun 2025 dan laporan evaluasi dari inspektorat, terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan dalam pengelolaan Manajemen Risiko BPOM di Pangkal Pinang sepanjang tahun 2026						

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan pencapaian kinerja yaitu :

1. Peningkatan kompetensi pegawai terkait Manajemen risiko melalui IDEAS, dimana telah diikuti oleh seluruh pegawai
2. Peningkatan pemahaman dan *awareness* pegawai terkait manajemen risiko dengan sosialisasi berkala melalui infografis dan informasi lainnya di media sosial dan *WhatsApp Group* Balai yang dilaksanakan oleh Pokja Pengawasan dan Program AoC GERASAK (Gerakan Sadar Risiko).
3. Monitoring dan evaluasi berkala pelaksanaan manajemen risiko sesuai dengan pedoman
4. Mengadakan *refreshment* atau penyegaran kembali tentang pengelolaan Manajemen Risiko dengan mengundang Inspektorat Utama Badan POM sebagai narasumber.

f. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 3.110 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Indeks Manajemen Risiko

Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian
	T	R	%	Target (RPD TW I)	Realisasi	%			
Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-	-	81.904.000	91.826.670	112,12	-	-	-

Berdasarkan tabel di atas, anggaran yang dialokasikan sampai dengan Triwulan I untuk indikator Indeks Manajemen Risiko sebesar Rp 81.904.000 dan realisasi anggarannya sebesar Rp 91.826.670 sehingga persentase capaian realisasi anggaran untuk indikator ini sebesar 112,12%. Namun pada Triwulan I ini belum ada target dan realisasi output karena indikator ini merupakan indikator yang nilainya diperoleh pada akhir tahun. Maka dari itu, tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator ini belum bisa dihitung.

Anggaran yang dipetakan untuk indikator Indeks Manajemen Risiko pada RAPK tahun 2026 adalah sebesar Rp 315,112,000. Anggaran ini akan digunakan untuk pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor serta sewa rumah dinas. Hingga Triwulan I, penggunaan anggaran yang dapat di realisasikan sampai dengan Triwulan I difokuskan pada sewa rumah dinas dan pengadaan peralatan/perlengkapan kantor.

Untuk mencapai efisiensi penggunaan anggaran pada indikator Indeks Manajemen Risiko Balai POM di Pangkal Pinang akan melakukan upaya sebagai berikut:

- Meningkatkan pemahaman dan kualitas penyelenggaraan manajemen risiko dengan memanfaatkan IDEAS.
- Melakukan pengelolaan risiko sesuai pedoman dan dilaporkan secara tepat waktu setiap semester.
- Melakukan tindak lanjut atas rekomendasi auditor internal maupun APIP atas implementasi manajemen risiko yang dilaksanakan.
- Memanfaatkan anggaran yang telah dipetakan secara efisien dalam mencapai kinerja.

g. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan informasi kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja tahun 2025, pemanfaatan informasi kinerja tersebut diantaranya:

- 1) Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja
 - Melakukan Reviu Risiko Semester 2 tahun 2025
 - Menyusun Risiko Semester 1 tahun 2026
 - Melaporkan pengelolaan risiko pada SAPAAPIP secara tepat waktu
 - Melakukan Reviu SK level Kemungkinan dan Dampak dan melakukan perbaikan yang diperlukan.
 - Menyusun Kertas Kerja Penentuan Skor Risiko
 - Melakukan Reviu dan Perbaikan Risiko semester 1 tahun 2026
 - Melakukan update daftar risiko di SAPAAPIP
 - Melakukan internalisasi terkait risiko di Instagram (oleh tim kerja penguatan Pengawasan dan program dari tim AoC)

- 2) Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja

Pada triwulan I, belum terdapat penyesuaian anggaran untuk indikator kinerja indeks manajemen risiko. Penyelenggaraan Manajemen risiko akan dilaksanakan seoptimal mungkin dengan dukungan anggaran yang tersedia.

- 3) Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja

Dari hasil evaluasi penilaian maturitas risiko tahun 2025 yang dilakukan inspektorat terdapat beberapa hal yang telah ditindaklanjuti sampai dengan triwulan I tahun 2026 diantaranya :

- Telah dilakukan eskalasi risiko ke deputi pembina dengan memberikan tanda centang pada laporan risiko di SAPAAPIP.
- Auditor Internal telah melakukan reviu risk register semester 1 tahun 2026
- Menetapkan SK Level Kemungkinan dan Dampak Risiko sebagai panduan dalam penentuan penilaian risiko pada Balai POM di Pangkal Pinang
- Menyusun rencana aksi/tindak lanjut evaluasi maturitas risiko tahun 2025
- Melakukan penyesuaian risiko di SAPAAPIP
- Melakukan internalisasi terkait manajemen risiko

- 4) Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya.

Kedepannya hal-hal yang dapat dilakukan penyesuaian diantaranya :

- Melakukan perbaikan identifikasi risiko program kerja baru AoC
- Melakukan update daftar risiko di SAPAAPIP

- Melakukan sosialisasi Risiko sem 1 tahun 2026 kepada seluruh pegawai

3.2 TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2024

1. TINDAK LANJUT REKOMENDASI INDIKATOR KINERJA UTAMA TRIWULAN I TAHUN 2026

Balai POM di Pangkal Pinang melakukan monitoring dan evaluasi atas capaian indikator kinerja utama setiap bulannya. Dari hasil evaluasi tersebut diperoleh rekomendasi perbaikan atas capaian kinerja disertai dengan timeline penyelesaiannya. Berikut progres tindak lanjut atas poin-poin rekomendasi Bulan Desember 2025 – Februari 2026 yang ditindaklanjuti pada Bulan Januari – Maret 2026.

Tabel 3.111 Tindak Lanjut Triwulan II atas Evaluasi SAKIP Tahun 2024

No	Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Januari	Kegiatan sampling obat tahun 2025 telah dilaksanakan dan diselesaikan sesuai dengan perencanaan serta ketentuan yang telah ditetapkan	-	-		-	-	Tidak	-	-
		Januari	Pelaksanaan pengujian sediaan farmasi berjalan dengan lancar sesuai dengan target yang telah ditetapkan.	lakukan pelaporan sampel yang diuji pada bulan desember secara tepat waktu	Melakukan pelaporan sampel yang diuji pada bulan Desember secara tepat waktu.	Selesai	-	-	Tidak	-	-
		Februari	Sebagai upaya untuk mengawal IKU ini telah dilaksanakan rapat pembahasan sampling dan pengujian pada tanggal 20 Januari 2026. Telah dilakukan pembahasan terkait kendala yang dihadapi di tahun 2025. Telah dibuat perencanaan bulanan pelaksanaan sampling untuk setiap komoditi sesuai target RO awal. Pada Bulan	Bersurat ke unit pengampu teknis terkait usulan pergeseran breakdown komoditi	Mengirim nota dinas ke unit pengampu teknis terkait usulan pergeseran breakdown komoditi	Selesai	-	-	Ya	O-01	1. Sampel Obat yang di sampling tidak sesuai dengan pedoman sampling

No	Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			januari telah dilakukan sampling terhadap semua komoditi sediaan farmasi dengan rincian sebagai berikut : 4 sampel Obat ; 5 sampel OBA ; 1 sampel SK ; 4 sampel Kosmetik. Kendala : Adanya Nota Dinas dari Sekretaris utama Nomor : PR.04.02.2.01.26.05 tanggal 5 Januari 2026 perihal pergeseran breakdown komoditi dan sarana yang menjadi target Rincian Output, menyebabkan perlunya penyesuaian anggaran yang tersedia								
			Realisasi : Pada bulan januari telah dilakukan sampling sesuai perencanaan, pengujian belum selesai dilakukan sehingga belum bisa dilaporkan sebagai capaian. Upaya : Untuk menunjang proses pengujian, di masing-masing komoditi telah ditunjuk tim teknis untuk merencanakan kebutuhan reagen, media mikro, suku cadang, baku pembanding, dan pendukung pengujian.	Memastikan ketersediaan reagen,suku cadang dan peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan pengujian sampel yang telah disampling	Dilakukan penyusunan kebutuhan reagen, media mikro, suku cadang, baku pembanding, dan pendukung pengujian untuk memperlancar	Selesai	-	-	Ya	1. S-01 2. S-02 3. O-51	1. Pengujian sampel sediaan farmasi secara kimia melebihi timeline yang ditetapkan 2. Pengujian sampel sediaan farmasi secara mikrobiologi melebihi timeline yang ditetapkan 3. Pemenuhan parameter uji tidak sesuai dengan pedoman sampling
		Maret	Pada Bulan Februari telah dilakukan sampling terhadap semua komoditi sediaan farmasi dengan rincian sebagai berikut : 11 sampel Obat, 10 sampel OBA, 1 sampel SK dan 23 sampel Kosmetik. Pelaksanaan sampling mengacu pada perencanaan sampling awal (sebelum adanya revisi target rincian output) Tidak terdapat kendala dalam pelaksanaan sampling komoditi sediaan farmasi bulan februari	Melakukan pemeriksaan kembali kesesuaian kategori / jenis sampel sediaan farmasi dengan membandingkannya pada database pendaftaran (Contoh : sampel kosmetik dicek kembali pada https://app-registrasi.pom.go.id/)	Mengingatkan kembali kepada PJ sampling untuk Melakukan pemeriksaan kembali kesesuaian kategori / jenis sampel sediaan farmasi dengan membandingkannya pada database pendaftaran saat pelaksanaan sampling	Selesai	-	-	Ya	O-01	1. Sampel Obat yang di sampling tidak sesuai dengan pedoman sampling
			Realisasi : Pada bulan februari telah dilakukan pengujian terhadap : 1. 17 sampel obat (4 sampel Balai,	1. Agar dilakukan koordinasi ke Region Pekanbaru untuk melaksanakan pengujian	1. Membuat nota dinas permohonan pengujian parameter logam ke Balai	Selesai	-	-	Ya	1. S-01 2. S-02 3. O-51	1. Pengujian sampel sediaan farmasi secara kimia melebihi timeline

No	Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			2 sampel loka, 11 sampel regionalisasi). 2. 12 sampel OBA (10 sampel balai, 2 sampel loka) 3. 2 sampel SK (1 sampel balai, 1 sampel loka) 4. 32 sampel kosmetik (27 sampel balai, 5 sampel loka) Kendala : Terjadi kerusakan pada board AAS Grafite Furnace sehingga dilakukan clock off pada aplikasi SIPT. Saat dilakukan clock on SLA pengujian 15 HK masih dapat dipenuhi. Namun, karena adanya keterbatasan anggaran perbaikan, saat ini belum dilakukan perbaikan.	parameter logam Pb,Cd,dan As di Balai lain. 2. Agar dilakukan koordinasi ke bagian Pemeriksaan untuk melakukan sampling untuk bulan maret dan april diusahakan sampel dengan parameter uji non logam Pb, Cd, dan As. 3. Agar dilakukan pengecekan oleh vendor terkait kepastian kerusakan alat AAS	lain. 2. Menginformasikan kerusakan alat AAS ke bagian pemeriksaan untuk dapat dilakukan penyesuaian pengujian. 3. Akan dilakukan pengajuan kunjungan oleh Teknisi untuk memastikan kerusakan alat.						yang ditetapkan 2. Pengujian sampel sediaan farmasi secara mikrobiologi melebihi timeline yang ditetapkan 3. Pemenuhan parameter uji tidak sesuai dengan pedoman sampling
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	Januari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Februari	Merupakan target tahunan. Akan dilakukan persiapan pelaksanaan KIE Farmakovigilans yang akan dilaksanakan pada 9 Februari 2026	1. Menetapkan 45 Sarana target KIE Farmakovigilans 2. Mempersiapkan pelaksanaan KIE Farmakovigilans	1. Membuat Nota Dinas Rencana Pelaksanaan KIE Farmakovigilans yang memuat target yang telah ditetapkan 2. Membuat Undangan Narasumber dan Undangan bagi Tenaga Kesehatan / Tenaga Medis yang akan menjadi PIC pelaporan e-meso di sarana nya	Selesai	-	-	Tidak	-	-
		Maret	Telah dilaksanakan KIE Farmakovigilans terhadap 45 Sarana Pelayanan Kesehatan dengan rincian 14 Rumah Sakit dan 31 Puskesmas. Pelaksanaan KIE secara luring diikuti oleh 13 sarana dan 32 sarana lainnya mengikuti kegiatan secara daring. Kendala : Setelah pelaksanaan KIE Farmakovigilans, masih terdapat Tenaga Kesehatan / Tenaga Medis yang belum melakukan pendaftaran akun e-meso sarananya	1. Membantu pembuatan akun e-meso sarana yang belum melakukan pendaftaran 2. Membatasi jumlah akun yang difasilitasi pembuatannya sebagai strategi untuk mencapai IKU yang diharapkan	1. Melakukan pendataan sarana yang belum melakukan pendaftaran akun e-meso 2. Memfasilitasi pendaftaran akun e-meso via online (Whatsapp)	Selesai	-	-	Tidak	-	-

No	Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Januari	Kegiatan sampling pangan tahun 2025 telah dilaksanakan dan diselesaikan sesuai dengan perencanaan serta ketentuan yang telah ditetapkan	-	-		-	-		-	-
		Januari	Realisasi : Sampai dengan bulan Desember jumlah sampel yang selesai dilakukan pengujian adalah 192 sampel dari target renlak sampling dan pengujian 192 sampel Kendala : Pada bulan Desember tidak terdapat kendala pengujian Capaian terhadap target : Capaian terhadap target bulanan dan tahunan untuk IKU ini adalah 109,72%, capaian yang tinggi ini dipengaruhi oleh upaya yang dilakukan analis laboratorium dengan melakukan lembur agar dapat menyelesaikan pengujian sampel tepat waktu sesuai timeline dan adanya koordinasi yang baik dengan tim kerja pemeriksaan Upaya yang telah dilakukan : Melakukan komunikasi dengan balai penguji di regional Pekanbaru tentang sampel yang belum dilaporkan melalui SIPT	Dilakukan evaluasi terhadap capaian tahun 2025 dengan target tahun 2026	Akan dilakukan evaluasi terhadap capaian di tahun 2025 dan dibandingkan dengan target tahun 2025	Selesai	-	-	Ya	O-05 O-53 O-06 O-54 O-55 O-70 SDM-17 K3-04	1. Kondisi sampel frozen dari loka yang diserahkan ke pihak Laboratorium dalam kondisi rusak/kurang baik 2. Terjadi ketidaksesuaian sampel balai (kategori pangan, laboratorium tujuan kimia mikro) yang masuk laboratorium dengan perencanaan sampling yang disampaikan 3. Terjadi ketidaksesuaian sampel loka (kategori pangan, laboratorium tujuan kimia mikro) yang masuk laboratorium dengan perencanaan sampling yang disampaikan 4. Terjadi kesalahan dalam pengujian dan perhitungan hasil uji 5. Pemenuhan parameter uji tidak lengkap 6. Pengujian sampel rutin pangan melewati timeline yang telah ditetapkan 7. Kesalahan dalam melakukan pengujian sampel 8. Terjadinya kecelakaan kerja dalam

No	Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
											pelaksanaan pengujian sampel obat dan makanan di laboratorium
		Februari	Telah dilaksanakan rapat pembahasan sampling dan pengujian pangan olahan pada tanggal 20 Januari 2026. Telah dilakukan pembahasan terkait kendala yang dihadapi di tahun 2025. Telah dibuat perencanaan bulanan pelaksanaan sampling komoditi pangan olahan sesuai target RO awal. Pada Bulan Januari telah dilakukan sampling terhadap komoditi pangan olahan sebanyak 12 sampel. Adanya Nota Dinas dari Sekretaris utama Nomor : PR.04.02.2.01.26.05 tanggal 5 Januari 2026 perihal pergeseran breakdown komoditi dan sarana yang menjadi target Rincian Output, menyebabkan perlunya penyesuaian anggaran yang tersedia Kendala : Adanya kerusakan sampel AMDK galon (1 dari 12 sampel) pada saat dilakukan pengiriman ke BBPOM Palembang dikarenakan cuaca buruk saat pengiriman (via pos)	1. Bersurat ke unit pengampu teknis terkait usulan pergeseran breakdown komoditi 2. Memberikan perhatian khusus bagi sampel-sampel yang mudah rusak dan berkoordinasi dengan jasa pengiriman (PT. POS Indonesia) terkait tata cara pengiriman sampel yang mudah rusak	1. Mengirim nota dinas ke unit pengampu teknis terkait usulan pergeseran breakdown komoditi 2. Memberikan packing khusus bagi sampel-sampel yang mudah rusak dan memberikan penjelasan yang lebih detail kepada jasa pengiriman (PT. POS Indonesia) untuk dapat lebih hati-hati dalam menangani pengiriman sampel-sampel yang mudah rusak	Selesai	-	-	Ya	O-04	1. Sampel Pangan Olahan yang di sampling tidak sesuai dengan pedoman sampling
			Realisasi : - Sampai dengan bulan Januari jumlah sampel yang masuk laboratorium dan dilakukan pengujian adalah 12 sampel dari target renlak sampling dan pengujian 12 sampel - Telah dilakukan rapat target sampling dan pengujian bersama antara pengujian dan pemeriksaan - Perencanaan kebutuhan laboratorium telah dilakukan dan	1. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan tim kerja pemeriksaan dan balai penguji di regional Pekanbaru 2. Melakukan identifikasi kebutuhan pengujian	1. Penyusunan renlak pengujian regionalisasi 2. Penyusunan kebutuhan pengujian untuk segera dilakukan pengadaan	Selesai	-	-	Ya	O-05 O-53 O-06 O-54 O-55 O-70 SDM-17 K3-04	1. Kondisi sampel frozen dari loka yang diserahkan ke pihak Laboratorium dalam kondisi rusak/kurang baik 2. Terjadi ketidaksesuaian sampel balai (kategori pangan, laboratorium tujuan kimia mikro) yang masuk laboratorium

No	Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			dalam proses pengadaan Kendala : Belum ditemukan kendala pengujian sampel pada bulan Januari Capaian terhadap target : Capaian dihitung mulai B02 Upaya yang telah dilakukan : Melakukan komunikasi dengan balai penguji di regional Pekanbaru tentang sampel yang dikirimkan								dengan perencanaan sampling yang disampaikan 3. Terjadi ketidaksesuaian sampel loka (kategori pangan, laboratorium tujuan kimia mikro) yang masuk laboratorium dengan perencanaan sampling yang disampaikan 4. Terjadi kesalahan dalam pengujian dan perhitungan hasil uji 5. Pemenuhan parameter uji tidak lengkap 6. Pengujian sampel rutin pangan melewati timeline yang telah ditetapkan 7. Kesalahan dalam melakukan pengujian sampel 8. Terjadinya kecelakaan kerja dalam pelaksanaan pengujian sampel obat dan makanan di laboratorium
		Maret	Pada Bulan februari telah dilakukan sampling terhadap komoditi pangan olahan sebanyak 17 sampel. Pelaksanaan sampling mengacu pada perencanaan sampling awal (sebelum adanya revisi target rincian output) Tidak terdapat kendala dalam pelaksanaan sampling komoditi pangan olahan bulan februari	1. Melakukan pemeriksaan kembali kesesuaian kategori / jenis sampel pangan olahan dengan membandingkannya pada database pendaftaran (Contoh : sampel pangan olahan MD dicek kembali pada https://ereg-rba.pom.go.id/)	Mengingatkan kembali kepada PJ sampling untuk Melakukan pemeriksaan kembali kesesuaian kategori / jenis sampel pangan olahan dengan membandingkannya pada database pendaftaran saat pelaksanaan sampling	Selesai	-	-	Ya	O-04	1. Sampel Pangan Olahan yang di sampling tidak sesuai dengan pedoman sampling

No	Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			Realisasi : - Sampai dengan bulan Januari jumlah sampel yang masuk laboratorium dan dilakukan pengujian adalah 29 sampel dari target renlak sampling dan pengujian 29 sampel - Perencanaan kebutuhan laboratorium telah dilakukan dan dalam proses pengadaan Kendala : Terdapat kerusakan ICP MS (kotor di bagian vakum) sehingga pengujian dihentikan sementara (clock off) karena AAS juga mengalami kerusakan Rencana perbaikan awal Maret 2026 Capaian terhadap target : Capaian dihitung dengan target revisi yang diajukan adalah 101,11% Upaya yang telah dilakukan : Melakukan komunikasi dengan teknisi alat untuk dilakukan perbaikan ICP MS segera	1. Segera melakukan perbaikan ICP MS 2. Melakukan pelatihan terkait pemeliharaan ICP MS termasuk pembersihan vakum untuk menghemat biaya perbaikan yang memakan biaya cukup mahal	1. Akan dilakukan perbaikan di awal Maret 2026	Selesai	-	-	Ya	O-05 O-53 O-06 O-54 O-55 O-70 SDM-17 K3-04	1. Kondisi sampel frozen dari loka yang diserahkan ke pihak Laboratorium dalam kondisi rusak/kurang baik 2. Terjadi ketidaksesuaian sampel balai (kategori pangan, laboratorium tujuan kimia mikro) yang masuk laboratorium dengan perencanaan sampling yang disampaikan 3. Terjadi ketidaksesuaian sampel loka (kategori pangan, laboratorium tujuan kimia mikro) yang masuk laboratorium dengan perencanaan sampling yang disampaikan 4. Terjadi kesalahan dalam pengujian dan perhitungan hasil uji 5. Pemenuhan parameter uji tidak lengkap 6. Pengujian sampel rutin pangan melewati timeline yang telah ditetapkan 7. Kesalahan dalam melakukan pengujian sampel 8. Terjadinya kecelakaan kerja dalam pelaksanaan pengujian sampel obat dan makanan di laboratorium

No	Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Januari	Hingga akhir periode tahun 2025 tidak terdapat kejadian KLB Keracunan Pangan di wilayah pulau Bangka	-	-	Selesai	-	-	Tidak	-	-
		Januari	Realisasi : Tidak terjadi kasus KLB/Keracunan Pangan pada tahun 2025 Kendala : belum ditemukan kendala dalam pengujian sampel KLB keracunan pangan Capaian terhadap target : 1. Belum dapat dilakukan perhitungan capaian karena belum ada realisasi terhadap IKU ini 2. Belum terdapat sampel KLB keracunan pangan Upaya yang telah dilakukan : 1. Melakukan diskusi dengan PPOMN terkait pengujian sampel kasus KLB keracunan pangan 2. Melakukan pengecekan dan menyiapkan reagen serta media yang diperlukan untuk parameter uji yang berhubungan dengan sampel keracunan pangan	Bersurat ke pengampu kedeputian III untuk tindak lanjut tidak ada sampel KLB KP 1. melaporkan tidak terdapat sampel KLB KP 2. arahan untuk perhitungan terhadap capaian target Dilakukan revidi terhadap rencana target tahun 2026	Melakukan konfirmasi terhadap perhitungan capaian karena tidak ada realisasi Akan melakukan revidi dan evaluasi terhadap capaian tahun 2025 dan target tahun 2026	Selesai	-	-	Ya	S-03 O-09 F-03 O-64 O-71	1. Tidak terdapat Penetapan terkait Status Kejadian Luar Biasa (KLB) dari Dinas Kesehatan setempat 2. Sampel KLB tidak diuji sesuai dengan standar 3. Analis menerima gratifikasi 4. Sampel KLB keracunan pangan tidak diuji sesuai dengan tools penilaian RHPK 5. Agen penyebab KLB tidak dapat dikonfirmasi
		Februari	Tidak terjadi kasus keracunan pangan pada bulan Januari	-	-	Selesai	-	-	Tidak	-	-
			Realisasi : Tidak terjadi kasus KLB/Keracunan Pangan pada bulan Januari Kendala : belum ditemukan kendala dalam pengujian sampel KLB keracunan pangan Capaian terhadap target : 1. Belum dapat dilakukan perhitungan capaian karena belum ada realisasi terhadap IKU ini	Menyusun kebutuhan reagen dan media untuk pengujian sampel KLB keracunan pangan	Penyusunan kebutuhan pengujian untuk segera dilakukan pengadaan	Selesai	-	-	Ya	S-03 O-09 F-03 O-64 O-71	1. Tidak terdapat Penetapan terkait Status Kejadian Luar Biasa (KLB) dari Dinas Kesehatan setempat 2. Sampel KLB tidak diuji sesuai dengan standar 3. Analis menerima gratifikasi 4. Sampel KLB keracunan pangan tidak diuji sesuai dengan tools

No	Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			2. Belum terdapat sampel KLB keracunan pangan Upaya yang telah dilakukan : Melakukan pengecekan dan menyiapkan reagen serta media yang diperlukan untuk parameter uji yang berhubungan dengan sampel keracunan pangan								penilaian RHPK 5. Agen penyebab KLB tidak dapat dikonfirmasi
		Maret	Tidak terjadi kasus keracunan pangan pada bulan Februari	-	-	Selesai	-	-	Tidak	-	-
			Realisasi : Tidak terjadi kasus KLB/Keracunan Pangan pada bulan Februari Kendala : belum ditemukan kendala dalam pengujian sampel KLB keracunan pangan Capaian terhadap target : 1. Belum dapat dilakukan perhitungan capaian karena belum ada realisasi terhadap IKU ini 2. Belum terdapat sampel KLB keracunan pangan Upaya yang telah dilakukan : Melakukan pengecekan dan menyiapkan reagen serta media yang diperlukan untuk parameter uji yang berhubungan dengan sampel keracunan pangan	Menyusun kebutuhan reagen dan media untuk pengujian sampel KLB keracunan pangan	Penyusunan kebutuhan pengujian untuk segera dilakukan pengadaan	Selesai	-	-	Ya	S-03 O-09 F-03 O-64 O-71	1. Tidak terdapat Penetapan terkait Status Kejadian Luar Biasa (KLB) dari Dinas Kesehatan setempat 2. Sampel KLB tidak diuji sesuai dengan standar 3. Analis menerima gratifikasi 4. Sampel KLB keracunan pangan tidak diuji sesuai dengan tools penilaian RHPK 5. Agen penyebab KLB tidak dapat dikonfirmasi
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Januari	Kegiatan sampling PIRT telah selesai dilaksanakan dan berjalan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pedoman Sampling Tahun 2025.	Melakukan Sampling PIRT diawal bulan agar timeline pengujian dan pelaporan dapat efektif sampai dengan tanggal 15 bulan berikutnya	Sampling akan dilakukan pada awal bulan agar timeline pengujian dan pelaporan dapat efektif sampai dengan tanggal 15 bulan berikutnya	Selesai	-	-	Ya	F-04 SDM-12	1. Mark up harga pembelian sampel PIRT 2. Ketidaksesuaian dalam penentuan kategori sampel PIRT yang di sampling
			Realisasi : - Pengujian sampel PIRT telah dilakukan pada TW I sesuai dengan Pedoman Sampling. - Berdasarkan surat nomor PW.04.03.54.08.25.1621 tentang	Dilakukan evaluasi terhadap capaian target dan target tahun 2026	Akan dilakukan evaluasi terhadap capaian tahun 2025 reviu terhadap target tahun 2026	Selesai	-	-	Ya	F-05 O-10 O-72	1. Manipulasi data hasil pengujian oleh analis 2. Sampel PIRT terlambat dilaporkan 3. Sampel PIRT berisiko

No	Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			Evaluasi Pengawasan PIRT TW II TA 2025 Balai POM di Pangkal Pinang terdapat beberapa hal yang dianggap tidak sesuai yaitu terdapat 2 sampel tidak sesuai kategori pangan dan hasil evaluasi terhadap ketepatan waktu Pelaporan hasil sampling dan pengujian sesuai dengan pedoman sampling yaitu paling lambat tiap tanggal 15 di bulan berikutnya, seluruh sampel dilaporkan tidak tepat waktu (tanggal 15 di bulan berikutnya) Kendala : Tidak ada kendala pada bulan Desember Capaian terhadap target : Capaian bulan Desember terhadap target adalah 107,87% terhadap target bulanan dan tahunan Upaya yang telah dilakukan : Melakukan evaluasi dan konfirmasi terkait hasil evaluasi dari Deputi 3. Hasil evaluasi tidak merubah penilaian mandiri UPT sehingga tidak merubah realisasi dan capaian yang sudah dilaporkan								diuji tidak sesuai dengan standar
		Februari	Pada bulan Januari belum dilakukan sampling produk PIRT. Pelaksanaan sampling ditargetkan pada bulan Februari-Maret serta menunggu keputusan usulan perubahan target ke unit pengampu teknis. Hal ini berhubungan dengan anggaran sampel PIRT yang cukup tinggi untuk setiap sampelnya	Melakukan Sampling PIRT diawal bulan agar timeline pengujian dan pelaporan dapat efektif sampai dengan tanggal 15 bulan berikutnya	Sampling akan dilakukan pada awal bulan agar timeline pengujian dan pelaporan dapat efektif sampai dengan tanggal 15 bulan berikutnya Tahun 2026 akan dipastikan kategori pangan yang disampling sesuai dengan Pedoman Sampling	Belum Selesai	Pelaksanaan sampling PIRT masih menunggu keputusan unit pengampu teknis terkait target kategori pangan PIRT yang harus disampling	March 2026	Ya	F-04 SDM-12	1. Mark up harga pembelian sampel PIRT 2. Ketidaksesuaian dalam penentuan kategori sampel PIRT yang di sampling

No	Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			Realisasi : Pada bulan Januari belum dilakukan pengujian sampel PIRT, sesuai renlak awal sampel PIRT ditargetkan bulan Februari akan tetapi karena adanya perubahan target akibat pemotongan anggaran sampling maka sampling dan pengujian sampel PIRT dipending dan menunggu hasil pengesahan target. Saat ini dilakukan identifikasi dan penyusunan kebutuhan untuk pengujian sampel PIRT. Kendala : belum ditemukan kendala dalam pengujian sampel PIRT Capaian terhadap target : Belum dapat dilakukan perhitungan capaian karena belum ada realisasi terhadap IKU ini Upaya yang telah dilakukan : - Melakukan pengecekan dan menyiapkan reagen serta media yang diperlukan untuk parameter uji yang berhubungan dengan sampel PIRT - Melakukan revisi terhadap renlak sampling dan pengujian bulan Februari	Melakukan revisi terhadap renlak sampling dan pengujian sampel PIRT di bulan Februari	Penyusunan kebutuhan pengujian untuk segera dilakukan pengadaan	Selesai	-	-	Ya	F-05 O-10 O-72	1. Manipulasi data hasil pengujian oleh analis 2. Sampel PIRT terlambat dilaporkan 3. Sampel PIRT berisiko diuji tidak sesuai dengan standar
		Maret	Kendala : Pada bulan Februari belum dilakukan sampling produk PIRT. Pelaksanaan sampling masih menunggu keputusan unit pengampu teknis terkait jumlah total sampel pangan sehingga dapat diketahui jumlah sampel PIRT yang harus disampling (8%)	Berkoordinasi dengan unit pengampu teknis terkait kepastian usulan perubahan target	Jika belum ada kepastian hingga akhir februari, maka pelaksanaan sampling PIRT sesuai dengan jumlah sampel pada perencanaan awal (8% dari Total Target RO awal)	Selesai	-	-	Ya	F-04 SDM-12	1. Mark up harga pembelian sampel PIRT 2. Ketidaksiesuaian dalam penentuan kategori sampel PIRT yang di sampling
			Realisasi : Pada bulan februari belum dilakukan pengujian sampel PIRT,	1. Melakukan revisi terhadap renlak sampling dan pengujian sampel PIRT di bulan Maret	1. Melakukan revisi renlak sampling dan pengujian sampel PIRT di bulan	Selesai	-	-	Ya	F-05 O-10 O-72	1. Manipulasi data hasil pengujian oleh analis 2. Sampel PIRT

No	Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			sesuai renlak awal sampel PIRT ditargetkan bulan Februari akan tetapi karena adanya perubahan target akibat pemotongan anggaran sampling maka sampling dan pengujian sampel PIRT dipending dan menunggu hasil pengesahan target. Rencana sampling dan pengujian PIRT di bulan Maret. Saat ini dilakukan identifikasi dan penyusunan kebutuhan untuk pengujian sampel PIRT. Kendala : belum ditemukan kendala dalam pengujian sampel PIRT Capaian terhadap target : Belum dapat dilakukan perhitungan capaian karena belum ada realisasi terhadap IKU ini Upaya yang telah dilakukan : Melakukan pengecekan dan menyiapkan reagen serta media yang diperlukan untuk parameter uji yang berhubungan dengan sampel PIRT Melakukan revisi terhadap renlak sampling dan pengujian bulan Maret	2. Melakukan pemeriksaan kembali kesesuaian kategori / jenis sampel PIRT dengan membandingkannya pada database pendaftaran (cek PIRT pada https://spirt.pom.go.id/cek-spirt)	Maret sesuai target usulan baru 2. Mengingatkan kembali kepada PJ sampling untuk Melakukan pemeriksaan kembali kesesuaian kategori / jenis sampel PIRT dengan membandingkannya pada database pendaftaran saat pelaksanaan sampling						terlambat dilaporkan 3. Sampel PIRT berisiko diuji tidak sesuai dengan standar
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Januari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Februari	Realisasi keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder bulan Januari sebesar 100%. Dengan rincian : - 3 realisasi carry over (1 Dist Pangan dan 2 Produksi MD) - 12 realisasi berasal dari sardist pangan yang telah menindaklanjuti	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			rekomendasi petugas pemeriksa (TL Pelaku Usaha) saat dilakukan pembinaan di sarana selama bulan Januari								
		Maret	Realisasi keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder bulan februari sebesar 40.7%. Target tidak tercapai dikarenakan pada realisasi keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti pada parameter pelaku usaha sebesar 81.40% namun pada parameter lintas sektor sebesar 0% . Hal ini terkendala akibat adanya 1 rekomendasi yang diberikan kepada GFK selaku lintas sektor, namun belum terdapat jawaban CAPA meskipun masih sesuai dengan timeline yang ditentukan.	Menerbitkan surat permintaan CAPA kedua kepada sarana GFK yang belum memberikan respon CAPA	Melakukan monitoring data sarana yang belum menjawab CAPA dan timeline maksimal jawaban capa dari sarana menggunakan inovasi AMOI CAKEP	Selesai	-	-	-	-	-
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Januari	Sampai dengan akhir tahun 2025, target IKU telah tercapai sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Seluruh target output juga telah terpenuhi, sehingga capaian IKU dinyatakan selesai.	-	-	-	-	-	-	-	-
		Februari	Tidak terdapat target pemeriksaan sarana produksi Sediaan Farmasi pada bulan Januari. Sesuai perencanaan, pemeriksaan sarana produksi Sediaan Farmasi (UKOT) akan dimulai pada bulan Februari	-	-	-	-	-	-	-	-
		Maret	Telah dilakukan pemeriksaan dan pemberian tindak lanjut sarana produksi sediaan farmasi (UKOT) terhadap 1 sarana dengan persentase 100% Tidak terdapat kendala dalam pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi bulan februari	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Januari	Sampai dengan akhir tahun 2025, target IKU telah tercapai sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Seluruh target output juga telah terpenuhi, sehingga capaian IKU dinyatakan selesai.	-	-	-	-	-	-	-	-
		Februari	Tidak terdapat target pemeriksaan sarana produksi Pangan Olahan pada bulan Januari. Sesuai perencanaan, pemeriksaan sarana produksi Pangan Olahan (MD) akan dimulai pada bulan Februari	-	-	-	-	-	-	-	-
		Maret	Telah dilakukan pemeriksaan dan pemberian tindak lanjut sarana produksi pangan olahan (MD) terhadap 2 sarana dengan persentase 100% Tidak terdapat kendala dalam pemeriksaan sarana produksi pangan olahan bulan februari	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Januari	Sampai dengan akhir tahun 2025, target IKU telah tercapai sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Seluruh target output juga telah terpenuhi, sehingga capaian IKU dinyatakan selesai.	-	-	-	-	-	-	-	-
		Februari	Pada bulan januari dilakukan pemeriksaan ke 3 sarana distribusi sediaan farmasi dengan rincian 1 PBF dan 2 Apotek. Realisasi sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada bulan januari sebesar 100% Tidak terdapat kendala dalam pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi bulan januari	-	-	-	-	-	-	-	-
		Maret	Pada bulan februari dilakukan pemeriksaan ke 7 sarana distribusi sediaan farmasi dengan rincian 1 IFK, 2 Klinik, 4 Apotek, 1 Sardist OBA dan 4 Sardist KOS. Realisasi sarana distribusi Sediaan Farmasi	1. Melakukan pemeriksaan kembali status pengiriman SIPT agar tidak melebihi tanggal 5 bulan berikutnya 2. Memberitahukan kepada kepala Balai untuk dapat	1. Melakukan pemeriksaan status pengiriman SIPT pemeriksaan sarana pelayanan kefarmasian dan distribusi obat setiap	Selesai	Telah dilakukan konfirmasi kembali via Whatsapp kepada kepala balai setiap selesai melakukan verifikasi laporan SIPT	March 2026	Ya	O-15	Data pemeriksaan distribusi Sediaan Farmasi yang diinput pada SIPT tidak sesuai dengan jumlah sarana yang ditelaah diawasi

No	Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sampai dengan bulan februari sebesar 98,33% Kendala : Terdapat 1 sarana (Apotek Bunda 1) yang dikirimkan via SIPT melebihi tanggal 5 Maret sehingga tidak bisa menjadi capaian bulan Februari (Capaian terhitung 9 sarana), sedangkan target pemeriksaan bulan februari yaitu 10 sarana	melakukan pengiriman SIPT, setelah laporan SIPT selesai diverifikasi oleh Ketua Tim	tanggal 4 bulan selanjutnya (agar tidak melebihi tanggal 5 bulan berikutnya) 2. Segera memberitahukan kepada kepala Balai untuk dapat melakukan pengiriman SIPT, setelah laporan SIPT selesai diverifikasi oleh Ketua Tim		(Terakhir pada 30 Maret 2026)				
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Januari	Sampai dengan akhir tahun 2025, target IKU telah tercapai sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Seluruh target output juga telah terpenuhi, sehingga capaian IKU dinyatakan selesai.	-	-		-	-		-	-
		Februari	Pada bulan januari dilakukan pemeriksaan ke 12 sarana distribusi Pangan Olahan dengan rincian 6 Sardist Pangan Modern dan 6 Sardist Pangan Tradisional. Realisasi sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada bulan januari sebesar 94.17%. Hal ini disebabkan adanya ketidaktepatan dalam memberikan tindak lanjut ke 1 Sardist Pangan Modern (Perihal surat TL yang dibuat yaitu "Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan", Seharusnya yaitu "Peringatan Keras" karena adanya Temuan Produk PIRT yang telah habis masa berlaku NIE nya)	Akan dilakukan verifikasi yang lebih detail terkait surat tindak lanjut yang akan dikirimkan ke sarana	Melakukan verifikasi kesesuaian TL saat akan melakukan verifikasi Surat TL di SRIKANDI dan verifikasi Surat TL sebelum dikirimkan melalui SIPT	Selesai	Telah dilakukan verifikasi kesesuaian TL Sarana Distribusi Pangan Olahan saat akan melakukan verifikasi Surat TL di SRIKANDI dan verifikasi Surat TL sebelum dikirimkan melalui SIPT sehingga tidak terjadi kekeliruan seperti pelaksanaan di bulan Januari	February 2026	Tidak	-	-
		Maret	Pada bulan februari dilakukan pemeriksaan ke 14 Sardist Pangan. Realisasi sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sampai dengan bulan februari sebesar 97.31% Tidak terdapat kendala dalam	Ketua tim agar segera menginfokan kepada kepala Balai untuk dapat melakukan pengiriman SIPT, setelah laporan SIPT selesai diverifikasi oleh Ketua Tim	Akan dilakukan konfirmasi kembali via Whatsapp kepada kepala balai setiap selesai melakukan verifikasi laporan SIPT	Selesai	Telah dilakukan konfirmasi kembali via Whatsapp kepada kepala balai setiap selesai melakukan verifikasi laporan SIPT (Terakhir pada 30 Maret 2026)	March 2026	Tidak	-	-

No	Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan bulan februari								
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Januari	Sampai dengan akhir tahun 2025 target dapat terpenuhi sesuai dengan yang telah direncanakan.	-	-	Selesai	-	-	Tidak	-	-
		Februari	Pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan bulan Januari telah dilaksanakan dengan realisasi 81,83,0 % Kendala: adanya keterlambatan pelaporan iklan ke operator pusat sehingga target tidak terpenuhi	Segera meneruskan laporan penandaan iklan dari supervisor ke Kepala Balai	Melakukan penarikan data di SIPT untuk setiap pelaporan iklan di setiap bulan agar dapat diverifikasi ketepatan waktu pengiriman dari balai ke operator pusat	Selesai	-	-	Tidak	-	-
		Maret	Pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan bulan Februari telah dilaksanakan dengan realisasi 92,23 %	Segera meneruskan laporan penandaan iklan dari supervisor ke Kepala Balai	Melakukan penarikan data di SIPT untuk setiap pelaporan iklan di setiap bulan agar dapat diverifikasi ketepatan waktu pengiriman dari balai ke operator pusat	Selesai	Telah dilakukan konfirmasi kepada kepala Balai setiap selesai verifikasi laporan iklan di SIPT	April	Tidak	-	-
12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	Januari	Capaian pengawasan label produk tembakau tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan	Capaian pengawasan label produk tembakau tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan	Melaksanakan pengawasan label tembakau sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat untuk memastikan target tercapai diakhir tahun	Selesai	Telah dilakukan konfirmasi kepada kepala Balai setiap selesai verifikasi laporan penandaan produk tembakau di SIPT	-	Tidak	-	-
		Februari	Pengawasan label tembakau pada bulan Januari telah dilaksanakan sesuai dengan target bulanan dengan realisasi 100%	Melakukan verifikasi data produk tembakau yang telah diawasi agar tidak melebihi tanggal yang telah ditetapkan di SIPT	Melakukan penarikan data di SIPT untuk setiap pelaporan di setiap bulan	Selesai	Telah dilakukan konfirmasi kepada kepala Balai setiap selesai verifikasi laporan penandaan produk tembakau di SIPT	-	Tidak	-	-
		Maret	Pengawasan label tembakau pada bulan Februari telah dilaksanakan sesuai dengan target bulanan dengan realisasi 100%	Melakukan verifikasi data produk tembakau yang telah diawasi agar tidak melebihi tanggal yang telah ditetapkan di SIPT	Melakukan penarikan data di SIPT untuk setiap pelaporan di setiap bulan	Selesai	Telah dilakukan konfirmasi kepada kepala Balai setiap selesai verifikasi laporan penandaan produk tembakau di SIPT	-	Tidak	-	-
13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Januari	Hingga saat ini, dari empat indikator pendukung tercapainya IKU AMR, telah terlaksana empat kegiatan, yaitu penggunaan tools pengawasan antibiotik di sarana apotek serta	Melakukan pelaporan dan publikasi di akhir Triwulan IV dari hasil pengawasan dengan Tools AMR	Melakukan pelaporan serta publikasi hasil pengawasan melalui Tools AMR pada akhir Triwulan IV.	Belum Selesai	Belum terdapat rekapitulasi hasil pengawasan Tools AMR selama tahun 2025 dari unit pengampu teknis	Maret	Tidak	-	-

No	Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			pelaksanaan advokasi kepada Dinas Kesehatan Kota, Bimtek kepada APJ dan PAS dan Publikasi Hasil pengawasan menggunakan tools AMR Sudah diterima hasil realisasi AMR dari direktorat pengawasan Distribusi ONPPZA dan realisasi telah mencapai target yang telah ditentukan.								
		Februari	Merupakan target tahunan. Pada bulan Januari telah digunakan Tools pemetaan penggunaan antibiotik terhadap 2 Sarana Apotek yang menjadi target pemeriksaan Belum terdapat kendala selama perencanaan bulan Januari	Melakukan perencanaan pelaksanaan setiap butir kegiatan yang menunjang IKU AMR	Mengidentifikasi Kabupaten yang akan menjadi target intervensi	Selesai	Kabupaten yang menjadi target intervensi yaitu Kab. Bangka Tengah, Kab. Bangka Selatan dan Kab. Bangka	Februari	Tidak	-	-
		Maret	Merupakan target tahunan. Hingga bulan Februari telah digunakan Tools pemetaan penggunaan antibiotik terhadap 6 Sarana Apotek yang menjadi target pemeriksaan. Telah dilakukan identifikasi kabupaten yang akan dilakukan intervensi yaitu Kab. Bangka Tengah dan Kab. Bangka Selatan Belum terdapat kendala selama perencanaan bulan Februari	Melakukan koordinasi terkait pelaksanaan Bimtek AMR dan Join Inspection ke Dinas Kesehatan Kabupaten yang menjadi target	Melaksanakan rapat koordinasi pelaksanaan Bimtek AMR dan Join Inspection dengan Dinkes Kab. Bangka Tengah dan Dinkes Kab. Bangka Selatan yang memperoleh DAK Pengawasan Saryanfar 2026	Selesai	Telah dilaksanakan rapat koordinasi pelaksanaan Bimtek AMR dan Join Inspection dengan Dinkes Kab. Bangka Tengah dan Dinkes Kab. Bangka Selatan pada 2 Maret 2026. Pelaksanaan Bimtek AMR dan Join Inspection dijadwalkan pada TW III dan TW IV	Maret	Tidak	-	-
14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Januari	Pemenuhan target TW IV dicapai melalui kegiatan : 1. Penambahan SRL sebanyak 3 RL di Laboratorium OBASKOK, 4 RL di Laboratorium Pangan (82,9) 2. Peningkatan kompetensi sesuai dengan penambahan SRL di Laboratorium OBASKOK dan Laboratorium Pangan, dan tidak menambah nilai kompetensi (80) 3. Penambahan masing-masing 1 MA Terverifikasi di Laboratorium Obat, Laboratorium OBASKOK dan	Monitoring dan evaluasi pengecekan antara alat	Memasukkan kalibrasi mikropipet ke dalam perencanaan kalibrasi tahun 2026.	Selesai	Kalibrasi mikropipet sudah dimasukkan ke dalam perencanaan kalibrasi tahun 2026.	-	Tidak	-	-

No	Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			Laboratorium Kosmetik, dan masing-masing 2 MA Terverifikasi di Laboratorium Pangan dan Laboratorium Mikrobiologi (34) 4. Tidak ada penambahan Peralatan. Pengadaan alat tahun 2025 sudah selesai di TW II (86,7).								
		Februari	1. Standar kompetensi Lab Kosmetik yang direncanakan mencapai 100% di TW 1 2026 tidak terpenuhi karena adanya mutasi pegawai a.n Silvia Anggraini yang menyebabkan jumlah Aspek 1 turun dari 113 menjadi 112 dan Aspek 2 turun dari 112 menjadi 104. 2. Standar kompetensi Aspek 2 Lab OBASKOK turun dari 125 menjadi 116 karena adanya analisis yang tubel a.n Atika Melati dan rotasi pegawai a.n Septo Dwi Yan Purnomo. 3. Penurunan standar kompetensi Aspek 1 di Lab Kosmetik menyebabkan perubahan nilai real SKL dari 78,2 menjadi 76,2. Aspek 1 direncanakan terpenuhi di TW 1 2026. 4. Rencana pemenuhan SKL 2026 di masing-masing lab telah disusun. Target yang direncanakan untuk TW 1, 2, 3 dan 4 masing-masing adalah 78,2; 78,4; 78,5; 78,6.	Lakukan perubahan target sesuai perencanaan yang telah disusun.	Melakukan perubahan target IKU "Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium" tahun 2026 dari 77 menjadi 78,6.	Selesai	Sudah dilakukan perubahan target IKU "Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium" tahun 2026 dari 77 menjadi 78,6.	-	Ya	SDM-18	Laboratorium kehilangan personel kompeten.
		Maret	Pengisian tools SKL tw 1 dilakukan pada bulan maret	Lakukan monitoring pengisian tools SKL sesuai arahan PPOMN.	Melakukan pengisian dan monitoring tools SKL PPOMN.	Selesai	Sudah dilakukan pengisian dan monitoring tools SKL PPOMN.	-	Tidak	-	-
15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	Januari	Hasil Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman sebesar 20% dengan target 20% sehingga didapatkan capaian sebesar 100%. Kota Pangkal Pinang merupakan Kab/Kota yang didampingi Tahun 2025, namun	Untuk Target 2026 akan memanfaatkan hasil penilaian di tahun 2025	Hasil penilaian tahun 2025 dimanfaatkan untuk memilih target tahun 2026	Selesai	-	-	Ya	S-06, S-07	1. Kabupaten/Kota yang dilakukan pendampingan tidak mengisi tools penilaian dan Data Dukung KKPA 2. Kabupaten/Kota yang dilakukan

No	Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			demikian yang menjadi catatan adalah Kota Pangkal Pinang yang dilakukan pendampingan nilainya turun cukup besar sehingga untuk tahun selanjutnya akan menjadi perhatian								pendampingan tidak mengisi tools penilaian dan Data Dukung KKPA
		Februari	Belum terdapat kendala merupakan Target Tahunan proses pendampingan akan mulai dilaksanakan segera setelah perencanaan kegiatan selesai di buat	Segera menyusun perencanaan Kegiatan Pendampingan KKPA	Menyusun perencanaan kegiatan pendampingan KKPA sesuai juknis	Belum Selesai	Saat ini dokumen rencana kegiatan dalam tahapan proses penyusunan	April	Ya	S-06, S-07	1. Kabupaten/Kota yang dilakukan pendampingan tidak mengisi tools penilaian dan Data Dukung KKPA 2. Kabupaten/Kota yang dilakukan pendampingan tidak mengisi tools penilaian dan Data Dukung KKPA
		Maret	Belum terdapat kendala merupakan Target Tahunan proses pendampingan akan mulai dilaksanakan segera setelah perencanaan kegiatan selesai di buat	Segera menyusun perencanaan Kegiatan Pendampingan KKPA	Menyusun perencanaan kegiatan pendampingan KKPA sesuai juknis	Belum Selesai	Saat ini dokumen rencana kegiatan dalam tahapan proses penyusunan	April	Ya	S-06, S-07	1. Kabupaten/Kota yang dilakukan pendampingan tidak mengisi tools penilaian dan Data Dukung KKPA 2. Kabupaten/Kota yang dilakukan pendampingan tidak mengisi tools penilaian dan Data Dukung KKPA
16	Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Januari	-	-	-						
		Februari	Belum ada manual IKU untuk indikator ini. Upaya yang telah dilakukan adalah mengikuti desk penentuan target sampel dan pengusulan alat ke BGN	0	0						
		Maret	0	0	0						
16	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Januari	Survei Tingkat Efektifitas KIE telah dilaksanakan kepada peserta KIE secara Luring maupun melalui Media dengan telah memenuhi syarat minimal yang telah ditentukan oleh Unit Pengampu dengan Target 85,99, Realisasi 86,51 dengan Capaian 100,60%	Memastikan Kelengkapan Laporan Publikasi Tahun 2025	Laporan publikasi Tahun 2025 Lengkap dan telah diverifikasi	Selesai	-	-	Ya	O-23, F-14	1. Peserta mengalami kesulitan dalam mengisi survei tingkat efektifitas KIE 2. Peserta menandatangani kuitansi pertanggungjawaban

No	Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
											kegiatan KIE yang belum ada nominalnya
		Februari	Belum terdapat kendala, Kegiatan KIE belum dilaksanakan pada bulan Januari	Segera menyusun perencanaan Kegiatan KIE	Menyusun perencanaan kegiatan KIE sesuai juknis	Belum Selesai	Saat ini perencanaan kegiatan KIE masih dalam tahap penyusunan sambil menunggu kepastian jumlah target output sasaran.	Maret	Tidak	-	-
		Maret	Capaian Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT masih terkendala belum pastinya jumlah target output sasaran serta keterbatasan anggaran. Kondisi ini menyebabkan cakupan sasaran menjadi terbatas dan pemilihan target KIE belum dapat dilakukan secara optimal.	1. Menetapkan target output KIE sasaran secara jelas dengan mengkoordinasikan ke Biro Perencanaan dan Unit Pengampu, 2. Melakukan prioritas KIE berbasis risiko serta, 3. Mengoptimalkan metode KIE yang efisien sesuai ketersediaan anggaran.	1. Melakukan penetapan dan finalisasi target sasaran KIE, 2. Menyusun prioritas berbasis risiko, serta 3. menyesuaikan metode dan jadwal KIE dengan anggaran yang tersedia.	Belum Selesai	Penetapan target masih menunggu keputusan dari BAPENAS sehingga penyusunan prioritas maupun metode KIE menunggu terbitnya keputusan resmi mengenai target	April	Tidak	-	-
17	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Januari	Seluruh tahapan Program telah selesai dilaksanakan dengan 7 (Tujuh) Sekolah mendapatkan Sertifikat Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan dengan Capaian 100% Adapun Realisasi merupakan tahapan progres yang sudah dilakukan yaitu : 1. Rapat Advokasi Lintas Sektor yang sudah dilaksanakan pada tanggal 22 April 2025 dengan bobot 25% 2. Sosialisasi Keamanan Pangan Batch 1 kepada 13 Sekolah pada tanggal 6 Mei 2025 dengan bobot 10% 3. Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah Batch 1 sebanyak 3 Sekolah pada tanggal 16 Mei 2025 dengan bobot 12,5% 4. Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan Batch 1 kepada	Seluruh tahapan kegiatan sudah selesai dilaksanakan untuk selanjutnya memastikan semua sudah dilaporkan di aplikasi SIAP SAPA	Melaksanakan dan memastikan semua pelaporan sudah lengkap di Aplikasi SIAP SAPA	Selesai	-	-	Ya	O-25, O-26, F-15	1. Pengawasan Sekolah tidak dilaksanakan oleh Sekolah yang sudah diintervensi oleh BPOM di Pangkal Pinang 2. Kader tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan Petunjuk Teknis 3. Peserta menandatangani kuitansi pertanggungjawaban kegiatan program sekolah yang belum ada nominalnya

No	Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			3 Sekolah pada tanggal 22 - 24 Juli 2025 dengan bobot 12,5% 5. Sosialisasi Keamanan Pangan Batch 2 kepada 4 Sekolah pada tanggal 4 September 2025 dengan bobot 10% 6. Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah Batch 1 sebanyak 4 Sekolah pada tanggal 11 September 2025 dengan bobot 12,5% 7. Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan Batch 2 kepada 4 Sekolah pada tanggal 4 - 7 November 2025 dengan bobot 12,5% 8. Pengawasan terhadap 12 Sekolah yang diintervensi Tahun 2024 dengan bobot 5%								
		Februari	Belum terdapat kendala, Kegiatan belum dilaksanakan, Proses Intervensi sekolah akan mulai dilaksanakan segera setelah perencanaan kegiatan selesai di buat	Segera menyusun perencanaan Kegiatan Intervensi Sekolah	Menyusun perencanaan kegiatan Intervensi Sekolah sesuai juknis	Belum Selesai	Saat ini perencanaan kegiatan Intervensi Keamanan Pangan Sekolah masih dalam tahap penyusunan sambil menunggu kepastian jumlah target output sasaran.	Maret	Tidak	-	-
		Maret	Pencapaian indikator jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan masih menghadapi kendala, antara lain belum pastinya penetapan sekolah sasaran serta keterbatasan anggaran untuk mendukung kegiatan pendampingan dan monitoring. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya cakupan sekolah yang dapat diintervensi dan dibina secara berkelanjutan.	1. Mengkoordinasikan penetapan jumlah target sekolah sasaran secara lebih awal dengan berkoordinasi dengan unit pengampu dan Roren 2. Mengoptimalkan pendampingan melalui kolaborasi dengan Dinas Pendidikan guna memperluas cakupan pembudayaan keamanan pangan sesuai ketersediaan anggaran.	Melakukan koordinasi penetapan target sekolah serta menyusun pendampingan kolaboratif dengan Dinas Pendidikan guna memperluas pembudayaan keamanan pangan.	Belum Selesai	Penetapan target masih menunggu keputusan dari BAPENAS sehingga penyusunan prioritas maupun metode KIE menunggu terbitnya keputusan resmi mengenai target	April	Tidak	-	-
18	Jumlah desa pangan aman	Januari	Kegiatan Desa Pangan Aman sudah selesai dilaksanakan di 3 (Tiga) yang telah diintervensi dan dinyatakan	Seluruh tahapan Program Desa Pangan Aman sudah selesai dilaksanakan, untuk selanjutnya	Seluruh Laporan sudah diinput di Aplikasi GKPD Online	Selesai	-	-	Ya	SDM-04, F-16	1. Program Keamanan Pangan desa tidak dilanjutkan secara

No	Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			Desa Pangan Aman yaitu Desa Rias, Desa Gadung dan Desa Serdang dengan Capaian 100% Adapun Realisasi merupakan tahapan progres yang sudah dilakukan yaitu : 1. Rapat Advokasi Lintas Sektor yang sudah dilaksanakan pada tanggal 22 April 2025 dengan bobot 25% 2. Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa Batch 1 pada tanggal 23 April 2025 kepada 2 (Dua) Desa yang diintervensi dengan bobot 12,5% 3. Bimbingan Teknis Komunitas Desa pada Batch 1 tanggal 27 - 28 Mei 2025 kepada 2 (Dua) Desa yang diintervensi dengan bobot 10% 4. Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa Batch 2 pada tanggal 21 Agustus 2025 kepada 1 (Satu) Desa Serdang yang diintervensi dengan bobot 12,5% 5. Bimbingan Teknis Komunitas Desa pada Batch 2 tanggal 18 September 2025 kepada Desa yang diintervensi dengan bobot 10% 6. Rapat Monitoring dan Evaluasi Program Nasional Keamanan Pangan Terpadu pada tanggal 24 November 2025 dengan bobot 20% 7. Pengawalan kepada 7 (Tujuh) Desa/Kelurahan yang diintervensi Tahun 2024 dengan bobot 10%	memastikan seluruhnya dilaporkan di Aplikasi GKPD online							mandiri oleh desa yang telah diintervensi 2. Peserta menandatangani kuitansi pertanggungjawaban program desa pangan aman yang belum ada nominalnya
		Februari	Belum terdapat kendala ,Kegiatan belum dilaksanakan, Proses Intervensi desa akan mulai dilaksanakan segera setelah perencanaan kegiatan selesai di buat	Segera menyusun perencanaan Kegiatan Intervensi Desa	Menyusun perencanaan kegiatan Intervensi Desa sesuai juknis	Belum Selesai	Saat ini perencanaan kegiatan Intervensi Desa pangan aman masih dalam tahap penyusunan sambil menunggu kepastian jumlah target output sasaran.	Maret	Tidak	-	-
		Maret	Pencapaian indikator jumlah Desa Pangan Aman masih menghadapi	1. Mengkoordinasikan penetapan jumlah target desa	1. Menyampaikan usulan dan melakukan	Belum Selesai	Penetapan target masih menunggu keputusan	April	Tidak	-	-

No	Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			kendala, antara lain belum pastinya penetapan jumlah desa sasaran serta keterbatasan anggaran untuk mendukung kegiatan pembinaan, monitoring, dan evaluasi. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya cakupan desa yang dapat diintervensi dan dibina secara berkelanjutan sesuai standar program Desa Pangan Aman.	sasaran secara lebih awal kepada unit pengampu dan Biro perencanaan 2. Melakukan penyesuaian perencanaan kegiatan sesuai ketersediaan anggaran dengan memperkuat dukungan lintas sektor.	koordinasi resmi dengan unit pengampu dan Biro Perencanaan untuk finalisasi serta pengesahan jumlah desa sasaran. 2. Menyusun revisi rencana kerja dan jadwal kegiatan berdasarkan pagu anggaran yang tersedia, serta mengintensifkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan lintas sektor guna mendukung pelaksanaan program.		dari BAPENAS sehingga penyusunan prioritas maupun metode KIE menunggu terbitnya keputusan resmi mengenai target				
19	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Januari	Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas sudah selesai dilaksanakan dengan hasil Pasar Pelataran Parkir Terminal Toboali menjadi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dengan Capaian 100% Realisasi merupakan tahapan progres yang sudah dilakukan yaitu : 1. Rapat Advokasi Lintas Sektor yang sudah dilaksanakan pada tanggal 22 April 2025 dengan bobot 25% 2. Bimbingan Teknis dan Penyuluhan Komunitas Pasar telah dilaksanakan pada tanggal 03 Juni 2025 dengan bobot 25% 3. Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar telah dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2025 dengan bobot 20% 4. Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring Evaluasi telah dilaksanakan dengan bobot 20% 5. Pengawalan kepada Pasar yang sudah diintervensi pada tahun 2024	Seluruh tahapan Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas sudah selesai dilaksanakan, untuk selanjutnya memastikan seluruhnya dilaporkan di Aplikasi SIPAMAN	Seluruh Laporan sudah diinput di Aplikasi SIPAMAN	Selesai	-	-	Ya	F-17, O-56	1. Peserta menandatangani kuitansi pertanggungjawaban kegiatan program pasar pangan aman yang belum ada nominalnya 2. Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas tidak dilanjutkan oleh Pemerintah Daerah

No	Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			telah dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2025 di Kabupaten Belitung Timur dan tanggal 17 Juni 2025 di Kota Pangkal Pinang dengan bobot 10%								
		Februari	Belum terdapat kendala, Kegiatan belum dilaksanakan, Proses Intervensi pasar akan mulai dilaksanakan segera setelah perencanaan kegiatan selesai di buat	Segera menyusun perencanaan Kegiatan Intervensi Pasar	Menyusun perencanaan kegiatan Intervensi Pasar sesuai juknis	Selesai	-	-	Tidak	-	-
		Maret	Pencapaian indikator jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas masih menghadapi kendala karena penetapan target desa dan sekolah belum dilakukan. Sementara itu, pelaksanaan kegiatan Pasar Pangan Aman perlu dilaksanakan secara bersamaan dan terintegrasi dengan intervensi di desa dan sekolah. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan kegiatan belum dapat berjalan sesuai rencana.	Melakukan koordinasi dengan unit pengampu dan Biro Perencanaan (Roren) untuk percepatan penetapan target sekolah dan desa, sehingga pelaksanaan intervensi di pasar dapat segera dilaksanakan.	Melakukan koordinasi dan percepatan finalisasi target sekolah dan desa sebagai dasar penyusunan jadwal intervensi pasar.	Belum Selesai	Penetapan target masih menunggu keputusan dari BAPENAS sehingga penyusunan prioritas maupun metode KIE menunggu terbitnya keputusan resmi mengenai target	April	Tidak	-	-
20	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	Januari	Tahapan pendampingan UMKM untuk tahun 2025 telah selesai dilaksanakan dengan diterbitkannya 8 IP CPPOB. Capaian untuk tahun 2025 telah melampaui target tahunan yaitu 16,67. Berdasarkan renstra, target pendampingan pada tahun 2025 adalah sebanyak 7 sarana, namun target IKU yang ditetapkan sebanyak 8 sarana sehingga terdapat kelebihan 1 sarana. Target 8 sarana menyesuaikan dengan target output yang telah ditetapkan sebelumnya.	Menyesuaikan target IKU dengan target yang terdapat pada renstra untuk tahun 2026	Target IKU melebihi target Renstra namun sesuai dengan target DIPA yang telah ditetapkan	Selesai	Penyesuaian target IKU belum dietujui sehingga target Indikator kembali ke target awal. Perubahan terhadap target IKU menunggu keputusan revisi target	-	Tidak	-	
		Februari	Terdapat perubahan tahapan dalam pendampingan UMKM pangan olahan yang sehingga masih menunggu revisi pedoman tahapan	Setiap tahapan dalam proses pendampingan dilakukan sesuai dengan pedoman yang berlaku dan dalam setiap tahapan dilakukan pendokumentasian	Pengumpulan data UMKM yang akan dilakukan seleksi melalui verifikasi data yang telah	Selesai	Telah dilakukan dokumentasi setiap proses pendampingan kepada pelaku usaha untuk mendukung	Februari	Tidak	-	

No	Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			pendampingan sesuai dengan Kepka BPOM yang terbaru Upaya: Telah dilakukan permintaan data UMKM melalui lintas sektor dan pendataan UMKM melalui inovasi UMKM PACAK	untuk mendukung program kerja Zona Integritas mencapai WBBM	disampaikan disertai dengan dokumentasi		program kerja Zona Integritas				
		Maret	- Telah dilakukan pengumpulan data pelaku usaha UMKM melalui rekomendasi lintas sektor dan juga melalui inovasi UMKM Pacak yang selanjutnya akan dijadikan database UMKM - Telah dilakukan Sosialisasi Keamanan Pangan kepada Pelaku Usaha yang termasuk kedalam database	Seleksi UMKM yang akan ditetapkan sebagai target pendampingan melalui hasil KIE Keamanan Pangan	Melakukan GAP Asesment terhadap Pelaku usaha UMKM yang telah mengikuti KIE untuk selanjutnya dilakukan verifikasi sebelum ditetapkan sebagai target pendampingan	Selesai	GAP asesmen verifikasi sarana yang akan ditetapkan sebagai target pendampingan terkendala oleh waktu pelaksanaan dikarenakan UMKM sedang tidak dapat dikunjungi	April	Tidak	-	
21	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Januari	Realisasi s.d Desember/ Tahunan sebesar 92,5 dengan Capaian terhadap Target sebesar 102,78. Realisasi dan Capaian ini didapatkan dari : 1. Perkara LK nomor LK/01-25/BPOM-PPNS.7B/V/2025 dengan Tahapan : Tahap 2 tanggal 9 Oktober (50%) 2. Perkara LK nomor LK/02-25/BPOM-PPNS.7B/IX/2025 dengan tahapan : P21 tanggal 22 Desember (42,5%) Hal ini menyebabkan carry over pada tahap Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti di tahun 2026	Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti dilaksanakan pada bulan Januari 2026	Dilakukan penyerahan Tersangka dan Barang Bukti pad bulan Januari 2025	Belum Selesai	Belum dilaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap 2). dalam melaksanakan tindak lanjut tersebut PPNS telah melakukan Koordinasi dengan JPU terkait Jadwal Tahap 2 yang akan dilaksanakan bulan Februari	Februari	Tidak	-	belum dilaksanakan Tahap 2 di bulan januari
		Februari	Target Capaian Perkara pada tahun 2026 adalah sebanyak 2 perkara 2026 dan 1 perkara carry over 2025 belum ada progress capaian perkara (perkara carry over) dengan tahapan terakhir adalah P-21 Kendala: belum tersedianya jadwal Tahap 2 atas perkara LK/02-25 karena JPU masih fokus terhadap penyesuaian penerapan KUHAP baru	Koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum terkait jadwal pelaksanaan Tahap 2	Melakukan koordinasi dengan JPU, yang direncanakan Pelaksanaan Tahap 2 pada tanggal 5 Februari 2026	Selesai	-	-	Ya	SDM-05 O-29	Jumlah Fisik Barang Bukti berbeda jumlah dengan Jumlah Barang Bukti di Berita Acara Penyitaan Adanya celah perbedaan pemahaman terkait unsur tindak pidana Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar oleh Jaksa Penuntut Umum

No	Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		Maret	1. Penyerahan Tersangka a.n H dan Barang Bukti (Tahap 2) ke Kejaksaan Tinggi Kep. Bangka Belitung dengan nomor Surat B-PD.03.03.7B.02.26.138 tanggal 3 Februari 2026 yang dilaksanakan pada tanggal 5 Februari 2026 2. Untuk pemenuhan target perkara pada tahun 2026 telah dilakukan Kegiatan Intelijen pada tanggal 10,11,24,25 Februari 2026 dengan menghasilkan 3 Laporan Informasi. dari 3 Laporan Informasi tersebut masih dibutuhkan pendalaman untuk bisa dinaikkan ke Proses Pro Justicia 3. Pada bulan Februari dilakukan pemotongan anggaran QCD sebesar Rp. 22.008.000 berdasar Surat Sestama nomor PR.05.03.2.02.26.132 tanggal 20 Februari 2026. sehingga dilakukan revisi anggaran (revisi4) terkait revisi target Output (dari 2 perkara menjadi 1 perkara) dan anggaran perjadi di kegiatan Forkom PPNS dan Diklat PPNS Kendala : Sebagai efek anggaran AEA sangat terbatas yaitu sebesar Rp. 5.230.000 yang seharusnya di dalamnya ada anggaran Kegiatan Terpadu sehingga Kegiatan Terpadu diakomodasikan ke anggaran QCD yaitu Forkom PPNS dan Diklat Pembentukan PPNS	1. Memantau dan mengikuti update persidangan TSK H 2. dalam penggunaan anggaran supaya efektif dan efisien maka dilakukan pendalaman informasi terhadap target-target potensial untuk dijadikan target perkara	1. menghadirkan saksi-saksi petugas dalam persidangan dan update tahapdan persidangan melalui sippn 2. melakukan kegiatan intelijen terhadap target-target potensial	Belum Selesai	1. Persidangan TSK H Sudah keluar vonis dengan pidana denda Rp. 2.000.000 2. Sampai dengan bulan Maret masih dilakukan pendalaman informasi terhadap target-target potensial untuk dijadikan target perkara	Juni	Ya	K3-02 O-30 O-57	Keselamatan Petugas terancam saat melakukan Kegiatan dan Operasi Intelijen Bocornya Informasi Kejahatan Obat dan Makanan Informasi pada kegiatan atau operasi intelijen tidak bisa dijadikan sumber informasi awal
22	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Januari	Target Indikator Kinerja tercapai	1. Peta Kerawanan Kejahatan tahun 2025 dapat dimanfaatkan sebagai peta profil wilayah yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan teknis pengawasan, penindakan, pemberdayaan masyarakat,	1. Akan dilakukan pemanfaatan Peta Kerawanan Kejahatan oleh fungsi terkait 2. Akan dilakukan Monitoring terhadap	Selesai	-	-	Ya	SDM-16 O-68 O-69	Data Kerawanan Kejahatan tidak menggambarkan peta profil sebenarnya Pemanfaatan data kerawanan kejahatan

No	Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
				bimbingan teknis kepada pelaku usaha, 2. Rekomendasi analisis dan kegiatan penggalangan dapat ditindaklanjuti dengan kegiatan dukungan pengawasan Obat dan Makanan.	Rekomendasi Analisis yang ditindaklanjuti fungsi terkait						tidak digunakan dalam kegiatan teknis pengawasan, penindakan, pemberdayaan masyarakat dan sinergisme dengan pemangku kepentingan rekomendasi hasil analisis kejahatan tidak ditindaklanjuti
		Februari	Dalam mendukung tercapainya IKU ini telah dilakukan: 1. Pelaporan Laporan Penjejak Digital yaitu Laporan Patroli Siber dan Laporan Profiling Siber bulan Januari secara tepat waktu 2. Laporan Patroli Siber terdiri dari 20 (dua puluh) link yang direkomendasikan takedown 3. Laporan Profiling NIHIL telah dilaporkan pada tanggal 23 Januari 2026 4. Pada bulan Januari dilakukan update rawan kasus dari hasil kegiatan intelijen sebanyak 5 (lima) data.	Melaporkan Laporan Penjejak Digital dan Kerawanan Kejahatan secara tepat waktu	Melaporkan Laporan Penjejak Digital secara tepat waktu	Selesai	1. Pelaporan Laporan Penjejak Digital yaitu Laporan Patroli Siber dan Laporan Profiling Siber bulan Februari secara tepat waktu (a) Laporan Patroli Siber terdiri dari 19 (sembilan belas) link yang direkomendasikan takedown (b) Laporan Profiling bulan Februari telah dilaporkan melalui Aplikasi Dashboard Penindakan secara tepat waktu pada tanggal 23 Januari 2026 (c) Hasil Monitoring Rekomendasi takedown bulan Januari, sebanyak 14 link dari 20 link telah ditakedown (70%) 2. Telah dilaksanakan Update Kerawanan Kejahatan pada bulan Februari melalui ADP dengan jumlah 11 (sebelas) data	-	Ya	SDM-16 O-68 O-69	Data Kerawanan Kejahatan tidak menggambarkan peta profil sebenarnya Pemanfaatan data kerawanan kejahatan tidak digunakan dalam kegiatan teknis pengawasan, penindakan, pemberdayaan masyarakat dan sinergisme dengan pemangku kepentingan rekomendasi hasil analisis kejahatan tidak ditindaklanjuti
		Maret	Dalam mendukung tercapainya IKU ini telah dilakukan: 1. Pelaporan Laporan Penjejak	1. Dalam penyusunan Laporan Profiling Siber di saat ketersediaan anggaran yang	1. Laporan Profiling Siber memanfaatkan Open Source Intelligence	Selesai	1. Telah dilaporkan Profiling Siber dengan tidak menggunakan	-	Ya	SDM-16 O-68	Data Kerawanan Kejahatan tidak menggambarkan peta

No	Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			Digital yaitu Laporan Patroli Siber dan Laporan Profiling Siber bulan Februari secara tepat waktu (a) Laporan Patroli Siber terdiri dari 19 (sembilan belas) link yang direkomendasikan takedown (b) Laporan Profiling bulan Februari telah dilaporkan melalui Aplikasi Dashboard Penindakan secara tepat waktu pada tanggal 23 Januari 2026 (c) Hasil Monitoring Rekomendasi takedown bulan Januari, sebanyak 14 link dari 20 link telah ditakedown (70%) 2. Tindak Lanjut atas Rekomendasi yang diberikan (a) Dari Analisis Kejahatan yang disusun UPT tentang Obat Setelan terdapat 5 Rekomendasi yang harus di TL oleh lintas fungsi terkait. Monitoring TL s.d Februari telah dilakukan terhadap 5 Rekomendasi (b) Analisis Kejahatan dari Dit CT belum tersedia di TW I 3. Analisis Kerawanan Kejahatan Telah dilaksanakan Update Kerawanan Kejahatan pada bulan Februari melalui ADP dengan jumlah 11 (sebelas) data Kendala : 1. Tindak Lanjut atas Rekomendasi yang lintas fungsi belum dilakukan secara komprehensif 2. Anggaran AEA yang sangat terbatas sehingga pelaporan Profiling Siber tidak dilakukan verifikasi lapangan	minim, diharap bisa memanfaatkan Open Source Intelligence Platform 2. Perlu dibuatkan tools dalam rangka monitoring TL Rekomendasi dan pemanfaatan Data Kerawanan yang melibatkan lintas fungsi sehingga Data Kerawanan bisa mendukung kegiatan teknis pengawasan, penindakan, pemberdayaan masyarakat, bimbingan teknis kepada pelaku usaha, sinergisme dengan pemangku kepentingan	Platform atau melaporkan NIHIL apabila informasi terbatas 2. membuat tools yang bisa diakses lintas fungsi untuk memonitoring TL Rekomendasi dan pemanfaatan data kerawanan		anggaran verifikasi hasil patroli siber 2. Telah dibuat tools pemanfaatan data kerawanan dan monitoring TL Rekomendasi di datakerawanan.bpomp.p.info			O-69	profil sebenarnya Pemanfaatan data kerawanan kejahatan tidak digunakan dalam kegiatan teknis pengawasan, penindakan, pemberdayaan masyarakat dan sinergisme dengan pemangku kepentingan rekomendasi hasil analisis kejahatan tidak ditindaklanjuti
23	Indeks Pelayanan Publik UPT	Januari	Hasil penilaian BPOM di Pangkal Pinang mendapatkan Nilai Indeks Pelayanan Publik sebesar 4,84 dengan Capaian 102,98%	1. Melakukan tindakanlanjut RTL SKM secepatnya pada aplikasi SAPAAPIP, atau melaksanakan SKM Mandiri	Setelah melakukan penandatanganan Berita Acara hasil PEKPPP (Pemantauan dan Evaluasi Kinerja	Selesai	-	-	Ya	O-33. R-01, IT-01	1. Tidak terpenuhinya data dukung sesuai dengan tools penilaian 2. Masyarakat tidak

No	Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
				yang RTL nya ditindaklanjuti satu bulan setelah laporan SKM Mandiri terbiat 2. Memaksimalkan pelayanan dengan jam layanan yang memudahkan pengguna layanan (layanan tanpa jeda, layanan diluar hari kerja pada kondisi tertentu, dan layanan 24 jam) 3. Agar dapat ditambahkan: a. Layanan bantuan tuna rungu, seperti hearing aid, aplikasi penerjemah hear me, papan tulis, dll b. Menyertakan petugas layanan untuk mengikuti pelatihan bahasa isyarat	Penyelenggaraan Pelayanan Publik) maka akan menindaklanjuti saran dan masukan untuk perbaikan nilai di tahun 2026 dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia						menggunakan layanan publik yang disediakan BPOM di Pangkalpinang 3. Masyarakat tidak dapat mengakses sistem informasi layanan publik
			Jumlah sampel pihak ketiga pangan yang selesai diuji dan dilaporkan tepat waktu sampai dengan Desember 2025 adalah 45 sampel (100%)	-	-	Selesai	-	-	Ya	SDM-17	Kesalahan dalam melakukan pengujian sampel
			jumlah sampel pihak ketiga Obat Nappza dan Pangan yang sudah selesai uji s.d Desember 2025 : 420 sampel, semua sampel sudah selesai uji tepat waktu (100%)	-	-	Selesai			Ya		
			Sampai dengan Desember terdapat 16 permohonan sertifikasi, terdiri dari 6 Sertifikasi CDOB, 9 Sertifikasi CPPOB. dan 1 Rekomendasi Notifikasi Kosmetik. Rekomendasi sertifikasi yang telah diterbitkan: 6 sertifikat CDOB, 9 sertifikat IP CPPOB dan 1 Notifikasi Kosmetik	-	-	Selesai					
		Februari	Belum terdapat kendala, Merupakan Indikator target tahunan	1. Perlu dilakukan pemeliharaan dan perbaikan secara berkala terhadap sarana dan prasarana	1. Melakukan pemeliharaan Sarana Prasarana layanan publik	Belum Selesai	Pemeliharaan sarana pelayanan publik dilaksanakan secara	Juni	Tidak	-	-

No	Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
				layanan publik guna memastikan fasilitas pelayanan tetap berfungsi dengan baik dan mendukung kenyamanan masyarakat. 2. Perlu dilakukan persiapan dalam rangka pelaksanaan pengukuran Indeks Pelayanan Publik (IPP), termasuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana pelayanan publik agar pelaksanaan penilaian dapat berjalan optimal.	2. Menunggu pelaksanaan dimulainya pengukuran Indeks Pelayanan Publik dan melakukan pemeliharaan Sarana Prasarana Pelayanan Publik		berkala sepanjang tahun guna menjaga kelayakan dan keberfungsian sarana.				
			Realisasi : Pada bulan Januari terdapat 1 sampel pihak ketiga pangan yang telah diuji dan dilaporkan tepat waktu Kendala : Tidak terdapat kendala yang mengganggu pelaksanaan pengujian sampel pihak ketiga Capaian terhadap target : Belum dapat dihitung karena berasal dari berbagai faktor dan merupakan target tahunan Upaya yang telah dilakukan : Melakukan identifikasi kebutuhan pengujian sampel pihak ketiga	Identifikasi terhadap kebutuhan pengujian pihak ketiga	Melakukan identifikasi kebutuhan pengujian sampel pihak ketiga	Selesai	Telah dilakukan identifikasi kebutuhan pengujian sampel pihak ketiga pangan	Februari	Ya	SDM-17	Kesalahan dalam melakukan pengujian sampel
			Sampel pihak ketiga obat nappza : 20 Sampel dikerjakan sesuai timeline yang telah ditetapkan	Agar dilakukan monitoring dan evaluasi timeline sampel pihak ketiga	Dilakukan monitoring dan evaluasi secara konsisten	Selesai	Tlah dilakukan monitoring dan evaluasi secara konsisten	Februari	Ya	SDM-20 R-02	- Pengujian sampel pihak ketiga Nappza melewati timeline yang ditetapkan - Pelanggan tidak puas dengan layanan pengujian sampel narkotika
			Pada bulan Januari terdapat permohonan 2 sertifikasi CDOB yang telah diselesaikan tepat waktu	-	-	Selesai					

No	Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		Maret	Belum terdapat kendala, Merupakan Indikator target tahunan	1. Perlu dilakukan pemeliharaan dan perbaikan secara berkala terhadap sarana dan prasarana layanan publik guna memastikan fasilitas pelayanan tetap berfungsi dengan baik dan mendukung kenyamanan masyarakat. 2. Perlu dilakukan persiapan dalam rangka pelaksanaan pengukuran Indeks Pelayanan Publik (IPP), termasuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana pelayanan publik agar pelaksanaan penilaian dapat berjalan optimal.	1. Melakukan pemeliharaan Sarana Prasarana layanan publik 2. Menunggu pelaksanaan dimulainya pengukuran Indeks Pelayanan Publik dan melakukan pemeliharaan Sarana Prasarana Pelayanan Publik	Belum Selesai	Pemeliharaan sarana pelayanan publik dilaksanakan secara berkala sepanjang tahun guna menjaga kelayakan dan keberfungsian sarana.	Juni	Tidak	-	-
			Realisasi : Pada bulan Februari terdapat 4 sampel pihak ketiga pangan yang telah diuji dan dilaporkan tepat waktu Kendala : Tidak terdapat kendala yang mengganggu pelaksanaan pengujian sampel pihak ketiga Capaian terhadap target : Belum dapat dihitung karena berasal dari berbagai faktor dan merupakan target tahunan Upaya yang telah dilakukan : Melakukan identifikasi kebutuhan pengujian sampel pihak ketiga	Identifikasi terhadap kebutuhan pengujian pihak ketiga	Melakukan identifikasi kebutuhan pengujian sampel pihak ketiga	Selesai	Telah dilakukan identifikasi kebutuhan pengujian sampel pihak ketiga pangan	Maret	Ya	SDM-17	Kesalahan dalam melakukan pengujian sampel
			Realisasi : Sampai dengan bulan februari terdapat 61 sampel nappza, 1 sampel obat, dan 5 sampel pangan. Semua sampel telah diuji sesuai timeline yang telah ditetapkan.	Agar dipastikan pengujian sampel pihak ketiga sesuai batas timeline yang telah ditetapkan	Melakukan monitoring dan evaluasi timeline pengujian sampel pihak ketiga.	Selesai	Sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan timeline pengujian	March 2026	Ya	SDM-20 R-02	- Pengujian sampel pihak ketiga Nappza melewati timeline yang ditetapkan - Pelanggan tidak puas dengan layanan pengujian sampel narkotika

No	Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			Sampai dengan bulan Februari terdapat permohonan 2 Sertifikasi CDOB yang telah diselesaikan tepat waktu	-	-						
24	Nilai Pembangunan ZI UPT	Januari	Sebagai wujud continuous improvement, Balai POM di Pangkal Pinang senantiasa perlu melakukan perbaikan layanan baik internal maupun eksternal.	Melaksanakan sharing session dengan Balai lain untuk memberikan inspirasi dalam menciptakan inovasi. Pelaksanaan reformasi birokrasi hendaknya dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan.	Bersurat secara resmi kepada Bali Besar POM di Manado terkait sharing session yang akan dilaksanakan pada bulan Januari.	Belum Selesai	Belum selsai : Sharing session belum dilaksanakan di bulan Januari karena masih dalam proses penjadwalan dengan Balai Besar POM di Manado	February 2026	Tidak	-	-
		Februari	Merupakan indikator dengan target tahunan, beberapa upaya yang telah dilaksanakan di bulan Januari diantaranya yaitu : 1. Memastikan pimpinan sebagai role model dalam penerapan disiplin, kode etik, dan kode perilaku. 2. Melaksanakan inovasi secara konsisten seperti LADA BANGKA-48. ALONG SADAR, PULAU KETAWAI, dll 3. Memberikan apresiasi kepada pegawai BEDEPOR TW 4 tahun 2025	1. Melaksanakan sharing session dengan Balai lain untuk memberikan inspirasi dalam menciptakan inovasi, disarankan untuk dilaksanakan setiap TW ada kegiatan sharing session. 2. Melakukan pembentukan TimZi dan Tim AOC Tahun 2026	1. Akan melaksanakan sharing session TW 1 dengan Balai lain untuk menambah wawasan dalam pembangunan ZI di Balai POM di Pangkal Pinang. 2. Akan dilakukan pembahasan pembentukan tim ZI dan tim AOC tahun 2026.	Selesai	1. Telah dilakukan kegiatan sharing session dengan Balai Besar POM di Manado pada tanggal 2. Telah dilakukan pembahasan terkait pembentukan tim kerja ZI dan tim AOC tahun 2026	March 2026	Ya	2. O-46	2. ASN belum memahami terkait Reformasi Birokrasi dan memiliki pola pikir dan budaya kerja yang belum baik dalam mewujudkan zona integritas menuju WBK
		Maret	Merupakan indikator dengan target tahunan, beberapa upaya yang telah dilaksanakan di bulan Februari diantaranya yaitu : 1. Melakukan pembahasan penyusunan tim kerja pada tanggal 3 Februari 2026 2. Melakukan pembahasan pembentukan tim AOC pada tanggal 10 Februari 2026 3. Melakukan pembahasan penyusunan rencana kerja dan program prioritas tim ZI pada tanggal 20 Februari 2026 4. Melakukan Sosialisasi Sistem Digitalisasi Internal di lingkungan Balai POM di Pangkal Pinang pada tanggal 23 Februari 2026	1. Perlu dilakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait rencana kerja dan program prioritas tahun 2026 2. Perlu dilakukan revisi ST Tim RB untuk memastikan seluruh pegawai sudah tercantum dalam Surat Tugas. 3. Agar dilakukan sharing session dengan pihak Eksternal di TW 2 yaitu Kantor Imigrasi Tanjung Pandan Belitung 4. Agar diciptakan inovasi lokal spesifik Bangka Belitung yang khas sehingga mampu menjadi pendorong dalam pencapaian WBBM. 5. Agar dilakukan pendalaman	1. Dilakukan sosialisasi rencana kerja dan program prioritas tahun 2026 2. Dilakukan revisi ST yang telah mencantumkan seluruh pegawai. 3. Dilakukan komunikasi dan koordinasi dengan kantor imigrasi Tanjung Pandan Belitung. 4. Dilakukan pembahasan dan pembentukan tim terkait terkait inovasi lokal spesifik 5. Direncanakan untuk	Belum Selesai	1. Telah dilakukan sosialisasi rencana kerja kepada seluruh pegawai. 2. Telah dilakukan revisi ST dengan memastikan seluruh pegawai masuk ke dalam tim. 3. Telah melakukan koordinasi dengan kantor imigrasi Tanjung Pandan, selanjutnya akan berproses secara resmi. 4. Telah dilaksanakan sharing session dengan BBPOM di Palangkaraya 5. Telah dilakukan	April 2026	Ya	2. O-46	2. ASN belum memahami terkait Reformasi Birokrasi dan memiliki pola pikir dan budaya kerja yang belum baik dalam mewujudkan zona integritas menuju WBK

No	Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			5. Melakukan Sosialisasi Peraturan Terkait Disiplin Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai pada tanggal 24 Februari 2026 Selain itu, semua inovasi tetap dilaksanakan secara rutin untuk mengawal tercapainya IKU ZI	terkait inovasi smart laura dari BBPOM Palangkaraya. 6. Agar dilakukan pengisian data dukung LKE dengan dateline 6 April 2026 7. Agar diterbitkan SK khusus terkait tim Zi	dilakukan sharing session dengan BBPOM Palangkaraya terkait inovasi smart Laura 6. Akan diumumkan kepada seluruh tim terkait pengisian data dukung LKE. 7. Akan dibuat SK khusus terkait tim ZI tahun 2026		konfirmasi ke inspektorat, tidak diperlukan SK khusus terkait tim ZI dapat menggunkan ST terintegrasi dengan tim kerja teknis. Yang belum dilaksanakan : pembuatan SK terkait inovasi Smart Laura dan Tri Bakti Obat dan Makanan				
25	Nilai AKIP UPT	Januari	Capaian indikator nilai AKIP tahun 2025 sebesar 98,04%, tidak mencapai target yang ditetapkan. Terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki berdasarkan hasil evaluasi AKIP oleh Inspektorat.	Menyampaikan surat usulan kepada inspektorat agar penilaian capaian kinerja tidak dimasukkan dalam komponen penilaian SAKIP sebagaimana yang diatur dalam Permen PANRB No 88 Tahun 2021 Menyusun strategi untuk pencapaian kinerja sehingga setiap tahun bisa lebih baik dari tahun sebelumnya.	1. Membuat surat usulan ke Inspektorat Utama terkait komponen penilaian SAKIP tidak menilai komponen Capaian Kinerja sesuai PermenPANRB No 88 Tahun 2021 2. Menyusun Kertas kerja Stategi pencapaian kinerja selama periode RENSTRA 2025 - 2029	Belum Selesai	1. Telah dikirimkan surat usulan ke Inspektorat Utama terkait komponen penilaian SAKIP sesuai PermenPANRB No 88 Tahun 2021 melalui SRIKANDI. 2. Kertas kerja Stategi pencapaian kinerja selama periode RENSTRA masih dalam proses pengerjaan	Februari	Ya	O-75	Pencapaian kinerja tahun berjalan tidak lebih baik dari capaian kinerja tahun sebelumnya
		Februari	Merupakan indikator dengan target tahunan. Pada bulan Januari kegiatan pengelolaan SAKIP yang telah dilaksanakan : 1. Rapat Evaluasi kinerja tahun 2025 2. Penyampaian laporan Evaluasi Internal tw 4 tahun 2025 3. Penyampaian laporan monev bulan des 4. Penyusunan PoA kegiatan dan anggaran tahun 2025 5. Menyampaikan surat usulan terkait komponen penilaian SAKIP ke Inspektorat Utama Dari Laporan Hasil Evaluasi AKIP oleh inspektorat terdapat beberapa hal yang perlu untuk terus diperbaiki	Agar memperhatikan laporan hasil evaluasi AKIP tahun 2025 dari inspektorat, identifikasi hal-hal yang perlu diperbaiki dan dapat ditingkatkan dalam pelaksanaan AKIP tahun 2026. Untuk data yang tidak sesuai yang disampaikan pada Laporan hasil evaluasi AKIP, agar dilakukan klarifikasi. Lakukan penyusunan laporan kinerja tahun 2025 sesuai dengan pedoman SAKIP terbaru dan laporkan tepat waktu	1. Menyusun rencana Aksi/tindak lanjut hasil evaluasi AKIP Tahun 2025 2. Mengikuti Bimtek SAKIP dan Penyusunan Lapkin 2025 3. Menyusun Laporan Kinerja Tahun 2025 sesuai pedoman dan dilaporkan paling lambat 27 feb 4. Membuat surat klarifikasi data pada laporan evaluasi AKIP ke Inspektorat 5. Menyusun kertas kerja strateai pencapaian	Belum Selesai	Rencana Tindak lanjut yang telah dilaksanakan : 1. Menyusun rencana Aksi/tindak lanjut hasil evaluasi AKIP Tahun 2025 2. Mengikuti Bimtek SAKIP dan Penyusunan Lapkin 2025 3. Menyusun Laporan Kinerja Tahun 2025 sesuai pedoman dan dilaporkan paling lambat 27 feb 4. Menyusun kertas kerja strateai	Maret	Ya	SDM-06	Laporan kinerja yang disusun tidak sesuai dengan pedoman SAKIP

No	Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			dan ditingkatkan dalam pengelolaan AKIP di BPOM Pangkal Pinang Tahun 2026. Terdapat perbedaan data yang disampaikan dalam hasil evaluasi AKIP dari inspektorat dengan data yang dimiliki Balai.		kinerja selama periode RENSTRA		pencapaian kinerja selama periode RENSTRA Rencana Tindak Lanjut yang belum dilaksanakan : 1. Membuat surat klarifikasi data pada laporan evaluasi AKIP ke Inspektorat				
		Maret	Merupakan indikator dengan target tahunan. Pada bulan februari kegiatan pengelolaan SAKIP yang telah dilaksanakan adalah : 1. Rapat Perencanaan kinerja dan evaluasi bulan Januari 2026. 2. Mengikuti Bimtek SAKIP dan Penyusunan Lapkin tahun 2025 3. Penyampaian usulan target Perjanjian Kinerja Tahun 2026 4. Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 5. Publikasi Perjanjian Kinerja dan Laporan kinerja tahun 2025 di esr.menpan dan website BPOM. - Pelaporan data monev bulanan belum dapat dilakukan karena akses aplikasi pelaporan belum dibuka secara nasional. Dari Laporan Hasil Evaluasi AKIP oleh inspektorat terdapat beberapa hal yang perlu untuk terus diperbaiki dan ditingkatkan dalam pengelolaan AKIP di BPOM Pangkal Pinang Tahun 2026. Klarifikasi perbedaan data pada hasil evaluasi SAKIP oleh inspektorat belum dapat dilaksanakan karena banyaknya deadline yang harus diprioritaskan di Februari, sehingga	1. Laksanakan rencana aksi yang telah disusun terkait tindak lanjut evaluasi SAKIP oleh Inspektorat dan laksanakan upaya untuk perbaikan dan peningkatan nilai AKIP tahun 2026. 2. Agar segera dilakukan cascading kinerja sampai kepada individu 3. Agar dicek secara berkala terkait media pelaporan data monev, segera laporkan apabila aplikasi telah dibuka. 4. Agar segera melakukan klarifikasi perbedaan data yang disampaikan pada Laporan hasil evaluasi AKIP dengan data yang dimiliki.	1. Menyiapkan media pengumpulan sumber data (raw data) satu pintu 2. Penyusunan cascading/ matrik pembagian peran dan hasil (MPH) dan SKP individu pada aplikasi SIMAKIN. 3. Melakukan pelaporan data monev pada aplikasi (jika telah dibuka akses) 4. Membuat surat klarifikasi data pada laporan evaluasi AKIP ke Inspektorat.	Belum Selesai	Rencana tindak lanjut yang telah dilaksanakan : 1. Menyiapkan media pengumpulan sumber data di madu pelawan 2. penyusunan MPH dan SKP Individu pada SIMAKIN 3. Melakukan pelaporan monev e-performance/Simetris Namun terdapat rencana tindak lanjut yang belum dilaksanakan yaitu Membuat surat klarifikasi data atas hasil evaluasi AKIP ke Inspektorat	April	Tidak	-	-

No	Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			direncanakan dilaksanakan pada bulan Maret.								
26	Nilai Kinerja Anggaran UPT	Januari	Nilai NKA Tahun 2025 sebesar 95,13 (nilai 5) dengan rincian : IKPA : 96,70 EKA : 93,55 Komponen IKPA yang tidak optimal yaitu Revisi DIPA, Serapan Anggaran dan Capaian Output Komponen EKA yang tidak optimal adalah capaian RO dan efisiensi SBK Target NKA tahun 2025 tercapai 100% dimana nilai NKA lebih dari 90.	1. Mengupayakan pelaksanaan revisi DIPA tidak melebihi 2 kali per semester 2. Mencapai target serapan anggaran setiap triwulannya 3. Melaksanakan efisiensi SBK 20%	1. Melakukan evaluasi urgensi pelaksanaan revisi yang dapat mempengaruhi nilai IKPA, sebelum diajukan (jika ada) 2. Menyusun rencana penarikan dana tahun 2026 dengan mengacu pada target serapan anggaran per triwulan 3. Menyusun kertas kerja perhitungan efisiensi SBK tahun 2026	Belum Selesai	3 tindaklanjut tersebut belum dilaksanakan, akan dilaksanakan pada bulan februari, khusus untuk TL no 1 akan dilaksanakan jika terdapat pengajuan revisi yang mempengaruhi nilai IKPA	Februari	Tidak	-	-
		Februari	Merupakan indikator dengan target tahunan. Pada bulan januari kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencapaian target diantaranya : 1. Pelaporan Data Realisasi Capaian Output sampai dengan Desember 2025 2. Melakukan pengajuan UP tahun 2026 3. Melaksanakan revisi POK untuk penyesuaian kegiatan 4. Penyusunan PoA kegiatan dan anggaran tahun 2026 5. Pelaksanaan pencairan tagihan belanja kontraktual dan non kontraktual. Perlu terus dilakukan upaya pelaksanaan pengelolaan anggaran tahun 2026 secara berkesinambungan sesuai dengan ketentuan IKPA dan EKA	Lakukan penyusunan perencanaan realisasi anggaran dengan mempertimbangkan target serapan anggaran setiap triwulannya sebagaimana ketentuan IKPA (Kemenkeu)	1. Melakukan pemutakhiran Hal III DIPA tw 1 tahun 2026 paling lama 14 Feb 2026 2. Menyusun kertas kerja monitoring anggaran dan RPD tahun 2026	Selesai	-	-	Ya	O-36	Tidak bisa diinputnya Revisi Halaman III DIPA/RPD untuk 1 triwulan kedepan
		Maret	Merupakan indikator dengan target tahunan. Pada bulan Februari	1. Pastikan RPD yang telah disusun dapat dipenuhi setiap	1. Monitoring RPD bulan maret dan serapan	Belum Selesai	Monitoring RPD bulan maret telah	April	Tidak	-	-

No	Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencapaian target diantaranya : 1. Pelaksanaan pencairan tagihan belanja kontraktual dan non kontraktual. 2. Menyusun kertas kerja monitoring anggaran dan RPD tahun 2026 3. Pelaksanaan revolving UP tepat waktu 4. Melakukan penyusunan RPD / halaman III DIPA Perlu terus dilakukan upaya pelaksanaan pengelolaan anggaran tahun 2026 secara berkesinambungan sesuai dengan ketentuan IKPA dan EKA Laporan Target dan Realisasi output pada aplikasi SAKTI belum bisa dilakukan karena aplikasi belum dibuka, masih menunggu infomasi dari Kemenkeu.	bulannya 2. lakukan pengecekan secara berkala terhadap aplikasi pelaporan output, agar segera dilakukan penyusunan rencana dan pelaporan realisasi setelah aplikasi dibuka.	anggaran sd Maret 2026 2. Menyampaikan rencana target output dan realisasi output sd maret (jika aplikasi telah dibuka akses)		dilaksanakan Namun Pelaporan Rencana target output dan realisasi output sd maret belum dapat dilakukan karena aplikasi SAKTI untuk pelaporan caput masih belum bisa di akses				
27	Indeks Manajemen Risiko UPT	Januari	Target Indeks Manrisk tahun 2025 dapat tercapai sebesar 100,96%. Terdapat kenaikan nilai Maturitas Manrisk dari tahun sebelumnya dari sebesar 2,844 menjadi 2,938 kenaikan sebesar 0,094. Hal-hal yang menjadi catatan : 1. Belum ada kertas kerja penentuan level kemungkinan dan dampak 2. Risiko yang tidak dapat ditangani belum diekskalasi ke pimpinan (pembina) 3. Auditor internal belum melakukan reviu risk register sebelum dilaporkan ke SAPAAPIP	1. Menyusun kertas kerja penentuan level kemungkinan dan dampak 2. Mengekskalasi risiko yang tidak dapat ditangani ke atasan (deputi pembina) 3. Meningkatkan peran AI dalam pelaksanaan reviu risk register sebelum dilaporkan ke SAPAAPIP	1. Menyusun kertas kerja penentuan level kemungkinan dan dampak 2. Mengeskalasi risiko yang tidak dapat ditangani ke atasan (deputi pembina) dengan memberikan centang pada SAPAAPIP dan bersurat ke Deputi Pembina 3. Melaksanakan reviu risk register sebelum dilaporkan ke SAPAAPIP oleh AI	Belum Selesai	pada bulan Januari : 1. telah dilakukan eskalasi risiko ke deputi pembina dengan memberikan tanda centang pada laporan risiko di SAPAAPIP. 2. AI telah melakukan reviu risk register sem 1 tahun 2026 Belum selesai : 1. menyusun kertas kerja penentuan level kemungkinan dan dampak	Maret	Tidak	-	-
		Februari	Merupakan indikator dengan target tahunan. Pada bulan Januari kegiatan yang telah dilakukan diantaranya	Lakukan evaluasi terhadap hasil maturitas risiko tahun 2025 serta susun rencana tindak lanjutnya. Lakukan pengelolaan	1. menyusun rencana aksi/ tindak lanjut evaluasi maturitas risiko tahun 2026	Belum Selesai	Telah disusun rencana aksi/tindak lanjut evlauasi maturitas risiko tahun 2025	Maret	Ya	SDM-10	penyelenggaraan manajemen risiko belum sepenuhnya

No	Nama Indikator	Bulan	Kendala/Permasalahan Bulan Sebelumnya	Rekomendasi Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			1. Melakukan reuiu risiko sem 2 tahun 2025 2. Menyusun risiko sem 1 tahun 2026 3. melaporkan pengelolaan risiko pada SAPAAPIP secara tepat waktu Dari hasil indeks manajemen risiko tahun 2025 dan laporan evaluasi dari inspektorat, terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan dalam pengelolaan Manajemen Risiko BPOM di Pangkal Pinang pada tahun 2026	manajemen risiko sesuai pedoman	2. Melakukan sosialisasi Risiko sem 1 tahun 2026 kepada seluruh pegawai 3. Melakukan internalisasi terkait Manrisk		Sosialisasi risiko sem 1 dan internalisasi terkait manrisk belum dilaksanakan karena dijadwalkan di bulan maret				dilaksanakan sesuai dengan pedoman
		Maret	Merupakan indikator dengan target tahunan. Pada bulan Februari kegiatan yang telah dilakukan diantaranya 1. mereviu SK level Kemungkinan dan Dampak dan melakukan perbaikan yang diperlukan. 2. Menyusun kertas kerja penentuan skor risiko 3. Mereviu risiko sem 1 2026 Terdapat beberapa hal yang perlu disesuaikan pada daftar risiko yang telah dilaporkan di SAPAAPIP menyesuaikan dengan hasil penyusunan kertas kerja penentuan skor risiko. Dari hasil indeks manajemen risiko tahun 2025 dan laporan evaluasi dari inspektorat, terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan dalam pengelolaan Manajemen Risiko BPOM di Pangkal Pinang sepanjang tahun 2026	Segera lakukan penyesuaian pelaporan risiko di SAPAAPIP. Lakukan pengelolaan manajemen risiko sesuai pedoman	1. Melakukan penyesuaian risiko di SAPAAPIP 2. Melakukan sosialisasi Risiko sem 1 tahun 2026 kepada seluruh pegawai 3. Melakukan internalisasi terkait Manrisk	Belum Selesai	Yang telah diselesaikan : 1. melakukan penyesuaian risiko di sapaapip 2. Melakukan internalisasi terkait manrisk Namun Sosialisasi risiko belum terlaksana karena terdapat program baru yang perlu dilakukan penyesuaian risikonya	April	Ya	SDM-10	penyelenggaraan manajemen risiko belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan pedoman

2. RENCANA AKSI TINDAK LANJUT DAN TINDAK LANJUT ATAS HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2025

Inspektorat Utama telah melakukan Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Balai POM di Pangkal Pinang Tahun 2025. Dari hasil evaluasi tersebut, Inspektorat Utama memberikan beberapa rekomendasi untuk melakukan perbaikan kedepannya terkait implementasi SAKIP Balai POM di Pangkal Pinang. Balai POM di Pangkal Pinang telah menyusun rencana aksi tindak lanjut atas hasil evaluasi akip tahun 2025 dan melaksanakan tindak lanjut sesuai rencana aksi yg telah disusun.

Tabel 3.112 Rencana Aksi Tindak Lanjut atas Evaluasi SAKIP Tahun 2025

No	Rekomendasi	Rencana Aksi	Timeline
A	PERENCANAAN KINERJA		
1	Menyusun Renstra sesuai dengan Pedoman Penyusunan Renstra BPOM	Membuat matriks kesesuaian Renstra BPOM Pangkal Pinang 2025-2029 dengan Pedoman Penyusunan Renstra BPOM	TW II
2	Mengoptimalkan peran Tim SAKIP untuk mendukung implementasi SAKIP Satker terutama untuk memastikan: 1) keselarasan antar dokumen perencanaan dan/atau; 2) tidak adanya perbedaan nomenklatur dan/atau; 3) tidak adanya perbedaan target kinerja.	1. Membuat tabel keselarasan nomenklatur dan target kinerja antar dokumen perencanaan 2. Menuangkan justifikasi ketidakselarasan nomenklatur dan target kinerja antar dokumen perencanaan di laporan kinerja (jika ada)	TW II - TW IV
3	Melaksanakan reviu/kajian kesesuaian antara dokumen perencanaan kinerja dalam rapat perencanaan atau evaluasi kinerja internal triwulanan untuk memastikan keselarasan data antar dokumen perencanaan kinerja	1. Melakukan pembahasan keselarasan nomenklatur dan target pada rapat evaluasi internal 2. Melampirkan tabel keselarasan nomenklatur dan target kinerja antar dokumen perencanaan di laporan evaluasi internal	TW II - TW IV

No	Rekomendasi	Rencana Aksi	Timeline
4	Mengajukan penetapan SKP Kepala Balai POM di Pangkal Pinang	Bersurat ke biro SDM agar SKP Kepala Balai yang telah ditetapkan dapat diakomodir untuk ditandatangani oleh atasan pada aplikasi simakin	TW II
B	PENGUKURAN KINERJA		
1	Mendokumentasikan data awal atau data sumber dan kertas kerja yang digunakan untuk perhitungan data kinerja sebagai pendukung pelaporan kinerja pada aplikasi simetris dan pelaporan kinerja lainnya	1. Membuat media pengumpulan sumber data pada satu google drive 2. Melakukan sosialisasi media pengumpulan sumber data 3. Mengupload sumber data pada media yang sudah disediakan	TW I - TW IV
2	Memastikan data awal atau data sumber capaian kinerja jelas dan mampu tertelusur	1. Membuat media pengumpulan sumber data pada satu google drive 2. Mengunci link drive pengumpulan sumber data setiap bulan setelah rapat evaluasi	TW I - TW IV
3	Menyusun kertas kerja perhitungan data capaian kinerja yang dapat menunjukkan tahapan perhitungan dan kesimpulan hasil akhir capaian kinerja yang disajikan dalam dokumen laporan kinerja dan aplikasi pelaporan kinerja.	Mengupload kertas kerja perhitungan data capaian kinerja (RHPK) pada media pengumpulan sumber data setiap bulan	TW II - TW IV
C	PELAPORAN KINERJA		
1	Mereviu kembali mekanisme pengumpulan data kinerja yang telah disusun untuk memastikan tahapan	Sharing/diskusi dengan UPT lainnya terkait mekanisme pengumpulan data kinerja	TW II

No	Rekomendasi	Rencana Aksi	Timeline
	pengendalian internal dalam proses pengukuran dan pelaporan data kinerja telah memadai		
2	Mengoptimalkan pelaksanaan reviu berjenjang agar dapat meminimalkan adanya kesalahan penyajian data target dan realisasi capaian kinerja dalam dokumen perencanaan maupun pelaporan kinerja	Melampirkan lembar persetujuan data kinerja bulanan yang ditandatangani oleh ketua tim dan kepala balai pada laporan kinerja	TW II - TW IV
3	Melengkapi hasil perhitungan efisiensi sasaran maupun IKU dengan analisa yang komprehensif dengan harapan hasil analisis tersebut dapat menggambarkan upaya pengendalian kinerja yang telah dilaksanakan dan dapat dijadikan referensi oleh Satker lain untuk mengupayakan efisiensi anggaran/SDM dll secara lebih optimal	Menuangkan analisa yang lebih komprehensif terkait efisiensi sumberdaya baik sasaran maupun iku pada laporan kinerja interim dan tahunan	TW I - TW IV
4	Menyajikan upaya efisiensi yang telah dilaksanakan atau penyebab adanya inefisiensi dalam proses pencapaian target kinerja pada masing-masing Sasaran dan atau IKU dalam Laporan Kinerja Interim dan atau Tahunan.	Menuangkan analisa yang lebih komprehensif terkait efisiensi sumberdaya baik sasaran maupun iku pada laporan kinerja interim dan tahunan	TW I - TW IV
D	EVALUASI INTERNAL		
1	Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja internal untuk mendukung analisa kegagalan pencapaian target kinerja	Membuat tabel upaya perbaikan (rekomendasi perbaikan) pada laporan evaluasi internal untuk indikator kinerja yang tidak tercapai dan memonitoring progres tindak lanjut rekomendasi setiap bulannya	TW II - IV
2	Mendokumentasikan keterlibatan dan peran aktif Pimpinan seperti pada rapat monitoring dan evaluasi internal dalam	Menuangkan arahan pimpinan terkait IKU yang tidak	TW I - IV

No	Rekomendasi	Rencana Aksi	Timeline
	notulen dan laporan hasil evaluasi untuk menunjukkan adanya peran sebagai pengambil keputusan (decision maker) dalam mengukur capaian kinerja, terutama terkait arahan pimpinan secara khusus terhadap hasil analisa kendala/hambatan dan penetapan rekomendasi/rencana aksi yang akan dilaksanakan untuk mendukung upaya pemenuhan target kinerja yang belum tercapai	dapat mencapai target < 100% atau IKU yang mencapai target lebih dari > 120% pada notulen rapat evaluasi	

Tabel 3.113 Tindak Lanjut Triwulan I Tahun 2026 atas Evaluasi SAKIP Tahun 2025

Tabel 3.115 Tindak Lanjut Triwulan I Tahun 2026 atas Evaluasi SAKIP Tahun 2025							
No	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
					Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline	
A	PERENCANAAN KINERJA						
1		Menyusun Renstra sesuai dengan Pedoman Penyusunan Renstra BPOM	TW II		Membuat matriks kesesuaian Renstra BPOM Pangkal Pinang 2025-2029 dengan Pedoman Penyusunan Renstra BPOM	TW II	
2	1. Belum membuat tabel keselarasan nomenklatur dan target kinerja antar dokumen perencanaan 2. Belum menuangkan justifikasi ketidakselarasan nomenklatur dan target kinerja antar dokumen perencanaan di laporan kinerja	Mengoptimalkan peran Tim SAKIP untuk mendukung implementasi SAKIP Satker terutama untuk memastikan: 1) keselarasan antar dokumen perencanaan dan/atau; 2) tidak adanya perbedaan nomenklatur dan/atau; 3) tidak adanya perbedaan target kinerja.	TW II - TW IV		1. Membuat tabel keselarasan nomenklatur dan target kinerja antar dokumen perencanaan tahun 2026 2. Menuangkan justifikasi ketidakselarasan nomenklatur dan target kinerja (tahun 2026) antar dokumen perencanaan di laporan kinerja interim tahun 2026	TW II - TW IV	
3		Melaksanakan reviu/kajian kesesuaian antara dokumen perencanaan kinerja dalam rapat perencanaan atau evaluasi kinerja internal triwulanan untuk memastikan keselarasan data antar dokumen perencanaan kinerja	TW II - TW IV		1. Melakukan pembahasan keselarasan nomenklatur dan target pada rapat evaluasi internal 2. Melampirkan tabel keselarasan nomenklatur dan target kinerja antar dokumen perencanaan di laporan evaluasi internal	TW II - TW IV	

No	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
					Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline	
4		Mengajukan penetapan SKP Kepala Balai POM di Pangkal Pinang	TW II		Bersurat ke biro SDM agar SKP Kepala Balai yang telah ditetapkan dapat diakomodir untuk ditandatangani oleh atasan pada aplikasi simakin	TW II	
B	PENGUKURAN KINERJA						
1	Belum ada media pengumpulan sumber data pada satu google drive	Mendokumentasikan data awal atau data sumber dan kertas kerja yang digunakan untuk perhitungan data kinerja sebagai pendukung pelaporan kinerja pada aplikasi simetris dan pelaporan kinerja lainnya	TW I - TW IV	Membuat media pengumpulan sumber data pada satu google drive	1. Melakukan sosialisasi media pengumpulan sumber data 2. Mengupload sumber data pada media yang sudah disediakan	TW II - TW IV	Telah dibuat media pengumpulan sumber data pada satu google drive
2	Belum ada media pengumpulan sumber data pada satu google drive	Memastikan data awal atau data sumber capaian kinerja jelas dan mampu tertelusur	TW I - TW IV	Membuat media pengumpulan sumber data pada satu google drive	Mengunci link drive pengumpulan sumber data setiap bulan setelah rapat evaluasi	TW II - TW IV	Telah dibuat media pengumpulan sumber data pada satu google drive
3		Menyusun kertas kerja perhitungan data capaian kinerja yang dapat menunjukkan tahapan perhitungan dan kesimpulan hasil akhir capaian kinerja yang disajikan dalam dokumen laporan kinerja dan aplikasi pelaporan kinerja.	TW II - TW IV		Mengupload kertas kerja perhitungan data capaian kinerja (RHPK) pada media pengumpulan sumber data setiap bulan	TW II - TW IV	
C	PELAPORAN KINERJA						
1		Mereviu kembali mekanisme pengumpulan data kinerja yang telah disusun untuk memastikan tahapan pengendalian internal dalam proses pengukuran dan pelaporan data kinerja telah memadai	TW II		Sharing/diskusi dengan UPT lainnya terkait mekanisme pengumpulan data kinerja	TW II	
2		Mengoptimalkan pelaksanaan reviu berjenjang agar dapat meminimalkan adanya kesalahan penyajian data target dan realisasi capaian kinerja dalam dokumen perencanaan maupun pelaporan kinerja	TW II - TW IV		Melampirkan lembar persetujuan data kinerja bulanan yang ditandatangani oleh ketua tim dan kepala balai pada laporan kinerja	TW II - TW IV	
3	Belum melengkapi hasil perhitungan efisiensi sasaran maupun IKU dengan analisa yang komprehensif	Melengkapi hasil perhitungan efisiensi sasaran maupun IKU dengan analisa yang komprehensif dengan harapan hasil analisis	TW I - TW IV	Menuangkan analisa yang lebih komprehensif terkait efisiensi sumberdaya baik sasaran maupun iku pada laporan	Menuangkan analisa yang lebih komprehensif terkait efisiensi sumberdaya baik sasaran maupun	TW II - TW IV	Telah menuangkan analisa yang lebih komprehensif terkait efisiensi sumberdaya baik sasaran maupun iku pada laporan kinerja tahun 2025

No	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
					Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline	
		tersebut dapat menggambarkan upaya pengendalian kinerja yang telah dilaksanakan dan dapat dijadikan referensi oleh Satker lain untuk mengupayakan efisiensi anggaran/SDM dll secara lebih optimal		kinerja tahun 2025 (tercantum di BAB 3.1 poin h.Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja) di setiap IKU	iku pada laporan kinerja interim dan tahunan		
4	Menyajikan upaya efisiensi yang telah dilaksanakan atau penyebab adanya inefisiensi dalam proses pencapaian target kinerja	Menyajikan upaya efisiensi yang telah dilaksanakan atau penyebab adanya inefisiensi dalam proses pencapaian target kinerja pada masing-masing Sasaran dan atau IKU dalam Laporan Kinerja Interim dan atau Tahunan.	TW I - TW IV	Menuangkan analisa yang lebih komprehensif terkait efisiensi sumberdaya baik sasaran maupun iku pada laporan kinerja tahun 2025 (tercantum di BAB 3.1 poin h.Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja) di setiap IKU	Menuangkan analisa yang lebih komprehensif terkait efisiensi sumberdaya baik sasaran maupun iku pada laporan kinerja interim dan tahunan	TW II - TW IV	Telah menuangkan analisa yang lebih komprehensif terkait efisiensi sumberdaya baik sasaran maupun iku pada laporan kinerja tahun 2025, serta didalamnya telah menjelaskan penyebab efisiensi dan inefisiensi penggunaan sumber daya
D	EVALUASI INTERNAL						
1		Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja internal untuk mendukung analisa kegagalan pencapaian target kinerja	TW II - IV		Membuat tabel upaya perbaikan (rekomendasi perbaikan) pada laporan evaluasi internal untuk indikator kinerja yang tidak tercapai dan memonitoring progres tindak lanjut rekomendasi setiap bulannya		
2	Belum menuangkan arahan pimpinan terkait IKU yang tidak dapat mencapai target < 100% atau IKU yang mencapai target lebih dari >110% pada notulen rapat evaluasi	Mendokumentasikan keterlibatan dan peran aktif Pimpinan seperti pada rapat monitoring dan evaluasi internal dalam notulen dan laporan hasil evaluasi untuk menunjukkan adanya peran sebagai pengambil keputusan (decision maker) dalam mengukur capaian kinerja, terutama terkait arahan pimpinan secara khusus terhadap hasil analisa kendala/hambatan dan penetapan rekomendasi/rencana aksi yang akan dilaksanakan untuk mendukung upaya pemenuhan taraet kinerja yang belum tercapai	TW I - IV	Menuangkan arahan pimpinan terkait IKU yang tidak dapat mencapai target < 100% atau IKU yang mencapai target lebih dari >110% pada notulen rapat evaluasi Bulan Maret	Menuangkan arahan pimpinan terkait IKU yang tidak dapat mencapai target < 100% atau IKU yang mencapai target lebih dari >110% pada notulen rapat evaluasi bulan berikutnya	TW II - IV	Telah menuangkan arahan pimpinan terkait IKU yang tidak dapat mencapai target < 100% atau IKU yang mencapai target lebih dari >110% pada notulen rapat evaluasi Bulan Maret

3.3 REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2026 Balai POM di Pangkal Pinang memperoleh anggaran sebesar Rp 13.918.203.000. Pada bulan Februari 2025 dilaksanakan revisi kewenangan DJA untuk pergeseran anggaran kedalam RO Khusus dalam rangka penguatan dukungan pelaksanaan Prioritas Direktif Presiden Tahun Anggaran 2026. Dilakukan pergeseran anggaran dari pagu Balai POM di Pangkal Pinang sebesar Rp 2.230.083.000 dan blokir anggaran sebesar Rp 88.350.000 sehingga total pagu Balai POM di Pangkal Pinang sebesar Rp 11.688.120.000 atau pagu efektif sebesar Rp 11.599.770.000.

Pelaksanaan dan pengelolaan anggaran telah diupayakan sesuai dengan prinsip-prinsip laporan yang lazim dan pertanggungjawabannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, hemat, efisien dan efektif dengan menghindari penyalahgunaan.

Apabila dilihat dari Sasaran Kegiatan, realisasi anggaran Balai POM di Pangkal Pinang adalah sebagai berikut:

Tabel 3.114 Realisasi Anggaran Tiap Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Pagu 2025 (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1 Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	348.770.500	28.782.503	8,25%
		2 Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	5.983.000	3.639.000	60,82%
		3 Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	144.855.500	12.235.529	8,45%
		4 Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	8.198.400	-	0,00%
		5 Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	9.369.600	-	0,00%
		6 Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	14.630.800	2.121.000	14,50%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)		Pagu 2025 (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	19.076.500	2.583.960	13,55%
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	79.240.480	10.240.178	12,92%
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	109.656.680	12.546.601	11,44%
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	172.896.140	77.701.250	44,94%
		11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	4.144.000	-	0,00%
		12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	17.053.000	957.100	5,61%
		13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	16.159.400	2.550.380	15,78%
		14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	3.639.932.000	146.035.605	4,01%
		15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	22.160.000	-	0,00%
2	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	16	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	116.138.000	7.814.000	6,73%
		17	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	69.515.000	1.820.000	2,62%
		18	Jumlah desa pangan aman	72.577.000	1.820.000	2,51%
		19	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	36.673.000	-	0,00%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)		Pagu 2025 (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
3	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	20	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	37.257.000	2.330.000	6,25%
4	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	21	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	142.830.000	12.384.000	8,67%
5	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	22	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	5.230.000	-	0,00%
6	Layanan Publik UPT yang prima	23	Indeks Pelayanan Publik UPT	7.591.000	510.000	6,72%
7	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	24	Nilai Pembangunan ZI UPT	661.291.000	74.506.313	11,27%
		25	Nilai AKIP UPT	156.999.000	30.606.242	19,49%
		26	Nilai Kinerja Anggaran UPT	5.454.781.000	1.291.037.379	23,67%
		27	Indeks Manajemen Risiko UPT	315.112.000	91.826.670	29,14%
TOTAL				11.688.120.000	1.814.047.710	15,52%

Apabila dilihat dari Rincian Output (RO), realisasi anggaran Balai POM di Pangkal Pinang adalah sebagai berikut :

Tabel 3.115 Realisasi Anggaran Tiap Rincian Output

No	Program/Kegiatan/ Output	Pagu 2026 (Rp)	Realisasi s.d TW I (Rp)	Capaian (%)
1	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	Rp 5.230.000	Rp -	0,00%
2	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	Rp 7.591.000	Rp 510.000	6,72%
3	Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Rp 69.515.000	Rp 1.820.000	2,62%

No	Program/Kegiatan/ Output	Pagu 2026 (Rp)	Realisasi s.d TW I (Rp)	Capaian (%)
4	Desa Pangan Aman	Rp 72.577.000	Rp 1.820.000	2,51%
5	Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Rp 36.673.000	Rp -	0,00%
6	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	Rp 89.633.000	Rp 7.814.000	8,72%
7	Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diperiksa sesuai ketentuan oleh UPT BPOM	Rp 14.986.000	Rp 957.100	6,39%
8	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	Rp 7.999.000	Rp 1.640.000	20,50%
9	Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	Rp 26.505.000	Rp -	0,00%
10	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Rp 1.675.772.000	Rp 101.235.605	6,04%
11	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM PANGKAL PINANG	Rp 142.830.000	Rp 12.384.000	8,67%
12	Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans	Rp 5.983.000	Rp 3.639.000	60,82%
13	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	Rp 20.097.000	Rp 2.330.000	11,59%
14	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	Rp 183.337.000	Rp 12.235.529	6,67%
15	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	Rp 343.795.000	Rp 28.782.503	8,37%
16	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	Rp 21.624.000	Rp 680.000	3,14%
17	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	Rp 419.629.000	Rp 107.063.370	25,51%
18	Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Rp 1.964.160.000	Rp 44.800.000	2,28%
19	Layanan BMN	Rp 2.700.000	Rp -	0,00%
20	Layanan Perkantoran	Rp 6.577.484.000	Rp 1.486.336.604	22,60%
TOTAL		11.688.120.000	1.814.047.711	15,52%

Pada Triwulan I 2026, total realisasi anggaran Balai POM di Pangkal Pinang yaitu sebesar Rp **1.814.047.711** dari pagu yang bisa digunakan (diluar pagu blokir) sebesar Rp **11.599.770.000** dengan capaian sebesar **15,52%** atau **15,64%** bila dibandingkan dengan Pagu Total (dengan pagu blokir). Pada triwulan I capaian penyerapan Balai POM di Pangkal Pinang belum mencapai target penyerapan IKPA indikator Penyerapan Anggaran dengan target dan capaian masing-masing belanja yaitu: Belanja Pegawai dengan target 10% capaian 25,09%; Belanja Barang dengan target 15% dan capaian 13,38%; dan Belanja Modal dengan target 10% dan capaian 2,28%.

Upaya yang dilakukan Balai POM di Pangkal Pinang dalam pengelolaan anggaran antara lain:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi serapan anggaran dan rencana penarikan dana secara berkala
2. Melakukan revisi Halaman III DIPA untuk menyesuaikan rencana penarikan dana setiap triwulan.
3. Melakukan percepatan pengadaan barang dan jasa.
4. Melakukan evaluasi kegiatan dan anggaran sampai dengan tw I dan melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan.

Berikut penyesuaian anggaran yang sudah dilaksanakan Balai POM di Pangkal Pinang pada triwulan untuk mengoptimalkan anggaran serta efektif dan efisien:

Tabel 3.116 Penyesuaian Anggaran dalam Mencapai Kinerja

No	Jenis Revisi Anggaran	Dasar/Latar Belakang	Perubahan yang dilakukan	Bulan diajukan
1	Revisi Kewenangan DJA	• Nota Dinas Sekretaris Utama No. PR.04.02.2.12.25.771 tanggal 22 Desember 2025 tentang Penyampaian Data Pergeseran Anggaran Ke Dalam RO Khusus Berdasarkan Hasil Identifikasi Keuangan Dalam Rangka Penguatan Dukungan Pelaksanaan Prioritas Direktif Presiden	• Perubahan dilakukan pada seluruh akun dan seluruh RO yang terdapat di DIPA Balai POM di Pangkal Pinang sesuai dengan Hasil Identifikasi yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan	Desember 2025
	Revisi POK (Kewenangan KPA)	• Kebutuhan perjalanan dinas di dalam kota untuk kegiatan Audit Sertifikasi Dalam Kota yang	• Penambahan anggaran pada akun 524113	Januari

No	Jenis Revisi Anggaran	Dasar/Latar Belakang	Perubahan yang dilakukan	Bulan diajukan
		berkenaan dengan IKU Indeks Pelayanan Publik UPT • Kebutuhan perjalanan dinas untuk kegiatan Pengembangan Kemampuan Laboratorium BB/BALAI POM, Pengadaan Baku pembanding, pengadaan reagen, media mikro, dan DNA untuk pengujian sampel pihak ketiga yang berkenaan dengan IKU Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium • Penyesuaian anggaran pada kegiatan Operasi Intelijen, Gelar Kasus dan Pelaporan, Rapat Pembahasan Rencana Penyidikan, Skenario Penindakan dan Olah TKP, Operasi Penindakan, Pemberkasan, dan Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (wasmalitrik) yang berkenaan dengan IKU Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	(Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota) • Penambahan anggaran pada akun 524119 (Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota), 521811 (Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi) • Penyesuaian pada akun 521211 (Belanja Bahan), 524113 (Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota), 524111 (Belanja Perjalanan Dinas Biasa, dan 522141 (Belanja Sewa)	
3	Revisi Halaman III DIPA (Kewenangan Kanwil)	• Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang mana menyatakan Satker K/L dapat melakukan pemutakhiran RPD Bulanan paling lambat pada hari kerja kesepuluh setiap awal Triwulan; • Kebutuhan pembelian Penggandaan Pencetakan, ATK, dan pengadaan seminar KIT yang berkenaan dengan IKU Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan • Kebutuhan anggaran pada kegiatan Pengawasan, Sampling, dan Evaluasi Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik di Sarana Retail yang berkenaan dengan IKU Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar • Kebutuhan pengadaan	• Penambahan anggaran pada detail Sosialisasi Keamanan Pangan Sekolah akun 521211 (Belanja Bahan) • Penyesuaian anggaran pada akun 524113 (Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota • Penambahan akun 52113 (Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh)	Februari

No	Jenis Revisi Anggaran	Dasar/Latar Belakang	Perubahan yang dilakukan	Bulan diajukan
		Makanan/Minuman penambah daya tahan tubuh yang berkenaan dengan IKU Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		

3.4 ANALISIS EFISIENSI KEGIATAN

Pengukuran efisiensi dari kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit, namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai rumus berikut :

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Capaian outputnya adalah capaian masing-masing sasaran kegiatan, sedangkan inputnya merupakan persentase realisasi anggaran masing-masing sasaran kegiatan. Target anggaran yang digunakan adalah data RPD (Rencana Penarikan Dana).

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang dapat diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$\begin{aligned} SE &= \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} \\ &= \frac{100\%}{100\%} \\ &= 1 \end{aligned}$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE), mengikuti formula logika berikut :

Jika $IE \geq SE$, maka kegiatan dianggap efisien
Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Capaian Indikator Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	<0	Tidak Efisien
2	0 – 0,2	100% (efisien)
3	0,21 – 0,4	95% (efisien)
4	0,41 – 0,6	92% (efisien)
5	0,61 – 0,8	90% (efisien)
6	0,81 – 1,0	88% (efisien)
7	1,01 – 1,2	86% (tidak efisien)
8	1,21 – 1,4	84% (tidak efisien)
9	1,41 – 1,6	80% (tidak efisien)
10	1,61 – 1,8	78% (tidak efisien)
11	>1,81	75% (tidak efisien)

Berikut tingkat efisiensi sasaran kegiatan Balai POM di Pangkal Pinang pada Triwulan I Tahun 2026.

Tabel 3.117 Tingkat Efisiensi Anggaran untuk Pencapaian Sasaran Kegiatan Triwulan I Tahun 2026

No	Sasaran Kegiatan	Output	Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian	Keterangan
		%	Target (RPD TW I)	Realisasi	%				
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	98,69	353.049.617	293.203.726	83,05	1,19	0,19	100% (Efisien)	
2	Meningkatnya efektivitas KIE	101,12	10.844.999	9.634.000	88,83	1,14	0,14	100% (Efisien)	
3	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	96,82	2.670.000	2.330.000	87,27	1,11	0,11	100% (Efisien)	

No	Sasaran Kegiatan	Output	Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian	Keterangan
		%	Target (RPD TW I)	Realisasi	%				
4	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	100,00	14.699.996	12.384.000	84,24	1,19	0,19	100% (Efisien)	
5	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	100,00	0	0	-	-	-	-	Tidak Dapat Dihitung Efisiensinya
6	Layanan Publik UPT yang prima	-	1.520.000	510.000	33,55	-	-	-	Tidak Dapat Dihitung Efisiensinya
7	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	-	1.467.360.480	1.487.976.604	101,40	-	-	-	Tidak Dapat Dihitung Efisiensinya
TOTAL		99,16	381.264.612	317.551.726	83,29	1,19	0,19	100% (Efisien)	

Dari 7 sasaran kegiatan, hanya 4 sasaran kegiatan yang bisa dihitung tingkat efisiensinya. Hasil pengukuran 4 sasaran kegiatan tersebut diperoleh nilai Tingkat Efisiensi sebesar 0,19 sehingga kategorinya capaiannya **100% (Efisien)** dengan rata-rata persentase capaian output sebesar 99,16% dan persentase capaian input (anggaran) sebesar 83,29%. Berikut analisis untuk tingkat efisiensi anggaran per sasaran kegiatan:

- 1) Pada Sasaran Kegiatan 1 **Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT**, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp 293.203.726 atau 83,05% dari Rencana Penarikan Dana (RPD) Triwulan I sasaran kegiatan ini yaitu Rp 353.049.617. Anggaran ini digunakan untuk kegiatan sampling dan pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan beserta pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian; pembelian suku cadang dan kolom baku pembanding, reagensia dan media mikro, gas laboratorium; kalibrasi peralatan laboratorium dan perbaikan alat laboratorium; pengujian sampel pihak ketiga; pengadaan alat laboratorium dan sarana prasarana penunjang pengujian; edukasi pelaporan ESO ke sarana pelayanan Kesehatan; pemeriksaan sarana produksi dan distribusi; peningkatan kompetensi petugas pemeriksaan dan pengujian; perkuatan pengawasan iklan dan penandaan obat; pengawasan, sampling, dan evaluasi label produk tembakau dan/atau rokok elektronik

di sarana retail; dan pendampingan kabupaten kota pangan aman. Capaian sasaran kegiatan (output) ini sebesar 98,69% sehingga diperoleh nilai Indeks Efisiensi (IE) 1,19 dan Tingkat Efisiensi (TE) 0,19 dengan capaian TE 100% (**Efisien**). Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran kegiatan pertama adalah **efisien** karena nilai Indeks Efisiensi (1,19) lebih besar dari Standar Efisiensi (1) dengan capaian output yang lebih tinggi dari capaian input.

- 2) Pada Sasaran Kegiatan 2 **Meningkatnya efektivitas KIE**, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp 9.634.000 atau 88,83% dari Rencana Penarikan Dana (RPD) Triwulan I sasaran kegiatan ini yaitu Rp 10.844.999. Anggaran ini digunakan untuk pelaksanaan kegiatan KIE kepada masyarakat dan program Keamanan Pangan Terpadu yaitu desa pangan aman, pasar pangan aman berbasis komunitas, sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan. Sedangkan capaian sasaran kegiatan (output) sebesar 101,12% sehingga diperoleh nilai Indeks Efisiensi (IE) 1,14 dan Tingkat Efisiensi (TE) 0,14 dengan capaian TE 100% (**Efisien**). Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran kegiatan kedua adalah **efisien** karena nilai Indeks Efisiensi (1,14) lebih besar dari Standar Efisiensi (1) dengan capaian output yang lebih tinggi dari capaian input.
- 3) Pada Sasaran Kegiatan 3 **Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu**, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp 2.330.000 atau 87,27% dari Rencana Penarikan Dana (RPD) Triwulan I sasaran kegiatan ini yaitu Rp 2.670.000. Anggaran ini digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pendampingan UMKM dan Bimtek IP CPPOB BPOM di Pangkal Pinang. Sedangkan capaian sasaran kegiatan (output) sebesar 96,82% sehingga diperoleh nilai Indeks Efisiensi (IE) 1,11 dan Tingkat Efisiensi (TE) 0,11 dengan capaian TE 100% (**Efisien**). Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran kegiatan kegiatan ketiga adalah **efisien** karena nilai Indeks Efisiensi (1,11) lebih besar dari Standar Efisiensi (1) dengan capaian output yang lebih tinggi dari capaian input.
- 4) Pada Sasaran Kegiatan 4 **Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT**, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp 12.384.000 atau 84,24% dari Rencana Penarikan Dana (RPD) Triwulan III Sasaran Kegiatan ini yaitu Rp 14.699.996. Anggaran ini digunakan untuk berbagai rangkaian kegiatan penindakan dalam upaya penegakan hukum. Capaian sasaran kegiatan

(output) ini sebesar 100% sehingga diperoleh nilai Indeks Efisiensi (IE) 1,19 dan Tingkat Efisiensi (TE) 0,19 dengan capaian TE 100% (Efisien). Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai Sasaran Kegiatan keempat adalah **efisien** karena nilai Indeks Efisiensi (1,19) lebih besar dari Standar Efisiensi (1) dengan capaian output yang lebih tinggi dari capaian input.

- 5) Pada Sasaran Kegiatan 5 **Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT**, tidak ada Rencana Penarikan Dana (RPD) dan realisasi anggaran di Triwulan I. Total anggaran selama setahun yang dialokasikan untuk sasaran kegiatan pada tahun 2026 sebesar Rp 5.230.000 yang digunakan untuk kegiatan Verifikasi Data Patroli Siber dan Profiling Kejahatan Obat dan Makanan dalam rangka Penyusunan Laporan Patroli Siber. Capaian sasaran kegiatan (output) ini sebesar 100%. Namun, tidak dapat dihitung tingkat efisiensinya karena tidak ada RPD dan realisasi anggaran yang mendukung sasaran kegiatan ini pada triwulan I.
- 6) Pada Sasaran Kegiatan 6 **Layanan Publik UPT yang Prima**, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp 510.000 atau 33,55% dari Rencana Penarikan Dana (RPD) Triwulan I sasaran kegiatan ini yaitu Rp 1.520.000. Anggaran ini digunakan untuk kegiatan pelayanan publik dan audit sertifikasi. Capaian sasaran kegiatan (output) ini diperoleh pada akhir tahun sehingga belum bisa diukur tingkat efisiensinya.
- 7) Pada Sasaran Kegiatan 7 **Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal**, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp 1.487.976.604 atau 101,40% dari Rencana Penarikan Dana (RPD) Triwulan I sasaran kegiatan ini yaitu Rp 1.467.360.480. Anggaran ini digunakan untuk pelaksanaan kegiatan operasional dan pemeliharaan kantor, kegiatan untuk Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, Pembinaan Kinerja oleh Deputi Pembina, pengelolaan limbah B3, simulasi K3, koordinasi lintas sektor, pembayaran gaji dan tunjangan, langganan daya dan jasa, administrasi kegiatan, pengelolaan sistem akuntansi instansi, pengadaan jasa tenaga outsourcing, operasional pelaporan, peningkatan kompetensi petugas, pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor, dan Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa. Capaian Sasaran

Kegiatan (output) ini diperoleh pada akhir tahun sehingga belum bisa diukur tingkat efisiensinya.

**Tabel 3.118 Tingkat Efisiensi Anggaran untuk Pencapaian Kegiatan atau Rincian Output
Triwulan I Tahun 2026**

No	Kegiatan	Output	Input	IE	TE	Capaian TE	Keterangan
		%	%				
1	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	100,00	-	-	-	-	Tidak dapat dihitung TE nya
2	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	156,14	33,55	4,65	3,65	75% (Tidak Efisien)	
3	Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	100,00	63,97	1,56	0,56	92% (Efisien)	
4	Desa Pangan Aman	100,00	-	-	-	-	Tidak dapat dihitung TE nya
5	Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	100,00	-	-	-	-	Tidak dapat dihitung TE nya
6	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	108,00	156,28	0,69	-0,31	Tidak Efisien	
7	Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diperiksa sesuai ketentuan oleh UPT BPOM	100,00	87,96	1,14	0,14	100% (Efisien)	
8	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	100,00	93,18	1,07	0,07	100% (Efisien)	
9	Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	100,00	0,00	-	-	-	Tidak dapat dihitung TE nya
10	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	100,00	53,71	1,86	0,86	88% (Efisien)	
11	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM PANGKAL PINANG	100,00	84,24	1,19	0,19	100% (Efisien)	
12	Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans	100,00	60,82	1,64	0,64	90% (Efisien)	
13	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	-	87,27	-	-	-	Tidak dapat dihitung TE nya
14	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	100,00	44,16	2,26	1,26	84% (Tidak Efisien)	
15	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	100,00	104,00	0,96	-0,04	Tidak Efisien	

No	Kegiatan	Output	Input	IE	TE	Capaian TE	Keterangan
		%	%				
16	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	100,00	100,00	1,00	0,00	100% (Efisien)	
17	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	103,08	129,57	0,80	-0,20	Tidak Efisien	
18	Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	100,00	99,78	1,00	0,00	100% (Efisien)	
19	Layanan BMN	-	-	-	-	-	Tidak dapat dihitung TE nya
20	Layanan Perkantoran	100,00	101,52	0,99	-0,01	Tidak Efisien	
TOTAL		104,80	96,83	1,08	0,08	100% (Efisien)	

Pada tahun 2026, Balai POM di Pangkal Pinang melaksanakan 20 (dua puluh) kegiatan utama atau Rincian Output (RO) untuk mendukung pencapaian 7 Sasaran Kegiatan. Dari 20 Rincian Output (RO), hanya 14 RO yang dapat dihitung tingkat efisiensinya, sedangkan 6 RO lainnya tidak dapat dihitung Tingkat Efisiensinya karena belum ada capaian input (anggaran) dan/atau capaian output (RO) di Triwulan I ini.

Dilihat dari data tabel di atas, 14 RO yang dapat dihitung tingkat efisiensinya masih diperoleh nilai Indeks Efisiensi sebesar 1,08 dengan capaian **TE 100% (Efisien)**. Hal ini dikarenakan nilai Indeks Efisiensi (1,08) lebih besar dari Standar Efisiensi (1) dengan persentase capaian output yang lebih tinggi dari persentase capaian input. Namun Balai POM di Pangkal Pinang tetap terus mempertahankan efisiensi hingga akhir tahun. Beberapa upaya yang terus dilakukan Balai POM di Pangkal Pinang untuk mencapai efisiensi di tahun 2025 yaitu:

1. Melakukan monitoring realisasi anggaran dan melakukan revisi kegiatan, serta melakukan optimalisasi anggaran.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi capaian Rincian Output (RO) setiap bulannya pada rapat evaluasi bulanan untuk memantau progres capaian Rincian Output.
3. Melakukan revisi halaman III DIPA (Rencana Penarikan Dana) setiap triwulan.
4. Melakukan revisi anggaran baik kewenangan KPA, Kanwil maupun DJA untuk pergeseran anggaran dalam rangka mencapai target RO dengan anggaran yang tersedia.

5. Mereviu kembali target output tahunan sesuai dengan pagu anggaran 2026 dan mengajukan revisi target output melalui revisi kewenangan DJA.
6. Melakukan revisi target bulanan Rincian Output setiap triwulan pada aplikasi sakti.

BAB IV

PENUTUP



BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Secara garis besar, dalam perhitungan NKO Balai POM di Pangkal Pinang dinilai dari 7 Sasaran Kegiatan dan 27 Indikator kinerja yang ditetapkan. Berikut hasil pengukuran NKO pada Triwulan I Tahun 2026:

1. **7 (tujuh) indikator yang capaiannya Sangat Baik**, yaitu: 1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, 2. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, 3. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, 4. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, 5. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, 6. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dan 7. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT.
2. **10 (sepuluh) indikator yang capaiannya Baik**, yaitu: 1. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT, 2. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, 3. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan, 4. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium, 5. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan, 6. Jumlah desa pangan aman, 7. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas, 8. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan, 9. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT, dan 10. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

3. 1 (satu) indikator dengan kategori Tidak Dapat Disimpulkan, yaitu: 1. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar
4. 1 (satu) indikator dengan kategori Kurang, yaitu: 1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder.

Dari **27 (dua puluh tujuh)** Indikator Kinerja Utama, hanya **19 (sembilan belas)** indikator yang dapat diukur capaiannya, dan **8 (delapan)** indikator lainnya merupakan indikator tahunan yang penilaiannya dilakukan pada akhir tahun.

Pada perhitungan Nilai Kinerja Organisasi Balai POM di Pangkal Pinang Triwulan I Tahun 2026, terdapat 1 indikator kinerja yang capaiannya dinormalisasi menjadi 110% karena capaiannya melebihi 110% yaitu indikator Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar. Dari hasil perhitungan diperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Balai POM di Pangkal Pinang Triwulan I Tahun 2026 sebesar **98,98%** dengan predikat **Baik**.

Dalam pelaksanaan kegiatannya, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi Balai POM di Pangkal Pinang, yang menyebabkan tidak tercapainya target indikator yaitu pada IKU Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder. Rendahnya capaian ini disebabkan oleh adanya kesalahan rumus dalam perhitungan pada RAPK, di mana rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor yang sebelumnya tidak termasuk dalam komponen pembagi, justru masuk ke dalam perhitungan pembagi. Perubahan tersebut menyebabkan peningkatan jumlah total rekomendasi yang menjadi dasar perhitungan, sehingga persentase capaian menjadi lebih rendah dari kondisi sebenarnya. Dengan demikian, penurunan kinerja yang terlihat lebih dipengaruhi oleh aspek teknis perhitungan dibandingkan dengan pelaksanaan kegiatan di lapangan, sehingga diperlukan perbaikan formulasi dan validasi perhitungan agar capaian kinerja dapat merepresentasikan kondisi yang sebenarnya.

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan difokuskan pada pembenahan aspek teknis perhitungan serta penguatan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi. Langkah yang perlu dilakukan antara lain melakukan evaluasi dan

perbaiki rumus perhitungan pada aplikasi RAPK agar sesuai dengan definisi operasional indikator, khususnya memastikan komponen pembilang dan pembagi dihitung secara konsisten dan valid. Selain itu, perlu dilakukan verifikasi dan validasi data secara berkala untuk mencegah terjadinya kesalahan perhitungan yang dapat memengaruhi capaian kinerja. Dari sisi pelaksanaan, diperlukan penguatan koordinasi dan komitmen lintas sektor dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan, disertai dengan peningkatan monitoring dan evaluasi secara lebih intensif. Optimalisasi sistem pelaporan berbasis digital dan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan data juga menjadi langkah penting agar proses pelaporan lebih akurat dan tepat waktu. Dengan upaya tersebut, diharapkan capaian kinerja pada periode selanjutnya dapat meningkat dan lebih mencerminkan kondisi kinerja yang sebenarnya.

4.2 SARAN

Dengan pencapaian kinerja tersebut, Balai POM di Pangkal Pinang telah melakukan upaya-upaya perbaikan secara berkesinambungan guna meningkatkan kinerja pada masa mendatang. Beberapa rekomendasi untuk peningkatan kinerja Balai POM di Pangkal Pinang.

1. Melakukan koordinasi dengan petugas sampling untuk tidak melakukan sampling sampel dengan parameter cemaran logam Pb, Cd, dan As.
2. Menginformasikan kepada PJ sampling kosmetik untuk mendata merk dagang yang mengeluarkan jenis kosmetik Day / Night Cream dengan memanfaatkan data pada <https://app-registrasi.pom.go.id/>
3. Melakukan follow up melalui whatsapp / saat turun pemeriksaan sarana terkait kendala yang mungkin dialami PKM dan RS yang berpotensi dapat melaporkan KTD/ESO pada bulan April
4. Meningkatkan komunikasi dengan penanggung jawab sampling agar renlak dapat terlaksana
5. Membuat skala prioritas untuk melakukan pengujian dan verifikasi metode dalam rangka menyelesaikan temuan KAN
6. Melakukan perubahan terkait perhitungan timeline pengujian mulaibulan Maret 2026
7. Sarana SPPG yang menyediakan MBG akan dijadikan prioritas target pemeriksaan jika sarana kembali beroperasi
8. Berkoordinasi dengan dinas kesehatan kabupaten/kota
9. Menginput data keracunan pangan dalam aplikasi SPIMKER (admin SPIMKER dari infokom)
10. Membentuk tim TGC KLB KP yang melibatkan fungsi terkait
11. Mengingatkan kembali kepada PJ sampling pangan olahan untuk melakukan sampling terhadap sisa 1 sampel PIRT jika telah diperoleh balasan perubahan kategori sampel PIRT dari Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan

12. Koordinasi terkait perubahan kategori pangan sampel PIRT
13. Melakukan penyesuaian terhadap perubahan renlak
14. Melakukan monitoring data sarana yang belum menjawab CAPA dan timeline maksimal jawaban capa dari sarana menggunakan inovasi AMOI CAKEP
15. Melakukan follow up melalui whatsapp terhadap sarana yang telah dikirimkan CAPA ke-2 namun belum juga menjawab CAPA
16. Melakukan penarikan data di SIPT untuk setiap pelaporan iklan di setiap bulan
17. Melakukan konfirmasi segera kepada kepala balai jika sudah meneruskan data Iklan di setiap bulannya
18. Mengingatkan kembali PJ AMR untuk mengarsipkan data dukung seluruh kegiatan pengendalian AMR di cloud dan gdrive data dukung AMR 2026
19. Melakukan perhitungan perencanaan pemenuhan SKL TW 2.
20. Melaksanakan Rapat Advokasi ke Pemerintah Daerah terkait Prgoram KKPA melalui Zoom Meeting
21. Melaksanakan KIE Obat dan Makanan sesuai dengan targte perencanaan yang sudah ditetapkan
22. Melaksanakan Rapat Advokasi Program Nasional, Desa, dan Pasar
23. Penambahan target UMKM pangan olahan sebanyak 2 sarana
24. Konfirmasi sarana hasil rekomendasi lintas sektor
25. Melanjutkan tahapan verifikasi sarana UMKM yang akan didampingi
26. Melakukan monitoring dan evaluasi timeline pengujian sampel pihak ketiga.
27. Melakukan perbaikan identifikasi risiko program kerja baru AoC
28. Melakukan update daftar risiko di SAPAAPIP
29. Melakukan sosialisasi Risiko sem 1 tahun 2026 kepada seluruh pegawai

LAMPIRAN



Lampiran 1

Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK)

1. Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Bulan	Target Sampel Sediaan Farmasi	Target Indikator (%)	% Sampel Obat Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	% Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan (Bobot 60%)	% Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	% Sampel Kosmetik Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
Januari	14,00	98,75	-	-	-	-
Februari	59,00	98,75	100,00	100,00	100,00	100,00
Maret	96,00	98,75	100,00	100,00	100,00	100,00

Obat

Bulan	Jumlah sampel yang disampling	jumlah target sampel sampai dengan periode yang dimaksud	A1	Jumlah sampel yang sesuai Renlak per Kategori Sampel	jumlah target sampel sampai dengan periode yang dimaksud 2	A2	Jumlah sampel yang sesuai Renlak per Kelas Terapi	jumlah target sampel sampai dengan periode yang dimaksud	A3
Januari	4,00	4,00	100,00	4,00	4,00	100,00	4,00	4,00	100,00
Februari	15,00	15,00	100,00	15,00	15,00	100,00	15,00	15,00	100,00
Maret	27,00	27,00	100,00	27,00	27,00	100,00	27,00	27,00	100,00

Bulan	A Kesesuaian Pelaksanaan Sampling (Bobot: 30%)	Jumlah sampel yang sesuai Renlak waktu	jumlah target sampel sampai dengan periode yang dimaksud 2	B1	Jumlah sampel yang dilakukan evaluasi penandaan sesuai ketentuan	jumlah target sampel untuk dievaluasi penandaan sampai dengan periode yang dimaksud	B2	B Kesesuaian Pelaksanaan Sampling (Bobot: 20 %)	Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai ketentuan	jumlah sampel yang diuji sampai dengan periode yang dimaksud	C1
Januari	30,00	4,00	4,00	100,00	4,00	4,00	100,00	20,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Februari	30,00	15,00	15,00	100,00	15,00	15,00	100,00	20,00	17,00	17,00	100,00
Maret	30,00	27,00	27,00	100,00	27,00	27,00	100,00	20,00	20,00	20,00	100,00

Bulan	C Kesesuaian Pelaksanaan Pengujian (Bobot: 20%)	Jumlah sampel dengan kesimpulan sesuai ketentuan pedoman sampling	jumlah sampel yang dilaporkan sampai dengan periode yang dimaksud	D1	Jumlah sampel yang dilaporkan tepat waktu sesuai pedoman sampling	jumlah sampel yang dilaporkan sampai dengan periode yang dimaksud 2	D2	D Kesesuaian Pelaporan Hasil Sampling dan Pengujian (Bobot: 20 %)	jumlah laporan monitoring penarikan yang dilaporkan sesuai ketentuan sampai dengan pedoman	jumlah laporan yang harus dilaporkan sampai dengan periode yang dimaksud	E1	E Kesesuaian Pelaporan Monitoring Penarikan (Bobot: 10%)	% Sampel Obat Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
Januari	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	6,00	6,00	100,00	10,00	#DIV/0!
Februari	20,00	6,00	6,00	100,00	8,00	8,00	100,00	20,00	6,00	6,00	100,00	10,00	100,00
Maret	20,00	15,00	15,00	100,00	15,00	15,00	100,00	20,00	7,00	7,00	100,00	10,00	100,00

Obat Bahan Alam

Bulan	Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling	Target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT	A1	Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling (UPT yang melakukan pengujian)	Jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya (UPT yang melakukan pengujian)	A2	A % Pemenuhan Target Pengawasan	Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu	Jumlah seluruh sampel yang diperiksa/disampling dan diuji
Januari	5,00	5,00	100,00	0,00	0,00	#DIV/0!	100,00	0,00	0,00
Februari	15,00	15,00	100,00	12,00	12,00	100,00	100,00	12,00	12,00
Maret	22,00	22,00	100,00	15,00	15,00	100,00	100,00	15,00	15,00

Bulan	B Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan	Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan parameter uji	Jumlah seluruh sampel yang diuji	C Kesesuaian parameter uji	Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai	Target sampel yang diperiksa dan diuji	D Akurasi dalam penentuan kesimpulan	Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT	Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	E Tanggapan atas surat tindak lanjut	% Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
Januari	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	2,00	2,00	100,00	#DIV/0!
Februari	100,00	12,00	12,00	100,00	12,00	12,00	100,00	5,00	5,00	100,00	100,00
Maret	100,00	15,00	15,00	100,00	15,00	15,00	100,00	6,00	6,00	100,00	100,00

Suplemen Kesehatan

Bulan	Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling	Target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlik UPT	A1	Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling (UPT yang melakukan pengujian)	Jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya (UPT yang melakukan pengujian)	A2	A % Pemenuhan Target Pengawasan	Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu	Jumlah seluruh sampel yang diperiksa/disampling dan diuji	B Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan	Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan parameter uji	Jumlah seluruh sampel yang diuji
Januari	1,00	1,00	100,00	0,00	0,00	#DIV/0!	100,00	1,00	1,00	100,00	0,00	0,00
Februari	2,00	2,00	100,00	2,00	2,00	100,00	100,00	2,00	2,00	100,00	2,00	2,00
Maret	3,00	3,00	100,00	4,00	4,00	100,00	100,00	2,00	2,00	100,00	4,00	4,00

Bulan	C Kesesuaian parameter uji	Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai	Target sampel yang diperiksa dan diuji	D Akurasi dalam penentuan kesimpulan	Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT	Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	E Tanggapan atas surat tindak lanjut	% Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
Januari	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	2,00	2,00	100,00	#DIV/0!
Februari	100,00	2,00	2,00	100,00	2,00	2,00	100,00	100,00
Maret	100,00	4,00	4,00	100,00	2,00	2,00	100,00	100,00

Kosmetik

Bulan	Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling	Target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlik UPT	A1	Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling	Jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya	A2	A % Pemenuhan Target Pengawasan	Jumlah sampel dengan pelaksanaan sampling sesuai ketentuan	jumlah sampel yang diperiksa pada periode yang dimaksud	B Kesesuaian pelaksanaan sampling	Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu	Jumlah seluruh sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan
Januari	4,00	4,00	100,00	0,00	0,00	#DIV/0!	100,00	4,00	4,00	100,00	0,00	0,00
Februari	27,00	27,00	100,00	32,00	32,00	100,00	100,00	27,00	27,00	100,00	27,00	27,00
Maret	44,00	44,00	100,00	52,00	52,00	100,00	100,00	44,00	44,00	100,00	44,00	44,00

Bulan	C Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan	Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan sesuai	Jumlah sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan	D Ketepatan dalam penentuan kesimpulan	Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT	Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen	E Tanggapan atas surat tindak lanjut	% Sampel Kosmetik Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
Januari	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	5,00	5,00	100,00	#DIV/0!
Februari	100,00	27,00	27,00	100,00	7,00	7,00	100,00	100,00
Maret	100,00	44,00	44,00	100,00	8,00	8,00	100,00	100,00

2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM

Bulan s.d. TW IV (Jan - Des)	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM			
	Target	jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan	jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM	Realisasi
Januari	0	0	0,00	#DIV/0!
Februari	0	0	45,00	0
Maret	0	0	45,00	0

3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Bulan	Target Sampel Pangan Olahan	Target Indikator (%)	Kesesuaian Target Sampel (Bobot 20%)	Kesesuaian Parameter Uji (Bobot 20%)	Ketepatan Pengambilan Kesimpulan (Bobot 20%)	Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel (Bobot 10%)	Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian (Bobot 10%)	Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya (Bobot 20%)	Realisasi (%)
Januari	12,00	91,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	#DIV/0!	100,00
Februari	29,00	91,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Maret	29,00	98,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

2A. Kesesuaian Target Sampel

Bulan	Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling	target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak	A1 (%)	Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling	jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya	A2 (%)	Kesesuaian Target Sampel (%)
Januari	12,00	12,00	100,00	15,00	15,00	100,00	100,00
Februari	29,00	29,00	100,00	37,00	37,00	100,00	100,00
Maret	30,00	29,00	100,00	39,00	39,00	100,00	100,00

2B. Kesesuaian Parameter Uji

Bulan	Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling	jumlah sampel yang diuji	Kesesuaian Parameter Uji (%)
Januari	12,00	12,00	100,00
Februari	29,00	29,00	100,00
Maret	30,00	30,00	100,00

2C. Ketepatan Pengam. Keputusan

Bulan	Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling	jumlah sampel yang diperiksa dan diuji	Ketepatan Pengambilan Kesimpulan (%)
Januari	12,00	12,00	100,00
Februari	29,00	29,00	100,00
Maret	30,00	30,00	100,00

2D. Ketepatan Waktu Pengambilan

Bulan	Jumlah sampel yang diperiksa tepat waktu sesuai renlak	jumlah sampel yang diperiksa	Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel (%)
Januari	12,00	12,00	100,00
Februari	29,00	29,00	100,00
Maret	30,00	30,00	100,00

2E. Ketepatan Waktu Pelaporan

Bulan	Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji yang dilaporkan tepat waktu sesuai pedoman sampling	jumlah sampel yang diperiksa dan diuji	Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian (%)
Januari	12,00	12,00	100,00
Februari	29,00	29,00	100,00
Maret	30,00	30,00	100,00

2F. Tindak Lanjut sesuai Pedoma

Bulan	Jumlah sampel yang ditindaklanjuti	total jumlah sampel yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE atau Rusak atau Kedaluwarsa atau TMS Pengujian)	Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya (%)
Januari			#DIV/0!
Februari	2,00	2,00	100,00
Maret	2,00	2,00	100,00

4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT

Bulan s.d. TW IV (Jan - Des)	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT			
	Target	Realisasi	Kendala	Rekomendasi
Januari	100	0	Belum terdapat sampel KLB keracunan pangan	Menyusun kebutuhan reagen dan media untuk pengujian sampel KLB keracunan pangan
Februari	100	0	Belum terdapat sampel KLB keracunan pangan	
Maret	100	100	Keterbatasan informasi kronologi kejadian keracunan pangan	

5. Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Bulan	Target Indikator (%)	% Pemenuhan Target Sampel PIRT (Bobot 20%)	% Kesesuaian Parameter Uji (Bobot 20%)	% Ketepatan pengambilan kesimpulan (Bobot 20%)	% Ketepatan waktu pengambilan sampel (Bobot 10%)	% Ketepatan waktu pelaporan (Bobot 10%)	% Tindak lanjut sampel PIRT (Bobot 20%)	Realisasi (%)
Januari	96,5	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	0,00
Februari	96,5	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	0,00
Maret	96,5	96,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,33

3A. Target Sampel

Bulan	Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling* *Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian	Target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan Renlak UPT	A1	Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling** Cat: Untuk UPT yang tidak melakukan pengujian hanya melakukan perhitungan A1	Jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya	A2	% Pemenuhan Target Sampel PIRT
Januari	0,00	0,00	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
Februari	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Maret	14,00	15,00	93,33	18,00	18,00	100,00	96,67

3B. Parameter Uji

Bulan	Jumlah sampel sesuai parameter uji	Total Sampel PIRT	% Kesesuaian Parameter Uji
Januari			#DIV/0!
Februari			#DIV/0!
Maret	14,00	14,00	100,00

3C. Ketepatan Pengambilan Kesimpulan

Bulan	Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling	Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji	% Ketepatan pengambilan kesimpulan
Januari			#DIV/0!
Februari			#DIV/0!
Maret	14,00	14,00	100,00

3D. Ketepatan Waktu Sampling

Bulan	Jumlah sampel yang dilakukan sampling dan pengujian s.d TW 2	Total Sampel PIRT	% Ketepatan waktu pengambilan sampel
Januari	0,00	0,00	#DIV/0!
Februari	0,00	0,00	#DIV/0!
Maret	14,00	14,00	100,00

3E. Ketepatan Waktu Pelaporan

Bulan	Jumlah sampel tepat waktu	Total Sampel PIRT	% Ketepatan waktu pelaporan
Januari	0,00	0,00	#DIV/0!
Februari	0,00	0,00	#DIV/0!
Maret	14,00	14,00	100,00

3F. Tindak Lanjut

Bulan	Jumlah Sampel PIRT yang ditindaklanjuti	Total jumlah sampel yang TMS	% Tindak lanjut sampel PIRT
Januari	0,00	0,00	100,00
Februari	0,00	0,00	100,00
Maret	3,00	3,00	100,00

6. Persentase Keputusan_Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder

Bulan	Target Indikator (%)	% Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	% Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Realisasi (%)
Januari	85,00	100,00	#DIV/0!	100,00
Februari	85,00	81,40	0,00	40,70
Maret	85,00	88,06	0,00	44,03

6A. Pelaku Usaha

Bulan	Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha	% Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha
Januari	15,00	15,00	100,00
Februari	35,00	43,00	81,40
Maret	59,00	67,00	88,06

6B. Lintas Sektor

Bulan	Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor	% Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor
Januari	0,00	0,00	#DIV/0!
Februari	0,00	1,00	0,00
Maret	0,00	3,00	0,00

7. Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Bulan	Target Indikator	% Sarprod Obat	% Sarprod OBA	% Sarprod SK	% Sarprod Kosmetik	% Sarprod SF
Januari	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Februari	100,00	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00
Maret	100,00	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00

Sarana Produksi Obat

Bulan	Jumlah sarana yang diperiksa sesuai dengan sasaran dan cakupan renlak tahunan	Jumlah sasaran dan cakupan target renlak	A. % Kesesuaian sasaran dan cakupan pengawasan	Jumlah realisasi pengawasan sarana yang telah dilakukan sesuai renlak	Jumlah target sesuai renlak	B. % Pelaksanaan inspeksi	Jumlah inspeksi dengan tindak lanjut sesuai	Jumlah realisasi inspeksi pada periode tersebut	C1. % Ketepatan penetapan tindak lanjut
Januari	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!
Februari	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!
Maret	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!

Bulan	Jumlah inspeksi dengan waktu penyampaian tindak lanjut sesuai	Jumlah realisasi inspeksi pada periode tersebut 2	C2. % Ketepatan pemenuhan waktu penyampaian tindak lanjut	Jumlah inspeksi dengan penulisan laporan sesuai	Jumlah realisasi inspeksi pada periode tersebut 3	C3. % Kesesuaian format laporan inspeksi	Jumlah laporan yang disampaikan melalui SIPT	Jumlah realisasi inspeksi pada periode tersebut 4	C4. % Kepatuhan pelaporan tindak lanjut melalui SIPT
Januari	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!
Februari	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!
Maret	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!

Bulan	Jumlah inspeksi dengan kesesuaian keseluruhan cakupan CPOB	Jumlah realisasi inspeksi pada periode tersebut 5	C5. % Cakupan aspek CPOB dalam laporan inspeksi	Jumlah inspeksi dengan penulisan PLOR yang tepat	Jumlah realisasi inspeksi pada periode tersebut 6	C6. Implementasi metode PLOR dalam menerangkan temuan dalam laporan inspeksi	C. Kualitas laporan inspeksi dan ketepatan tindak lanjut	% Sarprod Obat
Januari	0,00	0,00	✓ #DIV/0!	0,00	0,00	✓ #DIV/0!	✓ #DIV/0!	✓ #DIV/0!
Februari	0,00	0,00	✓ #DIV/0!	0,00	0,00	✓ #DIV/0!	✓ #DIV/0!	✓ #DIV/0!
Maret	0,00	0,00	✓ #DIV/0!	0,00	0,00	✓ #DIV/0!	✓ #DIV/0!	✓ #DIV/0!

Sarana Produksi OBA SK

Bulan	Jumlah realisasi pengawasan sarana	Jumlah target renlak	A. % Pelaksanaan inspeksi	Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu	Jumlah seluruh sarana yang diperiksa	B. % Kualitas pelaporan dan ketepatan waktu	Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar	Jumlah sarana yang selesai diperiksa/inspeksi	C. % Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi	Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu	D. % Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana	% Sarprod OBA
Januari	0,00	0,00	✓ #DIV/0!	0,00	0,00	✓ #DIV/0!	0,00	0,00	✓ #DIV/0!	0,00	0,00	✓ #DIV/0!
Februari	1,00	1,00	✓ 100,00	1,00	1,00	✓ 100,00	1,00	1,00	✓ 100,00	1,00	1,00	✓ 100,00
Maret	1,00	1,00	✓ 100,00	1,00	1,00	✓ 100,00	1,00	1,00	✓ 100,00	1,00	1,00	✓ 100,00

Sarana Produksi OBA SK

Bulan	Jumlah realisasi pengawasan sarana	Jumlah target renlak	A. % Pelaksanaan inspeksi	Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu	Jumlah seluruh sarana yang diperiksa	B. % Kualitas pelaporan dan ketepatan waktu	Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar	Jumlah sarana yang selesai diperiksa/inspeksi	C. % Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi	Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu	D. % Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana	% Sarprod SK
Januari	0,00	0,00	✓ #DIV/0!	0,00	0,00	✓ #DIV/0!	0,00	0,00	✓ #DIV/0!	0,00	0,00	✓ #DIV/0!
Februari	0,00	0,00	✓ #DIV/0!	0,00	0,00	✓ #DIV/0!	0,00	0,00	✓ #DIV/0!	0,00	0,00	✓ #DIV/0!
Maret	0,00	0,00	✓ #DIV/0!	0,00	0,00	✓ #DIV/0!	0,00	0,00	✓ #DIV/0!	0,00	0,00	✓ #DIV/0!

Sarana Produksi Kosmetik

Bulan	Target Sarana	Jumlah realisasi pengawasan sarana	Jumlah target sesuai renlak	A. % Pelaksanaan inspeksi	Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu	Jumlah seluruh sarana yang diperiksa	B. % Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat	Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai	Jumlah sarana yang selesai diperiksa	C. % Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi	Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu	D. % Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana	% Sarprod Kosmetik
Januari	0,00	0,00	✓ #DIV/0!	0,00	0,00	0,00	✓ #DIV/0!	0,00	0,00	✓ #DIV/0!	0,00	0,00	✓ #DIV/0!
Februari	0,00	0,00	✓ #DIV/0!	0,00	0,00	0,00	✓ #DIV/0!	0,00	0,00	✓ #DIV/0!	0,00	0,00	✓ #DIV/0!
Maret	0,00	0,00	✓ #DIV/0!	0,00	0,00	0,00	✓ #DIV/0!	0,00	0,00	✓ #DIV/0!	0,00	0,00	✓ #DIV/0!

8. Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTIP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Bulan	Target Indikator	Jumlah sarana yang diperiksa tepat waktu	jumlah sarana yang diperiksa	% Ketepatan waktu	Jumlah sarana yang ditindaklanjuti dengan tepat	Jumlah sarana yang diperiksa ²	% Ketepatan tindak lanjut	Jumlah sarana yang diberikan grading dengan tepat	jumlah sarana yang diperiksa ²	% Evaluasi Ketepatan Grading	% Sarana Diperiksa & Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
Januari	94,25	0,00	0,00	✓ #DIV/0!	0,00	0,00	✓ #DIV/0!	0,00	0,00	✓ #DIV/0!	
Februari	94,25	2,00	2,00	✓ 100,00	2,00	2,00	✓ 100,00	2,00	2,00	✓ 100,00	100,00
Maret	94,25	2,00	2,00	✓ 100,00	2,00	2,00	✓ 100,00	2,00	2,00	✓ 100,00	100,00

9. Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Bulan	Target	% Sardis Obat	% Sardis OBA dan SK	% Sardis Kosmetik	% Sardis
Januari	96,60	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00
Februari	96,60	95,00	100,00	100,00	98,33
Maret	96,60	100,00	100,00	100,00	100,00

7A. % Sardis Obat

Bulan	Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi ditambah dengan Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat, yang telah diperiksa, ditindaklanjuti, dan dilaporkan melalui SIPT oleh Kepala UPT setiap bulan pada tahun berjalan	Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi ditambah dengan Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang ditargetkan untuk diperiksa, ditindaklanjuti, dan dilaporkan melalui SIPT oleh Kepala UPT setiap bulan pada tahun berjalan	% pemenuhan target pemeriksaan	A: Jumlah total tindak lanjut hasil pemeriksaan fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi ditambah dengan Jumlah total tindak lanjut hasil pemeriksaan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat, yang diselesaikan dan dilaporkan melalui SIPT oleh Kepala UPT, sesuai standar waktu (<i>timeline</i>),
Januari	3	3	100,00	3
Februari	9	10	90,00	9
Maret	16	16	100,00	16

Bulan	B. Jumlah total usulan tindak lanjut hasil pemeriksaan fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi ditambah dengan Jumlah total usulan tindak lanjut hasil pemeriksaan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat dari tim inspeksi, yang dinyatakan sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut oleh	C. Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi ditambah dengan Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat, yang telah diperiksa, ditindaklanjuti, dan dilaporkan melalui SIPT oleh Kepala UPT setiap bulan pada tahun berjalan	% kesesuaian tindaklanjut	% Sardis Obat
Januari	3	3,00	100,00	100,00
Februari	9	9,00	100,00	95,00
Maret	16	16,00	100,00	100,00

7B. % Sardis OBA

Bulan	Jumlah realisasi pengawasan sarana	Jumlah target pengawasan inspeksi sesuai renlak	% Kesesuaian Pelaksanaan inspeksi	Jumlah sarana yang diperiksa, dilaporkan lengkap dan tepat waktu	Jumlah sarana yang diperiksa	% Kelengkapan, kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat	Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar	Jumlah sarana yang selesai diperiksa	% Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi
Januari	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Februari	1	1	100,00	1	1	100,00	1	1	100,00
Maret	1	1	100,00	1	1	100,00	1	1	100,00

Bulan	Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu	Jumlah seluruh tindaklanjut	% Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana	% Sardis OBA
Januari	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Februari	1	1	100,00	100,00
Maret	1	1	100,00	100,00

7C. % Sardis Kos

Bulan	Jumlah realisasi pengawasan sarana	Jumlah target sesuai renlak	% Pelaksanaan Inspeksi	Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu	Jumlah seluruh sarana yang diperiksa	% Kelengkapan/ kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat	Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai	Jumlah sarana yang selesai diperiksa	% Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi	Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu	Jumlah seluruh tindaklanjut	% Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana	% Sardis Kos
Januari	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Februari	4	4	100	4	4	100	4	4	100,00	4	4	100,00	100,00
Maret	8	8	100	8	8	100	8	8	100,00	8	8	100,00	100,00

10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan

Bulan	Target	Jumlah Sarana yang Diperiksa	Target Jumlah Sarana yang Diperiksa sesuai Renlak	% Pemenuhan Target Sarana yang Diperiksa (Bobot 20%)	Jumlah Sarana yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Jumlah Sarana yang Diperiksa 2	% Ketepatan Tindak Lanjut (Bobot 70%)	Jumlah Sarana yang Diperiksa dan Dilaporkan Tepat Waktu	Jumlah Sarana yang Diperiksa 3	% Ketepatan Waktu (Bobot 10%)	% Sardis PO
Januari	93,25	12	12	20,00	11	12	64,17	12	12	10,00	94,17
Februari	93,25	26	26	20,00	25	26	67,31	26	26	10,00	97,31
Maret	93,25	42	42	20,00	41	42	68,33	42	42	10,00	98,33

11. Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan

Bulan	Target	% Iklan Obat	% Iklan Kos	% Iklan OBA	% Iklan SK	% Iklan PO	% Iklan SF dan PO
Januari		#DIV/0!	100,00	66,67	66,67	94,00	81,83
Februari		100,00	100,00	86,67	80,00	94,50	92,23
Maret		100,00	95,83	90,48	85,71	94,67	93,34

10A. % Iklan Obat

Bulan	Jumlah iklan yang selesai diawasi	Jumlah target iklan yang diawasi sesuai renlak	% Pemenuhan jumlah target pengawasan	Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah target iklan yang diawasi sesuai renlak 2	% Ketepatan waktu pelaporan	% Iklan Obat
Januari	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Februari	6	6	100,00	6	6	100,00	100,00
Maret	12	12	100,00	12	12	100,00	100,00

10B. % Iklan Kos

Bulan	Capaian jumlah iklan media cetak	Jumlah target media cetak	% Capaian media cetak	Capaian jumlah iklan media luar ruang	Jumlah target media luar ruang	% Capaian media luar ruang	Capaian jumlah iklan media online	Jumlah target media online	% Capaian media online	Capaian jumlah iklan media elektronik	Jumlah target media elektronik	% Capaian media elektronik	% Capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target
Januari	1	1	100,00	1	1	100,00	15	15	100,00	3	3	100,00	100,00
Februari	2	2	100,00	2	2	100,00	30	30	100,00	6	6	100,00	100,00
Maret	3	3	100,00	2	3	66,67	45	45	100,00	10	9	100,00	91,67

Bulan	Jumlah iklan yang evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT yang tepat waktu	Jumlah iklan yang dievaluasi	% Capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT	Jumlah iklan yang dilaporkan ke Operator Pusat yang tepat waktu	Jumlah iklan yang dievaluasi 2	% Capaian pelaporan ke Operator Pusat	% Ketepatan Waktu Pelaporan	% Iklan Kos
Januari	20	20	100,00	20	20	100,00	100,00	100,00
Februari	40	40	100,00	40	40	100,00	100,00	100,00
Maret	60	60	100,00	60	60	100,00	100,00	95,83

10C. % Iklan OBA OK

Bulan	Jumlah iklan yang selesai diawasi	Jumlah target iklan pengawasan sesuai Renlak	% Pemenuhan target pengawasan	Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah iklan yang selesai diawasi 2	% Ketepatan waktu pelaporan	Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai	Jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan	% Akurasi pengambilan keputusan	% Iklan OBA
Januari	4	4	100,00	0	4	0,00	4	4	100,00	66,67
Februari	10	10	100,00	6	10	60,00	10	10	100,00	86,67
Maret	14	14	100,00	10	14	71,43	14	14	100,00	90,48

10D. % Iklan SK

Bulan	Jumlah iklan yang selesai diawasi	Jumlah target iklan yang diawasi sd periode pelaporan	% Pemenuhan target pengawasan	Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah iklan yang selesai diawasi sd periode pelaporan	% Ketepatan waktu pelaporan	Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai	jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan	% Akurasi pengambilan keputusan	% Iklan Suplemen Kesehatan
Januari	3	3	100,00	0	3	0,00	3	3	100,00	66,67
Februari	5	5	100,00	2	5	40,00	5	5	100,00	80,00
Maret	7	7	100,00	4	7	57,14	7	7	100,00	85,71

10E. % Iklan PO

Bulan	Target iklan yang diawasi sesuai renlak	Jumlah Iklan yang diawasi	Realisasi	Nilai Pemenuhan Target Iklan (40%)	Target Media Cetak	Jumlah iklan yang diawasi (Media Cetak)	Realisasi Media Cetak	Target Media Online	Jumlah iklan yang diawasi (Media Online)	Realisasi Media Online
Januari	10	10	1	40,00	1	4	100,00%	5	4	80,00%
Februari	20	20	1	40,00	2	5	100,00%	10	9	90,00%
Maret	30	30	1	40,00	3	10	100,00%	15	14	93,33%

Bulan	Target Media Penyiaran	Jumlah iklan yang diawasi (Media Penyiaran)	Realisasi Media Penyiaran	Target Media Luar Ruang	Jumlah iklan yang diawasi (Media Luar Ruang)	Realisasi Media Luar Ruang	Kesesuaian Proporsi Media Iklan (20%)	Jumlah Iklan yang telah Dilaporkan ke Pusat	Jumlah Iklan Tepat Waktu	Ketepatan Waktu Pelaporan Iklan (40%)	% Iklan PO
Januari	2	0	0,00%	2	2	100,00%	14,00	10	10	40,00	94,00
Februari	4	0	0,00%	4	6	100,00%	14,50	20	20	40,00	94,50
Maret	6	0	0,00%	6	6	100,00%	14,67	30	30	40,00	94,67

12. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Bulan s.d. TW IV (Jan - Des)	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			
	Target	Realisasi	Kendala	Rekomendasi
Januari	-	-		
Februari	-	-		
Maret	78,2	78,2		

13. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Bulan s.d. TW IV (Jan - Des)	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			
	Target	Realisasi	Kendala	Rekomendasi
Januari	-	-		
Februari	-	-		
Maret	86,85	88,79		

14. Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan

Bulan	Target	Advokasi Lintas Sektor Program SAPA Sekolah (25%)	Sosialisasi Keamanan Pangan (20%)	Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah (25%)	Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan (25%)	Pengawasan (5%)	Realisasi
Januari	5	5,00					5,00
Februari	5	5,00					5,00
Maret	10	10,00					10,00

15. Jumlah Desa Pangan Aman

Bulan	Target	Advokasi Kelembagaan Desa (25%)	Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (25%)	Bimtek Komunitas (20%)	Monitoring dan Evaluasi (Pertemuan Lintas Sektor) (20%)	Pengawasan (10%)	Realisasi
Januari	5	5,00					5,00
Februari	5	5,00					5,00
Maret	10	10,00					10,00

16. Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Bulan	Target	Forum Advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar (25%)	Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar (25%)	Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar (20%)	Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring Evaluasi (20%)	Pengawasan (10%)	Realisasi
Januari	5	5,00					5,00
Februari	5	5,00					5,00
Maret	10	10,00					10,00

17. Persentase UMKM memperoleh rekomendasi sertifikat CP OBA, Kos dan_atau IP-CPPOB

Bulan	Target Indikator	% UMKM Pangan Olahan	% UMKM OBA	% UMKM Kosmetik	Realisasi
Januari	2,5	40,00	0,00	0,00	4,44
Februari	2,7	43,20	0,00	0,00	4,80
Maret	12,9	102,40	10,00	0,00	12,49

17A. UMKM Pangan Olahan

Bulan	Target	Pengumpulan Data Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Pangan Olahan (Jan-Maret) Bobot 5%	Seleksi dan Penetapan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) PO Target (Jan-Maret) Bobot 10%	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) (Feb-Juni) Bobot 30%	Pelaksanaan Pendampingan UMK PO (Feb-Des) Bobot 50%	Pelaporan (Feb-Des) Bobot 5%	Progress	Jumlah UMK Pangan Olahan yang memperoleh IP-CPPOB Tahun Berjalan
Januari	5	40,00			0,00		40,00	8
Februari	5,4	40,00			0,00	3,2	43,20	8
Maret	15,8	40,00	60,00		0,00	2,4	102,40	8

17B. UMKM OBA

Bulan	Target	Penetapan target UMKM obat tradisional (Jan - Feb) Bobot 10%	Bimbingan teknis UMKM Obat Bahan Alam oleh Fasilitator (Maret - April) Bobot 20%	Pendampingan UMKM Obat Bahan Alam oleh Fasilitator (April - Okt) Bobot 40%	Sertifikasi (Sept - Des) Bobot 20%	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Sept - Des) Bobot 10%	Progress
Januari	0	0,00					0,00
Februari	0	0,00					0,00
Maret	10	10,00	0,00				10,00

17C. UMKM KOS

Bulan	Target	Penetapan target UMKM Kosmetik (Jan - Feb) Bobot 10%	Bimbingan teknis UMKM Kosmetik oleh Fasilitator (Maret - April) Bobot 20%	Pendampingan UMKM Kosmetik oleh Fasilitator (April - Okt) Bobot 40%	Sertifikasi (Sept - Des) Bobot 20%	Monev dan Pelaporan (Sept - Des) Bobot 10%	Progress
Januari		0,00					0,00
Februari		0,00					0,00
Maret		0,00					0,00

18. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Bulan	Target Indikator	Target Perkara Tahun Berjalan	Target Perkara Carry Over	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (SPDP)	Realisasi Perkara Carry Over (SPDP)	Nilai Realisasi SPDP	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (Tahap I)	Realisasi Perkara Carry Over (Tahap I)	Nilai Realisasi Tahap I	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (P21)	Realisasi Perkara Carry Over (P21)	Nilai Realisasi P21	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (Tahap II)	Realisasi Perkara Carry Over (Tahap II)	Nilai Realisasi Tahap II	% Keberhasilan Perkara
Januari	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	33,33
Februari	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	33,33
Maret	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	33,33

19. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

Bulan s.d. TW IV (Jan - Des)	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar			
	Target	Realisasi	Kendala	Rekomendasi
Januari	50	50,00%		
Februari	50	50,00%		
Maret	50	50,00%		

20. Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar

Bulan	Target Indikator (%)	% Pemenuhan jumlah target pengawasan label (A)	% Ketepatan waktu pelaporan label (B)	Realisasi (%)
Januari	84,04	100,00	100,00	100,00
Februari	84,04	100,00	100,00	100,00
Maret	84,04	100,00	100,00	100,00

15A. Pemenuhan Target

Bulan	Jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang selesai diawasi s.d bulan N	Jumlah target pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi s.d bulan N	% Pemenuhan jumlah target pengawasan label
Januari	12,00	12,00	100,00
Februari	24,00	24,00	100,00
Maret	36,00	36,00	100,00

15B. Ketepatan Waktu

Bulan	Jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang selesai diawasi dan dilaporkan tepat waktu s.d bulan N	Jumlah target pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi s.d bulan N	% Ketepatan waktu pelaporan label
Januari	12,00	12,00	100,00
Februari	24,00	24,00	100,00
Maret	36,00	36,00	100,00

21. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT

Bulan s.d. TW IV (Jan - Des)	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT			
	Target	Realisasi	Kendala	Rekomendasi
Januari	0	0		
Februari	0	0		
Maret	0	43,75		

Lampiran 2
Rencana Kinerja Tahun 2026 Balai POM di Pangkal Pinang



BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKAL PINANG

Kompleks Perkantoran Pemprov. Kep. Bangka Belitung, Jl. Pulau Bangka, Air Itam, Pangkal Pinang

Telp : (0717) 439278, 434874 ; ULPK : (0717) 434705

email : bpom_pangkalpinang@pom.go.id dan bpompp@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI PANGKAL PINANG
NOMOR HK .02.02.7B.10.25.285 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KINERJA PADA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
PANGKAL PINANG TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKAL PINANG,

Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal Pinang pada Tahun 2026, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal Pinang Tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal Pinang tentang Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal Pinang Tahun 2026;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);

6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKAL PINANG TAHUN 2026.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal Pinang Tahun 2026 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Balai Pengawas Obat dan

Makanan di Pangkal Pinang dalam melakukan
penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2026.
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 09 Oktober 2025
KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI PANGKAL PINANG,



AGUS RIYANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKAL PINANG
NOMOR HK.02.02.7B.10.25.285 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI PANGKAL PINANG TAHUN 2026

RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI PANGKAL PINANG TAHUN 2026

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90.25
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	27
		Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95.75
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	89.60
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	81
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100
		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	77
		Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	40
		Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81
2	Meningkatnya efektivitas KIE	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86.85
		Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	10
		Jumlah desa pangan aman	6
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
3	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	31.25
4	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	91

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
5	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	91
6	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.75
7	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	90.4
		Nilai AKIP UPT BPOM	81.80
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.94

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI PANGKAL PINANG,



AGUS RIYANTO

Lampiran 3

Perjanjian Kinerja Tahun 2026 Balai POM di Pangkal Pinang



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 BALAI POM DI PANGKAL PINANG BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AGUS RIYANTO

Jabatan : Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal Pinang

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkal Pinang, 26 Februari 2026

Pihak Pertama
Kepala Balai Pengawas Obat dan
Makanan di Pangkal Pinang



AGUS RIYANTO

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas
Obat Makanan RI



TARUNA IKRAR

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI POM DI PANGKAL PINANG**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98.75
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	27.85
		03 - Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98.9
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.5
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94.25
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.6
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.25
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	93.83
		12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi	84.04

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		sesuai Standar	
		13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100
		14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	78,6
		15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	40
2.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,85
		04 - Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	7
		05 - Jumlah desa pangan aman	3
		06 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
3.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	31,25
4.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	92,5
5.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	94
6.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4,85
7.	09 - Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	90,4
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM	80,1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.94

Alokasi anggaran tahun 2026 sebesar Rp. 11,688,120,000 (Sebelas Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	5,107,936,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	6,580,184,000

Pangkal Pinang, 26 Februari 2026

Pihak Pertama
Kepala Balai Pengawas Obat dan
Makanan di Pangkal Pinang



AGUS RIYANTO

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas
Obat Makanan RI



TARUNA IKRAR

Lampiran 4

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Balai POM di Pangkal Pinang



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI POM DI PANGKAL PINANG
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan. Diarahkan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		98,75	98,75	98,75	98,75	98,75	98,75	98,75	98,75	98,75	98,75	98,75	343,795,000
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN	KONTRIBUSI		
		1.	DR.3165.QIA.002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	055 - Pengujian laboratorium sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan				A - Pengujian Laboratorium Sampel Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik				192,545,000	192,545,000		
		2.	DR.3165.QIA.002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	053 - Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan				A - Pengadaan Sampel				151,250,000	151,250,000		
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melapokan KTD/ESO											27,85	5,983,000	
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN	KONTRIBUSI		
		1.	DR.3165.QDC.002 - Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans	051 - Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klink) yang diberikan KIE Farmakovigilans				A - Pertemuan Sosialisasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klink)				5,983,000	5,983,000		
		03 - Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		98,9	98,9	98,9	98,9	98,9	98,9	98,9	98,9	98,9	98,9	143,609,000	
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN	KONTRIBUSI		
		1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan				A - Pengadaan Sampel				44,057,000	44,057,000		
		2.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengujian laboratorium sampel makanan				A - Pengujian Laboratorium Sampel Makanan				117,120,000	99,582,000		
1.	04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	8,198,400	
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN	KONTRIBUSI		
		1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengujian laboratorium sampel makanan				A - Pengujian Laboratorium Sampel Makanan				117,120,000	8,198,400		
		05 - Persentase sampel PRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		96,5	96,5	96,5	96,5	96,5	96,5	96,5	96,5	96,5	96,5	9,369,600	
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN	KONTRIBUSI		
		1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengujian laboratorium sampel makanan				A - Pengujian Laboratorium Sampel Makanan				117,120,000	9,369,600		
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	1,751,400	
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN	KONTRIBUSI		
		1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengujian laboratorium sampel makanan				A - Pengujian Laboratorium Sampel Makanan				117,120,000	9,369,600		
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	1,751,400	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		ditindaklanjuti oleh stakeholder													
			NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN				ANGGARAN	KONTRIBUSI				
			1.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	B - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI PRODUK OMKA OLEH PETUGAS BALAI DI LUAR KOTA				10,885,000	1,088,500				
			2.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI PRODUK OMKA OLEH PETUGAS BALAI DALAM KOTA				4,589,000	458,900				
			3.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	C - PERJALANAN KOORDINASI DALAM KOTA				2,040,000	204,000				
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	2,852,220	
			NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN				ANGGARAN	KONTRIBUSI				
			1.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI PRODUK OMKA OLEH PETUGAS BALAI DALAM KOTA				4,589,000	596,570				
			2.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	B - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI PRODUK OMKA OLEH PETUGAS BALAI DI LUAR KOTA				10,885,000	1,415,050				
			3.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	C - PERJALANAN KOORDINASI DALAM KOTA				2,040,000	265,200				
			4.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	D - PERJALANAN KOORDINASI DI LUAR KOTA				4,310,000	575,400				
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Dahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	84.25	94.25	84.25	94.25	84.25	94.25	84.25	94.25	84.25	94.25	84.25	17,020,380	
			NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN				ANGGARAN	KONTRIBUSI				
			1.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	C - PERJALANAN KOORDINASI DALAM KOTA				2,040,000	1570,800				
			2.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	D - PERJALANAN KOORDINASI DI LUAR KOTA				4,310,000	3,534,600				
			3.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	B - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI PRODUK OMKA OLEH PETUGAS BALAI DI LUAR KOTA				10,885,000	8,381,450				
			4.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI PRODUK OMKA OLEH PETUGAS BALAI DALAM KOTA				4,589,000	3,533,530				
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	145,995,360	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		ditindaklanjuti sesuai ketentuan													
NO	RO		KOMPONEN	SUB KOMPONEN										ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	L - Forum Komunikasi Inspektur Kosmetika di Medan										3,917,000	3,917,000
2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	A - Forum Komunikasi Pengawasan Sarana Distribusi dan Pelayanan CNPP di Bandung										2,015,000	2,015,000
3.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	T - Join Inspection Ke Balai Besar POM / Perijalan Koordinasi / Perijalan Lainnya										32,900,000	22,960,000
4.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI PRODUK OMKA OLEH PETUGAS BALAI DALAM KOTA										17,000,000	8,180,000
5.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	B - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI PRODUK OMKA OLEH PETUGAS BALAI DI LUAR KOTA										111,794,000	80,368,760
6.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	B - Forum Koordinasi dan Peningkatan Kompetensi Sertifikasi Cara Distribusi Obat Yang Baik di Jakarta										3,602,000	3,602,000
7.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	C - Rapat Koordinasi Pusat dan Balai dalam Manajemen Sampling/Kegiatan gabungan dengan Kedeputian II dan III di Jakarta										4,155,000	2,908,500
8.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	D - Rapat Koordinasi Pusat dan Balai dalam Manajemen Sampling/Kegiatan gabungan dengan Kedeputian I di Jakarta										2,067,000	2,067,000
9.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	E - Perkuatan Strategi dan Pemantapan Teknik Pengawasan Mutu Obat Beredar di Palembang										1,491,000	1,491,000
10.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	F - Penguatan Pengawasan Produk Tembakau untuk UPT BPOM di Jakarta										2,067,000	2,067,000
11.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	H - Pembentukan Inspektur Junior Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan di Jakarta										4,796,000	4,796,000
12.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	J - Peningkatan Kompetensi Pendampingan Monitoring Efek Samping OSA, OK dan SK serta Peningkatan Peran Tenaga Medis, Pelaku Usaha dan Masyarakat di Daerah JDI Jakarta										2,077,000	2,077,000
13.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	K - Forum Komunikasi Teknis Kedeputian II di Jakarta										3,469,000	3,469,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI		
		14.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			N - Evaluasi Sampling Kosmetik di Surabaya			6,745,000			6,745,000		
		15.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			P - Forum Komunikasi Fasilitas UMKM Obat Bahan Alam di Jakarta			2,077,000			2,077,000		
		16.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			S - PENINGKATAN KAPASITAS SDM / KEKUTSERTAAN BALAI/ PERJALANAN KOORDINASI DAN PERJALANAN LAINNYA			88,535,000			9,584,900		
		17.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			D - Bimbingan Teknis Fasilitas Pendampingan UMKM Obat Bahan Alam di Jakarta			4,155,000			4,155,000		
		18.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			M - Forum Koordinasi dan Komunikasi Penguatan Pengawasan dan Pelayanan Publik terkait Pemusatan Kosmetik dan Sertifikasi CPKB di Batam			2,105,000			2,105,000		
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan			93.25	93.25	93.25	93.25	93.25	93.25	93.25	93.25	93.25	93.25	253,730,440
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI		
		1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			C - Rapat Koordinasi Pusat dan Balai dalam Manajemen Sampling/Kegiatan gabungan dengan Ikedeputan II dan III di Jakarta			4,155,000			1,246,500		
		2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			S - PENINGKATAN KAPASITAS SDM / KEKUTSERTAAN BALAI/ PERJALANAN KOORDINASI DAN PERJALANAN LAINNYA			88,535,000			56,940,100		
		3.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya			A - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI: PRODUK OMA OLEH PETUGAS BALAI DALAM KOTA			17,000,000			6,120,000		
		4.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya			B - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI: PRODUK OMA OLEH PETUGAS BALAI DI LUAR KOTA			111,794,000			40,245,840		
		5.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya			C - OPERASIONAL LABORATORIUM KELILING DALAM RANGKA PEMERIKSAAN JAJANAN BUKA RUASA			48,525,000			48,525,000		
		6.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya			D - FOOD SECURITY			81,165,000			81,165,000		
		7.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			Q - Workshop registrasi pangan olahan untuk fasilitator di Serang			4,172,000			4,172,000		
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik															

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI		
		8.	DR.3165.QIC.004 – Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 – Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			R – Workshop Fasilitas Standardisasi Keamanan, Mutu dan Manfaat Produk Inovasi Pangan Olahan di Padang			6,756,000			6,756,000		
		9.	DR.3165.QIC.004 – Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 – Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			T – Join Inspection Ke Balai Besar POM / Perjalanan Koordinasi / Perjalanan Lainnya			32,800,000			6,560,000		
		11 – Persentase iklan sedotan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan			93.83	93.83	93.83	93.83	93.83	93.83	93.83	93.83	93.83	93.83	4,144,000
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI		
		1.	DR.3165.QIC.004 – Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 – Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			I – Peningkatan Kompetensi Petugas UPT Badan POM dalam Kesesuaian Evaluasi Hasil Pengawasan Iklan dan Penindakan OT di Jakarta			2,077,000			2,077,000		
		2.	DR.3165.QIC.004 – Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 – Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			G – Perkuatan Pengawasan Iklan dan Penindakan Obat Sesudah Beredar (back to back) dengan kegiatan Perkuatan Strategi dan Pemantapan Teknis Pengawasan Mutu Obat Beredar di Jakarta			2,067,000			2,067,000		
		12 – Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai Standar			84.04	84.04	84.04	84.04	84.04	84.04	84.04	84.04	84.04	84.04	14,986,000
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI		
		1.	DR.3165.BIA.001 – Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diperiksa sesuai ketentuan oleh UPT BPCM	051 – Pengawasan, Sampling, dan Evaluasi Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik di Sarana Retail			A – Pengadaan Sampel			14,986,000			14,986,000		
		2.	–	–			A – Pengadaan Sampel			0			0		
		13 – Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT											100	16,159,400	
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI		
		1.	DR.3165.QIC.004 – Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 – Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya			A – PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI PRODUK OMKA OLEH PETUGAS SALAI DALAM KOTA			17,000,000			1,700,000		
		2.	DR.3165.QIC.004 – Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 – Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			T – Join Inspection Ke Balai Besar POM / Perjalanan Koordinasi / Perjalanan Lainnya			32,800,000			3,280,000		
		3.	DR.3165.QIC.004 – Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 – Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya			B – PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI PRODUK OMKA OLEH PETUGAS SALAI DI LUAR KOTA			111,794,000			11,179,400		
		14 – Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sedotan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium				78.2	78.2	78.2	78.4	78.4	78.4	78.5	78.5	78.5	3,638,932,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO		KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI
		14.	DR.3165.PDO.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		056 - Pemantauan/evaluasi/koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja laboratorium				A - WORKSHOP REGIONALISASI LABORATORIUM				7,147,000		7,147,000
		15.	DR.3165.PDO.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian				E - PERBAIKAH PERALATAN LABORATORIUM				120,741,000		120,741,000
		16.	DR.3165.PDO.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian				D - Uji Profisiensi Eksternal				12,000,000		12,000,000
		17.	DR.3165.PDO.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian				C - PEMBELIAN SAMPEL RUANG LINGKUP				2,000,000		2,000,000
		18.	DR.3165.PDO.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian				B - KALIBRASI EKSTERNAL PERALATAN LABORATORIUM				206,000,000		206,000,000
		19.	DR.3165.RAB.001 - Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		051 - Pemenuhan/peningkatan alat laboratorium				A - Pengadaan Alat Laboratorium				1,864,160,000		1,864,160,000
		20.	DR.3165.PDO.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian				A - KALIBRASI ALAT LABORATORIUM OLEH PETUGAS PPOMN				29,001,000		29,001,000
		21.	DR.3165.PDO.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian				F - SURVEILAN TERJADWAL DAN PERLUASAN RUANG LINGKUP AKREDITASI				75,013,000		75,013,000
		15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman												40	22,160,000
2.	04 - Meningkatkan efektivitas KIE	NO	RO		KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI
		1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT		055 - Pengadaan sampel makanan				B - PENDAMPINGAN KABUPATEN/KOTA PANGAN AMAN				22,160,000		22,160,000
		01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			86.85	86.85	86.85	86.85	86.85	86.85	86.85	86.85	86.85	86.85	116,138,000
		NO	RO		KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI
		1.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE		051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT				A - KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI OBAT DAN MAKANAN				84,781,000		84,781,000
		2.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE		051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT				B - Forum Konsultasi Publik				4,852,000		4,852,000
		3.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT		051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat				A - TALKSHOW, KIE DI MEDIA CETAK DAN ELEKTRONIK				26,505,000		26,505,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	04 - Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan		5	5	10	25	25	25	70	70	95	95	100	7	65,515,000
	NO	RO	KOMPONEN		SUB KOMPONEN									ANGGARAN	KONTRIBUSI
	1.	DR.3165.BDB.001 - Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	052 - Intervensi keamanan PJJAS		D - PENGAWALAN SEKOLAH YANG SUDAH DINTERVENSI KEAMANAN PANGAN									8,439,000	8,439,000
	2.	DR.3165.BDB.001 - Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	051 - Koordinasi lintas sektor		A - PERJALANAN KOORDINASI									2,855,000	2,855,000
	3.	DR.3165.BDB.001 - Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	052 - Intervensi keamanan PJJAS		A - SOSIALISASI KEAMANAN PANGAN SEKOLAH									18,313,000	18,313,000
	4.	DR.3165.BDB.001 - Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	052 - Intervensi keamanan PJJAS		B - BIMBINGAN TEKNIK KEAMANAN PANGAN UNTUK KADER KEAMANAN PANGAN SEKOLAH									18,876,000	18,876,000
	5.	DR.3165.BDB.001 - Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	052 - Intervensi keamanan PJJAS		C - MONITORING DAN SERTIFIKASI SEKOLAH YANG MELAKSANAKAN PEMBUDAYAAN KEAMANAN PANGAN									21,032,000	21,032,000
	05 - Jumlah desa pangan aman		5	5	10	25	25	25	50	50	70	70	100	3	72,577,000
	NO	RO	KOMPONEN		SUB KOMPONEN									ANGGARAN	KONTRIBUSI
	1.	DR.3165.BDB.002 - Desa Pangan Aman	051 - Penguatan Kapasitas desa		A - ADVOKASI PROGRAM TERPADU KEAMANAN PANGAN									15,900,000	15,900,000
	2.	DR.3165.BDB.002 - Desa Pangan Aman	051 - Penguatan kapasitas desa		B - PELATIHAN KADER KEAMANAN PANGAN DESA									8,050,000	8,050,000
	3.	DR.3165.BDB.002 - Desa Pangan Aman	052 - Pemberdayaan komunitas desa		A - SIMTEK KEAMANAN PANGAN BAGI KOMUNITAS DESA									9,795,000	9,795,000
	4.	DR.3165.BDB.002 - Desa Pangan Aman	052 - Pemberdayaan komunitas desa		C - PERJALANAN KEGIATAN DESA PANGAN AMAN									10,560,000	10,560,000
	5.	DR.3165.BDB.002 - Desa Pangan Aman	054 - Pemantauan dan evaluasi terhadap intervensi desa sebelumnya		A - MONITORING EVALUASI PROGRAM DESA PANGAN AMAN									13,035,000	13,035,000
	6.	DR.3165.BDB.002 - Desa Pangan Aman	051 - Penguatan kapasitas desa		C - PERJALANAN KEGIATAN DESA PANGAN AMAN									5,280,000	5,280,000
	7.	DR.3165.BDB.002 - Desa Pangan Aman	052 - Pemberdayaan komunitas desa		B - FASE/TAJID PENERAPAN KEAMANAN PANGAN OLEH KADER KEAMANAN PANGAN DESA									3,000,000	3,000,000
	8.	DR.3165.BDB.002 - Desa Pangan Aman	054 - Pemantauan dan evaluasi terhadap intervensi desa sebelumnya		B - PENGAWALAN DESA									6,957,000	6,957,000
	06 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas		5	5	10	25	50	70	80	100	100	100	100	1	36,673,000
	NO	RO	KOMPONEN		SUB KOMPONEN									ANGGARAN	KONTRIBUSI
	1.	DR.3165.BDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya		A - BIMBINGAN TEKNIK KOMUNITAS PASAR									8,795,000	8,795,000
	2.	DR.3165.BDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	054 - Pemantauan dan evaluasi		A - Pengawasan Keamanan Pangan dan Monev									6,300,000	6,300,000
	3.	DR.3165.BDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya		B - SOSIALISASI KEAMANAN PANGAN KEPADA KOMUNITAS PASAR									3,521,000	3,521,000
	4.	DR.3165.BDB.003 - Pasar	053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan		C - Pengawasan									3,957,000	3,957,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN	
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12		
		NO	RO	KOMPONEN						SUB KOMPONEN				ANGGARAN	KONTRIBUSI	
		Komunitas														
		5.	DR.3165.BDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	052 - Penguasaan peralatan pendukung						A - Pembelian test kit				12,600,000	12,600,000	
		6.	DR.3165.BDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	051 - Penguatan lintas sektor						A - ADVOKASI PROGRAM PPAER				1,500,000	1,500,000	
3.	05 - Meningkatkan pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan CBA, Kos yang baik dan layak IP CPOB pangan olahan	2.5	2.7	12.9	41.23	52.05	62.88	71.2	75.15	89.73	94.3	98.5	31.25	20,097,000	
		NO	RO	KOMPONEN						SUB KOMPONEN				ANGGARAN	KONTRIBUSI	
		1.	DR.3165.QDS.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM						B - PENDAMPINGAN UMKM				12,875,000	12,875,000	
		2.	DR.3165.QDS.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM						A - Bimtek IP CPOB BPOM di Pangkal Pinang				7,322,000	7,322,000	
		4.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	33.33	33.33	33.33	33.33	38.33	38.33	51.67	51.67	66.67	66	92.5	142,830,000
		NO	RO	KOMPONEN						SUB KOMPONEN				ANGGARAN	KONTRIBUSI	
		1.	DR.3165.QCD.U86 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM PANGKAL PINANG	055 - Pemberkasan						B - Konsultasi Penyelesaian Berkas Perkara				2,000,000	2,000,000	
		2.	DR.3165.QCD.U86 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM PANGKAL PINANG	051 - Operasi Intelijen						E - Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan PPNS Badan POM				39,260,000	39,260,000	
		3.	DR.3165.QCD.U86 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM PANGKAL PINANG	051 - Operasi Intelijen						A - Perencanaan Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan				670,000	670,000	
		4.	DR.3165.QCD.U86 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM PANGKAL PINANG	051 - Operasi Intelijen						B - Pelaksanaan Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan				32,877,000	32,877,000	
		5.	DR.3165.QCD.U86 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM PANGKAL PINANG	051 - Operasi Intelijen						C - Evaluasi Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan				268,000	268,000	
		6.	DR.3165.QCD.U86 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM PANGKAL PINANG	052 - Selar Kasus dan Pelaporan						A - Daftar Kasus dan Pelaporan				268,000	268,000	
		7.	DR.3165.QCD.U86 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM PANGKAL PINANG	054 - Operasi Penindakan						A - Operasi Penindakan				6,965,000	6,965,000	
		8.	DR.3165.QCD.U86 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM PANGKAL PINANG	054 - Operasi Penindakan						B - Penangkapan dan Penahanan				1,880,000	1,880,000	
		9.	DR.3165.QCD.U86 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM PANGKAL PINANG	055 - Pemberkasan						A - Pemberkasan				15,870,000	15,870,000	
		10.	DR.3165.QCD.U86 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM PANGKAL PINANG	055 - Pemberkasan						C - Gelar Perkara				670,000	670,000	
		11.	DR.3165.QCD.U86 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM PANGKAL PINANG	055 - Pemberkasan						D - Bantuan Hukum/ Penasehat Hukum				1,000,000	1,000,000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO		KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN		KONTRIBUSI		
		12.	DR.3165.QCD.U66 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM PANGKAL PINANG		055 - Pemberkasan			E - Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti			4,860,000		4,860,000		
		13.	DR.3165.QCD.U66 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM PANGKAL PINANG		056 - Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (wasmaltrik)			B - Pelaksanaan Wasmaltrik			29,992,000		29,992,000		
		14.	DR.3165.QCD.U66 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM PANGKAL PINANG		051 - Operasi Intelijen			D - Pertemuan Peningkatan Kinerja, Profesionalisme, dan Koordinasi PPNB Badan POM Tahun 2026			6,250,000		6,250,000		
5.	07 – Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Obat yang efektif di wilayah kerja UPT	01 – Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Obat yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	94	5,230,000	
		NO	RO		KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN		KONTRIBUSI		
		1.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT		052 - Penyusunan Analisa Data Kejahatan Kejahatan Aktual Obat dan Makanan			A - Verifikasi Data Patroli Siber dan Profiling Kejahatan Obat dan Makanan dalam rangka Penyusunan Laporan Patroli Siber			5,230,000		5,230,000		
		01 – Indeks Pelayanan Publik UPT												4.85	7,591,000
		NO	RO		KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN		KONTRIBUSI		
		1.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT		051 - Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi			A - AUDIT SERTIFIKASI DI DALAM KOTA			3,991,000		3,991,000		
		2.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT		051 - Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi			B - AUDIT SERTIFIKASI DI LUAR KOTA			3,600,000		3,600,000		
		01 – Nilai Pembangunan di UPT BPOM												90.4	601,291,000
		NO	RO		KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN		KONTRIBUSI		
		1.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran		002 – Operasional dan Pemeliharaan Kantor			I – PENGADAAN PAKAIAN DINAS			43,200,000		43,200,000		
		2.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran		002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor			A - PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR			185,836,000		185,836,000		
		3.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran		002 – Operasional dan Pemeliharaan Kantor			B - PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR			104,050,000		104,050,000		
		4.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		052 - Pelaksanaan koordinasi			A - KOORDINASI LINTAS SEKTOR			1,020,000		1,020,000		
		5.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran		002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor			D - PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL			40,000,000		40,000,000		
		6.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran		002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor			G - PERBAIKAN PERALATAN FUNSIONAL			60,000,000		60,000,000		
		7.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran		002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor			T - Pembinaan Kinerja oleh Deputy Pembina			5,525,000		5,525,000		
		8.	WA.6384.EBA.956 - Layanan BMN		054 – Pemasusahan BMN			A - PENGELOLAAN LIMBAH B3			2,700,000		2,700,000		
		9.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran		002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor			S - SIMULASI K3			5,000,000		5,000,000		
		10.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran		002 – Operasional dan Pemeliharaan Kantor			Q – PENGADAAN MAKANAN(MINUMAN) PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH			92,160,000		92,160,000		
		11.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran		002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor			P - PEMERIKSAAN KESEHATAN RESIKO PEKERJAAN			112,000,000		112,000,000		
		Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik													

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI		
		12.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor			O - PENINGKATAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI			9,800,000			9,800,000		
		02 - Nilai AKIP UPT BPQM											80.1	156,999,000	
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI		
		1.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor			R - PERJALANAN KOORDINASI/KONSULTASI PIMPINAN			74,420,000			74,420,000		
		2.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor			L - OPERASIONAL PELAPORAN			75,600,000			75,600,000		
		3.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			A - PENINGKATAN KOMPETENSI PETUGAS			6,979,000			6,979,000		
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPQM											5	5,454,781,000	
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI		
		1.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor			J - PENGELOLAAN SISTEM AKUNTANSI INSTANSI			13,800,000			13,800,000		
		2.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor			E - LANGGAHAN DAYA DAN JASA			497,932,000			497,932,000		
		3.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor			H - ADMINISTRASI KEGIATAN			88,180,000			88,180,000		
		4.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor			M - PENGADAAN JASA TENAGA OUTSOURCING			759,792,000			759,792,000		
		5.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	001 - Gaji dan Tunjangan			A - Pembayaran Gaji dan Tunjangan Balai			4,097,097,000			4,097,097,000		
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPQM											2.94	315,112,000	
NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI				
1.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor			C - PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR			239,400,000			239,400,000				
2.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor			N - SEWA RUMAH DINAS PIMPINAN			70,000,000			70,000,000				
3.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor			K - Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa			5,712,000			5,712,000				
Total												11,888,120,000			

Pangkal Pinang, 26 Februari 2025

Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal Pinang



AGUS RIYANTO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 5

SK Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029

Balai POM di Pangkal Pinang



BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKAL PINANG

Kompleks Perkantoran Pemprov. Kep. Bangka Belitung, Jl. Pulau Bangka, Air Itam, Pangkal Pinang

Telp : (0717) 439278, 434874 ; ULPK : (0717) 434705

email : bpom_pangkalpinang@pom.go.id dan bpompp@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKAL PINANG

NOMOR HK.02.02.8B.02.25.51 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BALAI PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI PANGKAL PINANG TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKAL PINANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengukur keberhasilan peningkatan kinerja dan akuntabilitas kinerja di lingkungan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal Pinang, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal Pinang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal Pinang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal Pinang Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
2. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/ M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah

- diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
 9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 930);
 10. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);
 11. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKAL PINANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKAL PINANG TAHUN 2025-2029.
Kesatu	:	Menetapkan dan memberlakukan Indikator Kinerja Utama Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal Pinang Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Indikator Kinerja Utama Balai POM di Pangkal Pinang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Kedua	:	Indikator Kinerja Utama Balai POM di Pangkal Pinang sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan untuk menyusun rencana kinerja tahunan, rencana kinerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di

Ketiga Pangkal Pinang.
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 5 Februari 2025

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI PANGKAL PINANG,



AGUS RIYANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI PANGKAL PINANG
NOMOR HK.02.02.8B.02.25.51 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI PANGKAL PINANG TAHUN 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKAL PINANG
TAHUN 2025-2029

SK 1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BPOM di Pangkal Pinang
1.1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO
1.3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh BPOM di Pangkal Pinang
1.5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
1.7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
SK 3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BPOM di Pangkal Pinang
3.1	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan BPOM di Pangkal Pinang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
SK 4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja BPOM di Pangkal Pinang
4.1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BPOM di Pangkal Pinang
4.2	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

4.3	Jumlah desa pangan aman
4.4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas
SK 5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu
5.1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan
SK 6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BPOM di Pangkal Pinang
6.1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di BPOM di Pangkal Pinang
SK 7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BPOM di Pangkal Pinang
7.1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar
SK 8	Layanan Publik BPOM di Pangkal Pinang yang prima
8.1	Indeks Pelayanan Publik BPOM di Pangkal Pinang
SK 9	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal
9.1	Nilai Pembangunan ZI BPOM di Pangkal Pinang
9.2	Nilai AKIP BPOM di Pangkal Pinang
9.3	Nilai Kinerja Anggaran BPOM di Pangkal Pinang
9.4	Indeks Manajemen Risiko BPOM di Pangkal Pinang

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI PANGKAL PINANG,



AGUS RIYANTO

Lampiran 6

SK Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029 Revisi

Balai POM di Pangkal Pinang



BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKAL PINANG

Kompleks Perkantoran Pemprov. Kep. Bangka Belitung, Jl. Pulau Bangka, Air Itam, Pangkal Pinang

Telp : (0717) 439278, 434874 ; ULPK : (0717) 434705

email : bpom_pangkalpinang@pom.go.id dan bpompp@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKAL PINANG

NOMOR HK.02.02.7B.12.25.340 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BALAI PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI PANGKAL PINANG 2025-2029

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKAL PINANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengukur keberhasilan peningkatan kinerja dan akuntabilitas kinerja di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal Pinang, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal Pinang;
- b. bahwa ketentuan dalam Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal Pinang Nomor HK.02.02.8B.02.25.51 Tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal Pinang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal Pinang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal Pinang;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
2. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
 3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
 8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan;

9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 763);
10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
11. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 596 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan dan Reviu Rencana Strategis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029;
12. Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal Pinang Nomor HK.02.02.7B.12.25.339 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal Pinang Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKAL PINANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKAL PINANG TAHUN 2025-2029.
Kesatu	:	Menetapkan dan memberlakukan Indikator Kinerja Utama Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal Pinang Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Kedua	:	Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan untuk menyusun rencana kinerja tahunan, rencana kinerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal Pinang.

- Ketiga : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal Pinang Nomor HK.02.02.8B.02.25.51 Tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal Pinang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 05 Desember 2025

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI PANGKAL PINANG,



AGUS RIYANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI PANGKAL PINANG
NOMOR HK.02.02.7B.12.25.340 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BALAI PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI PANGKAL PINANG TAHUN 2025-
2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2029

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKAL PINANG

SK 1 Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	
1.1	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO
1.3	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar
1.5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
1.7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

1.11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
1.12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar
1.13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT
1.14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
1.15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman
1.16	Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan (2026-2029)
SK 2 Meningkatnya efektivitas KIE	
2.1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
2.2	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
2.3	Jumlah desa pangan aman
2.4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas
SK 3 Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	
3.1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan
SK 4 Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	
4.1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT
SK 5 Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	
5.1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

SK 6	Layanan Publik UPT yang prima
6.1	Indeks Pelayanan Publik UPT
SK 7	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal
7.1	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM
7.2	Nilai AKIP UPT BPOM
7.3	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM
7.4	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI PANGKAL PINANG,



AGUS RIYANTO

Lampiran 7
Realisasi IKU Balai POM di Pangkal Pinang Triwulan I Tahun 2026

No	Nama Indikator	Target Tahun 2026	Bulan	RAPK			Capaian terhadap target tahunan	Anggaran			
				Target	Realisasi sd	Capaian (%)		Pagu 2026	RPD sd	Realisasi sd (SPAN)	Capaian (%)
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98,75	Jan	-	-	-	-	Rp 348.770.500	Rp 680.000	Rp 680.000	0,19%
			Feb	98,75	100,00	101,27 %	101,27 %	Rp 348.770.500	Rp 16.650.390	Rp 16.650.390	4,77%
			Maret	98,75	100,00	101,27 %	101,27 %	Rp 348.770.500	Rp 27.674.390	Rp 28.782.503	8,25%
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	27,85	Jan	-	-	-	-	Rp 5.983.000	Rp -	Rp -	0,00%
			Feb	-	-	-	-	Rp 5.983.000	Rp 5.983.000	Rp 3.639.000	60,82%
			Maret	-	-	-	-	Rp 5.983.000	Rp 5.983.000	Rp 3.639.000	60,82%
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98,90	Jan	98,9	100,00	101,11 %	101,11 %	Rp 144.855.500	Rp 340.000	Rp 340.000	0,23%
			Feb	98,9	100,00	101,11 %	101,11 %	Rp 144.855.500	Rp 6.538.128	Rp 6.538.129	4,51%
			Maret	98,9	100,00	101,11 %	101,11 %	Rp 144.855.500	Rp 10.548.128	Rp 12.235.529	8,45%
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	Jan	100	0	0,00%	0,00%	Rp 8.198.400	Rp -	Rp -	0,00%
			Feb	100	0,00	0,00%	0,00%	Rp 8.198.400	Rp -	Rp -	0,00%
			Maret	100	100,00	100,00 %	100,00 %	Rp 8.198.400	Rp -	Rp -	0,00%
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,50	Jan	-	-	-	-	Rp 9.369.600	Rp -	Rp -	0,00%
			Feb	96,5	20,00	20,73%	20,73%	Rp 9.369.600	Rp -	Rp -	0,00%
			Maret	96,5	99,33	102,94 %	102,94 %	Rp 9.369.600	Rp -	Rp -	0,00%
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan	85,00	Jan	85	100,00	117,65 %	117,65 %	Rp 14.630.800	Rp 34.000	Rp 34.000	0,23%
			Feb	85	81,40	95,76%	95,76%	Rp 14.630.800	Rp 1.318.000	Rp 900.000	6,15%

No	Nama Indikator	Target Tahun 2026	Bulan	RAPK			Capaian terhadap target tahunan	Anggaran			
				Target	Realisasi sd	Capaian (%)		Pagu 2026	RPD sd	Realisasi sd (SPAN)	Capaian (%)
	Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder		Maret	85	88,06	103,60 %	103,60 %	Rp 14.630.800	Rp 2.500.000	Rp 2.121.000	14,50%
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	Jan	100	0,00	0,00%	0,00%	Rp 19.076.500	Rp -	Rp -	0,00%
			Feb	100	100,00	100,00 %	100,00 %	Rp 19.076.500	Rp 2.763.600	Rp 2.583.960	13,55%
			Maret	100	100,00	100,00 %	100,00 %	Rp 19.076.500	Rp 2.763.600	Rp 2.583.960	13,55%
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94,25	Jan	94,25	0,00	0,00%	0,00%	Rp 79.240.480	Rp -	Rp -	0,00%
			Feb	94,25	100,00	106,10 %	106,10 %	Rp 79.240.480	Rp 11.009.400	Rp 10.240.178	12,92%
			Maret	94,25	100,00	106,10 %	106,10 %	Rp 79.240.480	Rp 11.009.400	Rp 10.240.178	12,92%
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,60	Jan	96,6	100,00	103,52 %	103,52 %	Rp 109.656.680	Rp 166.600	Rp 166.600	0,15%
			Feb	96,6	98,33	101,79 %	101,79 %	Rp 109.656.680	Rp 8.760.000	Rp 6.563.701	5,99%
			Maret	96,6	100,00	103,52 %	103,52 %	Rp 109.656.680	Rp 14.551.800	Rp 12.546.601	11,44%
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,25	Jan	93,25	94,17	100,98 %	100,98 %	Rp 172.896.140	Rp 105.400	Rp 105.400	0,06%
			Feb	93,25	97,31	104,35 %	104,35 %	Rp 172.896.140	Rp 26.542.000	Rp 22.765.580	13,17%
			Maret	93,25	98,33	105,45 %	105,45 %	Rp 172.896.140	Rp 49.526.200	Rp 77.701.250	44,94%
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	93,83	Jan	93,83	81,83	87,21%	87,21%	Rp 4.144.000	Rp -	Rp -	0,00%
			Feb	93,83	92,23	98,30%	98,30%	Rp 4.144.000	Rp -	Rp -	0,00%
			Maret	93,83	93,34	99,48%	99,48%	Rp 4.144.000	Rp -	Rp -	0,00%
12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai	84,04	Jan	84,04	100,00	118,99 %	118,99 %	Rp 17.053.000	Rp -	Rp -	0,00%
			Feb	84,04	100,00	118,99 %	118,99 %	Rp 17.053.000	Rp 608.100	Rp 608.100	3,57%
			Maret	84,04	100,00	118,99	118,99	Rp	Rp	Rp	5,61%

No	Nama Indikator	Target Tahun 2026	Bulan	RAPK			Capaian terhadap target tahunan	Anggaran			
				Target	Realisasi sd	Capaian (%)		Pagu 2026	RPD sd	Realisasi sd (SPAN)	Capaian (%)
	standar		t			%	%	17.053.000	1.088.100	957.100	
13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100,00	Jan	-	0	0	0,00%	Rp 16.159.400	Rp 34.000	Rp 34.000	0,21%
			Feb	-	0	0	0,00%	Rp 16.159.400	Rp 1.777.000	Rp 1.329.380	8,23%
			Maret	-	0	0	0,00%	Rp 16.159.400	Rp 2.959.000	Rp 2.550.380	15,78%
14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	78,6	Jan	-	-	-	-	Rp 3.639.932.000	Rp -	Rp -	0,00%
			Feb	-	-	-	-	Rp 3.639.932.000	Rp 72.488.000	Rp 70.592.063	1,94%
			Maret	78,2	78,2	100,00%	99,49%	Rp 3.639.932.000	Rp 233.387.999	Rp 146.035.605	4,01%
15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	40,0	Jan	-	-	-	-	Rp 22.160.000	Rp -	Rp -	0,00%
			Feb	-	-	-	-	Rp 22.160.000	Rp -	Rp -	0,00%
			Maret	-	-	-	-	Rp 22.160.000	Rp 17.160.000	Rp -	0,00%
16	Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81,0	Jan	-	-	-	-		Rp -	Rp -	0,00%
			Feb	-	-	-	-		Rp -	Rp -	0,00%
			Maret	-	-	-	-				0,00%
16	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,85	Jan	-	-	-	-	Rp 116.138.000	Rp -	Rp -	0,00%
			Feb	-	-	-	-	Rp 116.138.000	Rp 4.999.999	Rp 6.314.000	5,44%
			Maret	86,85	88,79	102,23%	102,23%	Rp 116.138.000	7.999.999	7.814.000	6,73%
17	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	7	Jan	5	5,00	100,00%	0,00%	Rp 69.515.000	Rp -	Rp -	0,00%
			Feb	5	5,00	100,00%	-%	Rp 69.515.000	0	0	0,00%
			Maret	10,00	10,00	100,00	10,00%	Rp	2.845.000	1.820.000	2,62%

No	Nama Indikator	Target Tahun 2026	Bulan	RAPK			Capaian terhadap target tahunan	Anggaran			
				Target	Realisasi	Capaian (%)		Pagu 2026	RPD sd	Realisasi sd (SPAN)	Capaian (%)
			t			%		69.515.000			
18	Jumlah desa pangan aman	3	Jan	5	5,00	100,00 %	-%	Rp 72.577.000	Rp -	Rp -	0,00%
			Feb	5	5,00	100,00 %	-%	Rp 72.577.000	0	0	0,00%
			Maret	10,00	10,00	100,00 %	10,00%	Rp 72.577.000	0	1.820.000	2,51%
19	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	Jan	5	5,00	100,00 %	-%	Rp 36.673.000	Rp -	Rp -	0,00%
			Feb	5	5,00	100,00 %	-%	Rp 36.673.000	0	0	0,00%
			Maret	10,00	10,00	100,00 %	10,00%	Rp 36.673.000	0	0	0,00%
20	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	31,25	Jan	2,50	4,44	177,78 %	40,00%	Rp 37.257.000	Rp 510.000	Rp 510.000	1,37%
			Feb	2,70	4,80	177,78 %	37,04%	Rp 37.257.000	Rp 850.000	Rp 850.000	2,28%
			Maret	12,90	12,49	96,81%	39,96%	Rp 37.257.000	2.670.000	2.330.000	6,25%
21	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	92,50	Jan	0	0	-	-	Rp 142.830.000	3.280.000	3.280.000	2,30%
			Feb	33,33	33,33	100,01 %	3,00%	Rp 142.830.000	10.519.998	8.016.000	5,61%
			Maret	33,33	33,33	100,01 %	3,00%	Rp 142.830.000	Rp 14.699.996	Rp 12.384.000	8,67%
22	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	94,00	Jan	50	1	1,00%	0,53%	Rp 5.230.000	Rp -	Rp -	0,00%
			Feb	50	1	1,00%	0,53%	Rp 5.230.000	0	0	0,00%
			Maret	50	50,00%	1,00%	0,53%	Rp 5.230.000	0	0	0,00%
23	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,85	Jan	-	-	-	-	Rp 7.591.000	510.000	510.000	6,72%
			Feb	-	-	-	-	Rp 7.591.000	Rp 510.000	Rp 510.000	6,72%

No	Nama Indikator	Target Tahun 2026	Bulan	RAPK			Capaian terhadap target tahunan	Anggaran			
				Target	Realisasi sd	Capaian (%)		Pagu 2026	RPD sd	Realisasi sd (SPAN)	Capaian (%)
			Maret	-	-	-	-	Rp 7.591.000	1.520.000	510.000	6,72%
24	Nilai Pembangunan ZI UPT	90,40	Jan	-	-	-	-	Rp 661.291.000	14.591.838	14.591.838	2,21%
			Feb	-	-	-	-	Rp 661.291.000	35.355.838	34.602.838	5,23%
			Maret	-	-	-	-	Rp 661.291.000	58.755.838	74.506.313	11,27%
25	Nilai AKIP UPT	80,10	Jan	-	-	-	-	Rp 156.999.000	Rp 8.937.732	Rp 8.937.732	5,69%
			Feb	-	-	-	-	Rp 156.999.000	Rp 24.760.000	Rp 24.161.742	15,39%
			Maret	-	-	-	-	Rp 156.999.000	32.759.999	30.606.242	19,49%
26	Nilai Kinerja Anggaran UPT	5	Jan	-	-	-	-	Rp 5.454.781.000	Rp 293.024.596	Rp 293.024.596	5,37%
			Feb	-	-	-	-	Rp 5.454.781.000	Rp 674.800.790	Rp 673.327.793	12,34%
			Maret	-	-	-	-	Rp 5.454.781.000	1.292.420.643	1.291.037.379	23,67%
27	Indeks Manajemen Risiko UPT	2,94	Jan	-	-	-	-	Rp 315.112.000	Rp 70.000.000	Rp 70.000.000	22,21%
			Feb	-	-	-	-	Rp 315.112.000	75.952.000	82.699.544	26,24%
			Maret	-	-	-	-	Rp 315.112.000	81.904.000	91.826.670	29,14%

Lampiran 8

Matriks Tingkat Efisiensi Kinerja Per Output Balai POM di Pangkal Pinang Triwulan I Tahun 2026

No	Kegiatan	Output			Input			IE	TE	Capaian TE	Keterangan
		T	R	%	T	R	%				
1	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	3	3	100,00	Rp -	Rp -	-	-	-	-	Tidak dapat dihitung TE nya
2	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	57	89	156,14	Rp 1.520.000	Rp 510.000	33,55	4,65	3,65	75% (Tidak Efisien)	
3	Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	10,00%	10,00%	100,00	Rp 2.845.000	Rp 1.820.000	63,97	1,56	0,56	92% (Efisien)	
4	Desa Pangan Aman	10,00%	10,00%	100,00	Rp -	Rp 1.820.000	-	-	-	-	Tidak dapat dihitung TE nya
5	Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	10,00%	10,00%	100,00	Rp -	Rp -	-	-	-	-	Tidak dapat dihitung TE nya
6	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	50	54	108,00	Rp 4.999.999	Rp 7.814.000	156,28	0,69	-0,31	Tidak Efisien	
7	Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diperiksa sesuai ketentuan oleh UPT BPOM	36	36	100,00	Rp 1.088.100	Rp 957.100	87,96	1,14	0,14	100% (Efisien)	
8	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	24,00%	24,00%	100,00	Rp 1.760.000	Rp 1.640.000	93,18	1,07	0,07	100% (Efisien)	
9	Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	1	1	100,00	Rp 3.000.000	Rp -	0,00	-	-	-	Tidak dapat dihitung TE nya

No	Kegiatan	Output			Input			IE	TE	Capaian TE	Keterangan
		T	R	%	T	R	%				
10	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	32,75%	32,75%	100,00	Rp 188.488.000	Rp 101.235.605	53,71	1,86	0,86	88% (Efisien)	
11	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM PANGKAL PINANG	15,00%	15,00%	100,00	Rp 14.699.996	Rp 12.384.000	84,24	1,19	0,19	100% (Efisien)	
12	Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans	45	45	100,00	Rp 5.983.000	Rp 3.639.000	60,82	1,64	0,64	90% (Efisien)	
13	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	0	0,50	-	Rp 2.670.000	Rp 2.330.000	87,27	-	-	-	Tidak dapat dihitung TE nya
14	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	44	44	100,00	Rp 27.708.128	Rp 12.235.529	44,16	2,26	1,26	84% (Tidak Efisien)	
15	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	96	96	100,00	Rp 27.674.390	Rp 28.782.503	104,00	0,96	-0,04	Tidak Efisien	
16	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	3	3	100,00	Rp 680.000	Rp 680.000	100,00	1,00	0,00	100% (Efisien)	
17	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	65	67	103,08	Rp 82.629.999	Rp 107.063.370	129,57	0,80	-0,20	Tidak Efisien	
18	Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	59,00%	59,00%	100,00	Rp 44.899.999	Rp 44.800.000	99,78	1,00	0,00	100% (Efisien)	

No	Kegiatan	Output			Input			IE	TE	Capaian TE	Keterangan
		T	R	%	T	R	%				
19	Layanan BMN	0,00%	0,00%	-	Rp -	Rp -	-	-	-	-	Tidak dapat dihitung TE nya
20	Layanan Perkantoran	25,00%	25,00%	100,00	Rp 1.464.080.480	Rp 1.486.336.604	101,52	0,99	-0,01	Tidak Efisien	

Lampiran 9

Matriks Tingkat Efisiensi Kinerja Per Indikator Balai POM di Pangkal Pinang Triwulan I Tahun 2026

No	Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian	Keterangan
		T	R	%	Target (RPD TW I)	Realisasi	%				
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98,75	100,00	101,27	27.674.390	28.782.503	104,00	0,97	- 0,03	Tidak Efisien	
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	-	-	-	5.983.000	3.639.000	60,82	-	-	-	Tidak dapat dihitung TE nya
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98,9	100,00	101,11	10.548.128	12.235.529	116,00	0,87	- 0,13	Tidak Efisien	
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100,00	0	0	-	-	-	-	Tidak dapat dihitung TE nya
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,5	99	102,93	0	0	-	-	-	-	Tidak dapat dihitung TE nya
6	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85	44,03	51,80	2.500.000	2.121.000	84,84	0,61	- 0,39	Tidak Efisien	
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100,00	2.763.600	2.583.960	93,50	1,07	0,07	100% (Efisien)	
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94,25	100	106,10	11.009.400	10.240.178	93,01	1,14	0,14	100% (Efisien)	
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,6	100	103,52	14.551.800	12.546.601	86,22	1,20	0,20	100% (Efisien)	

No	Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian	Keterangan
		T	R	%	Target (RPD TW I)	Realisasi	%				
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,25	98	105,45	49.526.200	77.701.250	156,89	0,67	- 0,33	Tidak Efisien	
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	93,83	93,34	99,48	0	0	-	-	-	-	Tidak dapat dihitung TE nya
12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	84,04	100	118,99	1.088.100	957.100	87,96	1,35	0,35	95% (Efisien)	
13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	-	-	-	2.959.000	2.550.380	86,19	-	-	-	Tidak dapat dihitung TE nya
14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	78,2	78,2	100,00	233.387.999	146.035.605	62,57	1,60	0,60	92% (Efisien)	
15	Persentase Kabupaten/ Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	-	-	-	17.160.000	0	0,00	-	-	-	Tidak dapat dihitung TE nya
16	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,85	88,79	102,23	7.999.999	7.814.000	97,68	1,05	0,05	100% (Efisien)	
17	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	10	10	100	2.845.000	1.820.000	63,97	1,56	0,56	92% (Efisien)	
18	Jumlah desa pangan aman	10	10	100	0	1.820.000	-	-	-	-	Tidak dapat dihitung TE nya
19	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	10	10	100	0	0	-	-	-	-	Tidak dapat dihitung TE nya

No	Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian	Keterangan
		T	R	%	Target (RPD TW I)	Realisasi	%				
20	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	12,9	12,49	96,82	2.670.000	2.330.000	87,27	1,11	0,11	100% (Efisien)	
21	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	33,33	33,33	100,00	14.699.996	12.384.000	84,24	1,19	0,19	100% (Efisien)	
22	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50,00	100,00	0	0	-	-	-	-	Tidak dapat dihitung TE nya
23	Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-	1.520.000	510.000	33,55	-	-	-	Tidak dapat dihitung TE nya
24	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	-	-	-	58.755.838	74.506.313	126,81	-	-	-	Tidak dapat dihitung TE nya
25	Nilai AKIP UPT BPOM	-	-	-	32.759.999	30.606.242	93,43	-	-	-	Tidak dapat dihitung TE nya
26	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	-	-	1.292.420.643	1.291.037.379	99,89	-	-	-	Tidak dapat dihitung TE nya
27	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-	-	81.904.000	91.826.670	112,12	-	-	-	Tidak dapat dihitung TE nya

Lampiran 10

Matriks Tingkat Efisiensi Kinerja Per Sasaran Kegiatan Balai POM di Pangkal Pinang Triwulan I Tahun 2026

No	Sasaran Kegiatan	Output	Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian	Keterangan
		%	Target (RPD TW I)	Realisasi	%				
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	98,69	353.049.617	293.203.726	83,05	1,19	0,19	100% (Efisien)	
2	Meningkatnya efektivitas KIE	101,12	10.844.999	9.634.000	88,83	1,14	0,14	100% (Efisien)	
3	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	96,82	2.670.000	2.330.000	87,27	1,11	0,11	100% (Efisien)	
4	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	100,00	14.699.996	12.384.000	84,24	1,19	0,19	100% (Efisien)	
5	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	100,00	0	0	-	-	-	-	Tidak Dapat Dihitung Efisiensinya
6	Layanan Publik UPT yang prima	-	1.520.000	510.000	33,55	-	-	-	Tidak Dapat Dihitung Efisiensinya
7	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	-	1.467.360.480	1.487.976.604	101,40	-	-	-	Tidak Dapat Dihitung Efisiensinya

Lampiran 11

Capaian RAPK Triwulan I Tahun 2026 BPOM di Pangkal Pinang

KERTAS KERJA CAPAIAN RAPK
TRIWULAN I TAHUN 2026
BALAI POM DI PANGKAL PINANG

No	Indikator	Target 2026	Realisasi s.d bulan JANUARI				Realisasi s.d bulan FEBRUARI				Realisasi s.d bulan MARET				Link Kertas Kerja Perhitungan	Link Sumber Data
			Target	Realisasi	%Capaian thd Target tahun n	%Capaian thd Target tahun n	Target	Realisasi	%Capaian thd Target tahun n	%Capaian thd Target tahun n	Target	Realisasi	%Capaian thd Target tahun n	%Capaian thd Target tahun n		
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang diindikasikan sesuai ketentuan	98,75	-	-	-	-	98,75	100	101,27	101,27	98,75	100	101,27	101,27	https://docs.google.com/spreadsheets/d/17nG_n8uL-VI_wvKGMl_RdZK1Ad-HyR95wCQpvcw/edit?usp=sharing&hl=id&authkey=ACw5744N16	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1N0IP7naxZl-nK04s0nph11No1N0us7B9wls/edit?usp=sharing&hl=id&authkey=ACw5744N16
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESD	27,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1T28-dHLL-2QwA29Dn-d187dRw-4d1%3DnAkl-usaet8?usp=sharing&hl=id&authkey=ACw5744N16	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1T28-dHLL-2QwA29Dn-d187dRw-4d1%3DnAkl-usaet8?usp=sharing&hl=id&authkey=ACw5744N16
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang diindikasikan sesuai ketentuan	98,9	-	-	-	-	98,9	100	101,11	101,12	98,9	100	101,11	101,12	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1G6q4w5e1M4FckwF558H1n5e-70kx7w-9DZDn7dusdtrwz16t46793k1Bust-186579361	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1G6q4w5e1M4FckwF558H1n5e-70kx7w-9DZDn7dusdtrwz16t46793k1Bust-186579361
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	-	-	-	-	100	0	0	0,00	100	100	100	100,00	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1T28-dHLL-2QwA29Dn-d187dRw-4d1%3DnAkl-usaet8?usp=sharing&hl=id&authkey=ACw5744N16	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1T28-dHLL-2QwA29Dn-d187dRw-4d1%3DnAkl-usaet8?usp=sharing&hl=id&authkey=ACw5744N16
5	Persentase sampel PBCT berisiko yang diindikasikan sesuai ketentuan	96,5	-	-	-	-	96,5	0	0	0,00	96,5	99,33	102,94	102,94	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QzzGep_CGcvu-SP1P1890uG0U-baRG8QoLW0Tr1Yvsk2qjke-a15458750/edit?usp=sharing&hl=id&authkey=ACw5744N16	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QzzGep_CGcvu-SP1P1890uG0U-baRG8QoLW0Tr1Yvsk2qjke-a15458750/edit?usp=sharing&hl=id&authkey=ACw5744N16
6	Persentase kelompok/kekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diindikasikan oleh stakeholder	85	85	100	117,65	117,65	85	40,7	47,88	47,88	85	44,03	51,80	51,80	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1W7w4k5a-Amph2G7Hnec5B8uY4LgZu-25cG6SEnWw9w9?usp=sharing&hl=id&authkey=ACw5744N16	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1W7w4k5a-Amph2G7Hnec5B8uY4LgZu-25cG6SEnWw9w9?usp=sharing&hl=id&authkey=ACw5744N16
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diindikasikan sesuai ketentuan	100	100	0	0	0,00	100	100	100	100,00	100	100	100	100,00	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1F02WPPMe66Bn-J6-RtF0C2H89d-w0JB6FEdm-181529344/edit?usp=sharing&hl=id&authkey=ACw5744N16	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1F02WPPMe66Bn-J6-RtF0C2H89d-w0JB6FEdm-181529344/edit?usp=sharing&hl=id&authkey=ACw5744N16

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	Target 2026	Realisasi s.d bulan				Realisasi s.d bulan				Realisasi s.d bulan				Link Kertas Kerja Perhitungan	Link Sumber Data
			JANUARI				FEBRUARI				MARET					
			Target	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n	Target	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n	Target	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n		
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan diindaklanjuti sesuai ketentuan	94,25	94,25	0	0	0,00	94,25	100	106,1	106,11	94,25	100	106,1	106,11	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Qp3e3K6K_mQpQwLhE903w7Tfz-BDQWt_CqadkCqsd/edit#gid=177692364&hl=id	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Qp3e3K6K_mQpQwLhE903w7Tfz-BDQWt_CqadkCqsd/edit#gid=177692364&hl=id
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diindaklanjuti sesuai ketentuan	96,6	96,6	100	103,52	103,52	96,6	96,33	101,70	101,80	96,6	100	103,52	103,52	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Dtd6Qm-eaRfH-hedRfndf-X-56n75-F71Uv9gRQw4/edit#gid=107266016&hl=id&hl=id	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Dtd6Qm-eaRfH-hedRfndf-X-56n75-F71Uv9gRQw4/edit#gid=107266016&hl=id&hl=id
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan diindaklanjuti sesuai ketentuan	93,25	93,25	94,7	100,98	100,98	93,25	97,31	104,36	104,36	93,25	98,33	105,45	105,46	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HhVv6Np7983z7295L8agCQa-zP1w0X-c9784VnMedit/edit#gid=1136053142&hl=id&hl=id	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HhVv6Np7983z7295L8agCQa-zP1w0X-c9784VnMedit/edit#gid=1136053142&hl=id&hl=id
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	93,83	93,83	81,83	87,21	87,21	93,83	92,23	98,3	98,30	93,83	93,34	99,48	99,48	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1R1vncP-BI-cvRexMTac-_hoRQ0zCTwI-WTAAZ1rMvN-VYuedf/edit#gid=136560016&hl=id&hl=id	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1R1vncP-BI-cvRexMTac-_hoRQ0zCTwI-WTAAZ1rMvN-VYuedf/edit#gid=136560016&hl=id&hl=id
12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	94,04	94,04	100,00	118,99	100	94,04	100	118,99	100	94,04	100	118,99	100,00	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jwCkMMP55Qw67_9FmZ6H46AP64BQ16p46/edit#gid=1337970582&hl=id&hl=id	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jwCkMMP55Qw67_9FmZ6H46AP64BQ16p46/edit#gid=1337970582&hl=id&hl=id
13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vT2B-dHJL7Qw528DQ-d1B7Z8Bw_g478-7QD9M4uuedf/edit#gid=41248174&hl=id&hl=id	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vT2B-dHJL7Qw528DQ-d1B7Z8Bw_g478-7QD9M4uuedf/edit#gid=41248174&hl=id&hl=id
14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	78,6	-	-	-	-	-	-	-	-	78,2	78,2	100	99,50	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1T86-dHJL7Qw528DQ-d1B7Z8Bw_g478-7QD9M4uuedf/edit#gid=41248174&hl=id&hl=id	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1T86-dHJL7Qw528DQ-d1B7Z8Bw_g478-7QD9M4uuedf/edit#gid=41248174&hl=id&hl=id
15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vT2B-dHJL7Qw528DQ-d1B7Z8Bw_g478-7QD9M4uuedf/edit#gid=41248174&hl=id&hl=id	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vT2B-dHJL7Qw528DQ-d1B7Z8Bw_g478-7QD9M4uuedf/edit#gid=41248174&hl=id&hl=id
16	Tingkat efektivitas RLE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,85	-	-	-	-	-	-	-	-	86,85	88,78	102,23	102,24	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vT2B-dHJL7Qw528DQ-d1B7Z8Bw_g478-7QD9M4uuedf/edit#gid=41248174&hl=id&hl=id	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vT2B-dHJL7Qw528DQ-d1B7Z8Bw_g478-7QD9M4uuedf/edit#gid=41248174&hl=id&hl=id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	Target 2026	Realisasi s.d bulan				Realisasi s.d bulan				Realisasi s.d bulan				Link Kertas Kerja Perhitungan	Link Sumber Data
			JANUARI				FEBRUARI				MARET					
			Target	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n	Target	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n	Target	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n		
17	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	7	5	5	100	5,00	5	5	100	5	10	10	100	10,00	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Y2RgR4F0a3wpjx0t6eTav72oaq53Hx3Xre_F1ucw41/edit?usp=sharing&tab=t#gid=341469248&gid=341469248	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Y2RgR4F0a3wpjx0t6eTav72oaq53Hx3Xre_F1ucw41/edit?usp=sharing&tab=t#gid=341469248&gid=341469248
18	Jumlah desa pangan aman	3	5	5	100	5,00	5	5	100	5	10	10	100	10,00	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wQw6Yw6M6n67a7Tgag-5Hh3Wp-E1ucw41/edit?usp=sharing&tab=t#gid=341469248&gid=341469248	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wQw6Yw6M6n67a7Tgag-5Hh3Wp-E1ucw41/edit?usp=sharing&tab=t#gid=341469248&gid=341469248
19	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	5	5	100	5,00	5	5	100	5	10	10	100	10,00	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wQw6Yw6M6n67a7Tgag-5Hh3Wp-E1ucw41/edit?usp=sharing&tab=t#gid=341469248&gid=341469248	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wQw6Yw6M6n67a7Tgag-5Hh3Wp-E1ucw41/edit?usp=sharing&tab=t#gid=341469248&gid=341469248
20	Persentase UMM yang berdampak dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan DBA, Kru yang baik dan/atau IP CPOB (pangan olahan)	31,25	2,5	4,44	177,78	14,22	2,7	4,8	177,78	15,36	12,9	12,49	96,81	38,97	https://docs.google.com/spreadsheets/d/17gPQ5m34w7wP9Qa0FMy2NPvFak0B_-m_Kajmrcvq47/edit?usp=sharing&tab=t#gid=148689976&gid=148689976	https://docs.google.com/spreadsheets/d/17gPQ5m34w7wP9Qa0FMy2NPvFak0B_-m_Kajmrcvq47/edit?usp=sharing&tab=t#gid=148689976&gid=148689976
21	Persentase Keberhasilan Penyediaan Kejadian Sekedar Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	82,5	-	-	-	-	33,33	33,33	100,01	38,04	33,3	33,33	100,1	38,04	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Geg7e20KwJskKqR1CJdmWpSnlwqArUfuzp47/edit?usp=sharing&tab=t#gid=341469248&gid=341469248	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Geg7e20KwJskKqR1CJdmWpSnlwqArUfuzp47/edit?usp=sharing&tab=t#gid=341469248&gid=341469248
22	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sekedar Farmasi dan Pangan Olahan yang diserahkan sesuai standar	94	50	50	100	53,19	50	50	100	53,19	50	50	100	53,19	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1v72B-d5U_L2QvqA2R0v4d1BZA6gzc_n47w37DAklJugw47/edit?usp=sharing&tab=t#gid=841248174&gid=841248174	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1v72B-d5U_L2QvqA2R0v4d1BZA6gzc_n47w37DAklJugw47/edit?usp=sharing&tab=t#gid=841248174&gid=841248174
23	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1v72B-d5U_L2QvqA2R0v4d1BZA6gzc_n47w37DAklJugw47/edit?usp=sharing&tab=t#gid=841248174&gid=841248174	
24	Nilai Pembangunan di UPT	90,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1v72B-d5U_L2QvqA2R0v4d1BZA6gzc_n47w37DAklJugw47/edit?usp=sharing&tab=t#gid=841248174&gid=841248174	
25	Nilai AKOP UPT	90,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1v72B-d5U_L2QvqA2R0v4d1BZA6gzc_n47w37DAklJugw47/edit?usp=sharing&tab=t#gid=841248174&gid=841248174	
26	Nilai Kinerja Anggaran UPT	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1v72B-d5U_L2QvqA2R0v4d1BZA6gzc_n47w37DAklJugw47/edit?usp=sharing&tab=t#gid=841248174&gid=841248174	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	Target 2026	Realisasi s.d bulan				Realisasi s.d bulan				Realisasi s.d bulan				Link Kertas Kerja Perhitungan	Link Sumber Data
			JANUARI				FEBRUARI				MARET					
			Target	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n	Target	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n	Target	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n		
27	Indeks Manajemen Risiko UPT	2.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vT2B-d5DL2QvoARQvA1B76Rsz_g41gA17QbAkUasiodf7nol-S41268173Mocv-Rd1248178/edit#gid=1248178	

Pangkal Pinang, 09 April 2026
Kepala Balai POM di Pangkal Pinang



Agus Riyanto, S.Farm, Apt., M.M.

Lampiran 12

Tabel Keselarasan Nomenklatur Data Kinerja Triwulan I Tahun 2026

No	Renstra 2025-2029	Revisi SK IKU	RKT 2026	PK 2026	RAPK 2026	Keterangan
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Sesuai
2	Meningkatnya efektivitas KIE	Meningkatnya efektivitas KIE	Meningkatnya efektivitas KIE	Meningkatnya efektivitas KIE	Meningkatnya efektivitas KIE	Sesuai
3	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Sesuai
4	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Sesuai
5	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Sesuai

No	Renstra 2025-2029	Revisi SK IKU	RKT 2026	PK 2026	RAPK 2026	Keterangan
	UPT	kerja UPT				
6	Layanan Publik UPT yang prima	Layanan Publik UPT yang prima	Layanan Publik UPT yang prima	Layanan Publik UPT yang prima	Layanan Publik UPT yang prima	Sesuai
7	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Sesuai

Lampiran 13

Tabel Keselarasan Perencanaan Data Kinerja Triwulan I Tahun 2026

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Renstra (2026)	RKT 2026	PK 2026
				Target	Target	Target
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,25	90,25	98,75
		2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	27	27	27,85
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	91	98,9
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	90	96,5
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85	85	85
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92	92	94,25
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95,75	95,75	96,6

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Renstra (2026)	RKT 2026	PK 2026
				Target	Target	Target
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92	92	93,25
		11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	89,6	89,6	93,83
		12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	81	81	84,04
		13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	100	100
		14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	77	77	78,6
		15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	40	40	40
		16	Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81	81	
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	16	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,85	86,85	86,85
		17	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	10	10	7
		18	Jumlah desa pangan aman	6	6	3
		19	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	1

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Renstra (2026)	RKT 2026	PK 2026
				Target	Target	Target
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	20	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	31,25	31,25	31,25
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	21	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	91	91	92,5
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	22	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	91	91	94
7	Layanan Publik UPT yang prima	23	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,75	4,75	4,85
8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	24	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	90,4	90,4	90,4
		25	Nilai AKIP UPT BPOM	81,8	81,8	80,1
		26	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	5	5
		27	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,94	2,94	2,94

Lampiran 14

Tabel Keselarasan Pengukuran Data Kinerja Triwulan I Tahun 2026

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Laporan Kinerja Interim Triwulan I			Laporan Evaluasi Internal			Sumber Data (Madu Pelawan)		
				Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98,75	100,00	101,27%	98,75	100,00	101,27%	98,75	100,00	101,27%
		2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98,9	100,00	101,11%	98,9	100,00	101,11%	98,9	100,00	101,11%
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100,00	100,00%	100	100,00	100,00%	100	100,00	100,00%
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,5	99,33	102,94%	96,5	99,33	102,94%	96,5	99,33	102,94%
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85	44,03	51,80%	85	44,03	51,80%	85	44,03	51,80%

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Laporan Kinerja Interim Triwulan I			Laporan Evaluasi Internal			Sumber Data (Madu Pelawan)		
				Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
		14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	78,2	78,20	100,00%	78,2	78,20	100,00%	78,2	78,20	100,00%
		15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	16	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,85	88,79	102,23%	86,85	88,79	102,23%	86,85	88,79	102,23%
		17	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	10	10	100,00%	10	10	100,00%	10	10	100,00%
		18	Jumlah desa pangan aman	10	10	100,00%	10	10	100,00%	10	10	100,00%
		19	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	10	10	100,00%	10	10	100,00%	10	10	100,00%
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	20	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	12,9	12,49	96,81%	12,9	12,49	96,81%	12,9	12,49	96,81%

[illegible]

Lampiran 15

Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2026

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Target Tahun 2026	Realisasi Triwulan I	% Capaian Terhadap Target Tahunan	Kategori
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98,75	100,00	101,27 	Tercapai/ Melampaui
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	27,85	-	-	
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98,90	100,00	101,11 	Tercapai/ Melampaui
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00	100,00	100,00 	Tercapai/ Melampaui
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,50	99,33	102,93 	Tercapai/ Melampaui
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85,00	44,03	51,80 	Perlu Upaya Keras
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,00	100,00	100,00 	Tercapai/ Melampaui
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94,25	100,00	106,10 	Tercapai/ Melampaui
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,60	100,00	103,52 	Tercapai/ Melampaui
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,25	98,33	105,45 	Tercapai/ Melampaui
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	93,83	93,34	99,48 	Akan Tercapai
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	84,04	100,00	118,99 	Tercapai/ Melampaui

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Target Tahun 2026	Realisasi Triwulan I	% Capaian Terhadap Target Tahunan	Kategori
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100,00	-	-	
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	78,60	78,20	99,49 	Akan Tercapai
Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	40,00	-	-	
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87	88,79	102,23 	Tercapai/ Melampaui
Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	7	10,00	10,00 	Perlu Upaya Keras
Jumlah desa pangan aman	3	10,00	10,00 	Perlu Upaya Keras
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1,00	10,00	10,00 	Perlu Upaya Keras
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	31,25	12,49	39,97 	Perlu Upaya Keras
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	92,5	33,33	36,03 	Perlu Upaya Keras
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	94	50,00	53,19 	Perlu Upaya Keras
Indeks Pelayanan Publik UPT	4,85	-	-	
Nilai Pembangunan ZI UPT	90,40	-	-	
Nilai AKIP UPT	80,10	-	-	
Nilai Kinerja Anggaran UPT	5,00	-	-	
Indeks Manajemen Risiko UPT	2,94	-	-	

Lampiran 16

Penyesuaian anggaran Triwulan I Tahun 2026

No	Jenis Revisi Anggaran	Dasar/Latar Belakang	Perubahan yang dilakukan	Bulan diajukan
1	Revisi Kewenangan DJA	• Nota Dinas Sekretaris Utama No. PR.04.02.2.12.25.771 tanggal 22 Desember 2025 tentang Penyampaian Data Pergeseran Anggaran Ke Dalam RO Khusus Berdasarkan Hasil Identifikasi Keuangan Dalam Rangka Penguatan Dukungan Pelaksanaan Prioritas Direktif Presiden	• Perubahan dilakukan pada seluruh akun dan seluruh RO yang terdapat di DIPA Balai POM di Pangkal Pinang sesuai dengan Hasil Identifikasi yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan	Desember 2025
	Revisi POK (Kewenangan KPA)	• Kebutuhan perjalanan dinas di dalam kota untuk kegiatan Audit Sertifikasi Dalam Kota yang berkenaan dengan IKU Indeks Pelayanan Publik UPT • Kebutuhan perjalanan dinas untuk kegiatan Pengembangan Kemampuan Laboratorium BB/BALAI POM, Pengadaan Baku pembanding , pengadaan reagen, media mikro, dan DNA untuk pengujian sampel pihak ketiga yang berkenaan dengan IKU Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium • Penyesuaian anggaran pada kegiatan Operasi Intelijen, Gelar Kasus dan Pelaporan, Rapat Pembahasan Rencana Penyidikan, Skenario Penindakan dan Olah TKP, Operasi Penindakan, Pemberkasan, dan Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (wasmalitrik) yang berkenaan dengan IKU Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	• Penambahan anggaran pada akun 524113 (Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota) • Penambahan anggaran pada akun 524119 (Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota), 521811 (Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi) • Penyesuaian pada akun 521211 (Belanja Bahan), 524113 (Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota), 524111 (Belanja Perjalanan Dinas Biasa, dan 522141 (Belanja Sewa)	Januari
3	Revisi Halaman III DIPA (Kewenangan Kanwil)	• Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang mana menyatakan Satker K/L dapat melakukan pemutakhiran RPD Bulanan paling lambat pada hari kerja kesepuluh setiap awal Triwulan; • Kebutuhan pembelian Penggandaan	• Penambahan anggaran pada detil Sosialisasi Keamanan Pangan Sekolah akun 521211 (Belanja Bahan) • Penyesuaian anggaran pada akun 524113 (Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota)	Februari

No	Jenis Revisi Anggaran	Dasar/Latar Belakang	Perubahan yang dilakukan	Bulan diajukan
		Pencetakan, ATK, dan pengadaan seminar KIT yang berkenaan dengan IKU Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan • Kebutuhan anggaran pada kegiatan Pengawasan, Sampling, dan Evaluasi Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik di Sarana Retail yang berkenaan dengan IKU Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar • Kebutuhan pengadaan Makanan/Minuman penambah daya tahan tubuh yang berkenaan dengan IKU Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	• Penambahan akun 52113 (Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh)	

Lampiran 17

Matriks Reviu Target Indikator Pada Perjanjian Kinerja



MATRIKS A2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI POM DI PANGKAL PINANG
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

KODE	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	REALISASI			REKOMENDASI UNIT PENGAMPU	TARGET RENSTRA/RKT 2026	TARGET 2026	JUSTIFIKASI	APPROVAL	REVIEW APPROVAL
		2024	2025	●						
DR.3165.01.01	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0	99		90.25	90.25	98.75	Target disesuaikan berdasarkan ketersediaan sumberdaya dan prediksi permasalahan yang mungkin dihadapi di tahun 2026.	●	1. pengisian target bulanan jangan diisi angka 0, agar dikosongkan saja. 2. tangging RO belum sesuai dengan cascading, agar diperbaiki.
DR.3165.01.02	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	0	27		27	27.00	27.85	Realisasi pada tahun 2025 telah mendekati target tahun 2026 pada renstra 2025-2029 sehingga perlu dilakukan penyesuaian target menjadi sedikit lebih tinggi dengan mempertimbangkan kemungkinan jumlah laporan KTD	●	ok

KODE	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	REALISASI			REKOMENDASI UNIT PENGAMPU	TARGET RENSTRA/RKT 2026	TARGET 2026	JUSTIFIKASI	APPROVAL	REVIEW APPROVAL
		2024	2025	●						
								yang akan disampaikan sarana		
DR.3165.01.03	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0	99		91	91.00	98.90	Realisasi pada tahun 2025 telah melebihi target tahun 2026 dan target akhir di tahun 2029 sehingga dilakukan perhitungan ulang untuk penyesuaian target agar tidak terjadi capaian melebihi 110%. Usulan perubahan target dihitung dengan mempertimbangkan realisasi tahun 2025, keterbatasan anggaran dan SDM yang dimiliki.	●	1. pengisian target bulanan jangan diisi angka 0, agar dikosongkan saja. 2. tangging RO belum sesuai dengan cascading, agar diperbaiki.
DR.3165.01.04	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	0	0		100	100.00	100.00	Target masih sesuai dengan target pada renstra 2025-2029 karena pada tahun 2025 tidak terdapat realisasi untuk indikator ini sehingga belum diperoleh data baseline	●	ok

KODE	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	REALISASI			REKOMENDASI UNIT PENGAMPU	TARGET RENSTRA/RKT 2026	TARGET 2026	JUSTIFIKASI	APPROVAL	REVIEW APPROVAL
		2024	2025	📌						
DR.3165.01.05	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0	96		90	90.00	96.50	Realisasi pada tahun 2025 telah melebihi target tahun 2026 dan target akhir di tahun 2029 sehingga dilakukan perhitungan ulang untuk penyesuaian target agar tidak terjadi capaian melebihi 110%. Usulan perubahan target dihitung dengan mempertimbangkan realisasi tahun 2025, keterbatasan anggaran dan SDM yang dimiliki.	🟢	ok
DR.3165.01.06	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	0	84		85	85.00	85.00	Target masih sesuai dengan target pada renstra 2025-2029	🟢	ok

KODE	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	REALISASI			REKOMENDASI UNIT PENGAMPU	TARGET RENSTRA/RKT 2026	TARGET 2026	JUSTIFIKASI	APPROVAL	REVIEW APPROVAL
		2024	2025	📌						
DR.3165.01.07	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0	100		100	100.00	100.00	Target masih sesuai dengan target pada renstra 2025-2029	🔴	1. pengisian target bulanan jangan diisi angka 0, agar dikosongkan saja. 2. tanggung RO belum sesuai dengan cascading, agar diperbaiki.
DR.3165.01.08	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0	94		92	92.00	94.25	Realisasi pada tahun 2025 telah melebihi target tahun 2026 dan target tahun 2028 pada renstra 2025-2029 sehingga perlu dilakukan penyesuaian target dengan mempertimbangkan SDM yang dimiliki dan kemungkinan masalah yang akan dihadapi. Pengurangan target RO (jumlah sarana yang diperiksa) berhubungan erat terhadap faktor pembagi perhitungan IKU	🔴	1. pengisian target bulanan jangan diisi angka 0, agar dikosongkan saja. 2. tanggung RO belum sesuai dengan cascading, agar diperbaiki.

KODE	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	REALISASI			REKOMENDASI UNIT PENGAMPU	TARGET RENSTRA/RKT 2026	TARGET 2026	JUSTIFIKASI	APPROVAL	REVIEW APPROVAL
		2024	2025	📌						
DR.3165.01.09	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0	97		95,75	95.75	96.60	Realisasi pada tahun 2025 telah melebihi target tahun 2026 dan target tahun 2027 pada renstra 2025-2029 sehingga perlu dilakukan penyesuaian target dengan mempertimbangkan SDM yang dimiliki dan kemungkinan masalah yang akan dihadapi	🟢	ok
DR.3165.01.10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0	93		92	92.00	93.25	Realisasi pada tahun 2025 telah melebihi target tahun 2026 dan target tahun 2027 pada renstra 2025-2029 sehingga perlu dilakukan penyesuaian target dengan mempertimbangkan SDM yang dimiliki dan kemungkinan masalah yang akan dihadapi	🟢	ok

KODE	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	REALISASI			REKOMENDASI UNIT PENGAMPU	TARGET RENSTRA/RKT 2026	TARGET 2026	JUSTIFIKASI	APPROVAL	REVIEW APPROVAL
		2024	2025	📌						
DR.3165.01.11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	0	94		89,6	89.60	93.83	Target sesuai dengan capaian kinerja tahun 2025	🟢	ok
DR.3165.01.12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai Standar	0	86		81	81.00	85.87	Target sesuai dengan capaian kinerja tahun 2025	🔴	1. tanggung RO belum sesuai dengan cascading, agar diperbaiki. 2.
DR.3165.01.13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	0	105		100	100.00	100.00	Realisasi pada tahun 2025 telah melebihi target tahun 2026 dan target akhir di tahun 2029 pada renstra 2025-2029 sehingga perlu dilakukan penyesuaian target. Tingginya realisasi tahun 2025 disebabkan tingginya capaian salah satu dari empat komponen penilaian IKU AMR yaitu penggunaan tools pengawasan AMR yang ditargetkan hanya sebesar 80%	🔴	pengisian target bulanan agar disesuaikan dengan manual iku

KODE	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	REALISASI			REKOMENDASI UNIT PENGAMPU	TARGET RENSTRA/RKT 2026	TARGET 2026	JUSTIFIKASI	APPROVAL	REVIEW APPROVAL
		2024	2025	📌						
DR.3165.01.14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	0	78		77	77.00	78.60	Penyesuaian target karena realisasi pada tahun 2025 telah melebihi target tahun 2026	🟢	ok
DR.3165.01.15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	0	20		40	40.00	40.00	target masih sesuai dengan target pada renstra 2025-2029	🟢	ok
DR.3165.04.01	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	96	87		86,85	86.85	86.85	target masih sesuai dengan target pada renstra 2025-2029	🔴	1. pengisian target bulanan jangan diisi angka 0, agar dikosongkan saja. 2. tangging RO belum sesuai dengan cascading, agar diperbaiki.

KODE	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	REALISASI			REKOMENDASI UNIT PENGAMPU	TARGET RENSTRA/RKT 2026	TARGET 2026	JUSTIFIKASI	APPROVAL	REVIEW APPROVAL
		2024	2025	📌						
DR.3165.04.04	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	76	7		10	10.00	4.00	Target PK Tahun 2026 dalam Renstra ditetapkan sebanyak 10 sekolah yang harus dilakukan intervensi. Namun, dengan mempertimbangkan adanya efisiensi anggaran pada tahun 2025, target pada awal tahun 2026 disesuaikan dan diturunkan menjadi 7 sekolah. Selanjutnya, dalam pelaksanaannya terdapat pemotongan anggaran kembali sebagai bentuk penyesuaian terhadap hasil identifikasi Kementerian Keuangan terkait target prioritas Presiden, yaitu sebesar 40,58% dari total anggaran pada RO ini. Oleh karena itu, diusulkan penyesuaian target indikator menjadi sebanyak 4 sekolah	🔴	1. pengisian target bulanan jangan diisi angka 0, agar dikosongkan saja. 2. target yang dicantumkan dalam PK masih mengacu pada target RO sesuai dipa awal, bukan hasil desk penyesuaian kemarin. 3. pengisian target bulanan agar disesuaikan dengan manual iku dan b1.

KODE	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	REALISASI			REKOMENDASI UNIT PENGAMPU	TARGET RENSTRA/RKT 2026	TARGET 2026	JUSTIFIKASI	APPROVAL	REVIEW APPROVAL
		2024	2025	❶						
								yang akan diintervensi		
DR.3165.04.05	Jumlah desa pangan aman	31	3		6	6.00	2.00	Target PK Tahun 2026 dalam Renstra ditetapkan sebanyak 6 desa yang harus dilakukan intervensi. Namun, dengan mempertimbangkan adanya efisiensi anggaran pada tahun 2025, target pada awal tahun 2026 disesuaikan dan diturunkan menjadi 3 desa. Selanjutnya, dalam pelaksanaannya terdapat pemotongan anggaran kembali sebagai bentuk penyesuaian terhadap hasil identifikasi Kementerian Keuangan terkait target prioritas Presiden, yaitu sebesar 43,07% dari total anggaran pada RO ini. Oleh karena itu, diusulkan	●	1. pengisian target bulanan jangan diisi angka 0, agar dikosongkan saja. 2. target yang dicantumkan dalam PK masih mengacu pada target RO sesuai dipa awal, bukan hasil desk penyesuaian kemarin. 3. pengisian target bulanan agar disesuaikan dengan manual iku dari b1.

KODE	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	REALISASI			REKOMENDASI UNIT PENGAMPU	TARGET RENSTRA/RKT 2026	TARGET 2026	JUSTIFIKASI	APPROVAL	REVIEW APPROVAL
		2024	2025	❶						
								penyesuaian target indikator menjadi sebanyak 2 desa yang akan diintervensi.		
DR.3165.04.06	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	10	1		1	1.00	1.00	target masih sesuai dengan target pada renstra 2025-2029	●	1. pengisian target bulanan jangan diisi angka 0, agar dikosongkan saja. 2. pengisian target bulanan agar disesuaikan dengan manual iku dari b1.
DR.3165.05.01	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	0	17		31,25	31.25	27.08	Terdapat perbedaan antara target PK tahun 2026 dalam Renstra sebanyak 8 sarana dan target RO tahun 2026 adalah sebanyak 9 sarana. Dengan adanya pemotongan anggaran hasil identifikasi Kementerian Keuangan sebanyak 45,45 % maka dilakukan penyesuaian target menjadi 5 sarana sehingga mengurangi jumlah akumulatif sarana	●	1. pengisian target bulanan jangan diisi angka 0, agar dikosongkan saja. 2. tanggung RO belum sesuai dengan cascading, agar diperbaiki.

KODE	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	REALISASI			REKOMENDASI UNIT PENGAMPU	TARGET RENSTRA/RKT 2026	TARGET 2026	JUSTIFIKASI	APPROVAL	REVIEW APPROVAL
		2024	2025	📌						
								yang didampingi tahun 2025-2029. Oleh karena itu diusulkan penyesuaian target tahunan menjadi 27,08 %		
DR.3165.06.01	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	0	93		91	91.00	92.50	Target sesuai dengan realisasi tahun 2025	🔴	pengisian target bulanan jangan diisi angka 0, agar dikosongkan saja.
DR.3165.07.01	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	0	94		91	91.00	0.00	Target sesuai dengan realisasi tahun 2025	🔴	realisasi 2025 sudah melebihi target 2026, maka target harus disesuaikan/dinaikan
DR.3165.08.01	Indeks Pelayanan Publik UPT	5	5		4,75	4.75	4.85	Target sesuai dengan realisasi tahun 2025	🟢	ok
DR.3165.09.01	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	90	90		90,4	90.40	90.40	target masih sesuai dengan target pada renstra 2025-2029	🟢	ok
DR.3165.09.02	Nilai AKIP UPT BPOM	82	80		81,8	81.80	80.10	Realisasi tahun 2025 sebesar 80,10 lebih rendah dari target tahun 2026 pada Renstra. Dari hasil exercise	🟢	catatan agar dilengkapi kertas kerja perhitungan target yang lebih rendah dari target pada renstra

KODE	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	REALISASI			REKOMENDASI UNIT PENGAMPU	TARGET RENSTRA/RKT 2026	TARGET 2026	JUSTIFIKASI	APPROVAL	REVIEW APPROVAL
		2024	2025	📌						
								prediksi Nilai AKIP tahun 2026, diperoleh nilai AKIP sebesar 79,97 (lebih rendah dari realisasi 2025). Oleh karena itu diusulkan target 2026 sama dengan realisasi 2025 yaitu sebesar 80,10		
DR.3165.09.03	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	5		5	5.00	5.00	target masih sesuai dengan target pada renstra 2025-2029	🟢	ok
DR.3165.09.04	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	0	3		2,94	2.94	2.94	target masih sesuai dengan target pada renstra 2025-2029	🟢	ok

Lampiran 18

Matriks Reviu Target Indikator Pada Perjanjian Kinerja Setelah Perbaikan



MATRIKS A2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI POM DI PANGKAL PINANG
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

KODE	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	REALISASI			REKOMENDASI UNIT PENGAMPU	TARGET RENSTRA/RKT 2026	TARGET 2026	JUSTIFIKASI	APPROVAL	REVIEW APPROVAL
		2024	2025	📌						
DR.3165.01.01	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0.00	98.73		90.25	90.25	98.75	Target disesuaikan berdasarkan ketersediaan sumberdaya dan prediksi permasalahan yang mungkin dihadapi di tahun 2026.	🟢	ok
DR.3165.01.02	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	0.00	26.67		27	27.00	27.85	Realisasi pada tahun 2025 telah mendekati target tahun 2026 pada renstra 2025-2029 sehingga perlu dilakukan penyesuaian target menjadi sedikit lebih tinggi dengan mempertimbangkan kemungkinan	🟢	ok

KODE	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	REALISASI			REKOMENDASI UNIT PENGAMPU	TARGET RENSTRA/RKT 2026	TARGET 2026	JUSTIFIKASI	APPROVAL	REVIEW APPROVAL
		2024	2025	📌						
								jumlah laporan KTD yang akan disampaikan sarana		
DR.3165.01.03	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0.00	98.75		91	91.00	98.90	Realisasi pada tahun 2025 telah melebihi target tahun 2026 dan target akhir di tahun 2029 sehingga dilakukan perhitungan ulang untuk penyesuaian target agar tidak terjadi capaian melebihi 110%. Usulan perubahan target dihitung dengan mempertimbangkan realisasi tahun 2025, keterbatasan anggaran dan SDM yang dimiliki.	🟢	ok
DR.3165.01.04	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	0.00	0.00		100	100.00	100.00	Target masih sesuai dengan target pada renstra 2025-2029 karena pada tahun 2025 tidak terdapat realisasi untuk indikator ini sehingga belum	🟢	ok

KODE	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	REALISASI			REKOMENDASI UNIT PENGAMPU	TARGET RENSTRA/RKT 2026	TARGET 2026	JUSTIFIKASI	APPROVAL	REVIEW APPROVAL
		2024	2025	2026						
								diperoleh data baseline		
DR.3165.01.05	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0.00	96.00		90	90.00	96.50	Realisasi pada tahun 2025 telah melebihi target tahun 2026 dan target akhir di tahun 2029 sehingga dilakukan perhitungan ulang untuk penyesuaian target agar tidak terjadi capaian melebihi 110%. Usulan perubahan target dihitung dengan mempertimbangkan realisasi tahun 2025, keterbatasan anggaran dan SDM yang dimiliki.	●	ok
DR.3165.01.06	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	0.00	84.49		85	85.00	85.00	Target masih sesuai dengan target pada renstra 2025-2029	●	ok
DR.3165.01.07	Persentase sarana produksi Sediaan	0.00	100.00		100	100.00	100.00	Target masih sesuai dengan target pada	●	ok

KODE	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	REALISASI			REKOMENDASI UNIT PENGAMPU	TARGET RENSTRA/RKT 2026	TARGET 2026	JUSTIFIKASI	APPROVAL	REVIEW APPROVAL
		2024	2025	2026						
	Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan							renstra 2025-2029		
DR.3165.01.08	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0.00	94.20		92	92.00	94.25	Realisasi pada tahun 2025 telah melebihi target tahun 2026 dan target tahun 2028 pada renstra 2025-2029 sehingga perlu dilakukan penyesuaian target dengan mempertimbangkan SDM yang dimiliki dan kemungkinan masalah yang akan dihadapi. Pengurangan target RO (jumlah sarana yang diperiksa) berhubungan erat terhadap faktor pembagi perhitungan IKU	●	ok
DR.3165.01.09	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0.00	96.53		95,75	95.75	96.60	Realisasi pada tahun 2025 telah melebihi target tahun 2026 dan target tahun 2027 pada renstra 2025-2029 sehingga	●	ok

KODE	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	REALISASI			REKOMENDASI UNIT PENGAMPU	TARGET RENSTRA/RKT 2026	TARGET 2026	JUSTIFIKASI	APPROVAL	REVIEW APPROVAL
		2024	2025	●						
								perlu dilakukan penyesuaian target dengan mempertimbangkan SDM yang dimiliki dan kemungkinan masalah yang akan dihadapi		
DR.3165.0110	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0.00	93.21		92	92.00	93.25	Realisasi pada tahun 2025 telah melebihi target tahun 2026 dan target tahun 2027 pada renstra 2025-2029 sehingga perlu dilakukan penyesuaian target dengan mempertimbangkan SDM yang dimiliki dan kemungkinan masalah yang akan dihadapi	●	ok
DR.3165.0111	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	0.00	93.82		89,6	89.60	93.83	Target sesuai dengan capaian kinerja tahun 2025	●	ok
DR.3165.0112	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok	0.00	85.86		81	81.00	84.04	Target sesuai dengan capaian	●	ok

KODE	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	REALISASI			REKOMENDASI UNIT PENGAMPU	TARGET RENSTRA/RKT 2026	TARGET 2026	JUSTIFIKASI	APPROVAL	REVIEW APPROVAL
		2024	2025	●						
	elektronik yang diawasi sesuai Standar							kinerja tahun 2025		
DR.3165.0113	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	0.00	104.72		100	100.00	100.00	Realisasi pada tahun 2025 telah melebihi target tahun 2026 dan target akhir di tahun 2029 pada renstra 2025-2029 sehingga perlu dilakukan penyesuaian target. Tingginya realisasi tahun 2025 disebabkan tingginya capaian salah satu dari empat komponen penilaian IKU AMR yaitu penggunaan tools pengawasan AMR yang ditargetkan hanya sebesar 80%	●	ok
DR.3165.0114	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	0.00	78.20		77	77.00	78.60	Penyesuaian target karena realisasi pada tahun 2025 telah melebihi target tahun 2026	●	ok

KODE	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	REALISASI			REKOMENDASI UNIT PENGAMPU	TARGET RENSTRA/RKT 2026	TARGET 2026	JUSTIFIKASI	APPROVAL	REVIEW APPROVAL
		2024	2025	❶						
DR.3165.01.15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	0.00	20.00		40	40.00	40.00	target masih sesuai dengan target pada renstra 2025-2029	🟢	ok
DR.3165.04.01	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	95.54	86.51		86,85	86.85	86.85	target masih sesuai dengan target pada renstra 2025-2029	🟢	ok
DR.3165.04.04	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	76.00	7.00		10	10.00	7.00	Target PK Tahun 2026 dalam Renstra ditetapkan sebanyak 10 sekolah yang harus dilakukan intervensi. Namun, dengan mempertimbangkan adanya efisiensi anggaran pada tahun 2025, target pada awal tahun 2026 disesuaikan dan diturunkan menjadi 7 sekolah. Selanjutnya, dalam pelaksanaannya terdapat pemotongan anggaran kembali sebagai bentuk penyesuaian	🟡	agar disesuaikan kertas kerjanya

KODE	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	REALISASI			REKOMENDASI UNIT PENGAMPU	TARGET RENSTRA/RKT 2026	TARGET 2026	JUSTIFIKASI	APPROVAL	REVIEW APPROVAL
		2024	2025	❶						
								terhadap hasil identifikasi Kementerian Keuangan terkait target prioritas Presiden, yaitu sebesar 40,58% dari total anggaran pada RO ini. Oleh karena itu, diusulkan penyesuaian target indikator menjadi sebanyak 4 sekolah yang akan diintervensi		
DR.3165.04.05	Jumlah desa pangan aman	31.00	3.00		6	6.00	3.00	Target PK Tahun 2026 dalam Renstra ditetapkan sebanyak 6 desa yang harus dilakukan intervensi. Namun, dengan mempertimbangkan adanya efisiensi anggaran pada tahun 2025, target pada awal tahun 2026 disesuaikan dan diturunkan menjadi 3 desa. Selanjutnya, dalam	🟢	ok

KODE	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	REALISASI			REKOMENDASI UNIT PENGAMPU	TARGET RENSTRA/RKT 2026	TARGET 2026	JUSTIFIKASI	APPROVAL	REVIEW APPROVAL
		2024	2025	📌						
								pelaksanaannya terdapat pemotongan anggaran kembali sebagai bentuk penyesuaian terhadap hasil identifikasi Kementerian Keuangan terkait target prioritas Presiden, yaitu sebesar 43,07% dari total anggaran pada RO ini. Oleh karena itu, diusulkan penyesuaian target indikator menjadi sebanyak 2 desa yang akan diintervensi.		
DR.3165.04.06	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	10.00	1.00		1	1.00	1.00	target masih sesuai dengan target pada renstra 2025-2029	🟢	ok
DR.3165.05.01	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau	0.00	16.67		31,25	31.25	31.25	Terdapat perbedaan antara target PK tahun 2026 dalam Renstra sebanyak 8 sarana dan	🟢	ok

KODE	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	REALISASI			REKOMENDASI UNIT PENGAMPU	TARGET RENSTRA/RKT 2026	TARGET 2026	JUSTIFIKASI	APPROVAL	REVIEW APPROVAL
		2024	2025	📌						
	IP CPPOB pangan olahan							target RO tahun 2026 adalah sebanyak 9 sarana. Dengan adanya pemotongan anggaran hasil identifikasi Kementerian Keuangan sebanyak 45,45 % maka dilakukan penyesuaian target menjadi 5 sarana sehingga mengurangi jumlah akumulatif sarana yang didampingi tahun 2025-2029. Oleh karena itu diusulkan penyesuaian target tahunan menjadi 27,08 %		
DR.3165.06.01	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	0.00	92.50		91	91.00	92.50	Target sesuai dengan realisasi tahun 2025	🟢	ok
DR.3165.07.01	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang	0.00	94.00		91	91.00	94.00	Target sesuai dengan realisasi tahun 2025	🟢	ok

KODE	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	REALISASI			REKOMENDASI UNIT PENGAMPU	TARGET RENSTRA/RKT 2026	TARGET 2026	JUSTIFIKASI	APPROVAL	REVIEW APPROVAL
		2024	2025	❶						
	diselesaikan sesuai standar									
DR.3165.08.01	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,93	4,84		4,75	4,75	4,85	Target sesuai dengan realisasi tahun 2025	🟢	ok
DR.3165.09.01	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	90,20	90,35		90,4	90,40	90,40	target masih sesuai dengan target pada renstra 2025-2029	🟢	ok
DR.3165.09.02	Nilai AKIP UPT BPOM	81,62	80,10		81,8	81,80	80,10	Realisasi tahun 2025 sebesar 80,10 lebih rendah dari target tahun 2026 pada Renstra. Dari hasil exercise prediksi Nilai AKIP tahun 2026, diperoleh nilai AKIP sebesar 79,97 (lebih rendah dari realisasi 2025). Oleh karena itu diusulkan target 2026 sama dengan realisasi 2025 yaitu sebesar 80,10	🟢	agar dilengkapi kertas kerja perhitungan target yang lebih rendah dari target pada renstra

KODE	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	REALISASI			REKOMENDASI UNIT PENGAMPU	TARGET RENSTRA/RKT 2026	TARGET 2026	JUSTIFIKASI	APPROVAL	REVIEW APPROVAL
		2024	2025	❶						
DR.3165.09.03	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5,00	5,00		5	5,00	5,00	target masih sesuai dengan target pada renstra 2025-2029	🟢	ok
DR.3165.09.04	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	0,00	2,94		2,94	2,94	2,94	target masih sesuai dengan target pada renstra 2025-2029	🟢	ok

Lampiran 19

Perbandingan Capaian Kinerja TW I 2026 dengan Target Jangka Menengah

No	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Target Tahun 2029	Realisasi Triwulan I 2026	% Capaian Terhadap Target Jangka Menengah	Kategori
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,5	100,00	106,95	Tercapai/Melampaui
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	30	-	-	Tercapai/Melampaui
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94	100,00	106,38	Tercapai/Melampaui
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100,00	100,00	Tercapai/Melampaui
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95	99,33	104,56	Tercapai/Melampaui
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85	44,03	51,80	Perlu Upaya Keras
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100,00	100,00	Tercapai/Melampaui
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95	100,00	105,26	Tercapai/Melampaui
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98,75	100,00	101,27	Tercapai/Melampaui
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95	98,33	103,51	Tercapai/Melampaui
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	93,6	93,34	99,72	Akan Tercapai
12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	84	100,00	119,05	Tercapai/Melampaui
13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	-	-	Tercapai/Melampaui
14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	84,3	78,20	92,76	Akan Tercapai

No	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Target Tahun 2029	Realisasi Triwulan I 2026	% Capaian Terhadap Target Jangka Menengah	Kategori
15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	100	-	-	Tercapai/Melampaui
16	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	89,43	88,79	99,28	Akan Tercapai
17	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	12	10,00	83,33	Akan Tercapai
18	Jumlah desa pangan aman	7	10,00	142,86	Tercapai/Melampaui
19	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	10,00	1000,00	Tercapai/Melampaui
20	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	97,92	12,49	12,76	Perlu Upaya Keras
21	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	94	33,33	35,46	Perlu Upaya Keras
22	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	94	50,00	53,19	Perlu Upaya Keras
23	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,9	-	-	Tercapai/Melampaui
24	Nilai Pembangunan ZI UPT	90,7	-	-	Tercapai/Melampaui
25	Nilai AKIP UPT	82,1	-	-	Tercapai/Melampaui
26	Nilai Kinerja Anggaran UPT	5	-	-	Tercapai/Melampaui
27	Indeks Manajemen Risiko UPT	3,06	-	-	Tercapai/Melampaui

Lampiran 20

Nota Dinas Sekretaris Utama tentang Penyampaian Data Pergeseran Anggaran Ke Dalam RO Khusus Berdasarkan Hasil Identifikasi Keuangan Dalam Rangka Penguatan Dukungan Pelaksanaan Prioritas Direktif Presiden

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
SEKRETARIAT UTAMA

NOTA DINAS
NOMOR: PR.04.02.2.12.25.771

Yth. : 1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan BPOM
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan BPOM
3. Para Kepala UPT BPOM di Seluruh Indonesia

Dari : Sekretaris Utama

Lampiran : 4 Lembar

Hal : Penyampaian Data Pergeseran Anggaran Ke Dalam RO Khusus Berdasarkan Hasil Identifikasi Keuangan Dalam Rangka Penguatan Dukungan Pelaksanaan Prioritas Direktif Presiden

Tanggal : 22 Desember 2025

Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Utama Nomor PR.04.02.2.12.25.757 tanggal 12 Desember 2025 perihal Penyampaian Data Pergeseran Anggaran Ke Dalam RO Khusus Dalam Rangka Penguatan Dukungan Pelaksanaan Prioritas Direktif Presiden dan Sehubungan dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-415/MK/AG/2025, tanggal 19 Desember 2025 tentang Tanggapan atas Permohonan Perubahan Jenis Belanja, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk pemenuhan prioritas Direktif Presiden TA 2026, **BPOM diminta agar tetap mengacu pada hasil identifikasi yang telah dilakukan oleh Kementerian Keuangan** pada seluruh Satuan Kerja (Satker) di lingkungan BPOM sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-817/MK.03/2025 tanggal 8 Desember 2025.
2. Hasil identifikasi dimaksud berasal dari anggaran belanja yang dialokasikan untuk kegiatan yang **bersifat rutin dan administratif**, seperti rapat, perjalanan dinas, dan belanja keperluan kantor, baik sumber dana Rupiah Murni (RM) maupun sumber PNBPN.
3. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka hasil identifikasi yang telah dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan atas alokasi anggaran TA 2026 pada seluruh Satker di lingkungan BPOM **diminta untuk disesuaikan kembali dalam rangka pemenuhan Prioritas Direktif Presiden TA 2026**.
4. Rincian besaran anggaran yang dapat digeser harus **merujuk pada besaran dan rincian hasil identifikasi untuk tiap Satker sesuai hasil yang telah dilakukan oleh Kementerian Keuangan** yang dapat dilihat melalui <https://sites.google.com/view/penganggaranbadanpom/> menu "Input Informasi", Sub menu "Lampiran Hasil Identifikasi yang Dilakukan Kementerian Keuangan pada Seluruh Satuan Kerja (Satker) di Lingkungan BPOM sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-817/MK.03/2025 tanggal 8 Desember 2025". Rincian tersebut menjadi dasar seluruh Satker untuk melakukan penyesuaian pengalokasian dan pemanfaatan anggaran pada RO Khusus serta pemblokiran anggaran dalam rangka pemenuhan Prioritas Direktif Presiden TA 2026.

5. Seluruh Satker agar menyampaikan usul revisi anggaran sesuai hasil identifikasi, dengan ketentuan:
 - a. hasil identifikasi yang bersumber dari RM dilakukan pergeseran ke RO Khusus melalui proses **pergeseran pengurangan anggaran** oleh masing-masing Satker pada Aplikasi SAKTI.
 - b. hasil identifikasi yang bersumber dari PNBP diberikan **catatan pada halaman IV.A DIPA (blokir) dengan menggunakan Kode A** - Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya oleh masing-masing Satker pada Aplikasi SAKTI.
 - c. untuk **proses penginputan ke dalam RO khusus** akan dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan pada Aplikasi SAKTI.
6. Melakukan pencadangan anggaran sebagai antisipasi adanya kebutuhan prioritas mendesak sehingga memerlukan dukungan alokasi anggaran yang dapat dimanfaatkan secara cepat namun tetap terjaga tata kelolanya, melalui **Penundaan Pembangunan Lanjutan dan Renovasi Gedung Laboratorium pada 8 (delapan) Satker** yaitu: Loka POM di Aceh Tengah, Loka POM di Kabupaten Sorong, BPOM di Tasikmalaya, BPOM di Kota Indragiri Hulu, Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu, Loka POM di Kabupaten Buleleng, BPOM di Banyumas, dan BBPOM Makassar.
7. Seluruh Satker diminta untuk **melengkapi data dukung** berupa:
 - a. Surat penyampaian revisi pergeseran anggaran kedalam RO Khusus TA 2026;
 - b. Matriks semula menjadi form 1 dan 2 aplikasi SAKTI yang ditandatangani KPA;
 - c. RKA Satker aplikasi SAKTI yang ditandatangani KPA.

Seluruh data dukung agar dapat disampaikan selambat-lambatnya hari **Selasa, 23 Desember 2025** melalui <https://sites.google.com/view/penganggaranbadanpom/> pada menu Usulan Revisi Anggaran.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan. Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.



JAYADI

NO	SATUAN KERJA	ALOKASI ANGGARAN (DILUAR BELANJA PEGAWAI)	HASIL IDENTIFIKASI RO KHUSUS SUMBER DANA RM SESUAI SURAT S-817/MK.03/2025 TANGGAL 8 DESEMBER 2025	HASIL IDENTIFIKASI BLOKIR SUMBER DANA PNPB SESUAI SURAT S-817/MK.03/2025 TANGGAL 8 DESEMBER 2025	ALOKASI ANGGARAN EFEKTIF HASIL IDENTIFIKASI TERMASUK BLOKIR PNPB (DILUAR BELANJA PEGAWAI)
14	BALAI BESAR POM PALEMBANG	13.775.447.000	2.630.274.000	77.554.000	11.145.173.000
15	BALAI BESAR POM PEKAN BARU	19.505.224.000	3.318.800.000	244.379.000	16.186.424.000
16	BALAI BESAR POM PONTIANAK	13.047.588.000	2.119.815.000	155.947.000	10.927.773.000
17	BALAI BESAR POM SAMARINDA	13.537.675.000	2.076.942.000	51.752.000	11.460.733.000
18	BALAI BESAR POM SEMARANG	20.870.223.000	4.173.198.000	502.670.000	16.697.025.000
19	BALAI BESAR POM SURABAYA	28.458.610.000	6.211.311.000	168.360.000	22.247.299.000
20	BALAI BESAR POM YOGYAKARTA	14.530.166.000	1.836.943.000	545.687.000	12.693.223.000
21	BALAI BESAR POM DI BANJARBARU	15.003.982.000	2.132.223.000	341.005.000	12.871.759.000
22	BALAI BESAR POM DI GORONTALO	9.726.642.000	1.676.845.000	64.921.000	8.049.797.000
23	BALAI BESAR POM DI KUPANG	14.056.546.000	2.916.530.000	616.304.000	11.140.016.000
24	BALAI POM AMBON	11.405.833.000	1.737.167.000	60.800.000	9.668.666.000
25	BALAI POM BENGKULU	12.901.434.000	2.128.306.000	104.415.000	10.773.128.000
26	BALAI POM DI BATAM	14.078.208.000	2.219.022.000	173.069.000	11.859.186.000
27	BALAI POM DI MANOKWARI	14.880.346.000	2.874.201.000	230.500.000	12.006.145.000
28	BALAI POM DI PANGKAL PINANG	9.821.106.000	2.230.083.000	88.350.000	7.591.023.000
29	BALAI POM DI TARAKAN	8.392.579.000	1.724.960.000	-	6.667.619.000
30	BALAI POM JAMBI	9.976.170.000	1.689.018.000	99.537.000	8.287.152.000
31	BALAI POM KENDARI	10.529.229.000	2.095.479.000	53.330.000	8.433.750.000
32	BALAI POM MAMUJU	8.053.771.000	1.460.464.000	-	6.593.307.000
33	BALAI POM PALU	12.313.172.000	1.888.055.000	85.105.000	10.425.117.000
34	BALAI POM SOFIFI	7.939.026.000	1.587.086.000	-	6.351.940.000
35	BALAI POM DI BALIKPAPAN	2.423.003.000	571.321.000	-	1.851.682.000
36	BALAI POM DI BANYUMAS	6.474.990.000	597.450.000	-	5.877.540.000
37	BALAI POM DI BAU-BAU	2.778.103.000	678.963.000	-	2.099.140.000
38	BALAI POM DI BIMA	2.515.580.000	685.770.000	-	1.829.810.000
39	BALAI POM DI BOGOR	7.147.339.000	1.704.769.000	-	5.442.570.000
40	BALAI POM DI DUMAI	3.151.213.000	887.667.000	-	2.263.546.000
41	BALAI POM DI ENDE	5.253.317.000	1.339.254.000	-	3.914.063.000
42	BALAI POM DI INDRAGIRI HULU	21.170.223.000	673.887.000	-	20.496.336.000
43	BALAI POM DI JEMBER	4.925.270.000	1.022.094.000	-	3.903.176.000
44	BALAI POM DI KEDIRI	5.045.469.000	1.196.556.000	-	3.848.913.000
45	BALAI POM DI PALOPO	5.433.157.000	1.104.029.000	-	4.329.128.000
46	BALAI POM DI PAYAKUMBUH	23.959.444.000	1.048.344.000	-	22.911.100.000
47	BALAI POM DI SANGGAU	2.653.763.000	687.931.000	-	1.965.832.000
48	BALAI POM DI SURAKARTA	6.912.507.000	1.450.762.000	-	5.461.745.000
49	BALAI POM DI TABALONG	2.404.714.000	602.485.000	-	1.802.229.000
50	BALAI POM DI TANGERANG	6.445.458.000	1.653.756.000	-	4.791.702.000
51	BALAI POM DI TANJUNGBALAI	2.044.622.000	506.820.000	-	1.537.802.000
52	BALAI POM DI TASIKMALAYA	22.515.863.000	1.457.498.000	-	21.058.365.000
53	BALAI POM DI TULANG BAWANG	2.296.484.000	543.256.000	-	1.753.228.000
54	LOKA POM DI ACEH T SELATAN	2.550.076.000	577.320.000	-	1.972.756.000
55	LOKA POM DI ACEH TENGAH	5.916.035.000	480.995.000	-	5.435.040.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



X bpompangkalpng

 bpom.pangkalpinang

 Jl. Pulau Bangka, Air Itam, Pangkalpinang

 bpom.pangkalpinang@pom.go.id

 (0717) 439278, 434705